SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Seri Buku Advokasi Daerah

BUKU PANDUAN BAGI TKPK

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

TNP2K
TIM NASIONAL
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PASAMAN BARAT

SUMATERA BARAT

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Analisis Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat

Cetakan Pertama, Februari 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
©2019 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Foto Sampul: Sekretariat TNP2K
Anda dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.
Untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai Buku Panduan ini, silahkan hubungi TNP2K melalui Unit Advokasi Daerah (advokasi@tnp2k.go.id)
Buku Panduan ini juga tersedia di Website TNP2K (www.tnp2k.go.id)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511
Email: info@tnp2k.go.id
Website: www.tnp2k.go.id

Pengantar

Perbaikan kualitas belanja publik adalah salah satu kunci efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Kualitas ini utamanya ditunjukkan oleh relevansi program dan ketepatan pengalokasian anggaran serta pelaksanaannya.

Di daerah, upaya ini dapat ditempuh dengan mengoptimalkan fungsi perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan untuk memastikan bahwa program-program yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan di daerah. Proses perencanaan juga harus memastikan keselarasan antar-program lintas sektoral dalam mencapai target.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah berpotensi memainkan peran kunci dalam memanfaatkan data dan melakukan analisis perencanaan prioritas, penetapan sasaran, serta perumusan program kebijakan dan penganggarannya. Selain itu TKPK juga potensial untuk terlibat aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Buku ini disusun sebagai panduan bagi TKPK untuk melaksanakan peran kunci tersebut. Secara garis besar panduan ini berisi model analisis situasi kemiskinan dan evaluasi anggaran, serta kerangka model optimalisasi peran TKPK dalam perencanaan dan pengangggaran program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan diharapkan panduan ini dapat dikembangkan untuk memantapkan basis analisis dan evaluasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di daerah.

Secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Unit Advokasi Daerah Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K yang telah bekerja bersama TKPK di daerah proyek percontohan untuk menyusun buku panduan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Maret 2019
Bambang Widianto

Deputi Seswapres Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia
dan Pemerataan Pembangunan / Sekretaris Eksekutif TNP2K

Penghargaan

Buku ini merupakan hasil kerjasama TNP2K dengan TKPK dari daerah proyek replikasi Model Advokasi Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus disampaikan kepada: Bupati Pasaman Barat, Drs. H. Syahiran, MM.; Wakil Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, SH., MM. selaku Ketua TKPK Kabupaten Pasaman Barat.; dan Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Yudesri, S.IP.,M.Si.

Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, Drs. Joni Hendri, M.Si.; Kepala Bagian Dinas Pendidikan, Drs. Marimus, M.Pd.; Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hj. Anna Rahmadia; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan; Kepala Dinas Soial, Drs. Marwazi B, MM.; Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Peternakan, Sukarli, S.Pt., M.Si.; Yas'ari, S.P.; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, H. Tegus Suprianto, S.E., M.M.;

Seluruh Tim Teknis TKPK Kabupaten Pasaman Barat yang telah membantu menyusun buku ini: Sasmita Siregar, SS., M.Eng. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); Elfia Putra, ST. (BPKD Kabupaten Pasaman Barat); Putri Rismawanti, SE. (Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat); Astra, S.IP, ME. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); RD Komala Nitri, S.Pd. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); Junita, S.STP. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); Lili Syariyenti, SKM. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); Riza Amelia, SKM. (Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat); Yesti Nora (RSUD Kabupaten Pasaman Barat); Eksa Ramayanti (DPMN Kabupaten Pasaman Barat); Susry Amalya, SE. (DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat); Yefirson, ST., M.Si. (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat); Mulyadi (DPMN Kabupaten Pasaman Barat); Mudirman (DPUPR Kabupaten Pasaman Barat); Ade Mukhtar (DPKP Kabupaten Pasaman Barat); Yunilasari Dendi, ST. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); Atika Sandra J, ST. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); Afrizal, SP. (Disketapan Kabupaten Pasaman Barat); Fitria Santi, SP. (DTPHP Kabupaten Pasaman Barat); Ainul Qolbi (Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat); Winardi (Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat); Harnes Asril (DKUKM Perikanan Kabupaten Pasaman Barat); Delniriawati, SE. (Bappeda Perikanan Kabupaten Pasaman Barat); Agustia Mora, S.Sos (Disnaker Kabupaten Pasaman Barat); Fitriyadi (DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat); Rafki Junaidi, SKM. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); Ombun Rahmi, SS., M.Si. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); Gusnita, AMd.Keb. (Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat); Amanah Citra B, AMd. Par. (Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat); Nurlaili, ST. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat); Merly Wahyuni, SE. (Bappeda Kabupaten Pasaman Barat).

Tim Pendamping dari TNP2K: Muhammad Arif Tasrif, Sukmawah Yuningsih, Toton Dartono, Edi Safrijal, Nur Arifina Vivinia, Eneng Siti Saidah dan Kartina Prihastati.

Daftar Isi

DAFTAR TABEL i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR SINGKATAN v

BAB I PROFIL KEMISKINAN DAN KONDISI FISKAL KABUPATEN PASAMAN BARAT 01
A PROFIL KEMISKINAN MAKRO 02
B PROFIL KEMISKINAN MIKRO 04
C DAYA DUKUNG FISKAL 07
D BELANJA SEKTORAL 10

BAB II ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN AKSES SANITASI DAN AIR BERSIH DI PASAMAN BARAT 15
A. ISU STRATEGIS SEKTOR INFRASTRUKTUR DASAR 16
B. PRIORITAS INTERVENSI 20
C. PRIORITAS WILAYAH 23
D. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN 27
E. EVALUASI LOKUS PROGRAM DAN BELANJA APBD 31
F. EVALUASI PENERIMA MANFAAT PROGRAM 33
G. REKOMENDASI 33

BAB III ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN PENDIDIKAN DI PASAMAN BARAT 35
A. ISU STRATEGIS SEKTOR PENDIDIKAN 36
B. PRIORITAS INTERVENSI 40
C. PRIORITAS WILAYAH 49
D. EVALUASI FOKUS PRORAM DAN KEGIATAN 53
E. REKOMENDASI 57

BAB IV ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI PASAMAN BARAT 65
A. ISU STRATEGIS SEKTOR PERTANIAN 66
B. PRIORITAS INTERVENSI 69
C. PRIORITAS WILAYAH 75
D. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN 79
E. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT PRIORITAS INTERVENSI 82
F. REKOMENDASI 84

BAB V **ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENURUNAN KASUS KEMATIAN IBU, ANAK DAN PREVALENSI *STUNTING*** 85

A. ISU STRATEGIS SEKTOR KESEHATAN 86

B. PRIORITAS INTERVENSI 88

C. PRIORITAS WILAYAH 94

D. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN 99

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 102

BAB VI **ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN KESEMPATAN TENAGA KERJA** 105

A. ISU STRATEGIS SEKTOR TENAGA KERJA 106

B. PRIORITAS INTERVENSI 108

C. PRIORITAS WILAYAH 113

D. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN 116

E. REKOMENDASI 121

BAB VII **ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN KETEPATAN SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI PASAMAN BARAT** 125

A. ISU STRATEGIS 120

B. PRIORITAS INTERVENSI 133

C. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN 133

D. REKOMENDASI 136

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Perbandingan Indikator Utama Infrastruktur Dasar Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2017	19
Tabel 2.2.	Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Sanitasi dan Air Minum di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2014 - 2017	27
Tabel 2.3.	Lokasi Kegiatan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2018	31
Tabel 2.4.	Lokasi Kegiatan untuk Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2018	32
Tabel 2.5.	Lokasi Kegiatan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2018	32
Tabel 2.6.	Analisis Penerima Manfaat Belanja Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017	33
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017`	39
Tabel 3.2.	Program yang Berkaitan Langsung Terhadap Tujuan Akhir Peningkatan Akses Pendidikan	53
Tabel 4.1.	Produksi Padi, Produksi Beras, Jumlah Ketersediaan Beras dan Kebutuhan Beras per Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2016	78
Tabel 5.1.	Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan *Stunting*	93
Tabel 5.2.	Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan *Stunting*	94
Tabel 5.3.	Indikator Capaian Intervensi Gizi Spesifik pada Ibu Hamil	98
Tabel 5.4.	Indikator Capaian Intervensi Gizi Spesifik pada Balita	98
Tabel 5.5.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Kegiatan untuk Penurunan AKI dan AKB di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat (Juta Rupiah)	100
Tabel 5.6.	Proporsi Belanja Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB (DP2KB) untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Pasaman Barat	101
Tabel 5.7.	Proporsi Belanja Kegiatan Dinas Kesehatan untuk Menurunkan Prevalensi *Stunting* pada Balita di Kabupaten Pasaman Barat	102
Tabel 6.1.	Program yang Berkaitan dengan Penanganan Setengah Pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat	117
Tabel 7.1.	Sebaran Rumah Tangga Desil 1-4 Terhadap Akses Listrik	130
Tabel 7.2.	Distribusi Sasaran Bantuan Jamban	131

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Posisi Relatif dan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat	02
Gambar 1.2	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Gini Rasio Kabupaten Pasaman Barat	03
Gambar 1.3	Garis Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat	03
Gambar 1.4	Profil Kemiskinan Mikro Kabupaten Pasaman Barat	04
Gambar 1.5	Kepala Rumah Tangga Perempuan Kabupaten Pasaman Barat	05
Gambar 1.6	Kondisi Penduduk Miskin dan Rentan yang Berkebutuhan Khusus dan Memiliki Penyakit Kronis	06
Gambar 1.7	Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan Menurut Lapangan Usaha	06
Gambar 1.8	Kondisi Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Pasaman Barat	07
Gambar 1.9	Kondisi Ruang Fiskal Kabupaten Pasaman Barat	08
Gambar 1.10	Kondisi Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017	08
Gambar 1.11	Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Pasaman Barat,Tahun 2017	09
Gambar 1.12	Perkembangan Alokasi Belanja Modal Kabupaten Pasaman Barat	09
Gambar 1.13	Komposisi Alokasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi	10
Gambar 1.14	Alokasi Belanja Kesejahteraan dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017	11
Gambar 1.15	Analisis Keterkaitan Alokasi Belanja Pendidikan dan Indikator Pendidikan	11
Gambar 1.16	Analisis Keterkaitan Alokasi Belanja Kesehatan dan Indikator Kesehatan	12
Gambar 1.17	Analisis Keterkaitan Alokasi Belanja Infrastruktur dan Indikator Infrastruktur Dasar	13
Gambar 2.1	Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Bersih (%) Provinsi Sumatera Barat 2017	16
Gambar 2.2	Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Bersih (%) Berdasarkan Kuantil Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017	17
Gambar 2.3	Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Sumatera Barat 2017	17
Gambar 2.4	Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas BAB (%) Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017	18
Gambar 2.5	Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Listrik (%) Provinsi Sumatera Barat 2017	18
Gambar 2.6	Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Listrik (%) Kabupaten Pasaman Barat	19
Gambar 2.7	*Theory of change* Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Pasaman Barat	20
Gambar 2.8	Analisis Keterkaitan Akses Air Minum Bersih	21
Gambar 2.9	Analisis Keterkaitan Akses Sanitasi	22
Gambar 2.10	Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Persentase Rumah Tangga Sumber Air Minum Bersih (%) dengan Persentase Rumah Tangga Pengguna PDAM Kab. Pasaman Barat, Tahun 2017	24

Gambar 2.11	Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Persentase Rumah Tangga Sumber Air Minum Bersih (%) dengan Persentase Rumah Tangga Pemanfaat PAMSIMAS Kab. Pasaman Barat, Tahun 2017	24
Gambar 2.12	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan dengan Sumber Air Minum Tidak Terlindung (%)	25
Gambar 2.13	Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rentan dengan Sumber Air Minum Tidak Terlindung (%)	25
Gambar 2.14	Pengelompokan Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memiliki Jamban Sendiri dan Tangki Septik/SPAL (%)	26
Gambar 2.15	Komposisi Alokasi Belanja Program Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2017	28
Gambar 2.16	Analisis Relevansi Program dan Indikator Sumber Air Minum Bersih dan Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat	29
Gambar 2.17	Alokasi Belanja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat	29
Gambar 2.18	Alokasi Belanja Kegiatan pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Pasaman Barat	30
Gambar 2.19	Komposisi Belanja Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Pasaman Barat per Klasifikasi Ekonomi, Tahun 2017	30
Gambar 3.1	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	36
Gambar 3.2	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat	36
Gambar 3.3	Komposisi APK dan APM Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Gambar 3.4	Perkembangan Rata-Rata Nilai UN SD/MI Pasaman Barat	37
Gambar 3.5	Perkembangan Rata-Rata Nilai UN SMP/MTS Pasaman Barat	38
Gambar 3.6	Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI Pasaman Barat	38
Gambar 3.7	Perkembangan Angka Kelulusan SMP/MTS Pasaman Barat	39
Gambar 3.8	*Theory of change* bidang pendidikan Pasaman Barat	40
Gambar 3.9	Analisis Keterkaitan Angka Putus Sekolah SD/MI dengan Indikator Pendukung	41
Gambar 3.10	Analisis Keterkaitan Angka Putus Sekolah SMP/MTs dengan Indikator Pendukung	43
Gambar 3.11	Analisis Keterkaitan Angka Kelulusan SD/MI dengan Indikator Pendukung	44
Gambar 3.12	Analisis Keterkaitan Angka Kelulusan SMP/MTs dengan Indikator Pendukung	46
Gambar 3.13	Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar	49
Gambar 3.14	Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Angka Putus Sekolah SMP	50
Gambar 3.15	Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Angka Kelulusan Sekolah Dasar	51
Gambar 3.16	Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Angka Kelulusan SMP	52
Gambar 3.17	Komposisi Belanja Program Urusan Pendidikan	53

Gambar 3.18	Analisis Relevansi Belanja Program Wajib Belajar 9 Tahun dan Angka Putus Sekolah	54
Gambar 3.19	Rincian Belanja Kegiatan pada Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, 2014 – 2017	55
Gambar 3.20	Rincian Belanja Kegiatan pada Program BOS, Tahun 2017	55
Gambar 3.21	Analisis Relevansi Belanja Peningkatan Mutu Pendidik dan Indikator Kelulusan Sekolah	56
Gambar 4.1	Kondisi Ketersediaan dan Kebutuhan Penduduk terhadap Pangan Utama	66
Gambar 4.2	Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Tahun 2017	67
Gambar 4.3	Sebaran Luas Baku Lahan Sawah (Hektar) Kabupaten Pasaman Barat	67
Gambar 4.4	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	68
Gambar 4.5	Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)	68
Gambar 4.6	*Theory of change* Meningkatnya Ketahanan Pangan Pasaman Barat	69
Gambar 4.7	Analisis Keterkaitan Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	70
Gambar 4.8	Jumlah Kebutuhan, Ketersediaan dan Kemampuan Konversi Padi ke Beras	71
Gambar 4.9	Analisis Keterkaitan Produksi Padi	72
Gambar 4.10	Analisis Keterkaitan Pola Konsumsi	75
Gambar 4.11	Analisis Keterkaitan Konsumsi Protein	75
Gambar 4.12	Pengelompokan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Produksi Padi (Ton) dan Lahan Sawah Beririgasi (Ha) di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017	76
Gambar 4.13	Pengelompokan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Produksi Padi (Ton) dan Jumlah Traktor Roda Dua (Unit) di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2016	76
Gambar 4.14	Pengelompokan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Produksi Padi (Ton) dan Realokasi Pupuk Bersubsidi (Ton) di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2016	77
Gambar 4.15	Pengelompokan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Produksi Padi (Ton) dan Jumlah Bantuan Benih Unggul (Ton) di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2016	77
Gambar 4.16	Komposisi Realisasi Belanja untuk Ketahanan Pangan Menurut Program	78
Gambar 4.17	Komposisi Realiasi Belanja (Rp Miliar dan Persen) Kegiatan untuk Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Kabupaten Pasaman Barat	80
Gambar 4.18	Komposisi Realiasi Belanja Kegiatan untuk Program Ketahanan Pangan, Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017	80
Gambar 4.19	Komposisi Realiasi Belanja Kegiatan untuk Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Pasaman Barat	81
Gambar 4.20	Nilai Realiasi Belanja (Rp Juta) Kegiatan untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Pasaman Barat	82
Gambar 5.1	Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu	86
Gambar 5.2	Posisi Relatif dan Relevansi Angka Kematian Bayi	87
Gambar 5.3.	Posisi Relatif dan Relevansi Angka Prevalensi Balita *Stunting*	87
Gambar 5.4.	*Theory of change* Bidang Kesehatan untuk Menurunkan AKI dan AKB Kabupaten Pasaman Barat	88
Gambar 5.5.	Analisis Keterkaitan Angka Kematian Ibu (AKI)	90
Gambar 5.6.	Analisis Keterkaitan Angka Kematian Bayi (AKB)	92
Gambar 5.7.	Prioritas Wilayah untuk Intervensi Penurunan Angka Kematian Ibu	95

Gambar 5.8.	Prioritas Wilayah untuk Intervensi Penurunan Angka Kematian Bayi	97
Gambar 5.9.	Realisasi Belanja Program Urusan Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017 (dalam Miliar Rupiah dan Persen)	99
Gambar 6.1	Analisis Situasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasaman Barat	106
Gambar 6.2	Analisis Situasi Masalah Tingkat Setengah Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasaman Barat	107
Gambar 6.3	*Theory of change* Ketenagakerjaan Pasaman Barat	108
Gambar 6.4	Analisis Keterkaitan Setengah Pengangguran dengan Indikator Pendukung	109
Gambar 6.5	Analisis Keterkaitan Nilai Investasi dengan Indikator Pendukung	110
Gambar 6.6	Analisis Keterkaitan Nilai Produksi Industri dengan Indikator Pendukung	112
Gambar 6.7	Pengelompokkan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga yang Bekerja Pada Sektor Utama Masyarakat Miskin Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Pekerja Bebas di Perkebunan Kab. Pasaman Barat	114
Gambar 6.8	Pengelompokkan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Bekerja dengan yang Memiliki Usaha Sendiri Bidang di Sektor Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan, Kabupaten Pasaman Barat	115
Gambar 6.9	Pengelompokkan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memiliki Usaha Sendiri di Industri Pengolahan dan Banyaknnya Usaha Industri di Kabupaten Pasaman Barat	116
Gambar 6.10	Komposisi Belanja Urusan Ketenagakerjaan Menurut Program Kabupaten Pasaman Barat	118
Gambar 6.11	Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Peningkatan Kesempatan Kerja) Urusan Ketenagakerjaan – Kab. Pasaman Barat Tahun 2014 - 2017	119
Gambar 6.12	Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi) Urusan Ketenagakerjaan – Kab. Pasaman Barat Tahun 2014 – 2017	119
Gambar 6.13	Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi) Urusan Ketenagakerjaan – Kab. Pasaman Barat Tahun 2014 – 2017	120
Gambar 6.14	Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan) Urusan Ketenagakerjaan – Kab. Pasaman Barat Tahun 2014 – 2017	120
Gambar 6.15	Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan)	122
Gambar 6.16	Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri)	122
Gambar 6.17	Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah)	123
Gambar 6.18	Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah)	123
Gambar 6.19	Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Pengembangan Industri Kreatif) Kab. Pasaman Barat – Tahun 2017	124
Gambar 7.1	Jumlah Individu Desil 1-4 Kab. Pasaman Barat per Kecamatan	128

Gambar 7.2	Posisi Relatif Sisa Lebih/Kurang PBI Kab. Pasaman Barat 2017	128
Gambar 7.3	Posisi Relatif Sisa Lebih/Kurang Penerima Rastra 2016	130
Gambar 7.4	Posisi Relatif Sisa Lebih/Kurang Subsidi Listrik	131
Gambar 7.5	Posisi Relatif Rumah Tangga Sasaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pasaman Barat	132
Gambar 7.6	*Theory of change* Bidang Sosial Kabupaten Pasaman Barat	133
Gambar 7.7	Komposisi Belanja Menurut Program - Urusan Perlindungan Sosial Kab. Pasaman Barat, Tahun 2014 - 2017	134

Daftar Singkatan

AIDS	Acquired Immuno Deficiency Syndrome
AKABA	Angka Kematian Balita
AKI	Angka Kematian Ibu
AKB	Angka Kematian Bayi
AKG	Angka Kecukupan Gizi
Alsintan	Alat Mesin Pertanian
AM	Angka Melanjutkan
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBD-P	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APM	Angka Partisipasi Murni
APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Angka Partisipasi Sekolah
APtS	Angka Putus Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
Baduta	(Anak) Bawah Dua Tahun
Balita	(Anak) Bawah Lima Tahun
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBLR	Bayi Berat Lahir Rendah
BDT	Basis Data Terpadu
BGM	Bawah Garis Merah
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BPS	Badan Pusat Statistik
CPCL	Calon Lokasi Calon Penerima
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DOF	Derajat Otonomi Fiskal
DPI	Dampak Perubahan Iklim
GK	Garis Kemiskinan
GAKY	Gangguan Akibat kurang Yodium
Ha	Hektar
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HPK	Hari Pertama Kehidupan
IP	Indeks Pertanaman
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JUT	Jalan Usaha Tani (JUT)
KEK	Kekurangan Energi Kronis
KEP	Kurang Energi Protein
Kg	Kilogram
KIA	Kesehatan Ibu dan Anak
KM	Kilometer

KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KTP	Kartu Tanda Penduduk
K/L	Kementerian Lembaga
NPK	Nitrogen Phosphat Kalium
NTP	Nilai Tukar Petani
NTNP	Nilai Tukar Petani Perikanan
NTPH	Nilai Tukar Petani Hortikultura
NTPP	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan
NTPR	Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat
NTPT	Nilai Tukar Petani Peternakan
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	Pemerintah Daerah
Perpres	Peraturan Presiden
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKH	Program Keluarga Harapan
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
Polindes	Pondok Bersalin Desa
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPH	Pola Pangan Harapan
PUAP	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
Puskemas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
Rakor	Rapat Koordinasi
Raskin	Beras Miskin
Rastra	Beras Sejahtera
Resti	Risiko Tinggi
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RMU	*Rice Milling Unit*
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTM	Rumah Tangga Miskin
RTS	Rumah Tangga Sasaran
RTSM	Rumah Tangga Sangat Miskin
Saprodi	Sarana Produksi
SDM	Sumber Daya Manusia
SD/MI	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMA/MA	Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
SMP/MTs	Sekolah Menengah Pertama/mandrasah Tsanawiyah
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SPM	Standar Pelayanan Minimum
SPKD	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TB	Tuberkulosis
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TOC	*Theory of change*
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UKBM	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
UKM	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UMR	Upah Minumum Regional
UU	Undang-Undang
WBC	Wereng Batang Coklat

BAB 1

PROFIL KEMISKINAN DAN KONDISI FISKAL KABUPATEN PASAMAN BARAT

A. PROFIL KEMISKINAN MAKRO

Pasaman Barat adalah salah satu daerah dengan persentase maupun jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 7,26% dengan jumlah penduduk miskin 30.840 jiwa. Angka ini menempati urutan ke-8 terbesar dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dilihat dari sisi perkembangannya dari tahun 2010 hingga 2017, pada tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup tinggi, sebesar 0,85% atau menjadi 7,93% dari 7,08%. Selama kurun waktu tersebut, persentase penduduk miskin menurun sebesar 2,33%. Penurunan persentase penduduk miskin sudah sesuai dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun penurunannya cenderung melambat. Sehingga perlu usaha yang lebih untuk percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat agar laju penurunan angka kemiskinan akan lebih cepat. (Gambar 1.1)

Gambar 1.1 Posisi Relatif dan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat

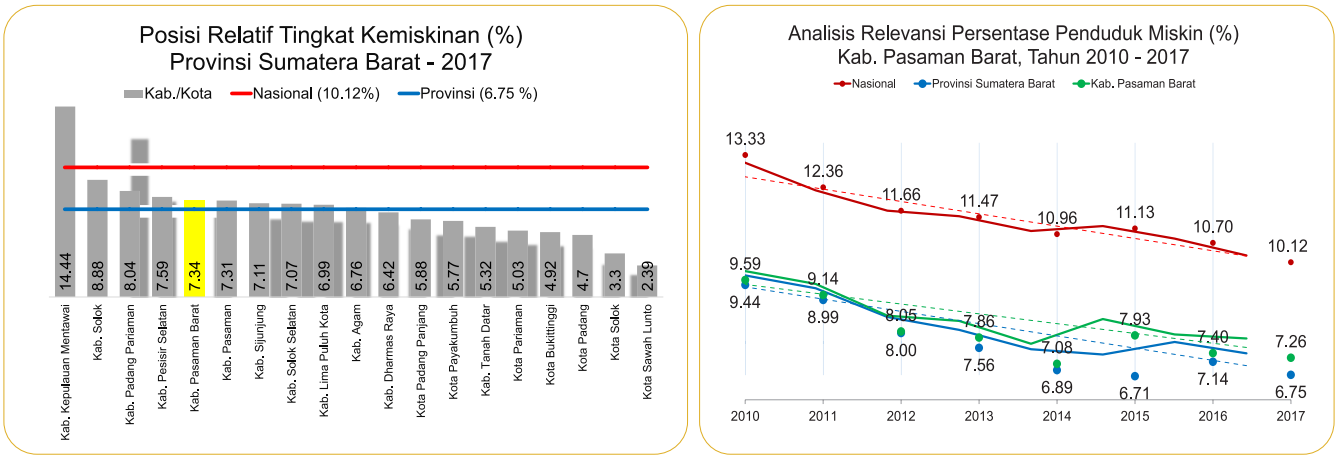

Sumber: BPS

Dalam tiga tahun terakhir ketimpangan antar penduduk miskin dan upaya keluar dari garis kemiskinan semakin sulit. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman menunjukkan seberapa sulit mengangkat atau mengeluarkan orang miskin dari Garis Kemiskinan (GK), sedangkan Indeks Keparahan akan menilai sejauh mana gap atau perbedaan konsumsi antar penduduk miskin. Pada tahun 2017, Indeks Kedalaman sebesar 1,17 dan terus mengalami kenaikan sejak tahun 2014. Begitu juga ketimpangan antar penduduk miskin sendiri mengalami kenaikan. Pencapaian terbaik terdapat pada tahun 2014 dimana P1 saat itu sebesar 0,63 dan P2 sebesar 0,13. Sedangkan pencapaian terburuk terjadi di tahun 2015, dimana P1 sebesar 1,33 dan P2 sebesar 0,32. Selain itu, ketimpangan pendapatan antar penduduk Pasaman Barat juga mengalami kenaikan dilihat dari perkembangan Gini Rasio yang terus meningkat sejak tahun 2014. (Gambar 1.2)

Gambar 1.2. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Gini Rasio Kabupaten Pasaman Barat

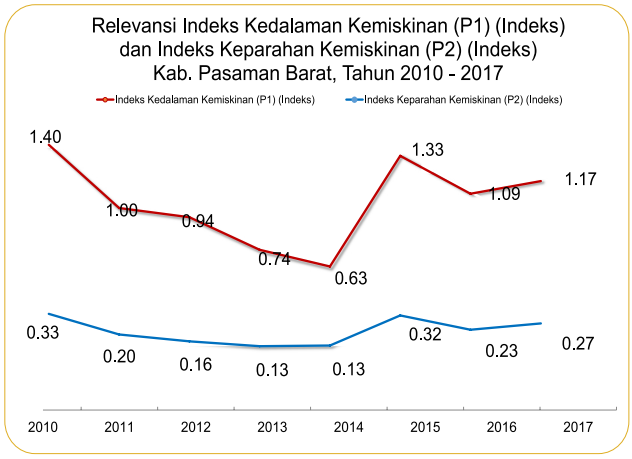

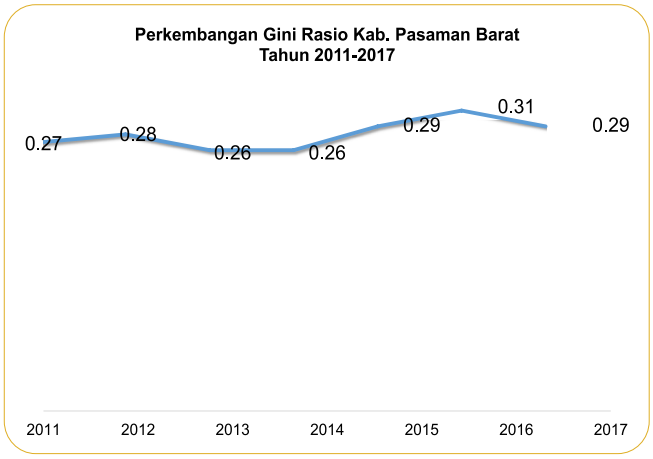

Beban pengeluaran penduduk miskin di Pasaman Barat secara umum memiliki kesamaan secara nasional. Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2017 adalah sebesar Rp382.820 yang berada di bawah Provinsi (Rp453.612) dan nasional (Rp387.160). Sedang laju pertumbuhan Garis Kemiskinan Pasaman Barat relatif rendah (Rp17.809/tahun) dibandingkan dengan rata-rata provinsi (Rp27.418/tahun) dan nasional (Rp25.065/tahun). Lebih rendahnya laju pertumbuhan Garis Kemiskinan ini, di satu sisi meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, di sisi lain menunjukkan rendahnya daya beli masyarakat secara umum di Pasaman Barat. (Gambar 1.3).

Gambar 1.3. Garis Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat

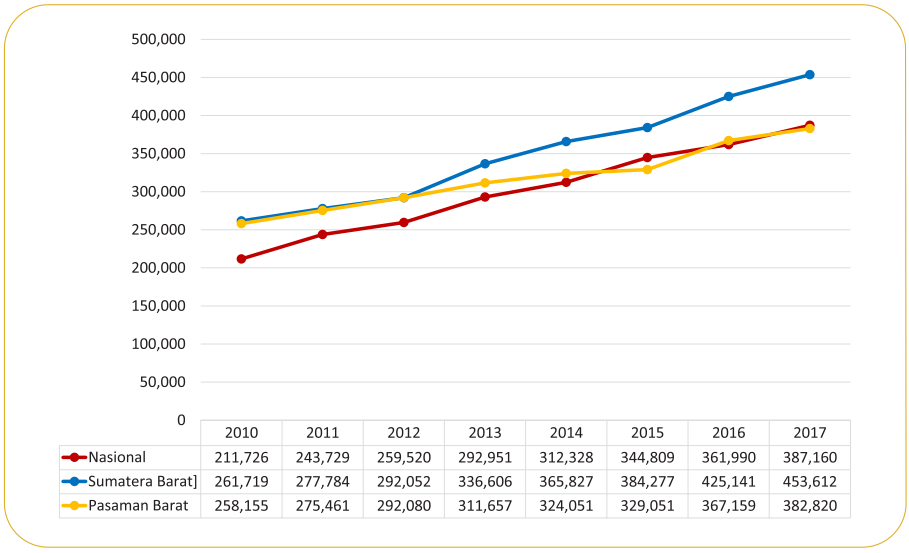

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nasional	211,726	243,729	259,520	292,951	312,328	344,809	361,990	387,160
Sumatera Barat]	261,719	277,784	292,052	336,606	365,827	384,277	425,141	453,612
Pasaman Barat	258,155	275,461	292,080	311,657	324,051	329,051	367,159	382,820

Sumber: BPS

B. PROFIL KEMISKINAN MIKRO
B.1. Penduduk Miskin dan Rentan

Seluruh penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat berada di dalam kelompok sepuluh persen penduduk dengan status kesejahteraan terendah nasional. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2017, sebesar 30.840 jiwa tercakup dalam kelompok 10% penduduk dengan kesejahteraan terendah sebesar 46.785 jiwa berdasarkan Basis Data Terpadu. Sedangkan total Desil-4 penduduk dengan kesejahteraan terendah sebanyak 161.191 jiwa, yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Kinali (1.471 jiwa). Sedangkan jumlah paling sedikit di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, yaitu sebanyak 255 jiwa. (Gambar 1.4).

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga Desil-1 di Kabupaten Pasaman Barat adalah hampir 6 jiwa per Rumah Tangga. Sedangkan pada Desil 4 sebesar 3,05 jiwa per Rumah Tangga. Ini menunjukkan di Pasaman Barat semakin rendah tingkat kesejahteraan suatu penduduk maka semakin banyak anggota rumah tangga atau beban pengeluaran rumah tangga dalam menghidupi anggotanya semakin tinggi. Kecamatan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga terbesar berada di Kecamatan Sungai Beremas (6,00 jiwa) sedangkan terendah berada di Kecamatan Kinali (5,29 jiwa). (Gambar 1.4).

Gambar 1.4. Profil Kemiskinan Mikro Kabupaten Pasaman Barat

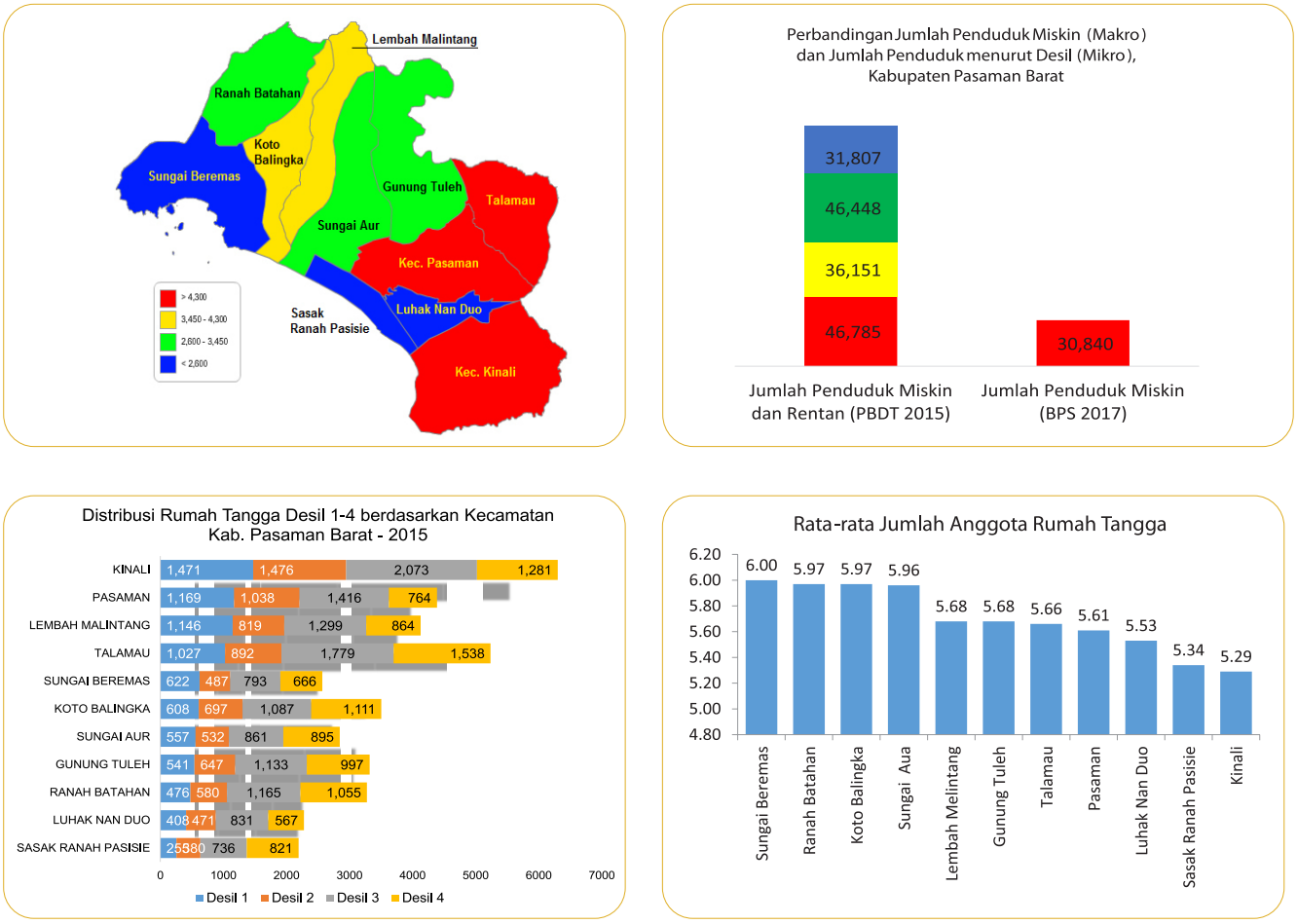

Sumber: BDT (2015)

B.2. Kepala Rumah Tangga Perempuan

Kepala rumah tangga perempuan masih tinggi dan didominasi oleh lansia. Tingginya jumlah kepala rumah tangga perempuan di Pasaman Barat akan menimbulkan kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan, terutama dalam perekonomian rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan anggota keluarga. Kecamatan Kinali merupakan wilayah dengan kepala rumah tangga perempuan paling tinggi (1.183 jiwa atau 46,7 %) pada Desil 1-4, sedangkan yang terendah di kecamatan Sasak Ranah Pasisie (372 jiwa atau 5,09 %). (Gambar 1.5)

Gambar 1.5. Kepala Rumah Tangga Perempuan Kabupaten Pasaman Barat

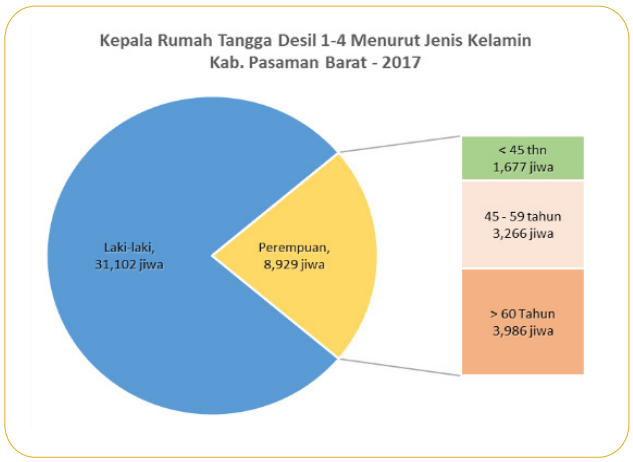

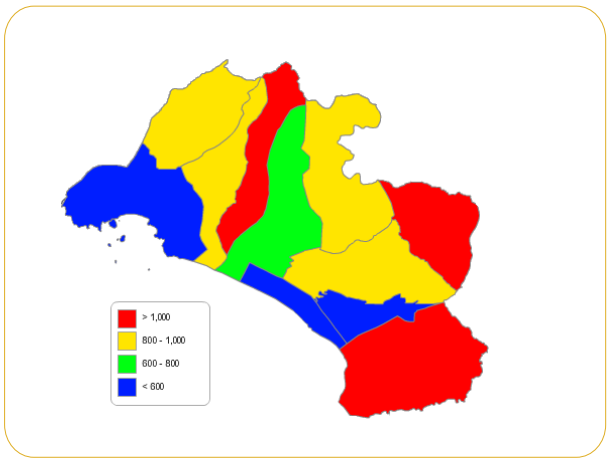

Kecamatan	KRT Perempuan
KINALI	1183
TALAMAU	1113
LEMBAH MALINTANG	1097
PASAMAN	928
GUNUNG TULEH	865
KOTO BALINGKA	836
RANAH BATAHAN	803
SUNGAI AUR	792
SUNGAI BEREMAS	529
LUHAK NAN DUO	411
SASAK RANAH PASISIE	372

Sumber: BDT (2015)

B.3. Kecacatan dan Penyakit Kronis

Penduduk miskin dan rentan yang berkebutuhan khusus dan memiliki penyakit kronis menimbulkan permasalahan kemiskinan lain di Kabupaten Pasaman Barat. Di sisi lain penduduk miskin dan rentan yang menderita penyakit kronis cukup tinggi, yaitu sebanyak 2,222 jiwa atau 1.38% dari total Desil 1-4. Sebaran kecacatan pada penduduk miskin dan rentan didominasi pada usia produktif (usia 15-45 tahun) dengan jumlah terbesar terdapat di kecamatan Lembah Melintang sebanyak 128 individu dan terkecil di kecamatan Luhak Nan Duo (44 individu). Selain itu, terdapat 7.661 jiwa penderita penyakit kronis yang mayoritas berusia produktif. Kecamatan Gunung Tuleh adalah kecamatan dengan penduduk penderita penyakit kronis tertinggi, yaitu

1.000 jiwa atau 13,05 % dari total penderita penyakit kronis. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam penanganan dan pelayanan kebutuhan bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan penderita penyakit kronis, terutama akses ke layanan kesejahteraan atau perawatan kesehatan khusus. (Gambar 1.6)

Gambar 1.6. Kondisi Penduduk Miskin dan Rentan yang Berkebutuhan Khusus dan Memiliki Penyakit Kronis

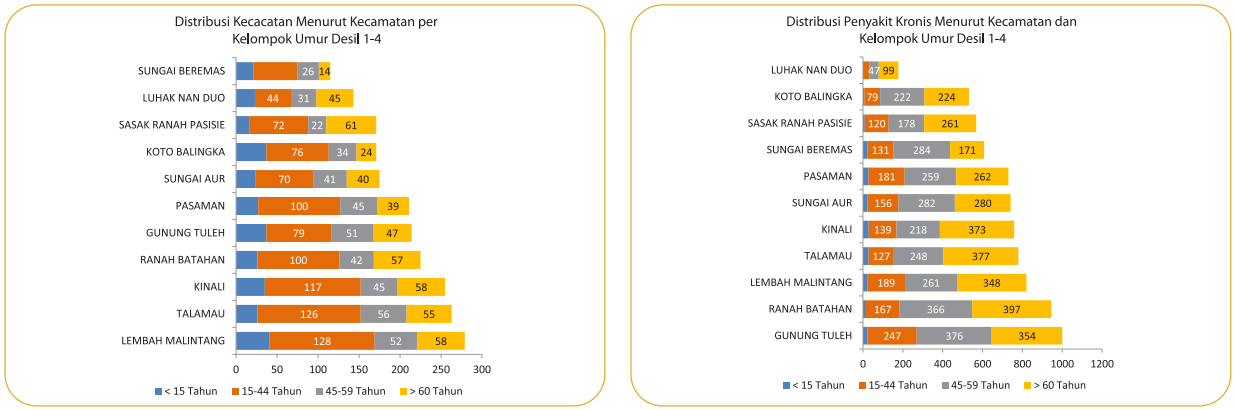

Sumber: BDT (2015)

B.4. Lapangan Pekerjaan

Sebagai daerah dengan lahan pertanian yang subur dan luas, pada umumnya sebagian besar kepala rumah tangga bekerja pada lapangan usaha pertanian tanaman padi, palawija, dan perkebunan. Selain itu, sebagian wilayah bekerja sebagai nelayan (perikanan tangkap), yaitu di Kecamatan Sei Beremas, Sasak Ranah Pasisie, Sungai Aur dan Koto Balingka yang berada di wilayah pesisir atau di pinggir pantai. Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja pada lapangan usaha pertanian tanaman padi dan palawija terbesar terdapat di kecamatan Talamau sebanyak 3.189 jiwa dari 24.471 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan. Sedangkan kepala rumah tangga yang bekerja pada usaha perikanan tangkap (nelayan) sebanyak 2.373 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan. Sektor lain dengan porsi sedikit lebih rendah bekerja pada sektor perdagangan (5,91 %), bangunan/konstruksi (3,89 %) dan pemulung (2.89 %). (Gambar 1.7).

Gambar 1.7. Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan Menurut Lapangan Usaha

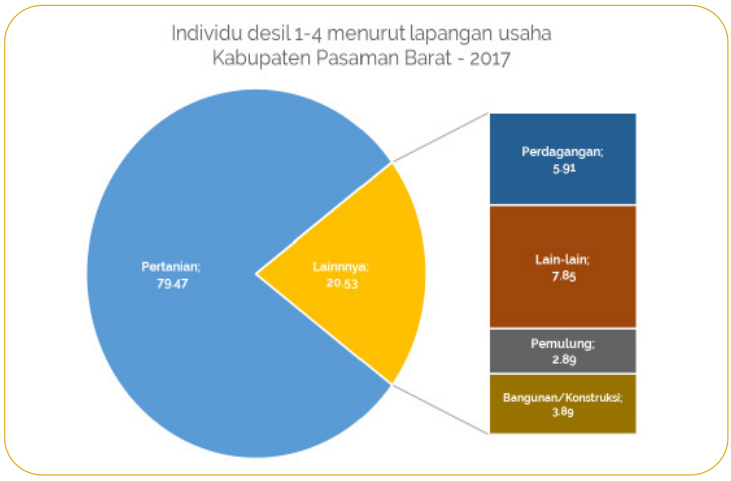

Sumber: BDT (2015)

C. DAYA DUKUNG FISKAL

Kabupaten Pasaman Barat memiliki ruang fiskal dan proporsi alokasi belanja modal yang relatif masih cukup rendah. Ruang fiskal dan Derajat Otonomi Fiskal dengan porsi yang semakin menurun sejak tahun 2014 sangat mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan pembangunan dan upaya penanggulangana kemiskinan di Pasaman Barat. Sumber pendanaan pembangunan masih banyak bergantung dengan transfer dari pusat, dengan porsi pendapatan daerah relatif sangat kecil. Sedangkan, dalam alokasi belanja daerah mengalami tren yang positif dengan semakin meningkatnya alokasi Belanja Langsung yang semakin besar dibanding dengan Belanja Tidak Langsung.

C.1. Derajat Otonomi Fiskal

Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Pasaman Barat relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera. Kemandirian fiskal suatu daerah dapat dilihat dari porsi Derajat Otonomi Fiskal yang menggambarkan besaran pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan, walaupun sempat terjadi penurunan di tahun 2015 dan 2016. Perlu upaya yang optimal dalam peningkatan penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai peningkatan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. (Gambar 1.8)

Gambar 1.8. Kondisi Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Pasaman Barat

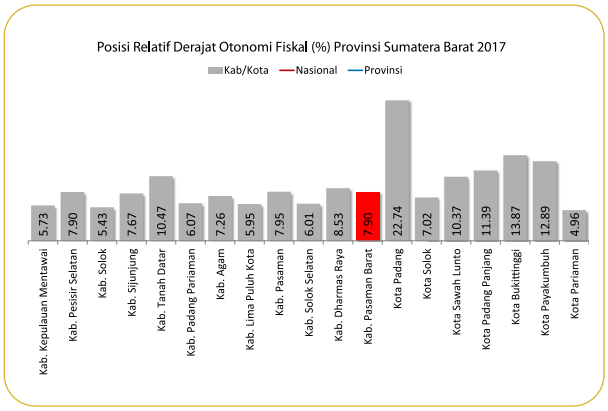

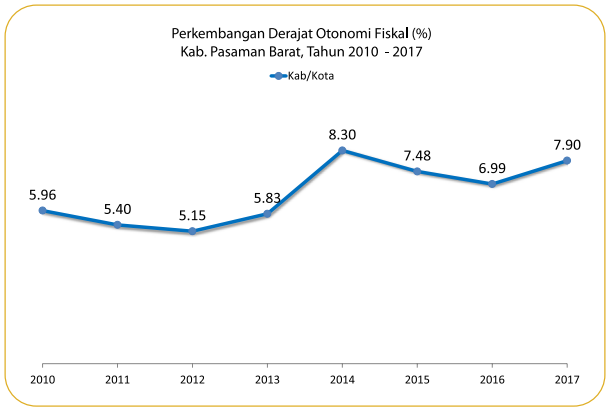

Sumber: Kementerian Keuangan RI

C.2. Ruang Fiskal

Ruang Fiskal di Kabupaten Pasaman Barat relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Pasaman Barat termasuk tujuh daerah di Sumatera Barat yang memiliki Ruang Fiskal rendah namun Persentase Penduduk Miskin masih tinggi, sehingga pemerintah daerah diharapkan ke depannya lebih mampu melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan yang lebih efektif dan efisien guna mengurangi kemiskinan secara signifikan. (Gambar 1.9).

Gambar 1.9. Kondisi Ruang Fiskal Kabupaten Pasaman Barat

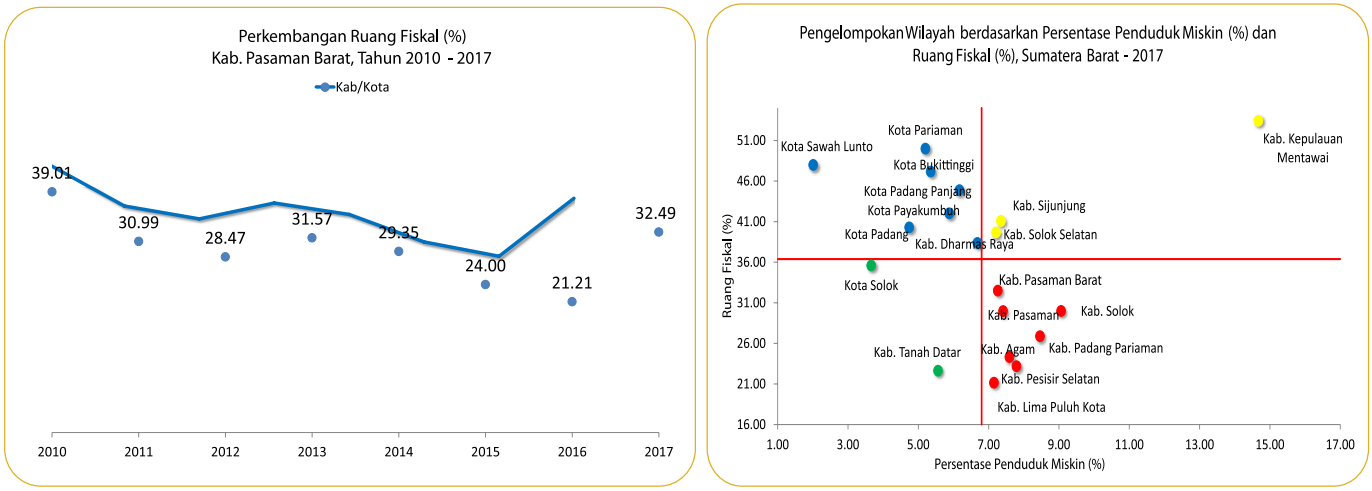

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan RI

C.3. Kapasitas fiskal

Kabupaten Pasaman Barat memiliki kapasitas fiskal rendah yang dipengaruhi oleh tingginya tingkat kemiskinan. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai tugas pemerintahan yang dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Kabupaten Pasaman Barat memiliki Kapasitas Fiskal yang rendah karena penerimaan daerah yang relatif rendah dan dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk miskin bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera Barat. Tingginya jumlah penduduk miskin sangat mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan karena rendahnya penerimaan daerah. (Gambar 1.10).

Gambar 1.10. Kondisi Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017

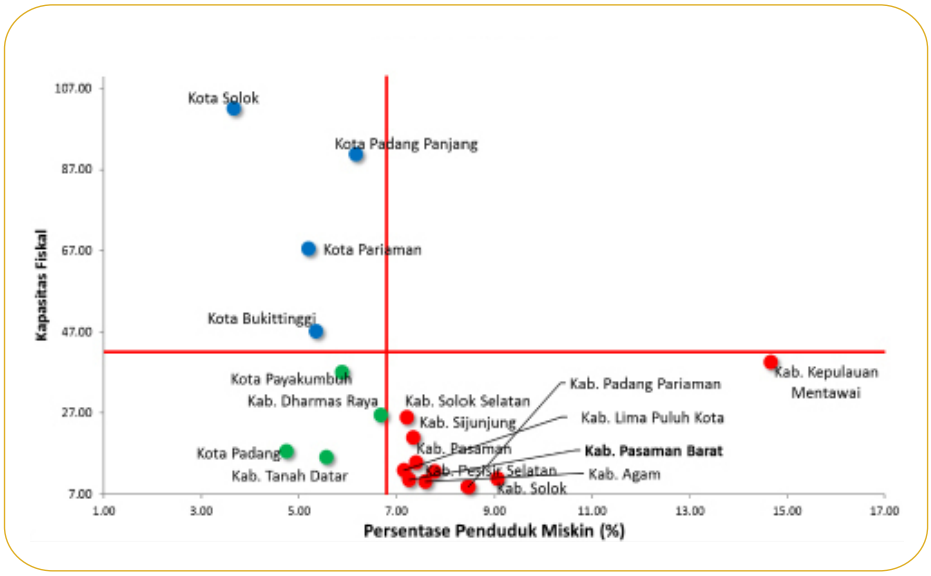

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan RI

C.4. Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pasaman Barat relatif rendah. Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya pendapatan dari sektor jasa dan perdagangan. Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pasaman Barat mengakibatkan alokasi belanja terbatas untuk membiayai belanja langsung program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan Pajak dan Retribusi daerah perlu dilihat sumber penerimaannya, apakah membebani pengeluaran penduduk miskin atau tidak. (Gambar 1.11).

Gambar 1.11. Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017

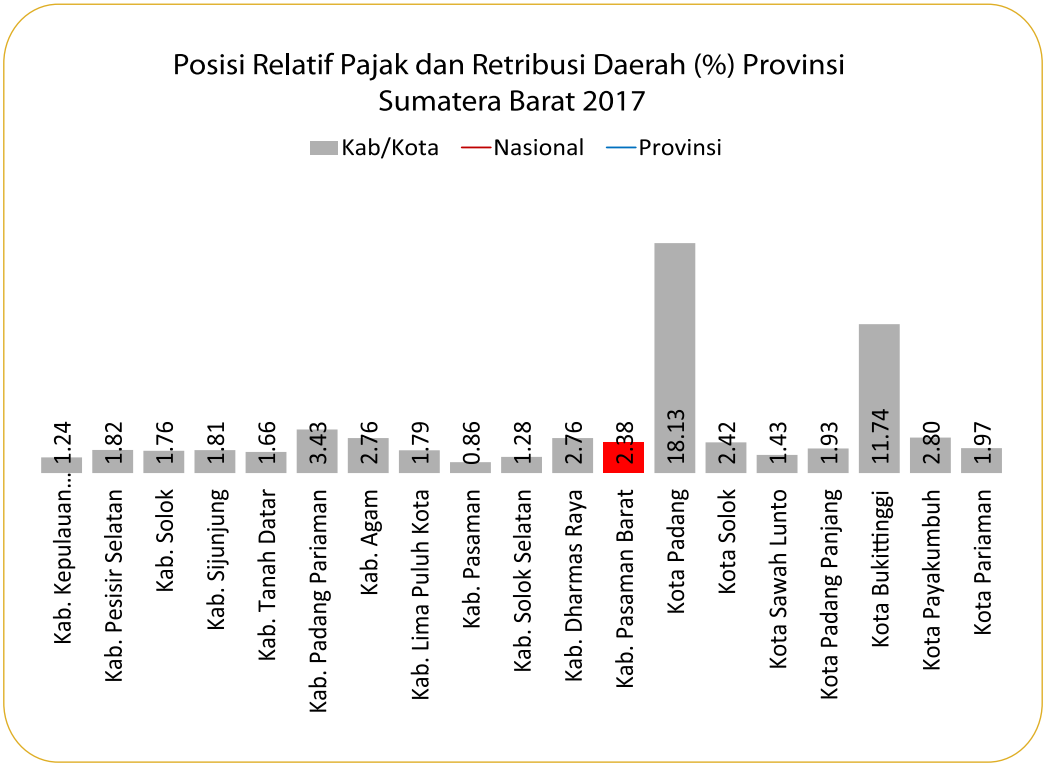

Sumber: Kementerian Keuangan RI

C.5. Belanja Modal

Keterbatasan ruang fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah Pasaman Barat. Apabila dilihat dari komposisi alokasi belanja modal, Kabupaten Pasaman Barat ternyata memiliki proporsi relatif rendah, yaitu 21,91% dari total alokasi belanja. Ini masih belum memenuhi standar belanja modal yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyusunan APBD sekurang-kurangnya 29% dari total belanja daerah. Namun alokasi anggaran balanja modal sejak tahun 2010 relatif tidak banyak perubahan dengan komposisi tertinggi, yaitu 26,04% pada tahun 2016. (Gambar 1.12).

Gambar 1.12. Perkembangan Alokasi Belanja Modal Kabupaten Pasaman Barat

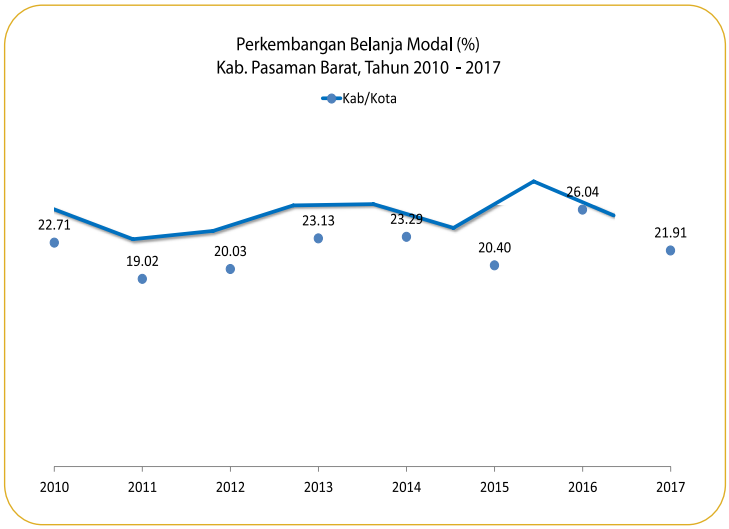

Sumber: Kementerian Keuangan RI

C.6. Persentase Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja di Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar digunakan untuk Belanja Pegawai Tidak Langsung. Lebih dari 40% belanja digunakan untuk Belanja Pegawai Tidak Langsung. Namun cenderung menurun sejak tahun 2012. Diharapkan tren ini sebagai langkah positif untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah daerah pada program penanggulangan kemiskinan. (Gambar 1.13).

Gambar 1.13. Komposisi Alokasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Sumber: Kementerian Keuangan RI

D. BELANJA SEKTORAL

D.1. Belanja Kesejahteraan

Belanja Kesejahteraan Kabupaten Pasaman Barat relatif tinggi namun persentase penduduk miskinnya juga tinggi. Berdasarkan pengelompokan wilayah dengan menggunakan Belanja Kesejahteraan dan Presentase Penduduk Miskin tahun 2017, terlihat bahwa Kabupaten Pasaman Barat berada di wilayah prioritas kedua (kuning) dengan alokasi Belanja Kesejahteraan yang relatif tinggi dan Persentase Penduduk Miskin yang tinggi dibandingkan kab/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan setiap belanja kesejahteraan yang dialokasikan setiap tahun diasumsikan mampu mengurangi persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun, Belanja Kesejahteraan adalah total penjumlahan anggaran dari Fungsi Perlindungan Sosial, Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, serta Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang dianggap paling berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan. (Gambar 1.14).

Gambar 1.14. Alokasi Belanja Kesejahteraan dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017

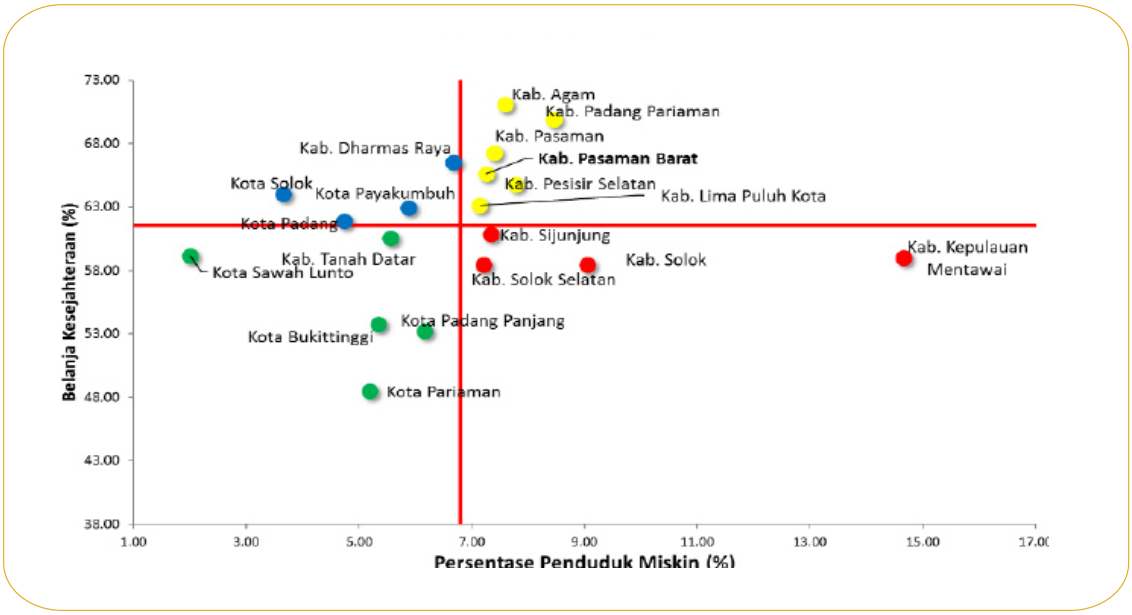

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan RI

D.2. Belanja Fungsi Pendidikan

Capaian indikator pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) setiap tahunnya terus mengalami perbaikan, baik jenjang SD, SMP maupun SMA dan sederajatnya. Namun pola kenaikan capaian indikator pendidikan ini tidak sama dengan alokasi Belanja Fungsi Pendidikan dimana ada kecenderungan terus menurunnya porsi anggaran untuk Belanja Fungsi Pendidikan. Menurunnya alokasi belanja pendidikan, terutama pada tahun 2016 karena adanya peralihan kewenangan untuk belanja pendidikan di tingkat sekolah menengah atas dari kabupaten ke provinsi. Selain itu, menurunnya belanja pendidikan dimana proporsinya masih memenuhi UU, yaitu minimal 20%, sedangkan capaian indikator outcome terus meningkat dapat mengindikasikan telah adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi penggunaan alokasi belanja di sektor pendidikan. (Gambar 1.15).

Gambar 1.15. Analisis Keterkaitan Alokasi Belanja Pendidikan dan Indikator Pendidikan

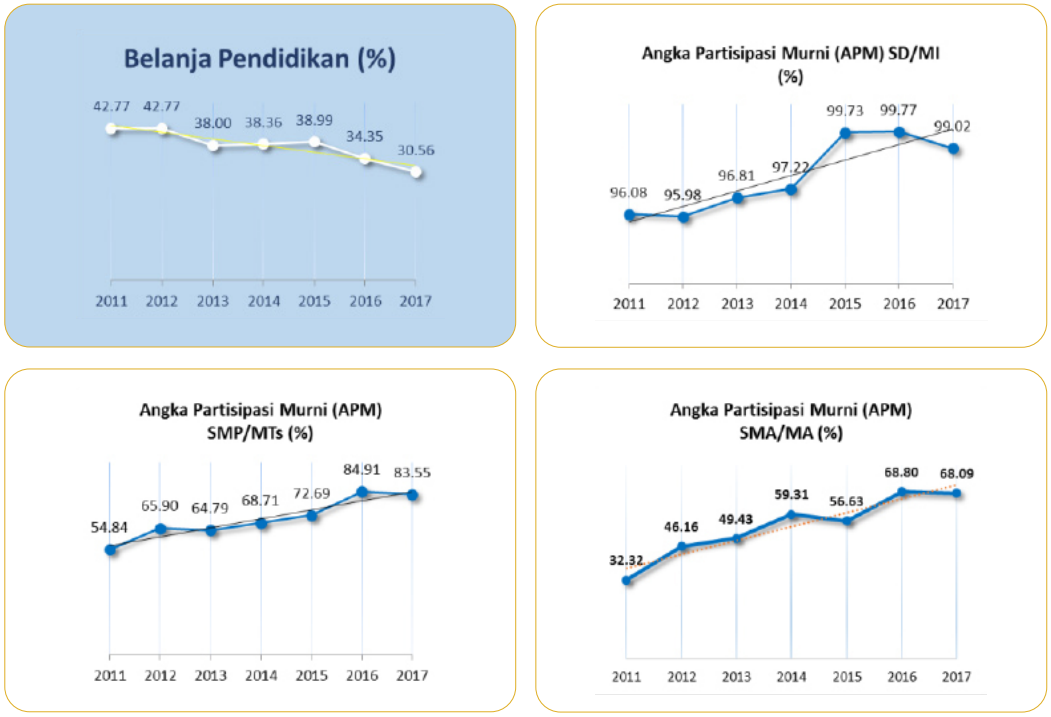

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan RI

D.3. Belanja Fungsi Kesehatan

Kabupaten Pasaman Barat dalam mengalokasikan Belanja Fungsi Kesehatan sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 terus mengalami kenaikan, namun kembali menurun pada tahun 2017. Besaran alokasi belanja fungsi kesehatan ini pada dua tahun terakhir, tahun 2016-2017 sudah memenuhi standar minimum alokasi belanja bidang kesehatan, yaitu minimal 10% dari total Belanja Daerah. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, kenaikan porsi belanja kesehatan belum berkontribusi maksimal terhadap capaian beberapa indikator kesehatan, diantaranya: persentase penduduk dengan keluhan kesehatan dan angka morbiditas yang terus meningkat. Sedangkan layanan kesehatan untuk ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih terus mengalami perbaikan. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan lebih memprioritaskan alokasi belanja program kesehatan dari sisi belanja langsung untuk upaya pencegahan (promotif dan preventif) dibandingkan program untuk upaya kuratif dan rehabilitatif, seperti program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat agar berperilaku hidup sehat, program upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, serta program pengembangan lingkungan sehat. (Gambar 1.16).

Gambar 1.16. Analisis Keterkaitan Alokasi Belanja Kesehatan dan Indikator Kesehatan

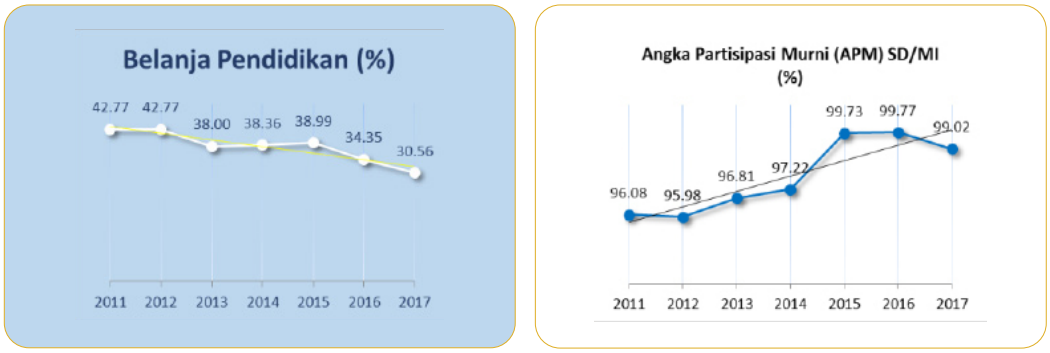

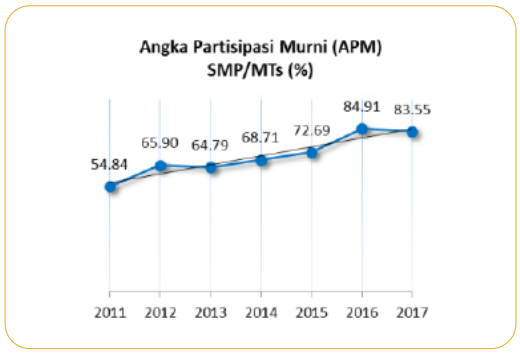

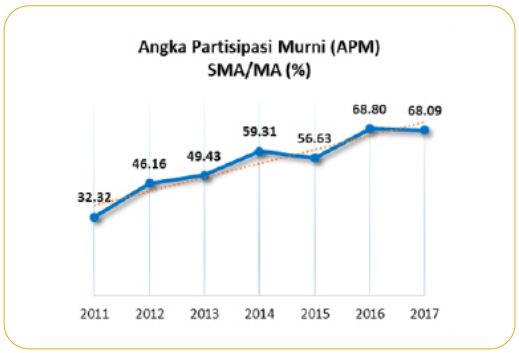

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan RI

D.4. Belanja Infrastruktur Dasar

Sejak tahun 2015 porsi alokasi belanja infrastruktur dasar terus mengalami kenaikan sekitar 1.5% tiap tahunnya. Kenaikan alokasi anggaran ini berpengaruh pada kenaikan capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Air Bersih yang cukup signifikan dalam tiga tahun dan kenaikan Proporsi Rumah Tangga dengan Askes Listrik yang mencapai 98,53% pada tahun 2017. Namun capaian indikator Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak justru mengalami penurunan dari 64,04% di tahun 2015 menjadi 59,98% pada tahun 2016, walaupun kembali sedikit meningkat di tahun 2017 (60,01%). Penurunan capaian indikator Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak ini perlu dikaji labih lanjut terkait dengan alokasi belanja program dan kegiatan yang menyasar pada perbaikan indikator sanitasi. (Gambar 1.17).

Gambar 1.17. Analisis Keterkaitan Alokasi Belanja Infrastruktur dan Indikator Infrastruktur Dasar

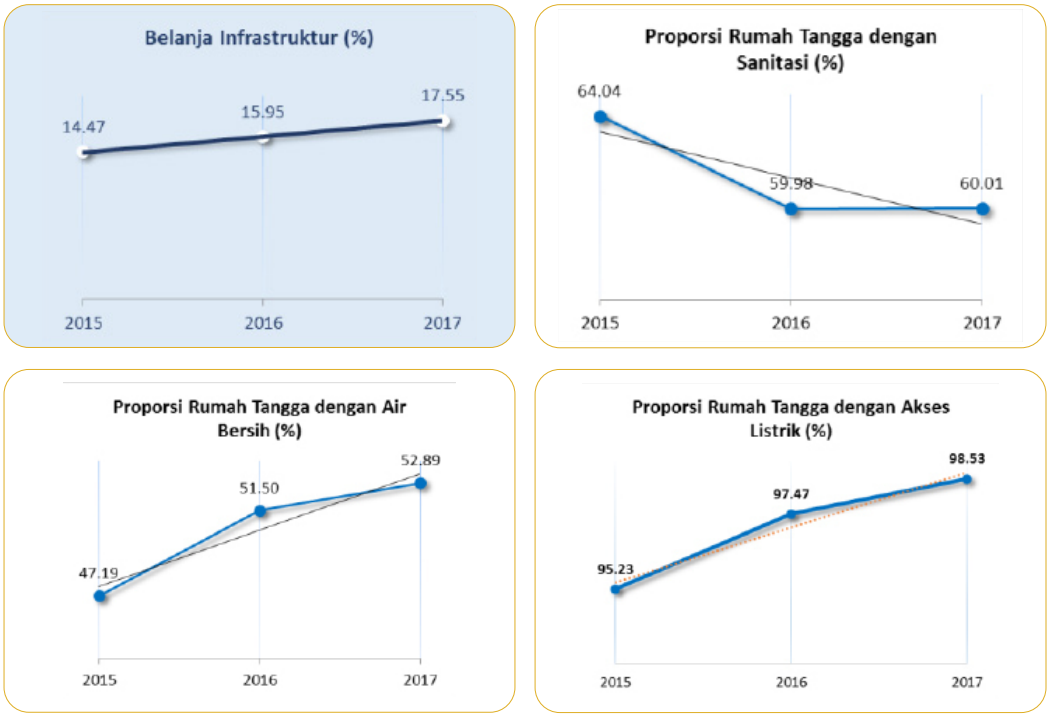

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan RI

BAB 2

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN AKSES SANITASI DAN AIR BERSIH DI PASAMAN BARAT

A. ISU STRATEGIS SEKTOR INFRASTRUKTUR DASAR

Kabupaten Pasaman Barat merupakan satu dari tiga daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat yang membutuhkan peningkatan penyediaan infrastruktur dasar. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tahun 2014-2019, Kabupaten Pasaman Barat masuk sebagai daerah tertinggal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat enam kriteria dalam penetapan daerah tertinggal, yaitu kondisi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan daerah, aksessibilitas, dan karakteristik daerah. Adapun indikator penetapan daerah tertinggal untuk infrastruktur sesuai Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3/2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam penetapan Daerah Tertinggal secara Nasional, yaitu mencakup jalan dan jembatan, pasar, sarana kesehatan, air minum, sarana telekomunikasi, listrik dan sarana pendidikan. Namun, berkaitan dengan analisis kemiskinan dalam buku ini maka identifikasi masalah pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti pemukiman, sanitasi, listrik, dan air minum.

A.1. Air Minum Bersih

Hanya setengah dari rumah tangga di Pasaman Barat memiliki akses terhadap air minum bersih. Indikator yang digunakan untuk melihat cakupan air minum bersih adalah persentase rumah tangga dengan akses air minum yang terdiri atas air kemasan, air isi ulang, leding (saluran air dari pipa), dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m)[1]. Pada Tahun 2017, cakupan air minum bersih di Kabupaten Pasaman Barat adalah 52,89% sedangkan sisanya masyarakat mengkonsumsi air dari sumber yang tidak terlindung, misal dari sungai, mata air tidak terlindung, dan sumur tidak terlindung. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, cakupan air minum bersih di Pasaman Barat relatif masih jauh berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat (70,79%) dan nasional (71,27%). Artinya, akses untuk air minum bersih di Kabupaten Pasaman Barat masih menjadi suatu masalah yang serius untuk ditangani. (Gambar 2.1).

Gambar 2.1. Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Bersih (%) Provinsi Sumatera Barat 2017

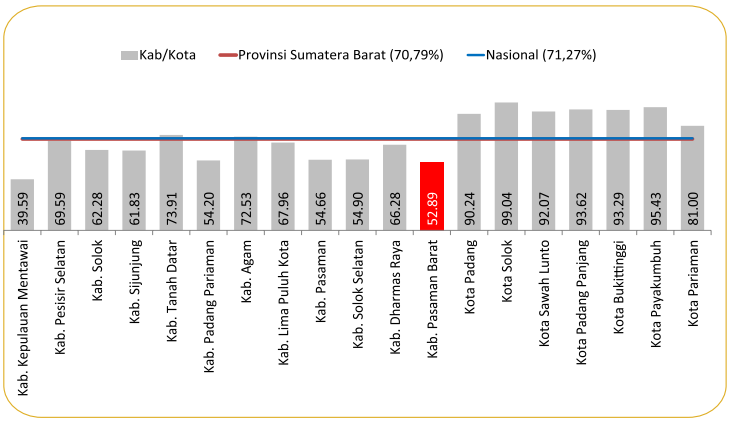

Sumber: BPS

[1] Definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai catatan karena keterbatasan ketersediaan data indikator untuk akses air minum layak, maka analisis selanjutnya hanya akan menggunakan indikator persentase rumah tangga dengan akses air minum bersih.

Sebagian besar rumah tangga miskin belum dapat mengakses air minum bersih. Berdasarkan distribusi pendapatan pada tahun 2017, terlihat bahwa rumah tangga dengan kuantil 5 (terkaya) sebanyak 73,32% rumah tangganya telah memiliki akses sumber air minum bersih yang sebagian berasal dari sumur terlindung dan air isi ulang. Sedangkan kelompok rumah tangga kuantil 1 (termiskin) hanya 40,02% rumah tangganya dapat mengakses sumber air minum bersih dan sebagian besar sumber air minumnya berasal dari sumur tidak terlindung dan mata air tidak terlindung. (Gambar 2.2).

Gambar 2.2. Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Bersih (%) Berdasarkan Kuantil Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017

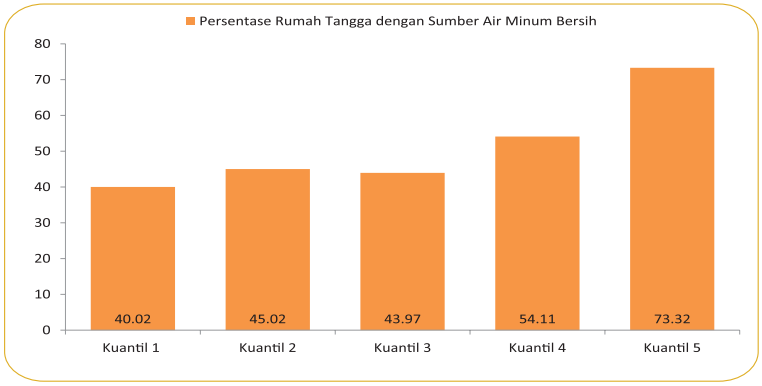

Sumber: BPS

A.2. Sanitasi Layak

Kurang dari 40 persen rumah tangga di Pasaman Barat belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Indikator yang digunakan dalam pemenuhan cakupan sanitasi layak berdasarkan definisi yang digunakan BPS[2]. Berdasarkan capaian tahun 2017, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Pasaman Barat adalah 38,09%, yaitu berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat (52,72%) dan nasional (67,89%). Rendahnya akses rumah tangga dengan sanitasi layak menjadi persoalan utama masyarakat di Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus dapat memprioritaskan persoalan ini agar membangun lingkungan permukiman yang baik yang akan berdampak pada peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. (Gambar 2.3).

Gambar 2.3. Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Sumatera Barat 2017

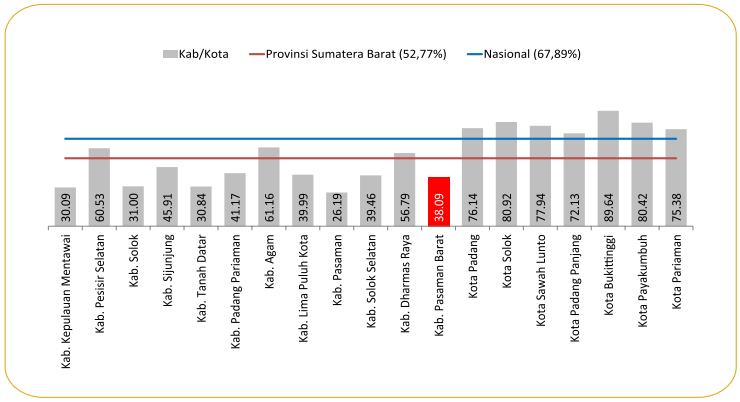

Sumber: BPS

[2] Sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (sumber: BPS)

Akses rumah tangga terhadap fasilitas buang air besar di Kabupaten Pasaman Barat juga masih relatif rendah. Fasilitas tempat buang air besar (BAB) mencakup milik sendiri, bersama dan MCK komunal. Pada tahun 2017, persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar di Kabupaten Pasaman Barat adalah 60,01%. Jika dibandingkan dengan capaian Propinsi Sumatera Barat dan nasional pada tahun yang sama, maka capaian Kabupaten Pasaman Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi (89,58%) dan nasional (81,83%). (Gambar 2.4).

Gambar 2.4. Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas BAB (%) Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

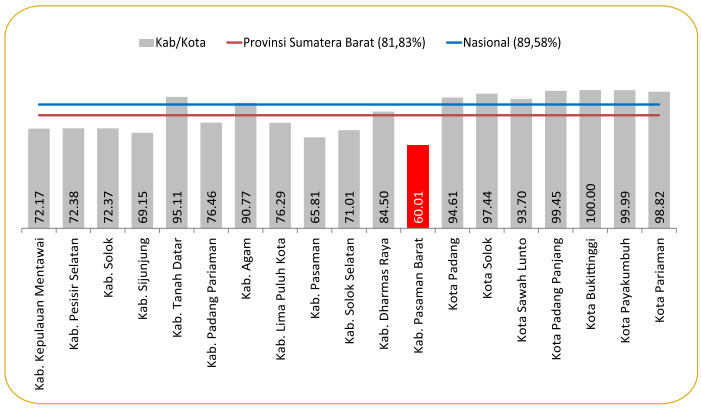

Sumber: BPS

A.3. Rasio Elektrifikasi

Akses rumah tangga terhadap listrik relatif baik, yaitu lebih dari 98 persen rumah tangga telah mendapatkan akses listrik. Rasio elektrifikasi mengGambar 2.kan sejauh mana layanan penyediaan energi listrik dapat diakses oleh rumah tangga, baik yang bersumber dari PLN maupun bukan dari PLN. Pada tahun 2017, persensate rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 98,53% relatif lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Barat (97,81%) dan nasional (98.14%). Artinya, berdasarkan posisi relatif cakupan rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Pasaman Barat lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat maupun di Indonesia. (Gambar 2.5).

Gambar 2.5. Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Listrik (%) Provinsi Sumatera Barat 2017

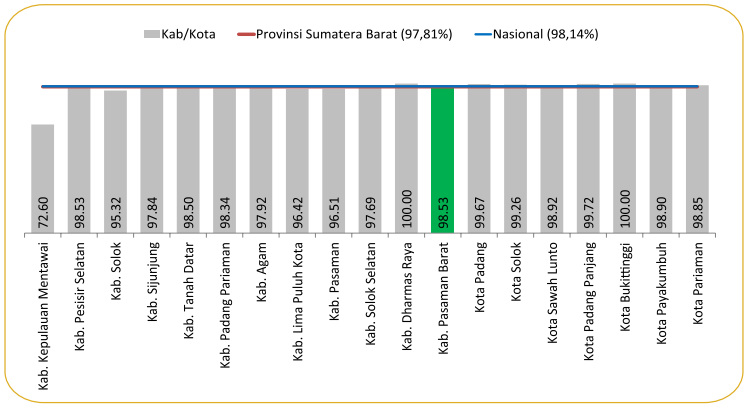

Sumber: BPS

Jika dilihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rumah tangga yang terakses listrik mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015, cakupan RT dengan akses listrik di Kabupaten Pasaman Barat adalah 95,23%. Pada tahun 2016, naik lagi menjadi 97.47% dan pada Tahun 2017 kembali naik menjadi 98,53%. Hal ini dapat diasumsikan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir cukup efektif untuk meningkatkan cakupan rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Pasaman Barat. (Gambar 2.6).

Gambar 2.6. Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Listrik (%) Kabupaten Pasaman Barat

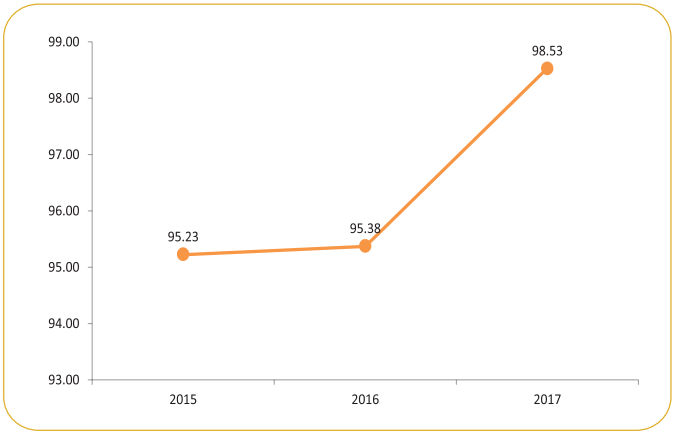

Sumber: BPS

Peningkatan cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi dan air minum menjadi prioritas utama dalam infrastruktur dasar. Berdasarakan analisis prioritas masalah, terlihat bahwa cakupan listrik di Pasaman Barat telah berwarna hijau yang artinya dapat dikatakan cukup baik dibandingkan ketiga indikator infrastruktur dasar lainnya. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut akan fokus dilakukan terhadap masalah utama, yaitu bidang sanitasi dan air minum saja. Untuk lebih jelasnya posisi indikator utama infrastruktur dasar tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut. (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Perbandingan Indikator Utama Infrastruktur Dasar Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2017

Indikator Utama	Pasaman Barat	Sumatera Barat	Nasional	Target RPJMD (akhir 2021)
Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Bersih (%)	52,89	70,79	71,27	100
Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	38,09	52,72	67,89	-
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar (%)	60,01	81,83	89,5	-
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)	98,53	97,81	98,14	-

Sumber : BPS (Susenas), RPJMD Pasaman Barat

B. PRIORITAS INTERVENSI

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka disusun logika program (*theory of change*) untuk menentukan program dan kegiatan prioritas berdasarkan masalah utama infrastruktur dasar di Pasaman Barat, yaitu (1) Akses Sanitasi Layak dan (2) Akses Air Minum Bersih. (Gambar 2.7).

Berdasarkan *theory of change* yang disusun, memperlihatkan bahwa meningkatnya akses sanitasi layak dan air minum bersih (final outcome) dipengaruhi oleh 4 determinan kunci, yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana air minum melalui PDAM
2. Peningkatan akses rumah tangga miskin dan perdesaan terhadap program PAMSIMAS
3. Peningkatan fasilitas buang air besar
4. Peningkatan akses rumah tangga terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)

Gambar 2.7. *Theory of change* Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Pasaman Barat

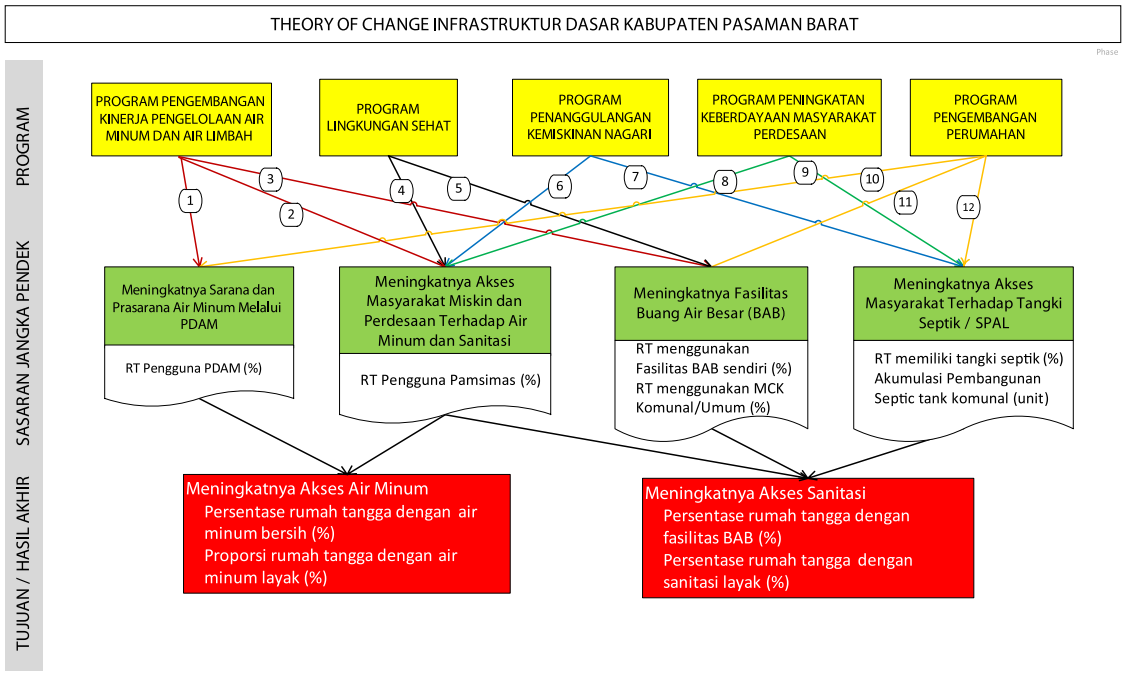

Keterangan daftar kegiatan:

1. Pengembangan sistem distribusi air minum
2. Penyediaan sarana dan prasana air minum bagi masyarakat berpeghasilan rendah
3. Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)
4. Pembangunan jaringan air bersih/air minum
5. Pembangunan MCK Komunal/ Umum
6. Kegiatan Nagari untuk akses air minun
7. Kegiatan Nagari untuk akses sanitasi
8. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap akses air minum
9. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap akses sanitasi
10. Pembangunan jaringan air minum
11. Pembangunan jamban perumahan
12. Pembangunan tangki septik perumahan

B.1. Prioritas Intervensi Peningkatan Akses Air Minum Bersih

Cakupan air minum bersih dipengaruhi setidaknya oleh tiga hal, yakni: (1) ketersediaan sumber air bersih; (2) akses masyarakat terhadap sumber air minum dapat berupa jaringan perpipaan atau non-perpipaan maupun tata kelola air minum oleh lembaga pemerintah; dan (3) kesadaran masyarakat untuk secara swadaya menyediakan sumber air minum yang layak. Selain itu, pertambahan penduduk tentunya juga mempengaruhi kecukupan pasokan air minum yang ada. (Gambar 2.8).

Gambar 2.8. Analisis Keterkaitan Akses Air Minum Bersih

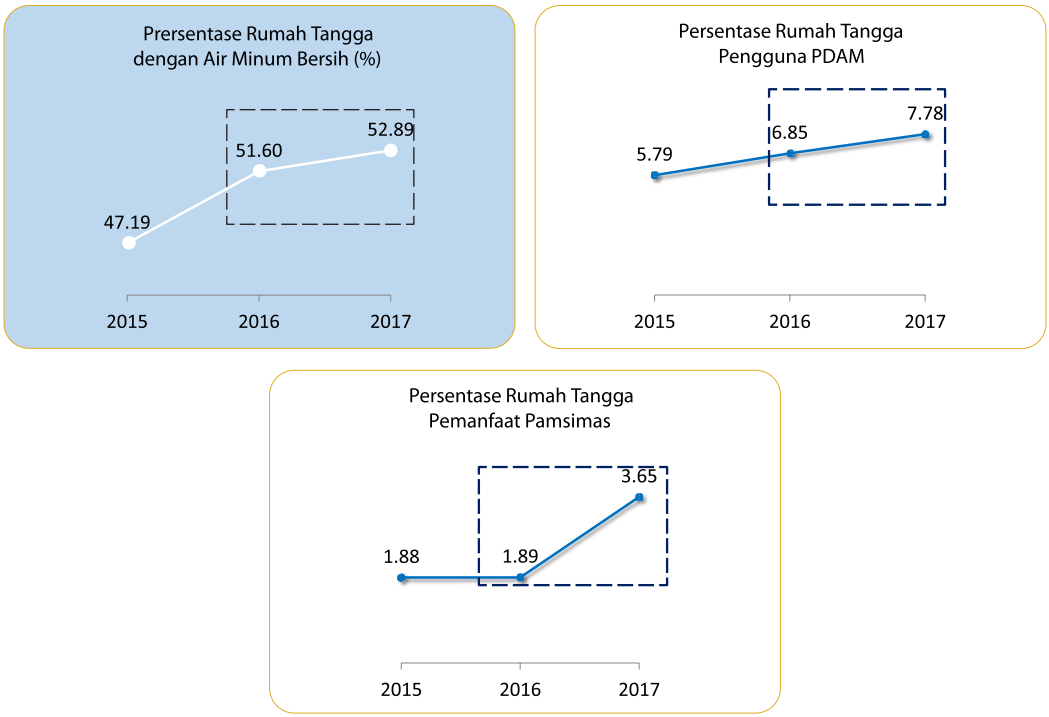

Sumber: BPS

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan, maka diperlukan beberapa intervensi terkait peningkatan akses sanitasi di Kabupaten Pasaman Barat, diantaranya:

- **Peningkatan pembangunan layanan air minum perpipaan PDAM.** Pada tahun 2017, sebanyak 9,48% rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat yang telah menggunakan air minum dari sumber perpipaan. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2016, yaitu hanya 2.28%. Sejalan dengan itu, proprosi rumah tangga dengan akses air minum bersih juga meningkat di tahun di tahun 2017. Oleh karena itu peningkatan akses layanan air minum perpipaaan PDAM akan berpengaruh terhadap akses rumah tangga di Pasaman Barat untuk mendapatkan sumber air bersih.
- **Peningkatan kegiatan program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).** Persentase rumah tangga pemanfaat sumber air dari program PAMSIMAS setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Hal ini sejalan dengan kenaikan cakupan rumah tangga dengan akses air minum bersih. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan perluasan cakupan penerima manfaat dari program ini untuk meningkatkan akses air minum bersih kepada masyarakat.

B.2. Prioritas Intervensi Peningkatan Akses Sanitasi Layak[3]

Hasil analisis keterkaitan (*causal relationship*) menunjukkan bahwa peningkatan sanitasi dipengaruhi oleh: (1) akses rumah tangga terhadap fasilitas BAB sendiri; (2) akses rumah tangga terhadap fasilitas BAB MCK/Komunal/Umum; dan (3) penggunaan fasilitas pembuangan akhir limbah tinja SPAL baik sendiri maupun komunal. (Gambar 2.9).

Gambar 2.9. Analisis Keterkaitan Akses Sanitasi

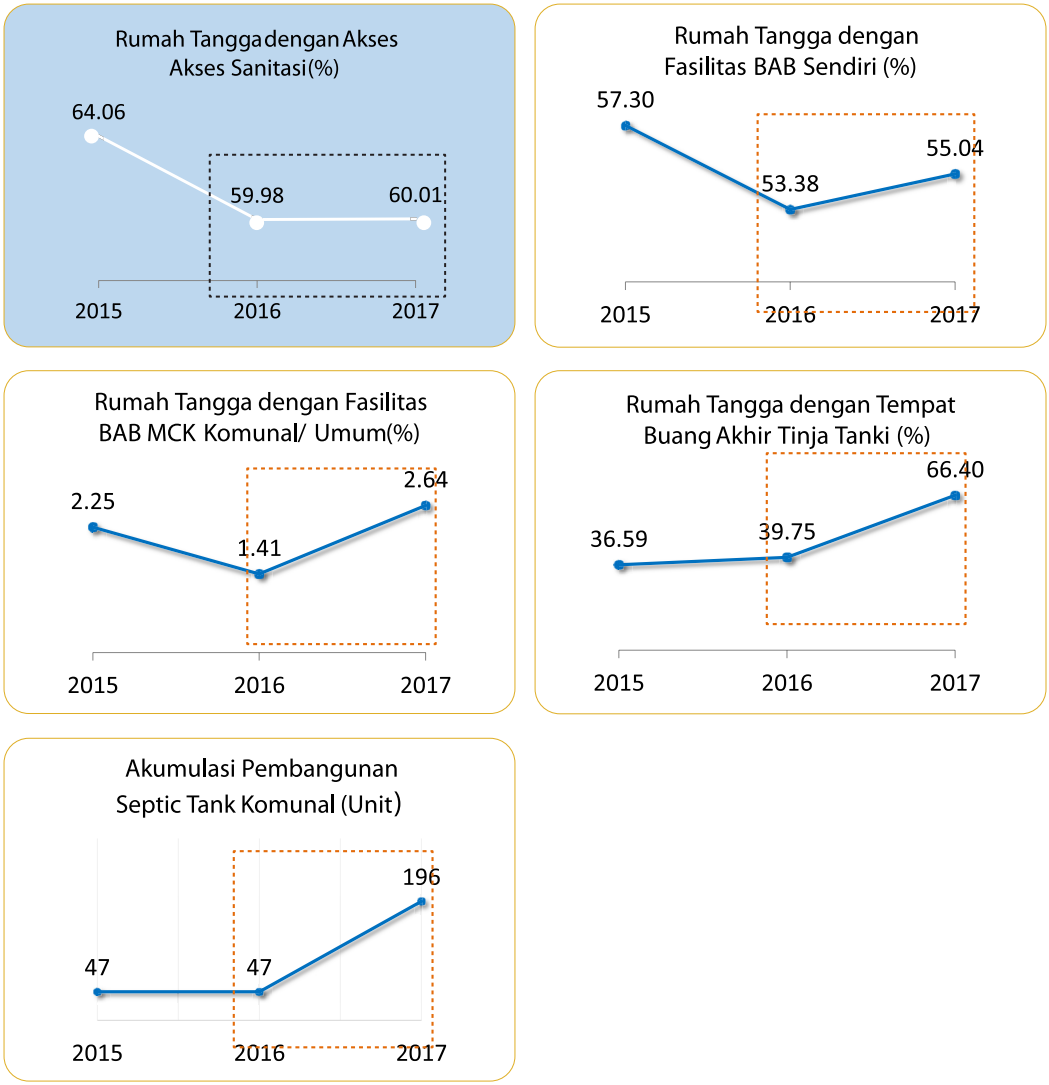

Sumber: BPS

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan, maka diperlukan beberapa intervensi terkait peningkatan akses sanitasi di Kabupaten Pasaman Barat, diantaranya:

- **Peningkatan pembangunan fasilitas buang air besar sendiri.** Salah satu kriteria sanitasi layak adalah tersedianya fasilitas jamban sendiri yang dimiliki sendiri oleh masing-masing rumah tangga. Hal ini penting karena berkaitan dengan kesehatan terutama untuk mengurangi risiko menyebarnya penyakit menular yang lebih luas di masyarakat.

[3] Ketersediaan data sanitasi layak untuk Kabupaten Pasaman Barat tidak tersedia tiap tahun dalam publikasi BPS, maka indikator yang digunakan untuk analisis adalah persentase rumah tangga dengan akses fasilitas buang air besar (BAB).tertentu (sumber: BPS)

- **Peningkatan pembangunan fasilitas buang air besar MCK komunal/umum.** Pembangunan MCK komunal merupakan salah satu strategi untuk mendekatkan sarana sanitasi bagi masyarakat. Pada Tahun 2016, BPS mencatat bahwa cakupan MCK komunal di Kabupaten Pasaman Barat adalah 1,41%, sedangkan pada Tahun 2017, naik menjadi 2,64%. Pada saat yang sama, cakupan sanitasi layak juga menunjukkan kenaikan. Jadi, bisa diasumsikan bahwa terdapat keterkaitan antara cakupan sanitasi layak dengan cakupan rumah tangga yang dapat mengakses fasilitas BAB berupa MCK komunal.
- **Peningkatan pembangunan fasilitas pembuangan akhir tinja dengan tangki septik/ SPAL.** Fasilitas pembuangan akhir tinja yang layak adalah tanki septik, baik yang dimiliki sendiri maupun komunal. Sedangkan lubang tanah tidak termasuk jenis tempat pembuangan akhir tinja yang layak karena tinja yang meresap ke dalam tanah akan mencemari sumber air yang digunakan untuk minum dan keperluan rumah tangga lainnya.
- **Peningkatan pembangunan tangki septik komunal.** Pembangunan tangki septik merupakan bagian dari penilaian untuk rumah tangga sehat sesuai dengan arahan yang terangkum dalam Dokumen Rencana Aksi Daerah – Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang telah dijadikan Perbub nomor 76 tahun 2014, serta dalam mendukung nawacita untuk mencapai 100% air minum, 0% kumuh, dan 100% sanitasi. Meskipun pada tahun 2015 dan 2016 terdapat target yang sama karena terjadinya perubahan SOTK yang awalnya tanggung jawab satu OPD menjadi dua OPD, namun setelah itu Kabupaten Pasaman Barat meningkatkan anggaran untuk pembangunan tangki septik komunal pada tahun 2017. Berdasarkan jumlah akumulasi pembangunan tangki septik komunal menunjukkan peningkatan dari 47 unit di tahun 2016 menjadi 196 unit di tahun 2017.

C. PRIORITAS WILAYAH

C.1. Prioritas Wilayah Intervensi Peningkatan Akses Air Minum Bersih

Analisis kuadran menghasilkan empat kelompok prioritas wilayah (kecamatan) bagi setiap prioritas intervensi. Adapun masing-masing prioritas wilayah tersebut dijelaskan berikut ini:

- **Kec. Sungai Beremas, Gunung Tuleh, Ranah Batahan, dan Kinali adalah empat kecamatan yang belum terjangkau jaringan PDAM.** Dari pengelompokan wilayah berdasarkan persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dengan persentase rumah tangga pengguna PDAM di Kabupaten Pasaman Barat, terlihat bahwa terdapat empat kecamatan yang belum terjangkau jaringan PDAM. Keempat kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Sungai Beremas, Gunung Tuleh, Kinali, dan Ranah Batahan. (Gambar 2.10).

Gambar 2.10. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Persentase Rumah Tangga Sumber Air Minum Bersih (%) dengan Persentase Rumah Tangga Pengguna PDAM Kab. Pasaman Barat, Tahun 2017

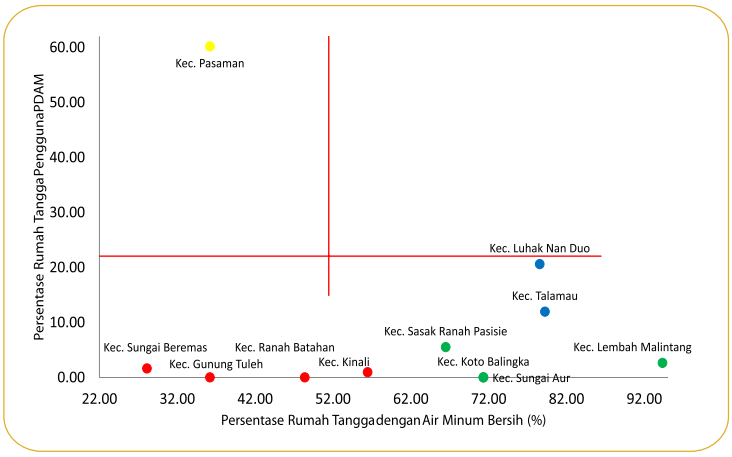

Sumber: BPS

- **Kec. Sungai Beremas, Gunung Tuleh, Ranah Batahan, dan Kinali adalah wilayah prioritas untuk peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap akses air minum.** Wilayah yang menjadi perhatian adalah Kec. Pasaman dimana persentase rumah tangga dengan air minum bersih masih rendah namun persentase pamsimas tinggi. Salah satu penyebab adalah kemungkinan budaya masyarakat yang belum menggunakan fasilitas yang ada. (Gambar 2.11).

Gambar 2.11. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Persentase Rumah Tangga Sumber Air Minum Bersih (%) dengan Persentase Rumah Tangga Pemanfaat PAMSIMAS Kab. Pasaman Barat, Tahun 2017

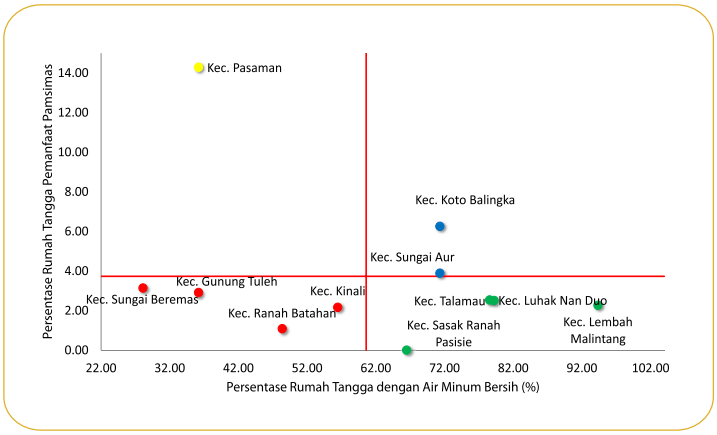

Sumber: BPS

- **Kec. Talamau, Koto Balingka, dan Kinali adalah wilayah prioritas kecamatan bantuan program penyediaan sumber air minum terlindung bagi masyarakat miskin dan rentan.** Hampir lebih dari setengah penduduk miskin dan rentan di beberapa kecamatan di Pasaman Barat tidak memiliki akses sumber air minum terlindung (air kemasan, air ledeng, dan sumur terlindung). Kelompok inilah yang menjadi kelompok prioritas intervensi untuk penyediaan air minum layak, baik berupa penyediaan air minum pedesaan (PAMSIMAS), air ledeng melalui PDAM, sumur bor, atau sumber air terlindung lainnya. Kecamatan Kinali adalah wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin dan rentan

terbanyak, yaitu 3,546 atau sekitar 56% rumah tangga tidak memiliki akses sumber air minum terlindung, terutama di Nagari Kinali. Sedangkan Kecamatan Talamau adalah wilayah dengan proporsi rumah tangga miskin dan rentan terbanyak, yaitu 64,25% tidak memiliki akses air minum terlindung dengan jumlah sebanyak 3.364 rumah tangga tersebar di Nagari Kajai dan Talu. (Gambar 2.12 dan Gambar 2.13).

Gambar 2.12. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan dengan Sumber Air Minum Tidak Terlindung (%), 2015

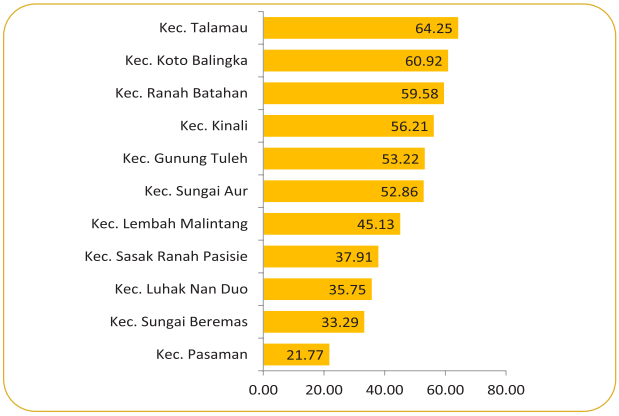

Sumber: BDT 2015

Gambar 2.13. Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rentan dengan Sumber Air Minum Tidak Terlindung (%), 2015

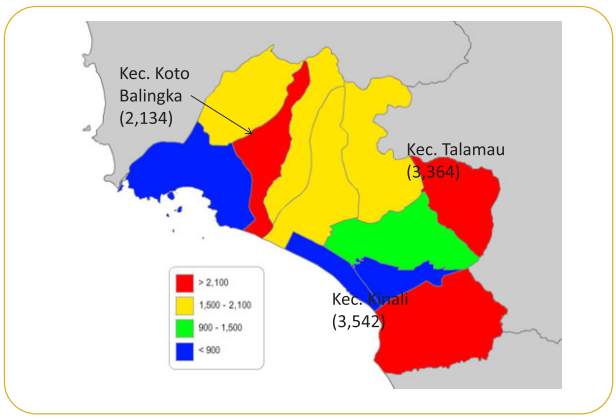

Sumber: BDT 2015

C.2. Prioritas Wilayah Intervensi Peningkatan Akses Sanitasi Layak

Karena keterbatasan data yang tersedia untuk akses sanitasi di tingkat kecamatan, maka digunakan pendekatan dengan menggunakan data persentase rumah tangga miskin dan rentan (desil 1-4) yang tidak memiliki akses sanitasi (ketersediaan fasilitas BAB dan tempat pembuangan akhir tinja) yang bersumber dari data BDT 2015. Sehingga penerima manfaat dari intervensi ini akan diprioritaskan kepada kelompok rumah tangga miskin dan rentan. Adapun masing-masing prioritas wilayah tersebut dijelaskan berikut ini:

- **Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman, dan Talamau adalah wilayah prioritas untuk program bantuan pembangunan sanitasi layak.** Rumah tangga miskin dan rentan di Pasaman Barat yang telah memiliki jamban sendiri masih kurang dari 50% Sedangkan untuk penggunaan pembuangan dengan tangki septik/SPAL rata-rata hanya 10,31%. Berdasarkan hasil analisis wilayah prioritas, terdapat tiga wilayah dengan zona merah dimana persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dan saluran tanki septik relatif terendah. Ketiga kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Talamau, Gunung Tuleh dan Pasaman. (Gambar 2.14).

Gambar 2.14. Pengelompokan Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memiliki Jamban Sendiri dan Tangki Septik/SPAL (%)

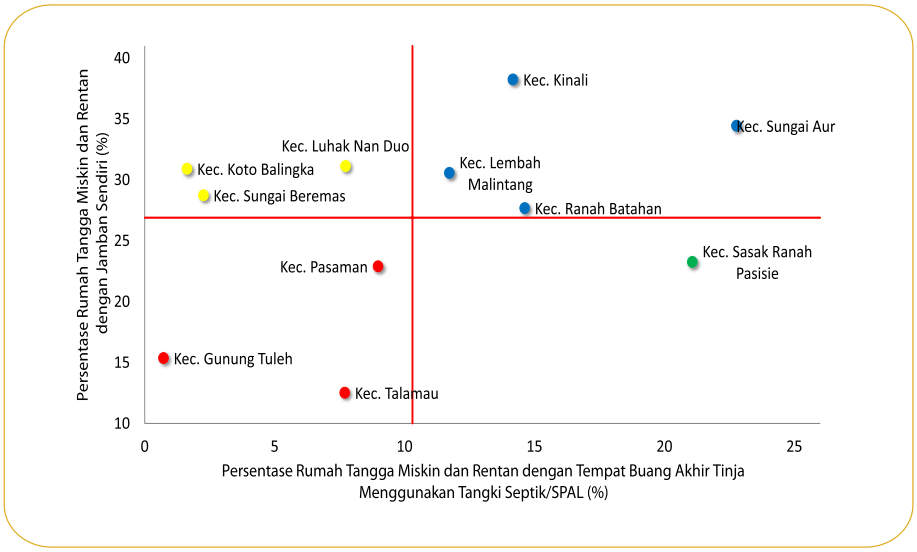

Sumber: BDT, 2015

D. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN

Analisis belanja bidang infrastruktur dasar, terutama penyediaan sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat dilakukan untuk melihat program/kegiatan yang diduga memiliki daya ungkit terbesar terhadap pencapaian tujuan akhir, serta melihat pemanfaatan anggaran pada program/ kegiatan tersebut dalam 4 (empat) tahun terakhir, yakni tahun 2014-2017. Terdapat program prioritas yang berkaitan untuk peningkatan akses sumber air minum dan sanitasi yang layak yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Sanitasi dan Air Minum di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2014-2017

Arah Kebijakan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan	Organisasi Pemda
Peningkatan sarana dan prasarana dasar kawasan perumahan dan permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dan memadai	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Pengembangansistem distribusi air minum • Penyediaan prasarana dan sarana air minum masyarakat berpenghasilan rendah • Pembangunan jaringan air bersih/minum • Dana operasional dana daerah untuk program pamsimas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan • Peningkatan mutu pelayanan badan pengelola sarana air bersih pasca konstruksi (Pamsimas)	Badan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Kerjasama Pembangunan • Koordinasi kegiatan pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan	Bappeda
		Program Per encanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam • Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Bappeda
	Persentase akses sanitasi layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) • Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Kerjasama Pembangunan • Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Bappeda
		Program perencanaan sosial dan budaya • Memorandum program sanitasi	Bappeda

Sumber: Dokumen APBD 2014-2017 dan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2021

D.1. Belanja Program untuk Sarana Air Bersih dan Sanitasi[4]

Sekitar 10 persen alokasi belanja Dinas Pekerjaan Umum digunakan untuk penyediaan air sarana dan prasarana air minum dan air limbah. Berdasarkan penelusuran program/kegiatan dalam dokumen anggaran belanja terkait dengan sarana air bersih dan sanitasi, terlihat bahwa Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah adalah salah satu program yang hampir setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah Pasaman Barat. Pada tahun 2017 program ini dianggarkan sebesar Rp 15,69 miliar atau sekitar 7,36% dari total belanja di Dinas PU. Sedangkan program terbesar yang dialokasikan oleh Dinas PU, yaitu 56,41% digunakan untuk program pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 120,3 miliar. (Gambar 2.15).

Gambar 2.15. Komposisi Alokasi Belanja Program Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2017

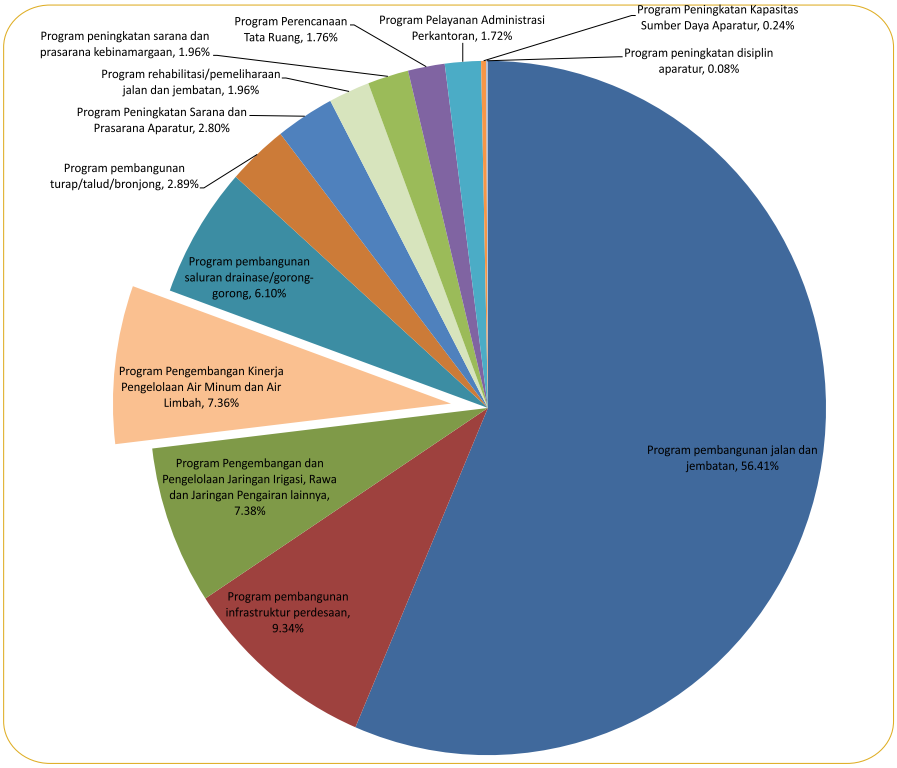

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

Namun, sebagian program/kegiatan terkait dengan sarana air bersih dan sanitasi juga dianggarkan oleh Dinas lain selain Dinas Pekerjaan Umum. Penyediaan air bersih juga dianggarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk kegiatan Peningkatan mutu pelayanan Badan Pengelola Sarana Air Bersih Pasca Konstruksi (Pamsimas) sebesar Rp 183,6 juta di bawah program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Sedangkan untuk sanitasi, terdapat alokasi belanja walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu Rp 44 juta untuk kegiatan fasilitasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di bawah kewenangan Bappeda dalam program kerjasama pembangunan. Sedangkan, untuk program/kegiatan di Dinas Perumahan dan Permukiman tidak ditemukan belanja program yang terkait langsung untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di tahun 2017.

[4] Analisis belanja dalam kasus ini menggunakan data alokasi belanja APBD dan tidak menggunakan data realisasi dikarenakan terbatasnya data yang tersedia . Dokumen laporan realisasi yang diperoleh saat penulisan belum mencerminkan keseluruhan besar pengeluaran realisasi belanja pemerintah selama tahun 2017.

Indikator capaian air bersih dan sanitasi meningkat seiring dengan peningkatan alokasi belanja untuk program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Berdasarkan nilai rill, terlihat tren peningkatan alokasi belanja untuk program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, kecuali pada tahun 2016 karena adanya pemotongan anggaran. Indikator capaian yang paling berdampak dari pemotongan anggaran tersebut adalah indikator persentase rumah tangga terhadap akses BAB atau sanitasi. Namun seiring peningkatan alokasi di tahun 2017, capaian sanitasi ini pun kembali sedikit meningkat dari sebelumnya 59,98% menjadi 60,01%. Meskipun, angkanya belum kembali seperti sebelumnya di tahun 2015, yaitu 64,06% rumah tangga memiliki akses fasilitas BAB. Salah satu penyebabnya lambatnya capaian ini adalah karena tingginya laju pertumbuhan penduduk dan rumah tangga di Pasaman Barat sehingga kebutuhan fasilitas sanitasi pun meningkat. (Gambar 2.16).

Gambar 2.16. Analisis Relevansi Program dan Indikator Sumber Air Minum Bersih dan Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat

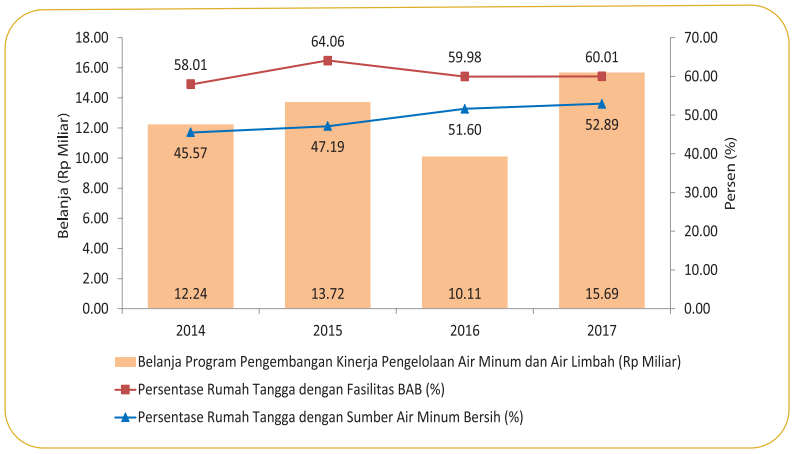

Sumber: BPS dan APBD Harga Konstan 2017=100

Komposisi belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015. Apabila dilihat dari perkembangan komposisi belanja program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah selama tahun 2014-2017, terlihat proporsi belanja modal meningkat cukup signifikan di tahun 2015 menjadi 48,8% dari sebelumnya 33,0% di tahun 2014. Sebaliknya belanja barang dan jasa dan honor pegawai mengalami penurunan. Tercatat pada 2017, nilai nominal belanja modal sebesar Rp 8 miliar atau 51,6% dari total belanja program. (Gambar 2.17).

Gambar 2.17. Alokasi Belanja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat

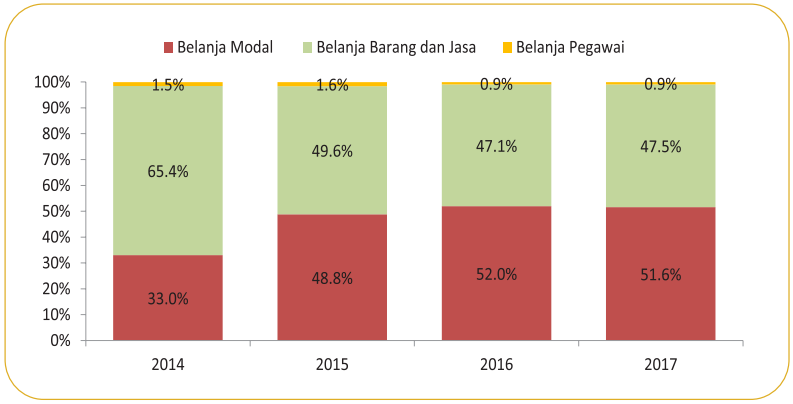

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

Sebagian besar alokasi belanja program digunakan untuk belanja penyediaan distribusi air minum. Selama tahun 2014-2017 sebagian besar belanja kegiatan digunakan untuk penyediaan air bersih. Pada tahun 2014, nama kegiatan tersebut adalah pembangunan jaringan air bersih/ air minum (46,51%). Kemudian di tahun 2015-2017 nama kegiatannya adalah pengembangan sistem distribusi air minum dengan komposisi di tahun 2017 sebesar 52,42% atau sebesar Rp 8,2 miliar, dimana 98% dari alokasi tersebut digunakan sebagai belanja modal. Sedangkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah senilai Rp 5,9 miliar (37,78%), serta penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 1,5 miliar (9,80%) digunakan untuk membiayai belanja operasional barang dan jasa, serta honor. (Gambar 2.18 dan Gambar 2.19).

Gambar 2.18. Alokasi Belanja Kegiatan pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Pasaman Barat

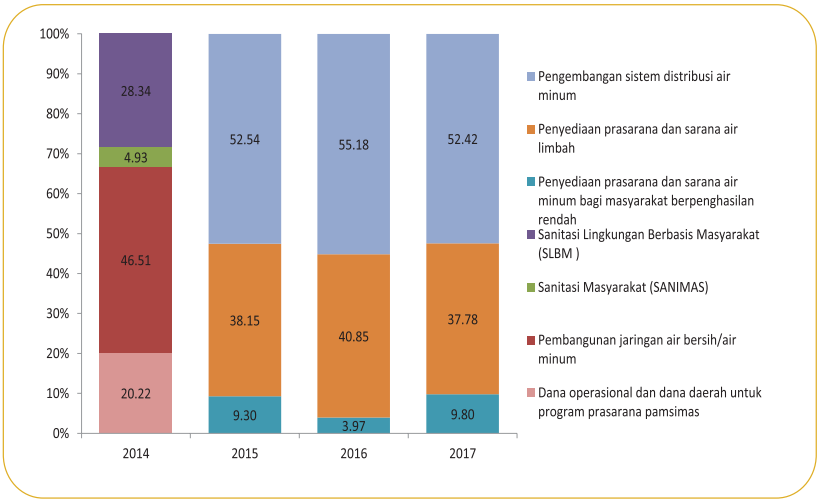

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

Gambar 2.19. Komposisi Belanja Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Pasaman Barat per Klasifikasi Ekonomi, Tahun 2017

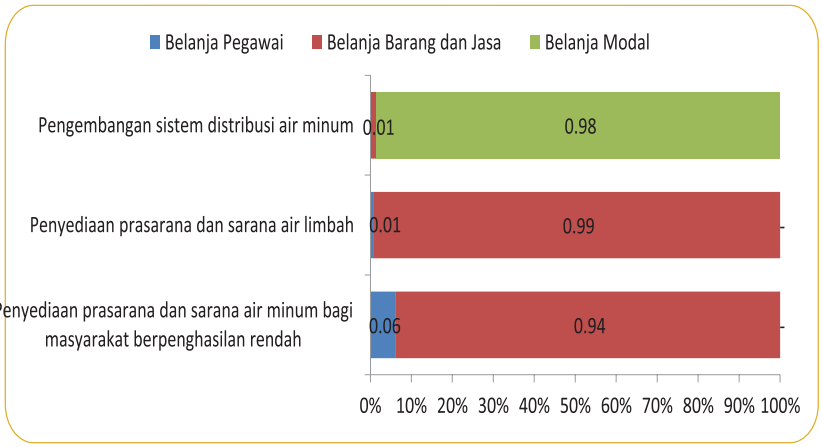

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

E. EVALUASI LOKUS PROGRAM DAN BELANJA APBD

Alokasi belanja penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah sudah sesuai dengan prioritas lokasi wilayah. Apabila dilihat rencana alokasi belanja tahun 2018, terlihat bahwa pemerintah daerah sudah sesuai mengalokasikan anggaran di wilayah prioritas berdasarkan hasil analisis sebelumnya (Gambar 2.12). Namun, pengalokasian masih terlihat berdasarkan pembagian yang sama rata belum disesuaikan berdasarkan pada kebutuhan. Oleh karena itu selanjutnya, pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam jangka panjang (muti-year) untuk dapat mendanai wilayah prioritas secara tuntas. (Tabel 2.3)

Tabel 2.3. Lokasi Kegiatan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2018

No	Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*				2,745,000,000	APBD
1	Pembangunan Baru Sharing APBD Jor. Huta Tongga Nagari Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	1 Paket	245,000,000	APBD
2	Pembangunan Baru Sharing APBD Jor. Bulu Laga Nagari Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	1 Paket	140,000,000	APBD
3	Pembangunan Baru Sharing APBD Dusun Banjar Jaya Jor. Suko Rejo Desa baru	Ranah Batahan	1 Paket	245,000,000	APBD
4	Pembangunan Baru Sharing APBD Jor.Sigantang	Ranah Batahan	1 Paket	245,000,000	APBD
5	Pembangunan Baru Sharing APBD Jor. Siduampan, Nagari Parit	Koto Balingka	1 Paket	245,000,000	APBD
6	Pembangunan Baru Sharing APBD Dusun Trans Aek Garingging, Nagari Parit	Koto Balingka	1 Paket	245,000,000	APBD
7	Pembangunan Baru Sharing APBD Dusun Limau Puruik Jor Pasar Lamo	Talamau	1 Paket	245,000,000	APBD
8	Pembangunan Baru Sharing APBD Dusun Kampung Bangkok Jor. Kemajuan Nag. Sinuruik	Talamau	1 Paket	245,000,000	APBD
9	Pembangunan Baru Sharing APBD Dusun Kampung Lamo Jor. Timbo abu	Talamau	1 Paket	245,000,000	APBD
10	Pembangunan Baru Sharing APBD Dusun Tanjung Medan Jor. Bandua Balai Nagari Kinali	Kinali	1 Paket	245,000,000	APBD
11	Hibah Air Minum Pedesaan (OBA)	Kab. Pasaman Barat	200 Paket	400,000,000	APBD

* Tujuan: terbangunnya Prasarana Jaringan Air Bersih (Pipa, Intake, Reservoir dan HU), perencanaan dan pengawasan air bersih

Sumber: Rancangan Renja Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Tahun 2018
Hasil Review Terhadap Perancangan Awal RKPD 2018

Sebagian wilayah prioritas untuk pengembangan distribusi jaringan air minum dan pamsimas sudah teralokasikan dalam alokasi anggaran 2018. Kec. Sungai Beremas, Gunung Tuleh, Ranah Batahan, dan Kinali adalah empat kecamatan yang belum terjangkau jaringan PDAM dan masuk sebagai wilayah prioritas untuk perluasan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap akses air minum (PAMSIMAS). Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2018, masih terdapat daerah prioritas yang belum teralokasikan anggaran, yaitu di wilayah Kecamatan Sungai Beremas untuk pembangunan PDAM. Begitu juga Gunung Tuleh dan Kinali untuk kegiatan pamsimas. (Tabel 2.4 dan Tabel 2.5).

Tabel 2.4. Lokasi Kegiatan untuk Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2018

No	Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum*				11,050,000,000	APBD
1	Lanjutan Pembangunan Jaringan Air Bersih di Jorong Silaping	Ranah Batahan	1 Paket	2,000,000,000	APBD
2	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Jorong Mulyorejo	Ranah Batahan	1 Paket	1,150,000,000	APBD
3	Pembangunan Jaringan Air Bersih Pondok	Sasak Ranah Pasisie	1 Paket	500,000,000	APBD
4	Pembangunan Jaringan Air Bersih Banda Baru	Sasak Ranah Pasisie	1 Paket	250,000,000	APBD
5	Rehab Berat Pipa Jaringan Induk BP SPAM Nagari Kinali	Kinali	1 Paket	300,000,000	APBD
6	Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun I dan II Tandikek	Kinali	1 Paket	800,000,000	APBD
7	Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun I, II dan III wonosari	Kinali	1 Paket	800,000,000	APBD
8	Pembangunan Jaringan Air Bersih Kartini	Gunung Tuleh	1 Paket	500,000,000	APBD
9	Pembangunan Jaringan Air Bersih Guo	Gunung Tuleh	1 Paket	400,000,000	APBD
10	Pembangunan Jaringan Air Bersih sei. Magelang	Gunung Tuleh	1 Paket	350,000,000	APBD
11	Pembangunan Jaringan Air Bersih dari Trans Muara Kiawai ke kampung Alang	Gunung Tuleh	1 Paket	350,000,000	APBD
12	Pembangunan Jaringan Air Bersih Rabijonggor Bandar	Gunung Tuleh	1 Paket	450,000,000	APBD
13	Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung sudut	pasaman	1 Paket	500,000,000	APBD
14	Pembangunan Jaringan Air Bersih Aia Gadang	pasaman	1 Paket	500,000,000	APBD
15	PembangunanJaringan Air Bersih Situak lotok	lembah melintang	1 Paket	1,000,000,000	APBD
16	Pembangunan Jaringan Air Bersih Lubuk Alai	lembah melintang	1 Paket	250,000,000	APBD
17	Lanjutan Pembangunan Jaringan Air Bersih Pegambiran	Koto Balingka	1 Paket	250,000,000	APBD
18	Pembangunan Jaringan Air Bersih Lubuk Gadang	Koto Balingka	1 Paket	700,000,000	APBD

** Tujuan: terbangunnya Prasarana Jaringan Air Bersih (Pipa, Intake, Reservoir dan HU), perencanaan dan pengawasan air bersih*

Tabel 2.5. Lokasi Kegiatan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2018

No	Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan				**1,260,000,000**	**APBD**
1	Pembangunan Sarana air Bersih PAMSIMAS B. Gunung	Koto Balingka	1 Paket	450,000,000	APBD
2	Peningkatan Sumber Air Pamsimas Tombang Padang	Koto Balingka	1 Paket	250,000,000	APBD
3	Peningkatan Sumber Air PAMSIMAS Tolang Lama Batahan	Ranah Batahan	1 Paket	120,000,000	APBD
4	Peningkatan Sumber Air Pamsimas Jor. Gunung Tua	Ranah Batahan	1 Paket	120,000,000	APBD
5	Peningkatan Sumber Air Pamsimas Jor.Pigogah Patibubur	Sungai Beremas	1 Paket	120,000,000	APBD
6	Peningkatan Sumber Air Pamsimas Jor.Rao Rao	Ranah Batahan	1 Paket	200,000,000	APBD

Sumber: Rancangan Renja Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Tahun 2018 Hasil Review Terhadap Perancangan Awal RKPD 2018

F. EVALUASI PENERIMA MANFAAT PROGRAM

Manfaat dari belanja penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi berpenghasilan rendah belum dapat dimanfaatkan secara merata terutama bagi kelompok miskin. Berdasarkan analisis manfaat dari belanja yang dikeluarkan pemerintah belum terlihat hasil manfaat yang merata didapatkan masyarakat terutama pada kelompok kuantil 1 (termiskin). Pada tahun 2017, rumah tangga yang telah mendapatkan akses sumber air minum bersih hanya sekitar 40,02% dengan besar pengeluaran pemerintah yang telah termanfaatkan oleh kelompok kuantil 1, yaitu sekitar Rp 88 juta. Angka ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian cakupan air minum bersih pada kelompok rumah tangga kuantil 5 (terkaya) di Kabupaten Pasaman Barat. (Tabel 2.5)

Tabel 2.6. Analisis Penerima Manfaat Belanja Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017

Kuantil	Persentase RT dengan Sumber Air Minum Bersih (%)	∑ (%)	Persentase Manfaat Rill (%)	Alokasi Belanja (Rupiah)	Alokasi Belanja Per Kuantil (Rupiah)
Termiskin	40.02	40.02	5.77	1,537,602,000	88,714,202
2	45.02	85.04	12.26	1,537,602,000	188,512,138
3	43.97	129.01	18.60	1,537,602,000	285,982,489
4	54.11	183.12	26.40	1,537,602,000	405,930,652
Terkaya	73.32	256.44	36.97	1,537,602,000	568,462,519
	52.89	693.63	100.00		1,537,602,000

Sumber: APBD dan BPS

G. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi kebijakan yang diperlukan berdasarkan hasil analisis, yaitu:

- Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembangunan sanitasi, pipanisasi air bersih dan air minum, termasuk pembangunan rumah layak huni dan pengembangan rumah sehat terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan.
- Program dan kegiataan infrastruktur yang telah diagendakan dan dialokasikan dalam anggaran APBD sedapat mungkin segera direalisasikan agar pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dengan kurangnya sarana dan prasarana.
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan universal akses, dimana penduduk harus mendapat akses 100 persen terhadap air minum, 0 persen terhadap luas Kawasan kumuh perkotaan, dan 100 persen akses sanitasi (100-0-100).
- Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya ini dilakukan dengan memperluas sosialisasi pentingnya PHBS dan lingkungan sehat oleh dinas-dinas terkait.
- Suatu program penyediaan air minum dan sanitasi akan efektif dan berkelanjutan bila berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Rendahnya akses air bersih dan sanitasi bersifat multi dimensi baik dari aspek infrastruktur, teknis, sosial ekonomi maupun budaya pola hidup sehat masyarakat. Sehingga, penanganannya juga harus dilakukan dengan berbagai pendekatan dan melibatkan pihak-pihak terkait baik dari pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan juga peran dari swasta melalui CSR perusahaan.

BAB 3

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DI PASAMAN BARAT

A. ISU STRATEGIS SEKTOR PENDIDIKAN

Rata-rata penduduk di Kabupaten Pasaman Barat belum mencapai target pendidikan minimal 9 tahun. Berdasarkan data tahun 2017, tercatat rata-rata lama sekolah penduduk Pasaman Barat, yaitu 7,85 tahun. Artinya, rata-rata penduduk telah lulus sekolah dasar SD namun tidak melanjutkan/tidak tamat pendidikan menengah pertama setaraf SMP. Angka ini masih relatif rendah dibandingkan angka capaian Provinsi Sumatera Barat (8,72 tahun) dan nasional (8,10 tahun). Selain itu, jika dilihat dari perkembangannya tidak mengalami kenaikan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. (Gambar 3.1 dan Gambar 3.2).

Gambar 3.1. Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

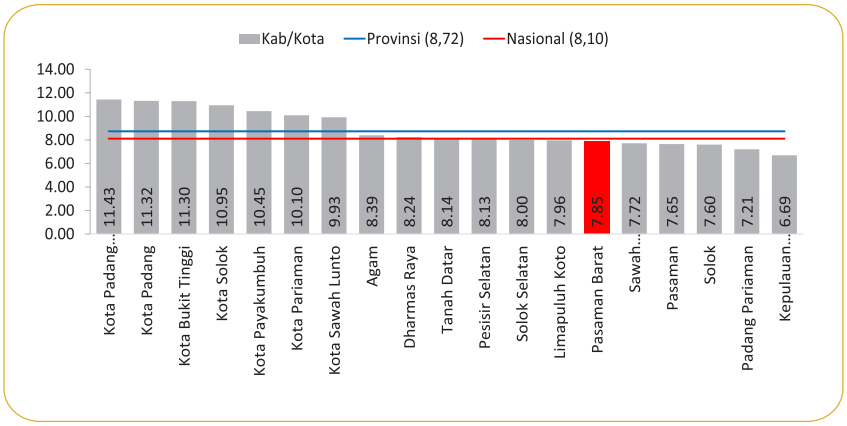

Sumber: BPS

Gambar 3.2. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat

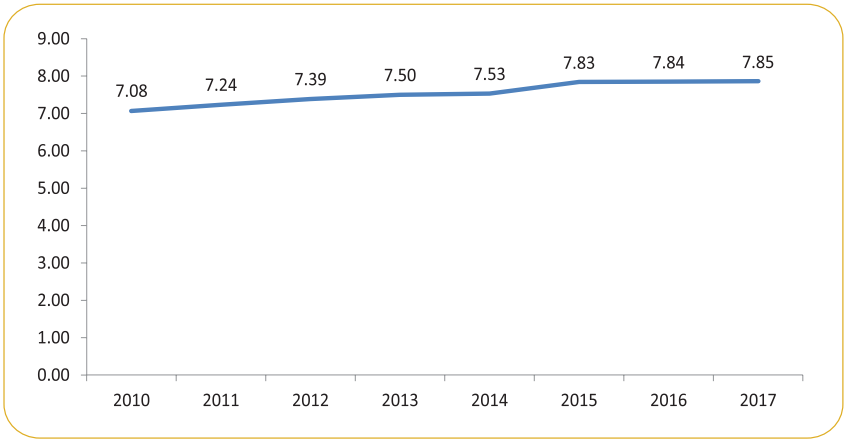

Sumber: BPS

Partisipasi perempuan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2017, angka partisipasi pendidikan baik APK maupun APM menunjukkan bahwa partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan capaian APK pada tingkat sekolah SD untuk perempuan (113,90%) dan laki-laki (112,38%). Pada tingkat setaraf SMP, APK perempuan (99,75%) dan laki-laki (98,28%). Lalu untuk tingkat setaraf SMA, APK perempuan (74,64%) dan laki-laki (87,32%). Begitu juga dengan capaian APM dimana perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu APM SD perempuan (99,75%) sedangkan laki-laki (98,28%).

Setingkat SMP, APM untuk perempuan (86,69%) dan laki-laki (80,79%). Kemudian, APM pada jenjang setaraf SMA untuk perempuan (72,34%) dan laki-laki (64,19%). Salah satu faktor lebih rendahnya partisipasi laki-laki terutama pada jenjang pendidikan menengah adalah karena masalah ekonomi dan budaya Minang seperti budaya merantau ke kota lain untuk bekerja. (Gambar 3.3).

Gambar 3.3. Komposisi APK dan APM Berdasarkan Jenis Kelamin

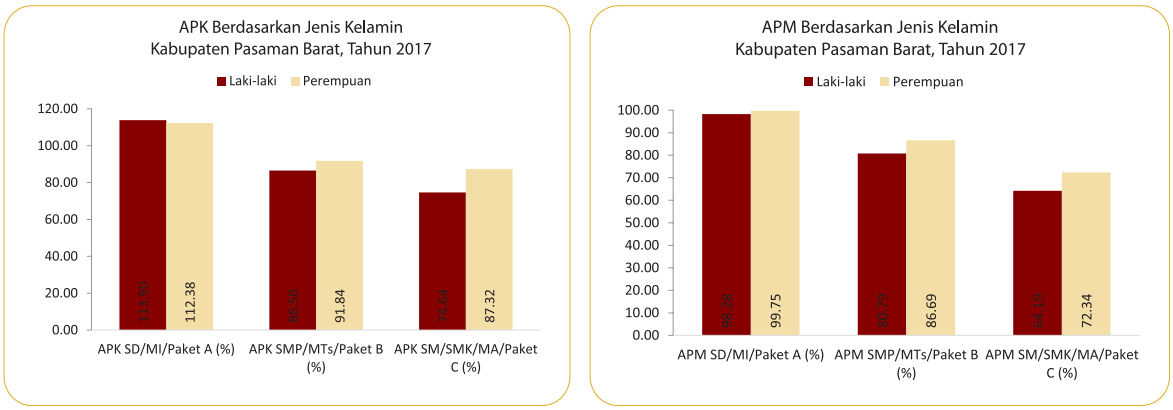

Sumber: BPS

Rata-rata nilai ujian meningkat baik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pada Tahun 2015, Rata-rata nilai UN SD/MI Kabupaten Pasaman Barat adalah 67,66 meningkat menjadi 68,29 pada Tahun 2016 dan 70,26 pada Tahun 2017. Angka rata-rata nilai UN SD/MI Kab.Pasaman Barat ini berada di bawah Rata-Rata Nilai UN SD/MI Provinsi Sumatera Barat yaitu 75,22. Kab.Pasaman Barat beragam. Pada Tahun 2015 Rata-rata Nilai UN SMP/MTs adalah 48,70 dan mengalami penurunan pada Tahun 2016 yaitu 46,74. Pada Tahun 2017 meningkat kembali menjadi 47,51. Angka rata-rata nilai UN SMP/MTs Kab.Pasaman Barat ini berada di bawah Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs Provinsi Sumatera Barat yaitu 51,37. Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2016-2021 yang menargetkan angka Rata-Rata Nilai UN SD/MI yaitu 80,00 dan Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs adalah 75, maka berdasarkan penjelasan diatas, Rata-Rata Nilai UN Kab.Pasaman Barat Tingkat SD/MI dan Tingkat SMP/MTs masih jauh dibawah target RPJMD. (Gambar 3.4 dan Gambar 3.5).

Gambar 3.4. Perkembangan Rata-Rata Nilai UN SD/MI Pasaman Barat

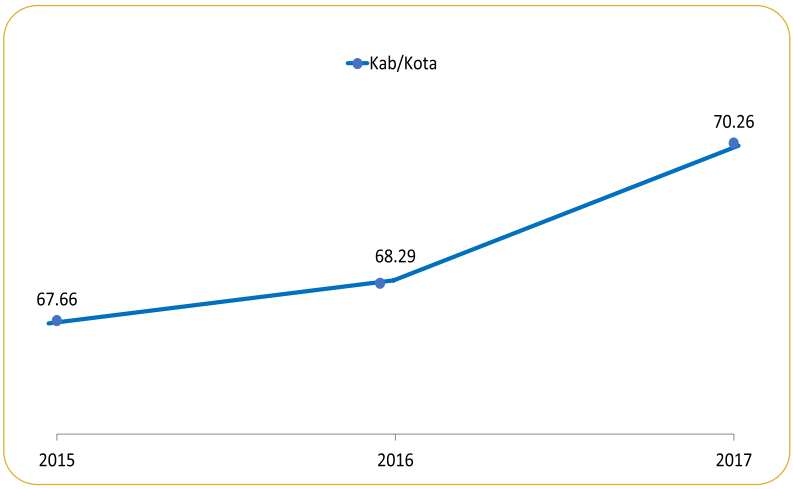

Sumber: BPS

Gambar 3.5. Perkembangan Rata-Rata Nilai UN SMP/MTS Pasaman Barat

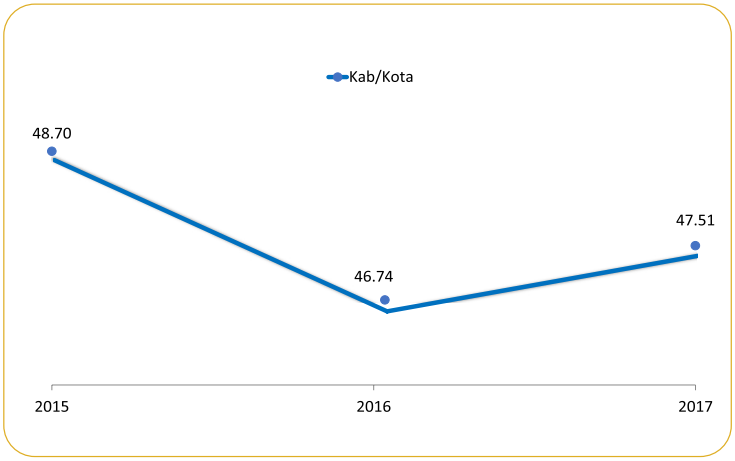

Sumber: BPS

Angka Kelulusan SD/MI Kab.Pasaman Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015, angka kelulusan tingkat SD/MI adalah 98,31% dan mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 98,25 dan 96,07% pada Tahun 2017. Angka Kelulusan SMP/MTs Kab. Pasaman Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015, angka kelulusan tingkat SMP/MTs adalah 92,21% dan mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 92,01 dan 91,37% pada Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan Target RPJMD 2016-2021 yang menargetkan Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs adalah 100%, maka dapat dilihat bahwa angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kab.Pasaman Barat belum mencapai target RPJMD. (Gambar 3.6 dan Gambar 3.7).

Gambar 3.6. Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI Pasaman Barat

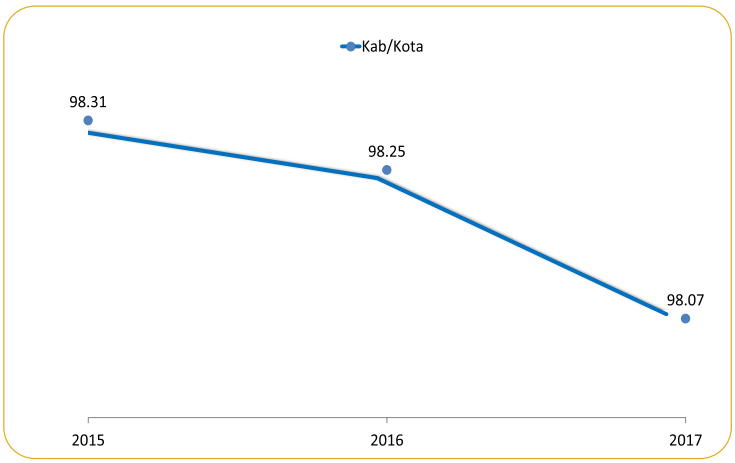

Sumber: BPS

Gambar 3.7. Perkembangan Angka Kelulusan SMP/MTS Pasaman Barat

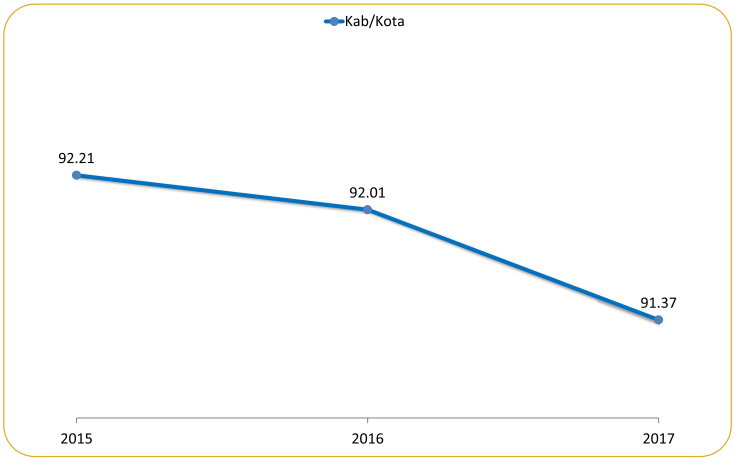

Sumber: BPS

Beberapa capaian indikator pendidikan Pasaman Barat masih perlu ditingkatkan. Mengacu pada data capaian di tahun 2017, indikator pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, yaitu seperti: indikator APK SMP/MTs/Paket B, APK SM/SMK/MA/Paket C dan kemampuan membaca dan menulis penduduk dilihat dari masih relatif tingginya Angka Buta Huruf Usia 15 tahun ke atas di Pasaman Barat[5]. APK yang rendah menunjukkan masih rendahnya penduduk usia sekolah yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan. Alasan klasik yang sering ditemukan di lapangan, yaitu rendahnya kesadaran orang tua dan kurangnya minat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah tamat sekolah dasar.

Untuk lebih jelasnya posisi 14 (empat belas) indikator utama pendidikan tersebut dapat dirangkum dalam tabel 2 berikut.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017

No	Indikator	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Target RPJMD
1	APK SD/MI /Paket A (%)	113,13	110,46	108,50	118,30
2	APK SMP/ MTs /Paket B (%)	89,00	90,40	90,23	89,94
3	APK SM /SMK /MA/Paket C (%)*	80,71	88,39	82,84	78,21
4	APM SD/MI /Paket A (%)	99,02	98,64	97,19	99,77
5	APM SMP/ MTs /Paket B (%)	83,55	76,47	78,40	78,55
6	APM SM /SMK /MA/Paket C (%)*	68,09	67,30	60,37	61,17
7	Angka Buta Huruf 15 + Tahun (%)	1,49	1,11	4,5	-
8	Angka Putus Sekolah SD / MI **	1,01	0,20	0,21	0,52
9	Angka Putus Sekolah SMP / MTs **	9,44	3,86	4,89	0,79
10	Angka Putus Sekolah SMA / MA **	25,66	17,27	28,93	*
11	Rata-Rata Nilai UN SD/MI	70,26	75,22		80,00
12	Rata-Rata Nilai UN SMP/ MTS	47,51	51,37		75,00
13	Angka Kelulusan SD/MI	98,07	100,27		100
14	Angka Kelulusan SMP/ MTS	91,37	98,97		100

Ket:
* Kewenangan SMA/SMK/MA pindah ke Provinsi semenjak tahun 2016
** Data tahun 2014

Sumber: BPS

[5] Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Sedangkan, Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai kelompok usia sekolah

B. PRIORITAS INTERVENSI

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman Barat dalam bidang pendidikan adalah masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya kualitas pendidikan. Untuk menguraikan permasalahan bidang pendidikan tersebut, maka disusun program/kegiatan yang prioritas untuk dilakukan, berdasarkan *theory of change* (ToC), (Gambar 3.8).

Gambar 3.8. *Theory of change* bidang pendidikan Pasaman Barat

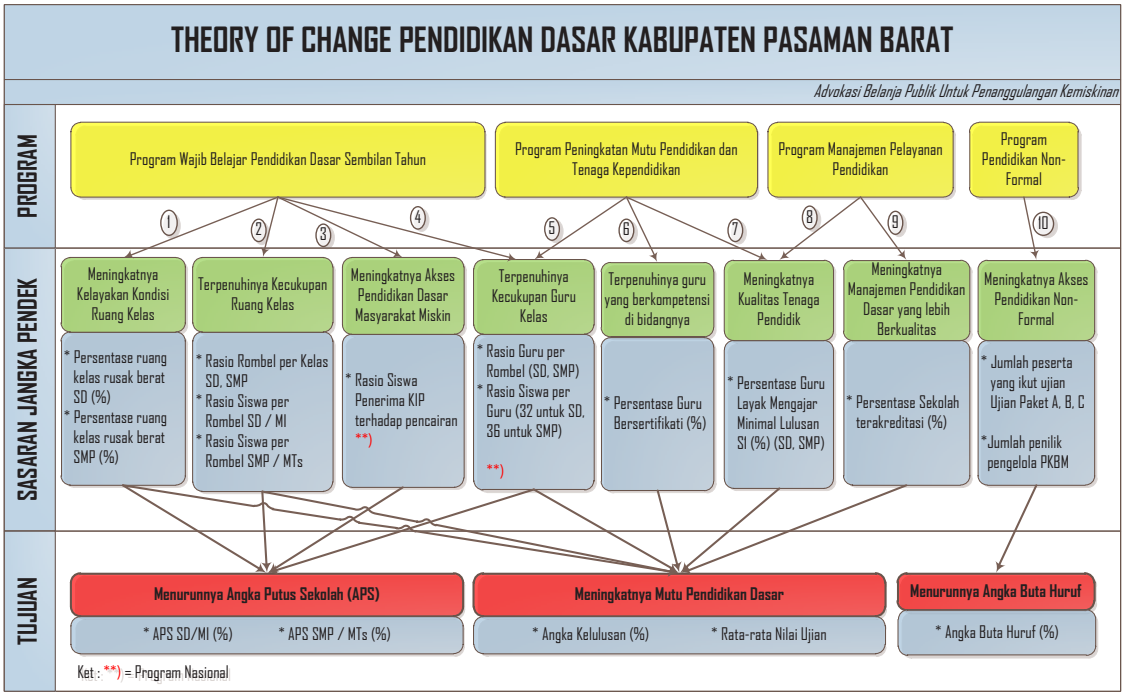

Keterangan :

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

2a. Pembangunan gedung sekolah

2b. Penambahan ruang kelas baru

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

6b. Penilaian Kinerja Guru*

7a. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

7b. Kenaikan pangkat fungsional guru dan pamong belajar*

7c. Pelatihan Peningkatan Mutu Guru Kelas Untuk Mata Pelajaran UN dan Guru SD Pembina

7d. Pelatihan lembaga-lembaga kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8. Seleksi guru dan kepala Sekolah dan Pengawas TK,SD,SMP,SMA dan SMK berprestasi 2013*

9a. Pengembangan Kurikulum

9b. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

9c. Manajemen BOS*

9d. Pengelolaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

9e. Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Informasi dan Teknologi IT*

Program Pendidikan Non Formal

10a. Pelaksanaan Pendidikan Paket A,B dan C*

10b. Pelaksanaan ujian paket A,B dan C*

10c. Pemberantasan buta aksara

10d. Pengembangan minat dan budaya baca

10e. Supevisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat

10f. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

10g. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

10h. Pelayanan Perpustakaan keliling*

B.1. Prioritas Intervensi Menurunkan Angka Putus Sekolah SD/MI

Berdasarkan ToC yang telah disusun, angka putus sekolah SD/MI dipengaruhi oleh indikator persentase ruang kelas rusak berat, rasio rombel per ruang kelas SD/MI, angka penerima PIP SD/MI, rasio guru per rombel SD/MI, serta rasio siswa per guru SD/MI. (Gambar 3.9).

Gambar 3.9. Analisis Keterkaitan Angka Putus Sekolah SD/MI dengan Indikator Pendukung

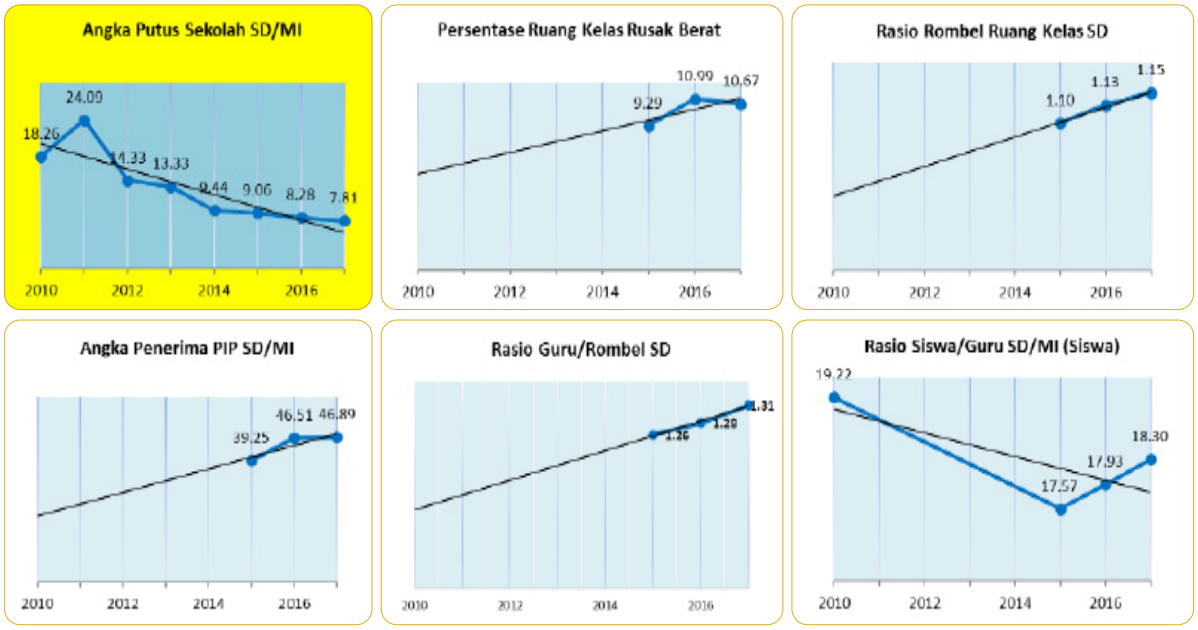

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

Menurunnya Angka Putus Sekolah SD, berkaitan dengan beberapa indikator pendukung berikut ini:

1. Persentase ruang kelas rusak berat Pasaman Barat tahun 2017 juga mengalami penurunan pada angka 10,67 persen yang pada tahun sebelumnya 10,99 persen. Keselarasan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan ruang kelas rusak berat yang ada di kabupaten Pasaman Barat.

2. Rasio rombel per ruang kelas SD Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 1,15 yang pada tahun sebelumnya 1,13. Keselarasan ini dapat dipahami bahwa program pemerintah untuk menggalakkan pendidikan wajib dasar sembilan tahun berhasil untuk meningkatkan peserta didik SD/MI yang ada. Namun, peningkatan ruang kelas SD dengan pertumbuhan anak usia SD/MI belum sebanding, sehingga meningkatkan rasio rombel per ruang kelas SD/MI.

3. Persentase angka penerima PIP SD/MI Pasaman Barat yang dicairkan tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 46,89 persen yang pada tahun sebelumnya 46,51 persen. Artinya, program pemerintah dalam memberikan beasiswa PIP bagi masyarakat miskin dapat meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu tersebut terhadap pendidikan. Peningkatan pencairan dana PIP SD/MI, secara umum juga mempengaruhi terhadap pengurangan angka putus sekolah SD/MI.

4. Rasio guru per rombel SD/MI Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 1,31 yang pada tahun sebelumnya 1,28. Hal ini dapat dikatakan selaras dalam menurunkan angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan meningkatnya rasio guru per rombel SD/MI, memberikan pemahaman bahwa terjadi peningkatan guru dalam menangani jumlah rombel yang ada, salah satu faktornya diakibatkan oleh peningkatan peserta didik dari tahun sebelumnya.

5. Rasio siswa per guru SD/MI Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 18,30 yang pada pada tahun sebelumnya pada angka 17,93. Kondisi ini menguatkan argumentasi bahwa angka putus sekolah juga dipengaruhi oleh rasio siswa per guru SD/MI. Artinya, jumlah siswa SD/MI yang ditangani oleh satu orang guru meningkat dari tahun sebelumnya. Realitanya, dapat dijelaskan bahwa terjadinya peningkatan jumlah siswa SD/MI dari tahun sebelumnya, namum belum terantisipasi dengan penambahan dari tenaga pengajar dari siswa tersebut. Namun, angka ini masih dalam batas SPM SD/MI maksimal pada angka 32 siswa per guru.

B.2. Prioritas Intervensi Menurunkan Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Berdasarkan ToC yang telah disusun, angka putus sekolah SMP/MTs dipenguruhi oleh indikator persentase ruang kelas rusak berat, rasio rombel per ruang kelas SMP/MTs, angka penerima PIP SMP/MTs, rasio guru per rombel SMP/MTs, serta rasio siswa per guru SMP/MTs. (Gambar 3.10).

Gambar 3.10. Analisis Keterkaitan Angka Putus Sekolah SMP/MTs dengan Indikator Pendukung

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2017, angka putus sekolah SMP/MTs Pasaman Barat mengalami penurunan pada angka 4,48 yang pada tahun sebelumnya pada angka 4,97. Kondisi ini sejalan dengan beberapa indikator pendukung berikut ini:

1. Persentase ruang kelas rusak berat Pasaman Barat tahun 2017 juga mengalami penurunan pada angka 10,67 persen yang pada tahun sebelumnya 10,99 persen. Keselarasan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan ruang kelas rusak berat SMP/MTs yang ada di kabupaten Pasaman Barat.

2. Rasio rombel per ruang kelas SMP/MTs Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 1,01 yang pada tahun sebelumnya 0,99. Keselarasan ini dapat dipahami bahwa program pemerintah untuk menggalakkan pendidikan wajib dasar sembilan tahun berhasil untuk meningkatkan peserta didik SMP/MTs yang ada. Namun, peningkatan ruang kelas SMP/MTs dengan pertumbuhan anak usia SMP/MTs belum sebanding, sehingga meningkatkan rasio rombel per ruang kelas SMP/MTs.

3. Persentase angka penerima PIP SMP/MTs Pasaman Barat yang dicairkan tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 69,85 persen yang pada tahun sebelumnya 68,30 persen. Artinya, program pemerintah dalam memberikan beasiswa PIP bagi masyarakat miskin dapat meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu tersebut terhadap pendidikan. Peningkatan pencairan dana PIP SMP/MTs, secara umum juga mempengaruhi terhadap pengurangan angka putus sekolah SMP/MTs.

4. Rasio guru per rombel SMP/MTs Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 2,18 yang pada tahun sebelumnya 2,14. Hal ini dapat dikatakan selaras dalam menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan meningkatnya rasio guru per rombel SMP/MTs, memberikan pemahaman bahwa guru menangani jumlah rombel yang lebih banyak yang salah satu faktornya diakibatkan oleh peningkatan peserta didik dari tahun sebelumnya. Kondisi ini kurang terantisipasi oleh kebutuhan ruang kelas baru yang belum dilakukan penambahan.

5. Rasio siswa per guru SMP/MTs Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 12,28 yang pada pada tahun sebelumnya pada angka 12,03. Kondisi ini menguatkan argumentasi bahwa angka putus sekolah juga dipengaruhi oleh rasio siswa per guru SMP/MTs. Artinya, jumlah siswa SMP/MTs yang ditangani oleh satu orang guru meningkat dari tahun sebelumnya. Realitanya, dapat dijelaskan bahwa terjadinya peningkatan jumlah siswa SMP/MTs dari tahun sebelumnya, namum belum terantisipasi dengan penambahan dari tenaga pengajar dari siswa tersebut. Namun, angka ini masih dalam batas SPM SMP/MTs maksimal pada angka 36 siswa per guru.

B.3. Prioritas Intervensi Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah SD/MI

Berdasarkan ToC yang telah disusun, angka kelulusan SD/MI dipengaruhi oleh indikator persentase ruang kelas rusak berat, rasio rombel per ruang kelas SD/MI, angka penerima PIP SD/MI, rasio guru per rombel SD/MI, persentase guru yang bersertifikasi SD/Mi, rasio siswa per guru berkualifikasi minimal S1, dan persentase SD yang terakreditasi. (Gambar 3.11).

Gambar 3.11. Analisis Keterkaitan Angka Kelulusan SD/MI dengan Indikator Pendukung

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2017, angka kelulusan SD/MI Pasaman Barat mengalami penurunan pada angka 98,07 yang pada tahun sebelumnya pada angka 98,25. Kondisi ini sejalan dengan beberapa indikator pendukung berikut:

1. Persentase ruang kelas rusak berat Pasaman Barat tahun 2017 mengalami penurunan pada angka 10,67 persen yang pada tahun sebelumnya 10,99 persen. Secara kasat mata, kondisi ini merupakan suatu anomali yang sulit untuk dipahami dengan sederhana. Namun, kondisi ini dapat dijelaskan bahwa disaat ruang kelas rusak berat menurun, maka akan meningkatnya ketersediaan ruang kelas untuk belajar yang secara tidak langsung akan berimbas terhadap tenaga pendidik yang ada. Disaat ketersediaan ruang kelas ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah guru, maka secara otomotis akan meningkatkan beban guru yang ada untuk menambah jam mengajar lebih dari sebelumnya. Penambahan jam mengajar ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi psikologis dan daya tahan mengajar dari seorang guru yang harus lebih ekstra.
2. Rasio rombel per ruang kelas SD/MI Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 1,15 yang pada tahun sebelumnya 1,13. Meningkatnya rasio rombel per ruang kelas SD/MI ternyata berkorelasi negatif dengan angka kelulusan SD/MI. Meningkatnya rombel per ruang kelas SD/MI yang melebihi angka 1, artinya satu ruang kelas dipakai untuk dua jam pelajaran yang berbeda dan/atau satu ruang kelas disekat menjadi dua kelas. Sehingganya, dengan adanya peningkatan rasio rombel per ruang kelas SD akan menurunkan kenyaman dan kebahagiaan dalam memberikan materi oleh guru serta penerimaan yang akan diterima oleh peserta didik SD/MI.
3. Persentase angka penerima PIP SD/MI Pasaman Barat yang dicairkan tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 46,89 persen yang pada tahun sebelumnya 46,51 persen. Peningkatan pencairan dana PIP SD/MI, belum dapat dijustifikasi dapat mengurangi angka kelulusan SD/MI. Secara teoritik, jika ingin melihat pengaruh pencairan dana PIP SD/MI terhadap angka kelulusan SD/MI, harus menetapkan sampel intervensi yang tetap untuk diperhatikan dalam jangka waktu selama pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan SD/MI tersebut.
4. Rasio guru per rombel SD/MI Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 1,31 yang pada tahun sebelumnya 1,28. Dengan meningkatnya rasio guru per rombel SD/MI, memberikan pemahaman bahwa terjadinya peningkatan guru dalam menangani jumlah rombel yang ada. Sehingganya, dengan banyak guru yang menangani rombel dapat dikatakan fokus mengajar dari guru yang ada kurang termotivasi karena tidak mendapatkan jam pelajaran untuk mengejar target jam mengajar minimal.
5. Persentase guru yang bersertifikasi SD/MI Pasaman Barat tahun 2017 mengalami penurunan pada angka 40,35 yang pada tahun sebelumnya pada angka 42,14. Berkurangnya persentase guru yang bersertifikasi SD/MI sangat berkorelasi positif dengan angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Pasaman Barat. Menurunnya angka kelulusan SD/MI ternyata juga dipengaruhi oleh menurunnya persentase guru yang bersertifikasi SD/Mi tersebut.

6. Rasio siswa per guru yang berkualifikasi minimal S1 Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 20,39 yang pada tahun sebelumnya pada angka 19,98. Meningkatnya rasio siswa per guru berkualifikasi minimal S1, memberikan pemahaman bahwa semakin banyaknya siswa yang ditangani oleh setiap guru yang berkualifikasi S1. Dengan semakin banyak siswa tersebut, berpengaruh buruk terhadap kualitas penyampaian materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik dan juga menurunkan kualitas penerimaan materi oleh siswa SD/MI tersebut.

7. Persentase SD terakreditasi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 mengalami penurunan pada angka 42,89 persen yang pada tahun sebelumnya pada angka 45 persen. Penurunan persentase SD terakreditasi tersebut berkorelasi positif dengan penurunan angka kelulusan SD/MI. Terakreditasinya suatu sekolah merupakan salah satu indikator dari kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

B.4. Prioritas Intervensi Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah SMP/MTs

Berdasarkan ToC yang telah disusun, angka kelulusan SMP/MTs dipenguruhi oleh indikator persentase ruang kelas rusak berat, rasio rombel per ruang kelas SMP/MTs, rasio siswa per rombel SMP, angka penerima PIP SMP/MTs, rasio guru per rombel SMP/MTs, persentase guru yang bersertifikasi SMP/MTs, rasio siswa per guru berkualifikasi minimal S1 SMP/MTs, dan persentase SMP/MTs yang terakreditasi. (Gambar 3.12).

Gambar 3.12. Analisis Keterkaitan Angka Kelulusan SMP/MTs dengan Indikator Pendukung

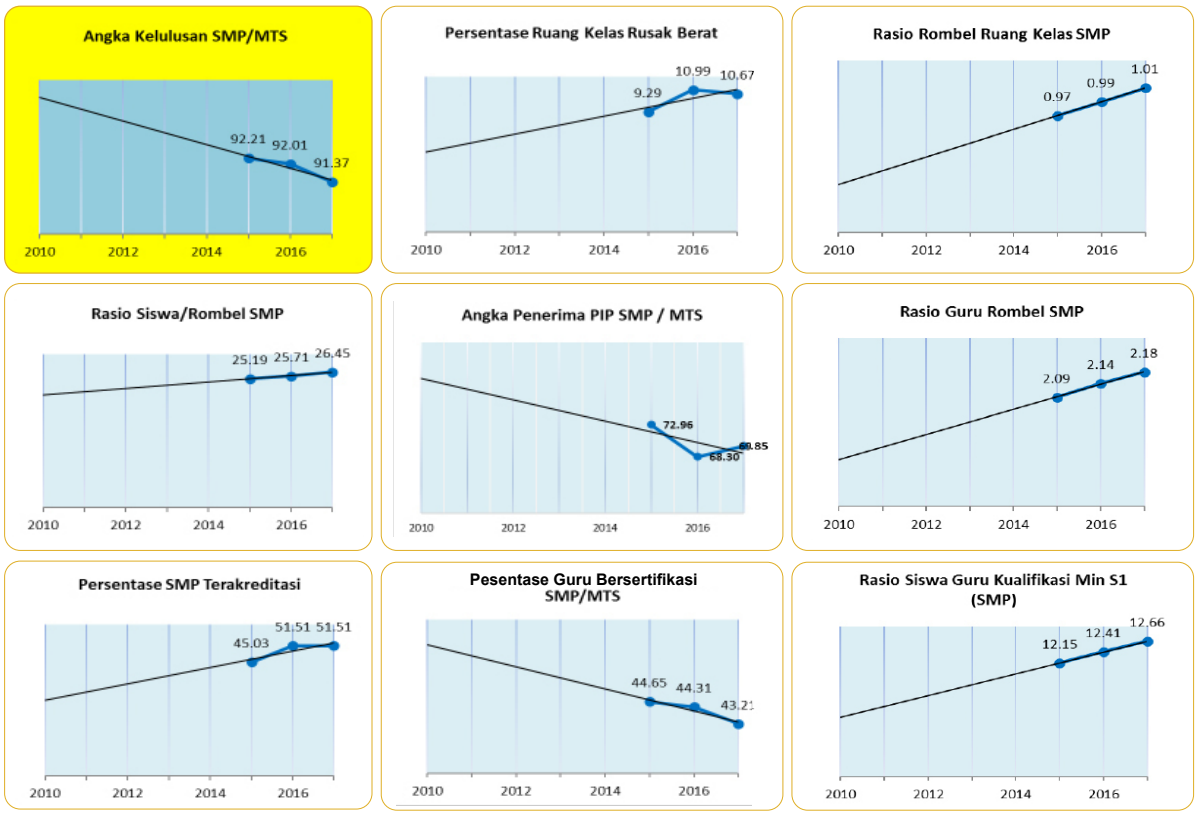

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2017, angka kelulusan SM/MTs Pasaman Barat mengalami penurunan pada angka 91,37 yang pada tahun sebelumnya pada angka 92,01. Kondisi ini sejalan dengan beberapa indikator pendukung berikut:

1. Persentase ruang kelas rusak berat Pasaman Barat tahun 2017 mengalami penurunan pada angka 10,67 persen yang pada tahun sebelumnya 10,99 persen. Secara kasat mata, kondisi ini merupakan suatu anomali yang sulit untuk dipahami dengan sederhana. Namun, kondisi ini dapat dijelaskan bahwa disaat ruang kelas rusak berat menurun, maka akan meningkatnya ketersediaan ruang kelas untuk belajar yang secara tidak langsung akan berimbas terhadap tenaga pendidik yang ada. Disaat ketersediaan ruang kelas ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah guru, maka secara otomotis akan meningkatkan beban guru yang ada untuk menambah jam mengajar lebih dari sebelumnya. Penambahan jam mengajar ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi psikologis dan daya tahan mengajar dari seorang guru yang harus lebih ekstra.
2. Rasio rombel per ruang kelas SMP/MTs Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 1,01 yang pada tahun sebelumnya 0,99. Meningkatnya rasio rombel per ruang kelas SMP/MTs ternyata berkorelasi negatif dengan angka kelulusan SMP/MTs. Meningkatnya rombel per ruang kelas SMP/MTs yang melebihi angka 1, artinya satu ruang kelas dipakai untuk dua jam pelajaran yang berbeda dan/atau satu ruang kelas disekat menjadi dua kelas. Sehingganya, dengan adanya peningkatan rasio rombel per ruang kelas SD akan menurunkan kenyaman dan kebahagiaan dalam memberikan materi oleh guru serta penerimaan yang akan diterima oleh peserta didik SMP/MTs.
3. Rasio siswa per rombel Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 26,45 yang pada tahun sebelumnya 25,71. Meningkatnya siswa per rombel SMP/MTs ternyata berkorelasi negatif dengan angka kelulusan SMP/MTs. Situasi ini dapat dipahami bahwa meningkatnya jumlah siswa per rombel akan mengurangi tingkat kenyamanan dalam proses belajar mengajar, sehingganya patut diduga akan mengurangi dalam penguasaan materi yang diterima oleh siswa SMP/MTs tesebut.
4. Persentase angka penerima PIP SMP/MTs Pasaman Barat yang dicairkan tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 69,85 persen yang pada tahun sebelumnya 68,30 persen. Peningkatan pencairan dana PIP SMP/MTs, belum dapat dijustifikasi dapat mengurangi angka kelulusan SMP/MTs. Secara teoritik, jika ingin melihat pengaruh pencairan dana PIP SMP/MTs terhadap angka kelulusan SMP/MTs, harus menetapkan sampel intervensi yang tetap untuk diperhatikan dalam jangka waktu selama pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan SMP/MTs tersebut.
5. Rasio guru per rombel SMP/MTs Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 2,18 yang pada tahun sebelumnya 2,14. Dengan meningkatnya rasio guru per rombel SMP/MTs, memberikan pemahaman bahwa terjadinya peningkatan guru dalam menangani jumlah rombel yang ada. Sehingganya, dengan banyak guru yang menangani rombel dapat dikatakan fokus mengajar dari guru yang ada kurang termotivasi karena tidak mendapatkan jam pelajaran untuk mengejar target jam mengajar minimal.

6. Persentase guru yang bersertifikasi SMP/MTs Pasaman Barat tahun 2017 mengalami penurunan pada angka 43,21 yang pada tahun sebelumnya pada angka 44,31. Berkurangnya persentase guru yang bersertifikasi SMP/MTs sangat berkorelasi positif dengan angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Pasaman Barat. Menurunnya angka kelulusan SMP/MTs ternyata juga dipengaruhi oleh menurunnya persentase guru yang bersertifikasi SMP/MTs tersebut.
7. Rasio siswa per guru yang berkualifikasi minimal S1 SMP Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 12,66 yang pada tahun sebelumnya pada angka 12,41. Meningkatnya rasio siswa per guru berkualifikasi minimal S1, memberikan pemahaman bahwa semakin banyaknya siswa yang ditangani oleh setiap guru yang berkualifikasi S1 ditingkat SMP/MTs. Dengan semakin banyak siswa tersebut, berpengaruh buruk terhadap kualitas penyampaian materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik dan juga menurunkan kualitas penerimaan materi oleh siswa SMP/MTs tersebut.
8. Persentase SMP/MTs terakreditasi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 sama dengan tahun 2016 pada angka 51,51 persen. Sehingganya, kondisi ini belum dapat dijustifikasi secara final, harus mendapatkan informasi lanjutan dengan data series yang lebih lama.

C PRIORITAS WILAYAH

C.1. Wilayah Prioritas Intervensi untuk Menurunkan Angka Putus Sekolah SD

- Kecamatan Pasaman, Sungai Aur dan Sasak Ranah Pasisie adalah wilayah prioritas untuk perbaikan ruang kelas rusak.
- Kecamatan Sungai Beremas, Sungai Aur dan Pasaman merupakan wilayah prioritas untuk dilakukan intervensi penambahan ruang kelas baru.
- Tiga kecamatan yang menjadi wilayah prioritas utama intervensi untuk program PIP SD adalah Kecamatan Pasaman, Luhak Nan Duo dan Sungai Aur.
- Kemudian, jika dikaitkan dengan rasio siswa per guru SD maka Kecamatan Pasaman, Sasak Ranah Pasisie dan Luhak Nan Duo adalah prioritas wilayah untuk penambahan tenaga guru.

Gambar 3.13. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar

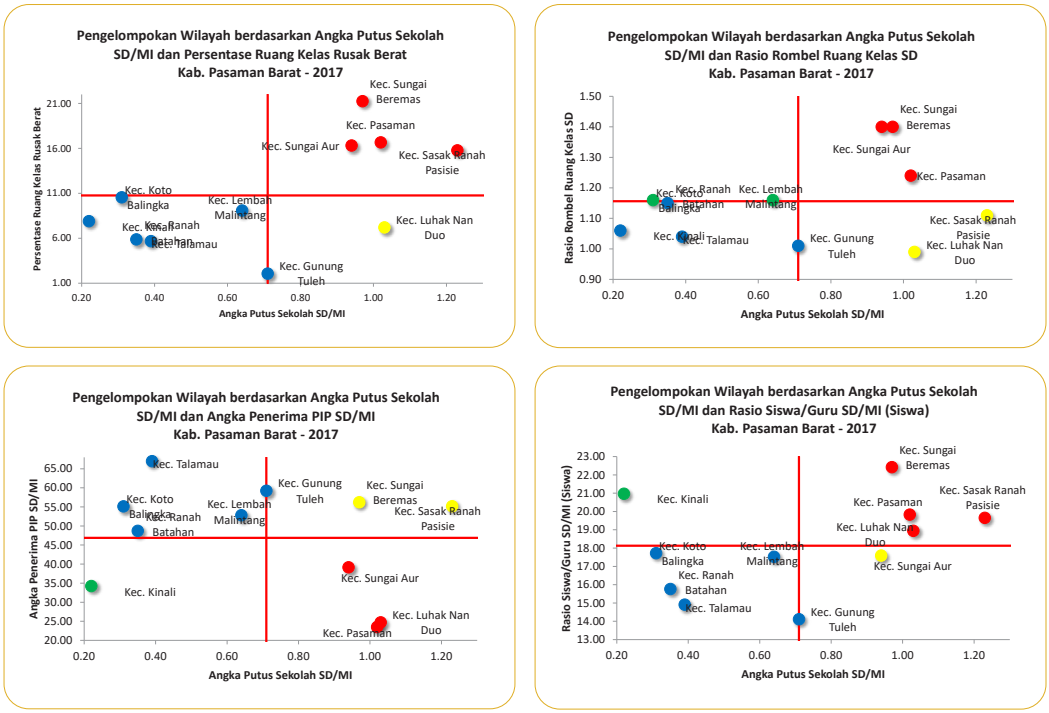

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

C.2. Wilayah Prioritas Intervensi untuk Menurunkan Angka Putus Sekolah SMP

- Kecamatan Sungai Aur dan Sasak Ranah Pasisie adalah wilayah prioritas untuk perbaikan ruang kelas.
- Berdasarkan rasio rombel per ruang kelas, maka wilayah prioritas untuk penambahan ruang kelas baru adalah Kecamatan Lembah Melintang, Luhak Nan Duo, Sungai Beremas, dan Sasak Ranah Pasisie.
- Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Lembah Melintang, dan Luhak Nan Duo adalah wilayah prioritas untuk program PIP SMP
- Wilayah prioritas untuk penambahan jumlah tenaga guru, yaitu Kecamatan Lembah Melintang, Luhak Nan Duo, Sungai Beremas, dan Ranah Batahan.

Gambar 3.14. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Angka Putus Sekolah SMP

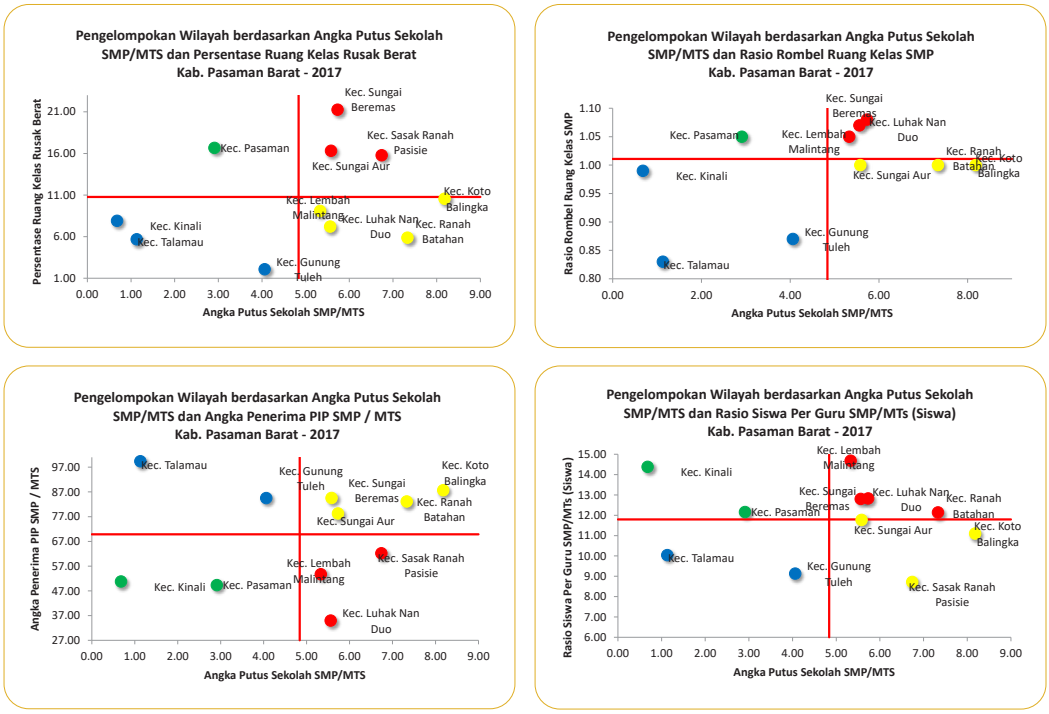

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

C.3. Wilayah Prioritas Intervensi untuk Meningkatkan Angka Kelulusan SD

- Kecamatan Pasaman dan Sasak Ranah Pasisie untuk intervensi perbaikan ruang kelas rusak berat.
- Jika dikaitkan dengan rasio rombel per ruang kelas, maka wilayah prioritas intervensi penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan kualitas proses belajar adalah Pasaman dan Koto Balingka.
- Kecamatan Pasaman dan Kinali untuk program PIP SD
- Rasio guru per rombel adalah Koto Balingka.

- Kecamatan Kinali, Sasak Ranah Pasisie, dan Koto Balingka untuk prioritas wilayah peningkatan guru yang bersertifikasi.
- Prioritas untuk meningkatkan pendidikan guru minimal S1 adalah Kecamatan Pasaman, Kinali, Sasak Ranah Pasisie, dan Koto Balingka
- Sedangkan, prioritas wilayah untuk meningkatkan status SD yang terakreditasi adalah Koto Balingka.

Gambar 3.15. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Angka Kelulusan Sekolah Dasar

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

C.4. Wilayah Prioritas Intervensi untuk Meningkatkan Angka Kelulusan SMP

- Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Sungai Aur untuk intervensi perbaikan ruang kelas rusak berat.
- Sasak Ranah Pasisie, Sungai Beremas, dan Luhak Nan Duo intervensi penambahan ruang kelas baru.
- Rasio siswa per rombel adalah Sasak Ranah Pasisie, Sungai Aur dan Sungai Beremas.
- Wilayah prioritas untuk program PIP adalah Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo, dan Kinali.
- Prioritas peningkatan guru yang bersertifikasi di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kinali, Sungai Aur dan Sungai Beremas.
- Prioritas untuk meningkatkan pendidikan guru minimal S1adalah Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo dan Sungai Beremas.
- Kecamatan Sungai Beremas, Sungai Aur dan Kinali adalah wilayah priotitas untuk peningkatkan status SMP yang terakreditasi.

Gambar 3.16. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Angka Kelulusan SMP

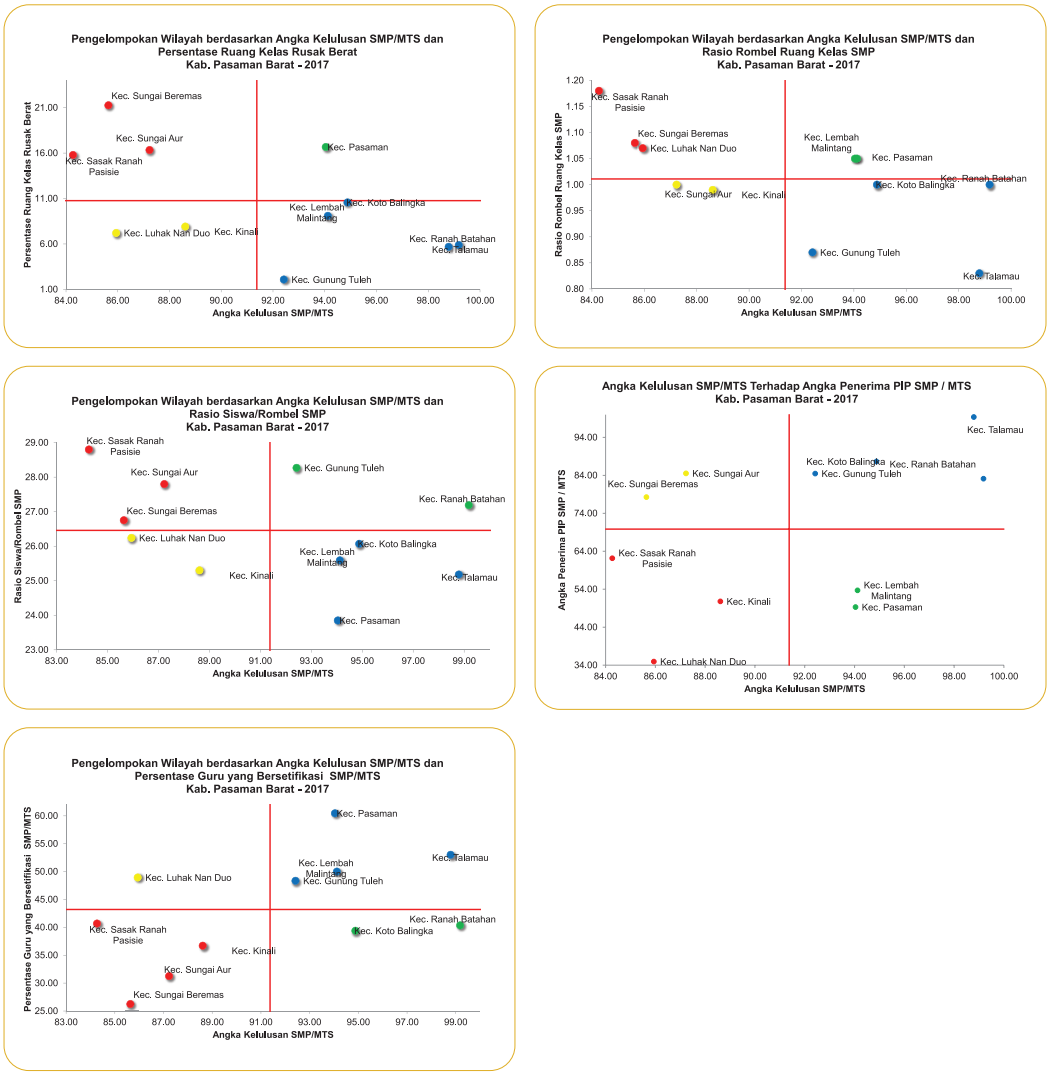

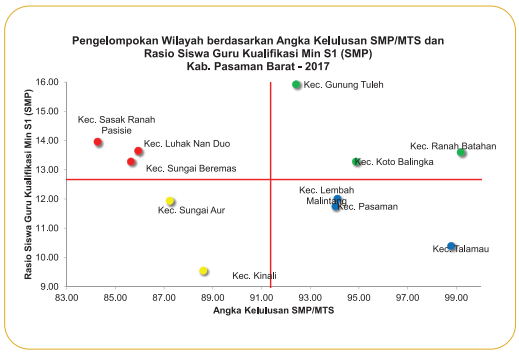

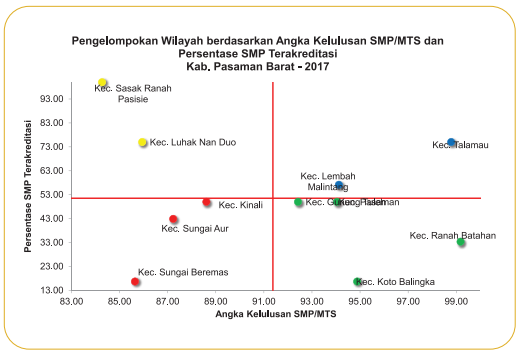

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

D. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN

Terdapat beberapa program prioritas yang berkaitan untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan yang selama ini telah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan RPJMD 2016 - 2021. (Tabel 3.1).

Tabel 3.2. Program yang Berkaitan Langsung Terhadap Tujuan Akhir Peningkatan Akses Pendidikan

No	Tujuan Akhir	Program
1	Menurunkan angka putus sekolah	1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 2. Program bantuan operasional sekolah
2	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	1. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 2. Program manajemen pelayanan pendidikan 3. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 4. Program SMP model
3	Menurunkan angka buta huruf	1. Program pendidikan anak usia dini 2. Program pendidikan non-formal

Sumber: Dokumen RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Pasaman Barat

D.1. Belanja Program untuk Urusan Pendidikan

Belanja pada bidang pendidikan, didistribusikan pada 13 (tiga belas) program utama. Sejak tahun 2017, Program Pendidikan Menengah tidak lagi dianggarkan oleh kabupaten karena adanya perubahan regulasi berdasarkan UU 23/2014, dimana pendidikan menengah telah menjadi kewenangan tingkat provinsi. Pada tahun 2017, terdapat dua program dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu Program Bantuan Operasional Sekolah dengan nilai Rp 56,5 miliar,

kemudian diikuti oleh Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun senilai Rp 19,5 miliar. (Gambar 3.17).

Gambar 3.17. Komposisi Belanja Program Urusan Pendidikan

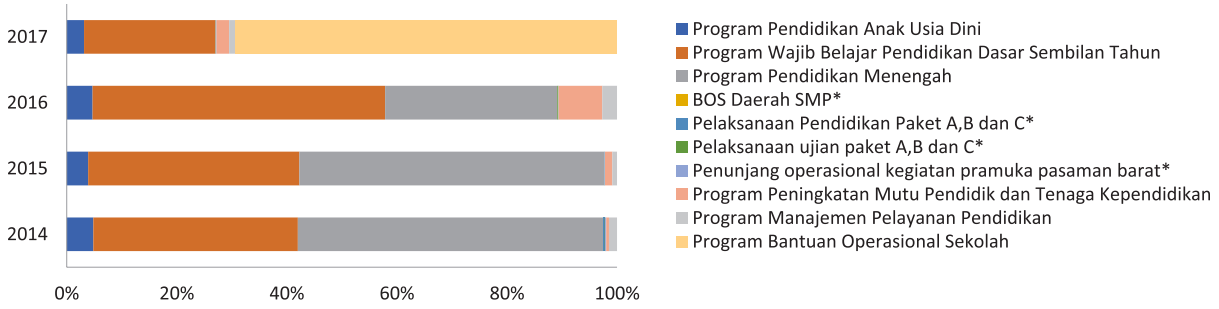

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

D.2. Belanja Kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTS menurun seiring meningkatnya belanja untuk program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Selama 2014-2017, belanja program wajib belajar 9 tahun selalu meningkat dengan sebagian besar digunakan untuk belanja modal. Di sisi lain, capaian angka putus sekolah membaik dengan menurunnya kedua indikator APS baik sekolah SD/MI maupun SMP/MTs. (Gambar 3.18)

Gambar 3.18. Analisis Relevansi Belanja Program Wajib Belajar 9 Tahun dan Angka Putus Sekolah

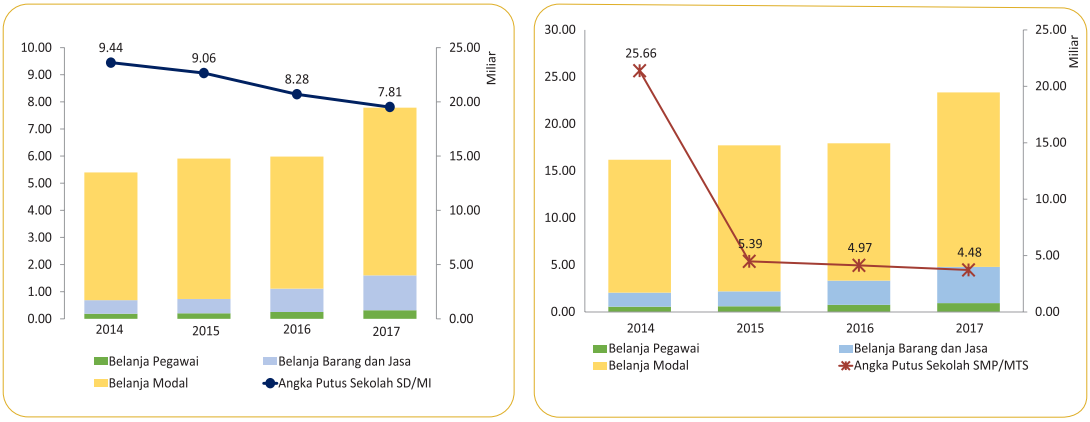

Sumber: BPS dan APBD Kabupaten Pasaman Barat

Sebagian besar belanja program pendidikan dasar 9 tahun digunakan untuk pembangunan fisik gedung dan ruang kelas sekolah. Pada tahun 2017, untuk pembangunan gedung sekolah SMP menghabiskan dana sebesar Rp. 6,76 miliar (37,85%). Sedangkan untuk pengadaan ruang kelas baru SD menghabiskan dana sebesar Rp. 1,47 miliar (8,27%), dan untuk kegiatan Pra UAS, UAS dan UASBN SD menghabiskan dana sebesar Rp. 2.29 miliar (12,85%). Selanjutnya, untuk kegiatan penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1,85 miliar (10,40%).

Demikian juga, untuk kegiatan pengelolaan alokasi khusus bidang pendidikan dasar sembilan tahun dan BOS daerah SD Negeri yang menghabiskan dana masing-masing Rp. 917 juta (5,14%), dan kegiatan pengadaan mebeler SMP menghabiskan dana Rp. 811 juta (4,54%). Selebihnya, sebesar Rp. 2.82 miliar (15,81%) dihabiskan untuk belanja lainnya seperti penyediaan dana operasional unit UPTPD (0,45 persen); OSN SD, SLTP, SLTA (1,75 persen), UKS SD, SLTP dan SLTA (1,96 persen), dan lain-lainnya. (Gambar 3.19).

Gambar 3.19. Rincian Belanja Kegiatan pada Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, 2014 – 2017

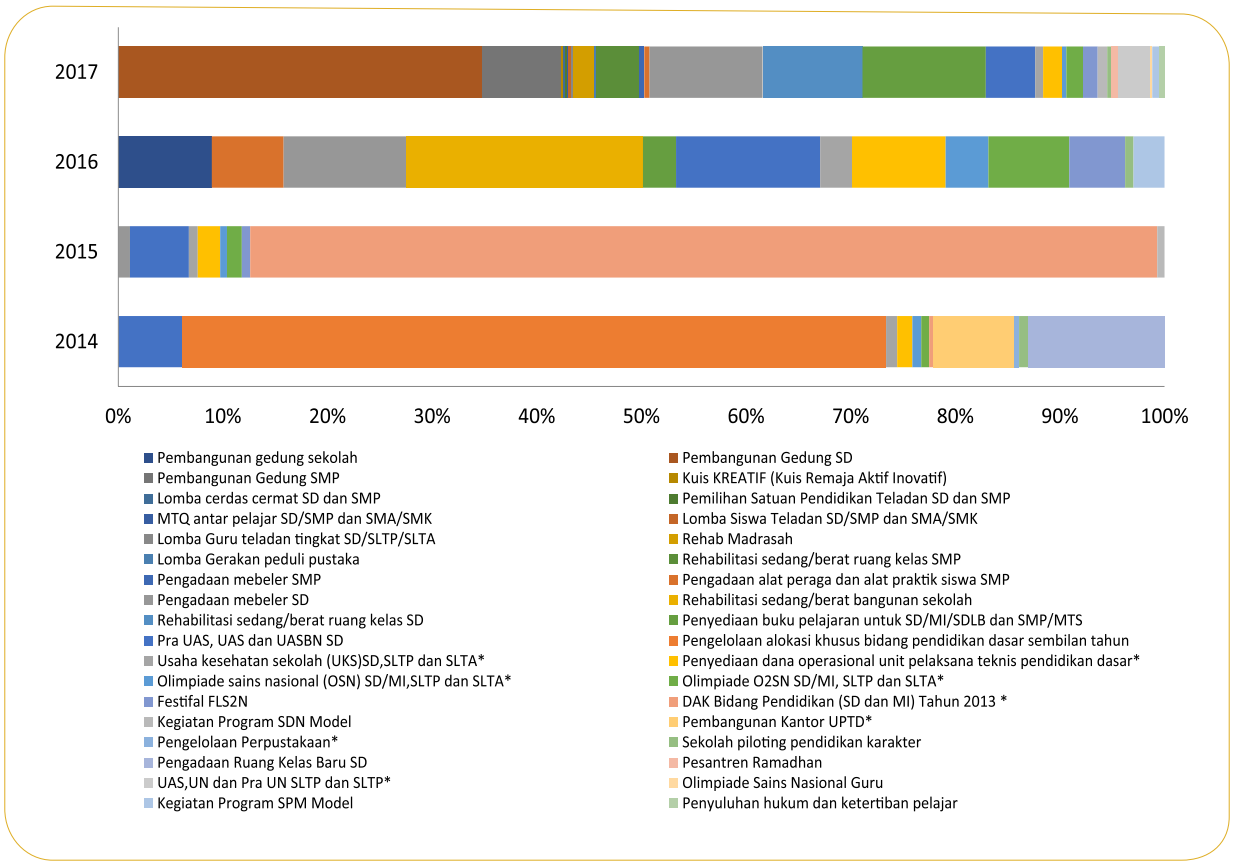

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

D.3. Belanja Kegiatan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pada dasarnya, BOS merupakan bagian dari skenario pendanaan pendidikan menengah seperti biaya investasi, operasional dan biaya pribadi peserta didik. BOS adalah bantuan pemerintah pusat yang ditujukan untuk membantu sekolah, baik negeri maupun swasta, dalam memenuhi biaya operasional sekolah khususnya non-personalia[6] bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar serta menjamin keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin. Dana BOS tahun 2017 sebesar Rp. 41 miliar (72,48%) dihabiskan untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal menghabiskan dana sebesar Rp. 15 miliar (26,63%) dan selebihnya dihabiskan untuk belanja pegawai honor sebesar Rp. 500 juta (0,89 %). (Gambar 3.20).

[6] Biaya non-personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dll.

Gambar 3.20. Rincian Belanja Kegiatan pada Program BOS, Tahun 2017

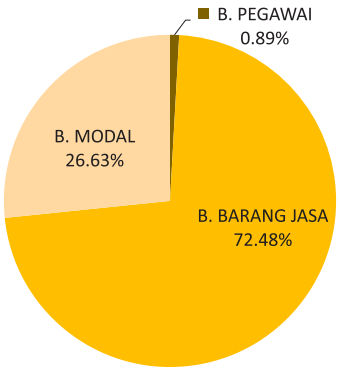

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

D.3. Belanja Kegiatan Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Sehubungan dengan tuntutan ke arah profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka semakin dirasakannya desakan untuk peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang telah menjadi komitmen pendidikan nasional. Namun, isu klasik yang sering mengemuka adalah cara yang paling tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Terlihat dari analisis relevansi dimana peningkatan belanja program mutu pendidik dan tenaga kependidikan ternyata tidak mempengaruhi peningkatan angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pasaman Barat. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs cenderung terus menurun setiap tahunnya, walaupun belanja untuk program peningkatan mutu tenaga didik terus meningkat. Adapun belanja kegiatan dalam program peningkatan mutu pendidik, sebagian dihabiskan untuk kegiatan pelatihan peningkatan mutu guru kelas untuk mata pelajaran dan guru SD pembina sebesar Rp. 426 juta (22,63%); untuk pelatihan peningkatan mutu guru tidak tetap untuk mata pelajaran UN sebesar Rp. 358 juta (19,01%). Kemudian, untuk kegiatan penilaian kinerja kepala SD dan SMP/Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebesar Rp. 264 juta (14,04%) dan kegiatan pembinaan kelompok kerja guru (KKG) sebesar Rp. 247 juta (13,12 %). (Gambar 3.21).

Gambar 3.21. Analisis Relevansi Belanja Peningkatan Mutu Pendidik dan Indikator Kelulusan Sekolah

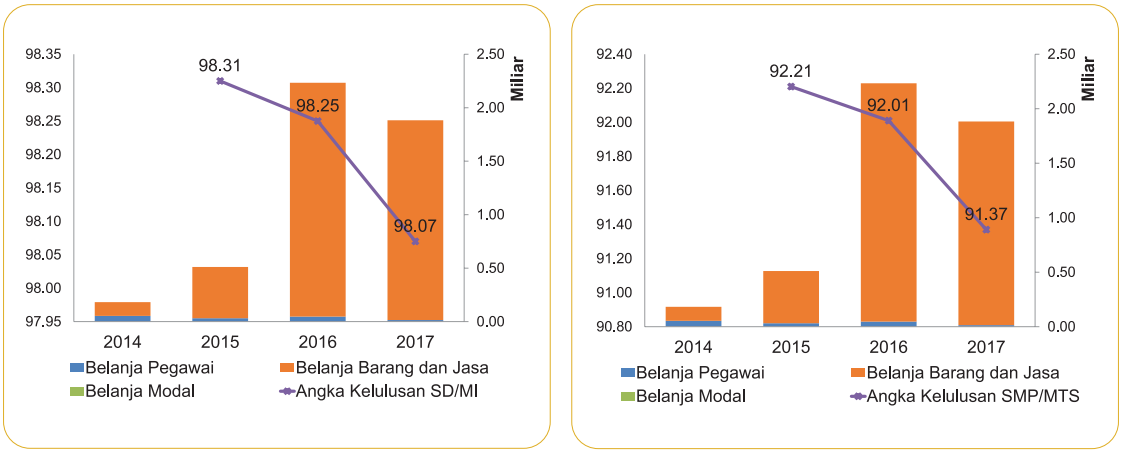

Sumber: Dinas Pendidikan dan APBD Kabupaten Pasaman Barat

E. REKOMENDASI

- Perlunya perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan usia sekolah melalui berbagai program penyediaan sarana prasarana pendidikan dan program pemberian beasiswa kepada siswa miskin dan rentan.
- Meningkatkan program penjaringan anak putus sekolah melalui program Kejar Paket A dan Paket B dalam meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun.
- Melakukan pemerataan tenaga pendidik terutama guru pengajar, baik guru yang berstatus pegawai tetap maupun honorer, khususnya di daerah-daerah pelosok.
- Meningkatkan persentase alokasi anggaran kegiatan yang mendukung peningkatan mutu kualitas pendidikan dasar seperti peningkatan fasilitas sarana-prasarana sekolah, terutama pembangunan laboratorium, perpustakaan, serta pengadaan buku dan alat praktik.
- Alokasi anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan pada bentuk kegiatan untuk peningkatan mutu kompetensi tenaga pendidik, seperti pemberian beasiswa guru untuk melanjutkan program setaraf S1 dan pelaksanaan uji kompetensi.
- Memprioritaskan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan wilayah (kecamatan dan desa), sehingga tidak dilakukan dengan pola bagi rata di seluruh wilayah.

LAMPIRAN. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Angka Putus Sekolah

Gambar 3.13. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar

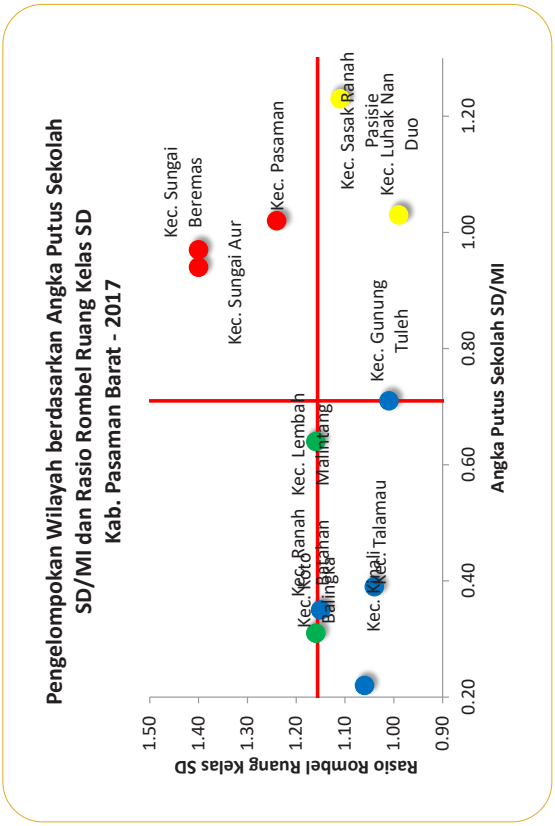

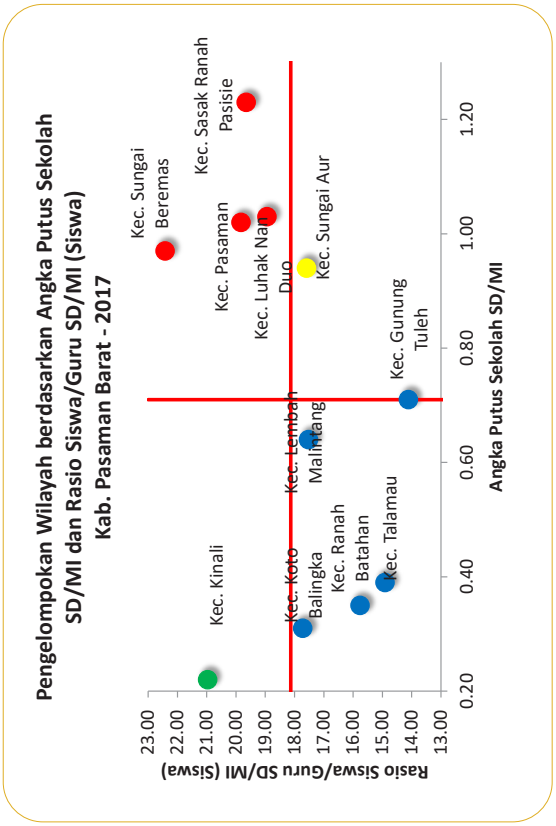

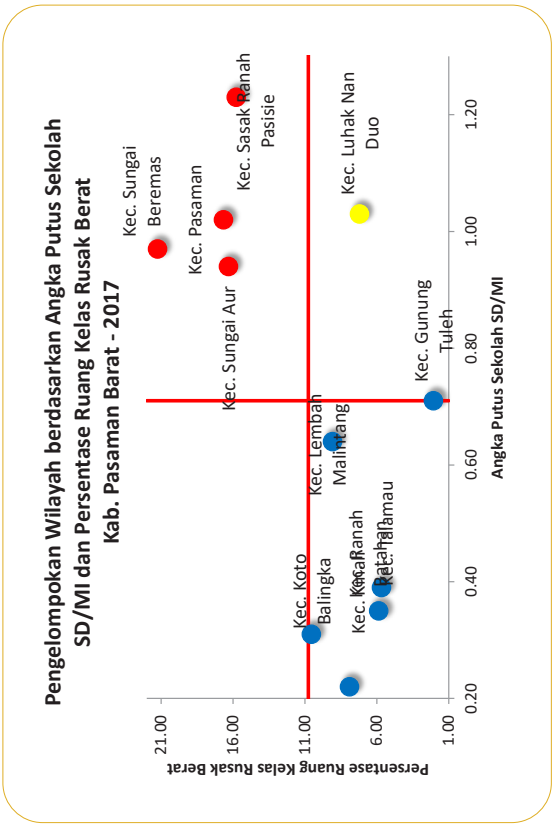

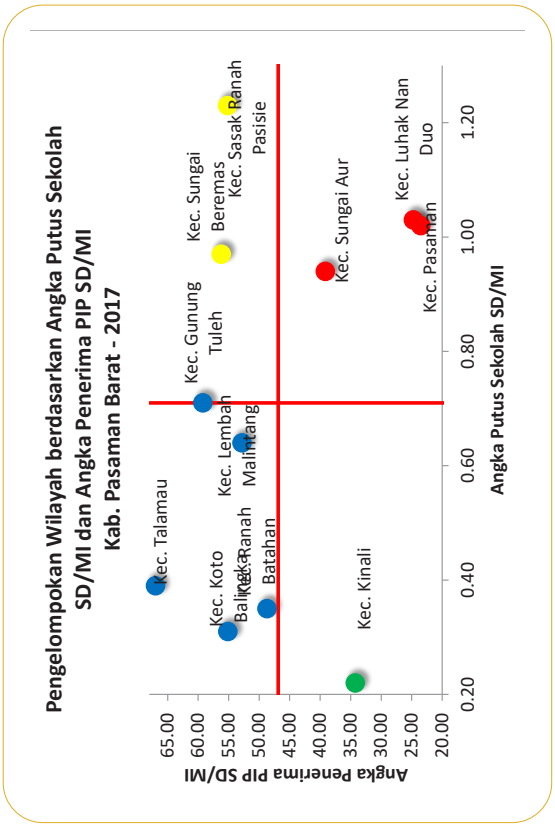

Gambar 3.14. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Angka Putus Sekolah SMP

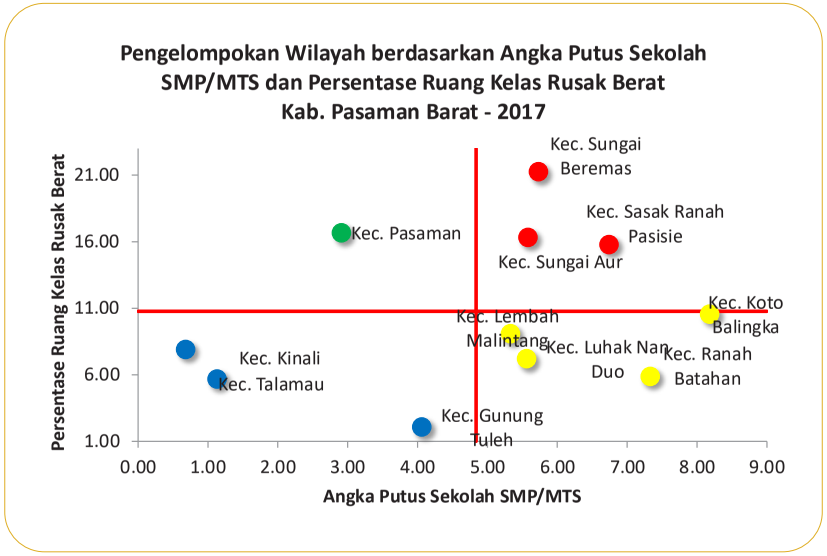

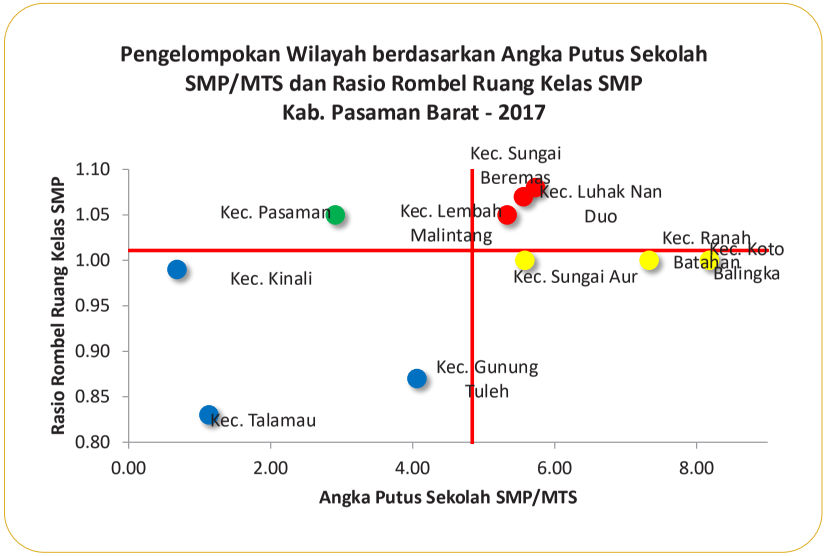

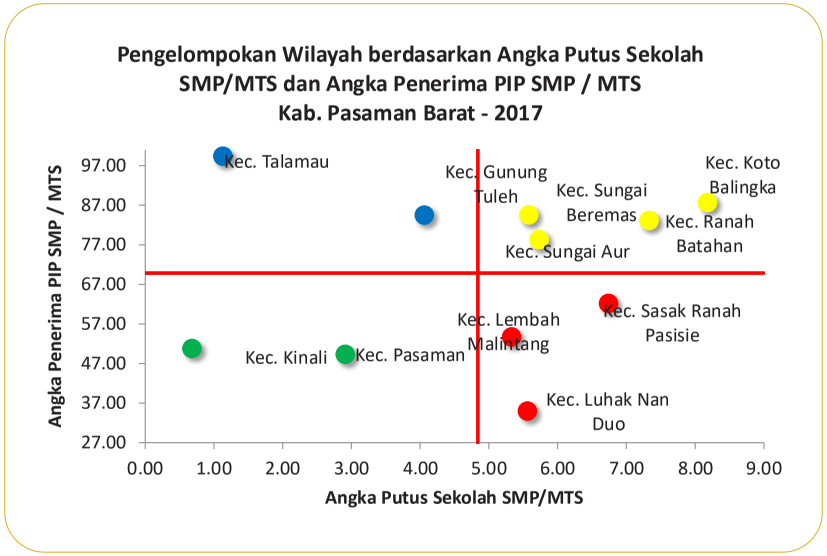

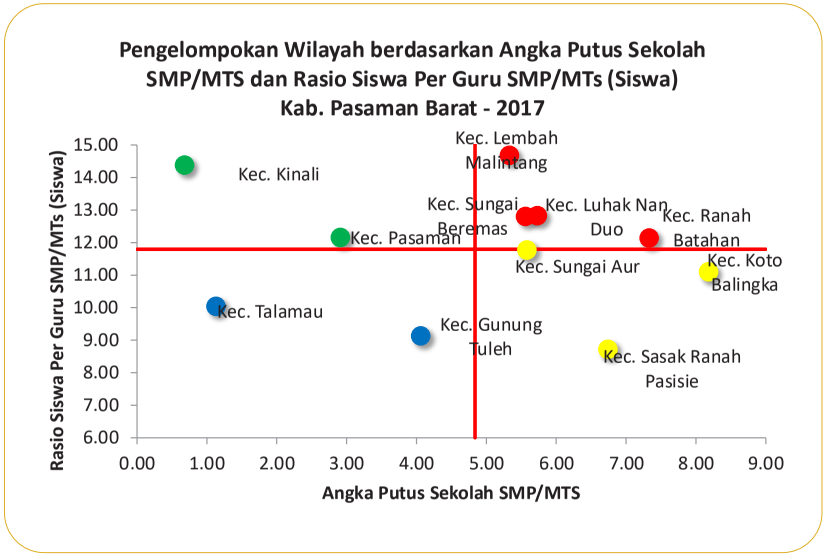

Gambar 3.15. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Angka Kelulusan Sekolah Dasar

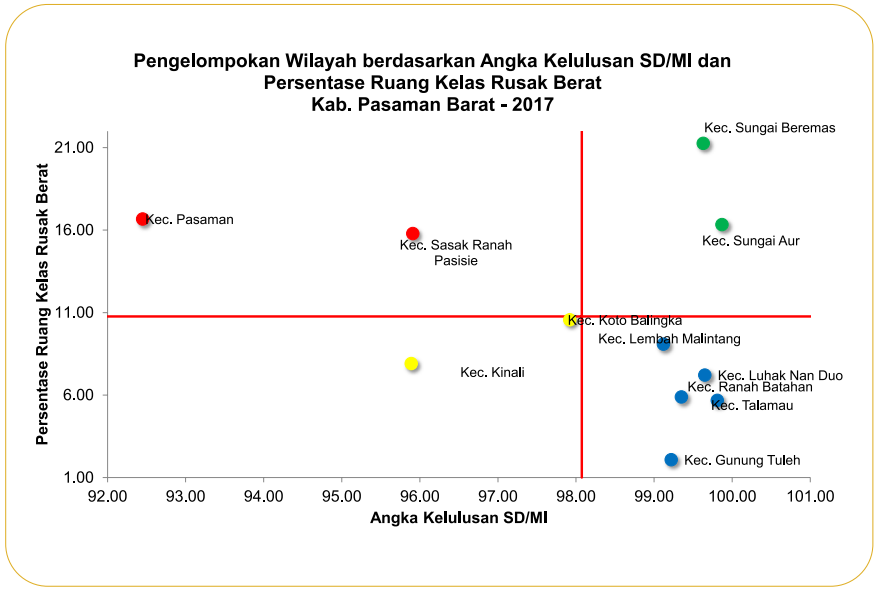

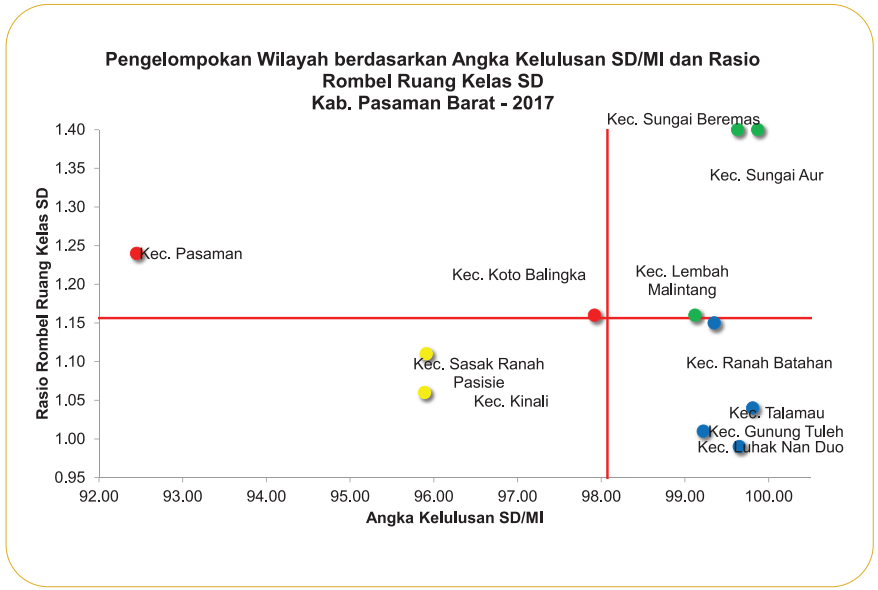

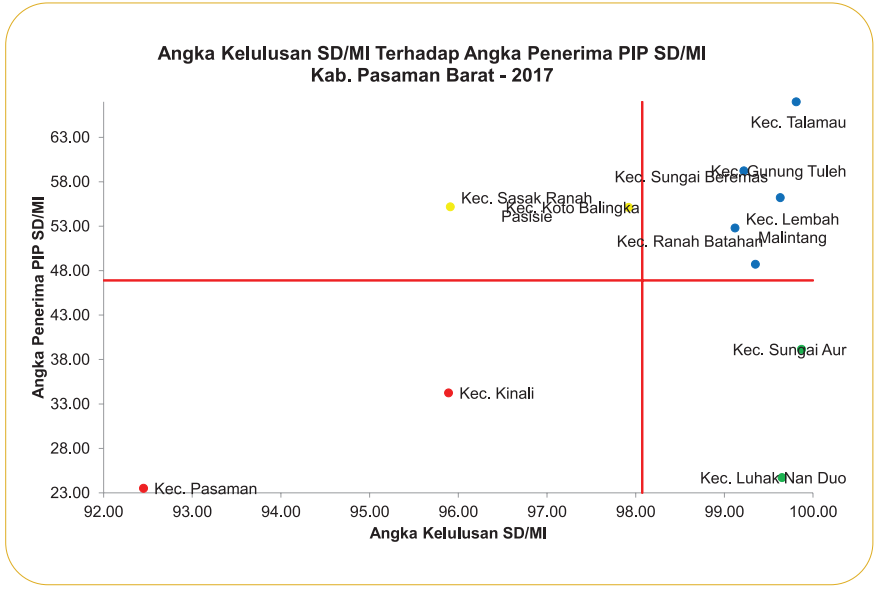

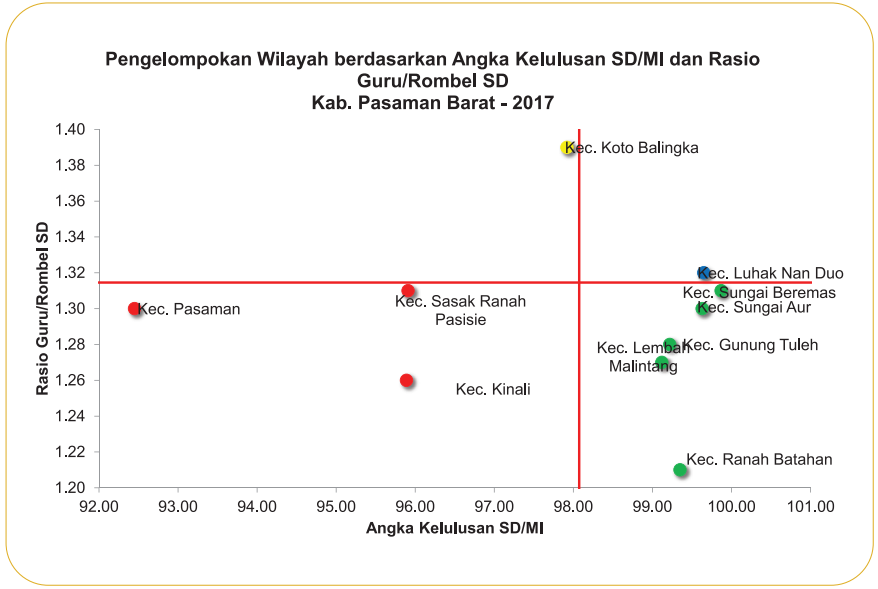

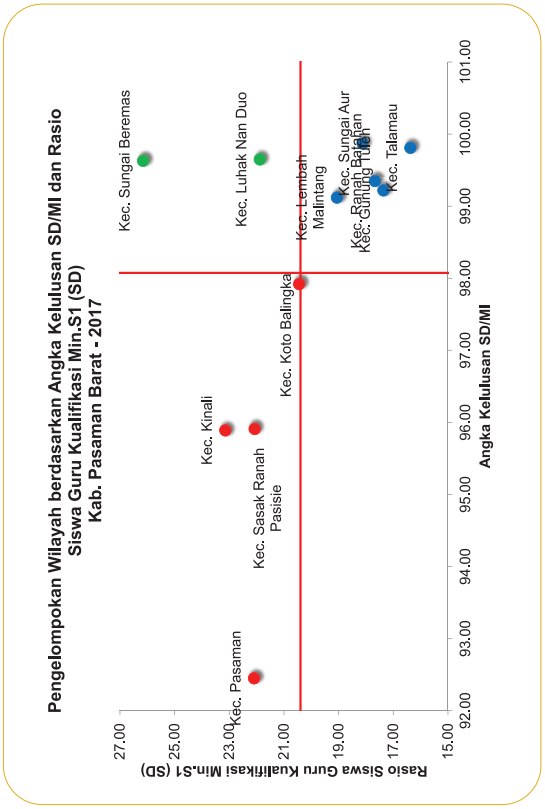
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Kelulusan SD/MI dan Rasio Siswa Guru Kualifikasi Min.S1 (SD)
Kab. Pasaman Barat - 2017
Rasio Siswa Guru Kualifikasi Min.S1 (SD)
Angka Kelulusan SD/MI
Kec. Sungai Beremas
Kec. Luhak Nan Duo
Kec. Lembah Malintang
Kec. Sungai Aur
Kec. Ranah Batahan
Kec. Gunung Tuleh
Kec. Talamau
Kec. Koto Balingka
Kec. Kinali
Kec. Sasak Ranah Pasisie
Kec. Pasaman

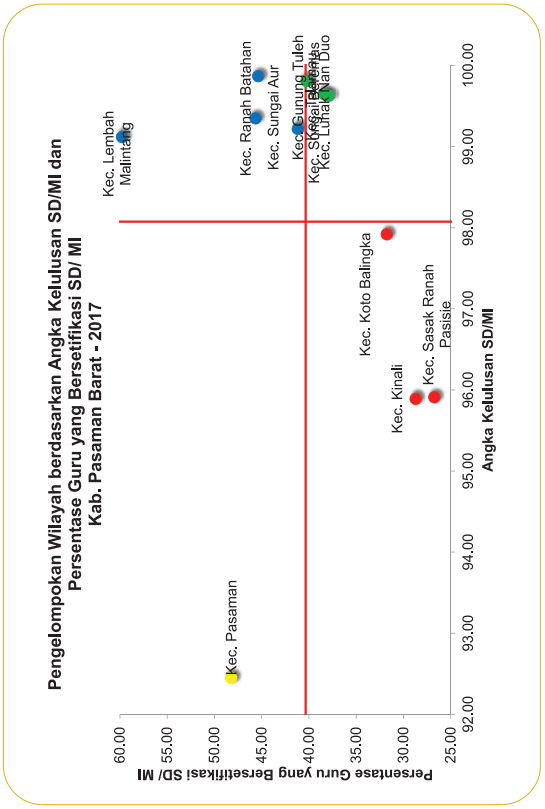
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Kelulusan SD/MI dan Persentase Guru yang Bersertifikasi SD/ MI
Kab. Pasaman Barat - 2017
Persentase Guru yang Bersertifikasi SD/ MI
Angka Kelulusan SD/MI
Kec. Lembah Malintang
Kec. Ranah Batahan
Kec. Sungai Aur
Kec. Gunung Tuleh
Kec. Luhak Nan Duo
Kec. Koto Balingka
Kec. Kinali
Kec. Sasak Ranah Pasisie
Kec. Pasaman

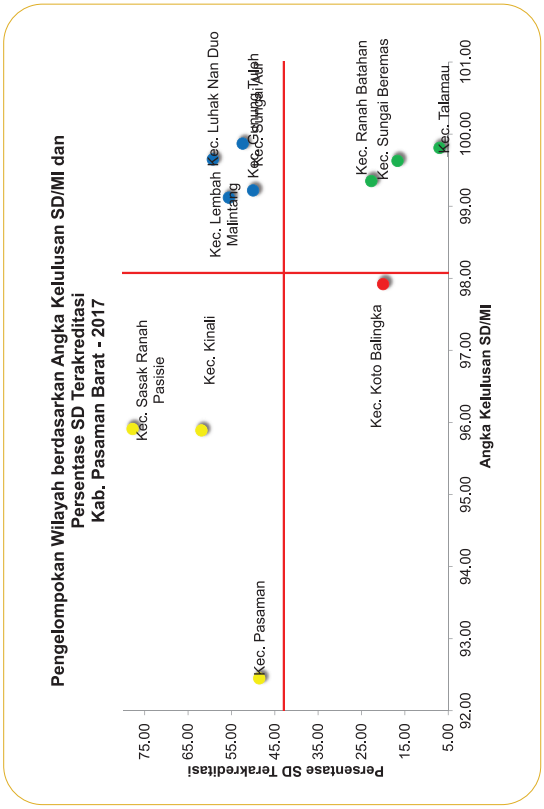
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Kelulusan SD/MI dan Persentase SD Terakreditasi
Kab. Pasaman Barat - 2017
Persentase SD Terakreditasi
Angka Kelulusan SD/MI
Kec. Sasak Ranah Pasisie
Kec. Kinali
Kec. Lembah Malintang
Kec. Luhak Nan Duo
Kec. Sungai Aur
Kec. Pasaman
Kec. Koto Balingka
Kec. Ranah Batahan
Kec. Sungai Beremas
Kec. Talamau

Gambar 3.16. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Angka Kelulusan SMP

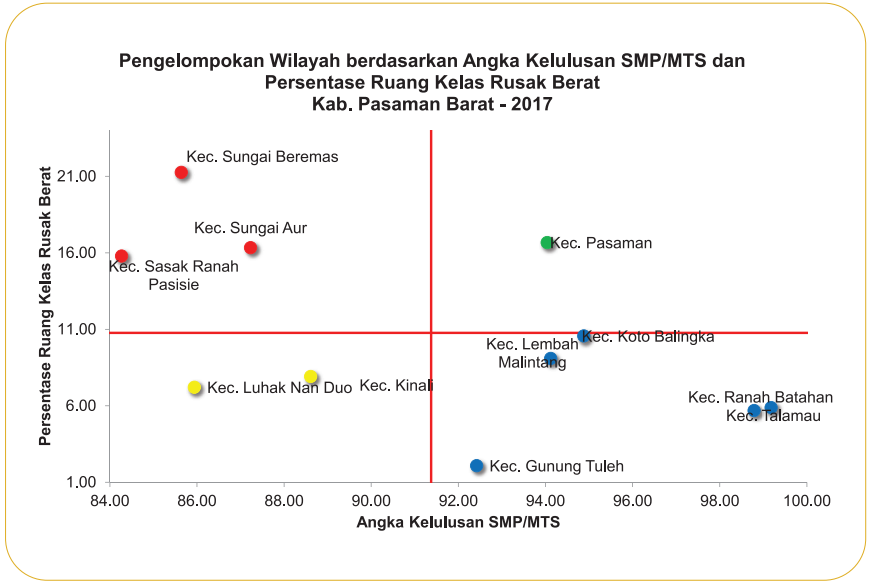

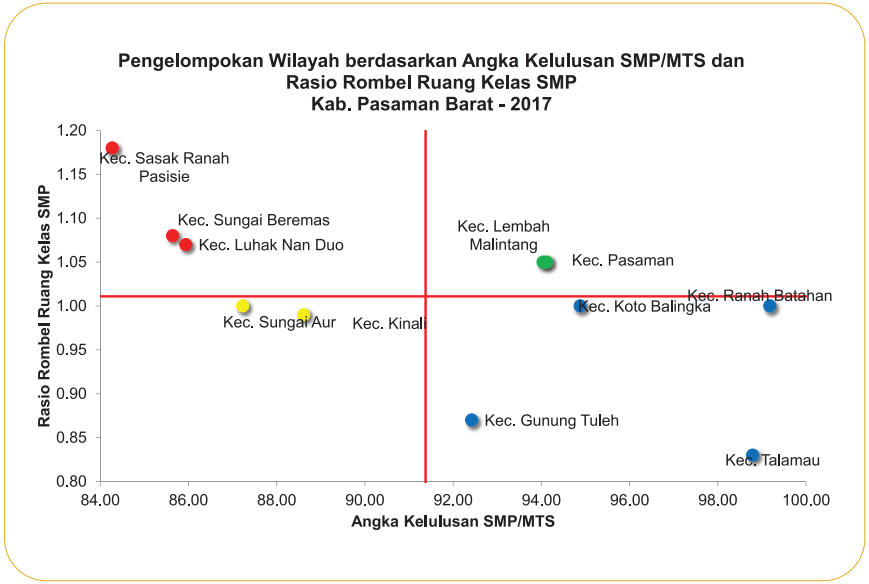

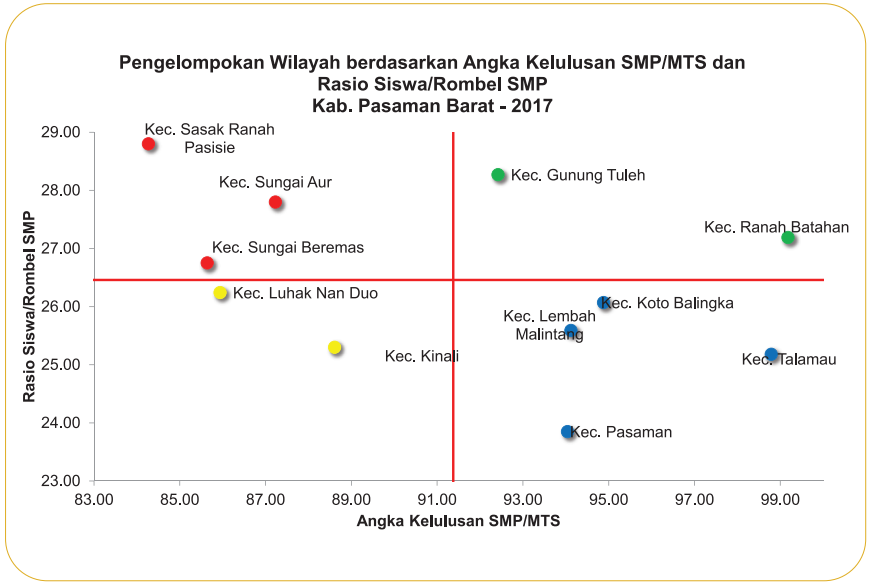

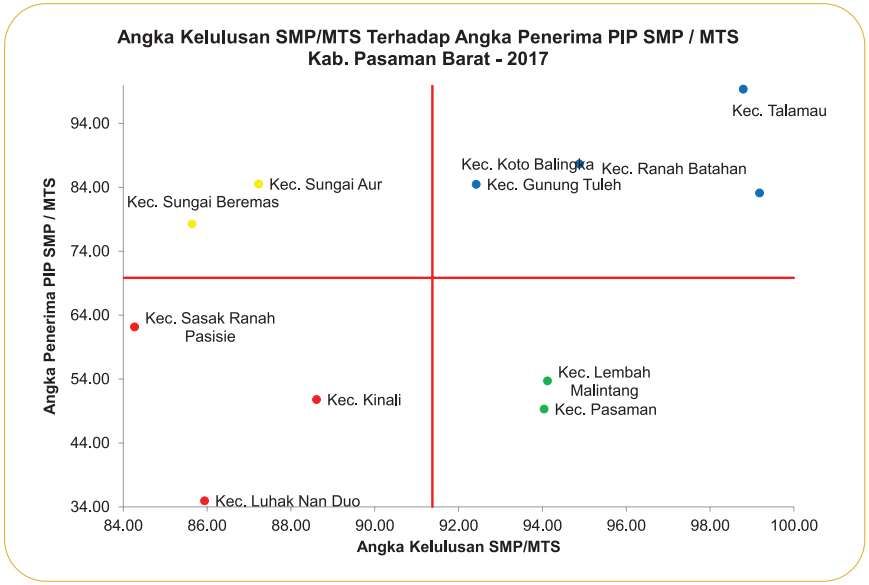

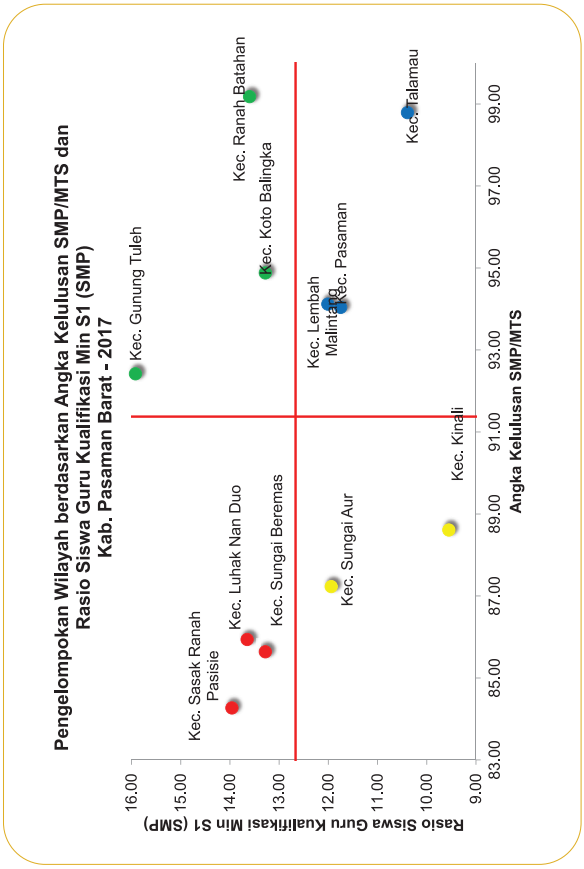
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Kelulusan SMP/MTS dan
Rasio Siswa Guru Kualifikasi Min S1 (SMP)
Kab. Pasaman Barat - 2017
Rasio Siswa Guru Kualifikasi Min S1 (SMP)
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
83.00
85.00
87.00
89.00
91.00
93.00
95.00
97.00
99.00
Angka Kelulusan SMP/MTS
Kec. Gunung Tuleh
Kec. Sasak Ranah Pasisie
Kec. Luhak Nan Duo
Kec. Sungai Beremas
Kec. Ranah Batahan
Kec. Koto Balingka
Kec. Lembah Malintang
Kec. Pasaman
Kec. Talamau
Kec. Sungai Aur
Kec. Kinali

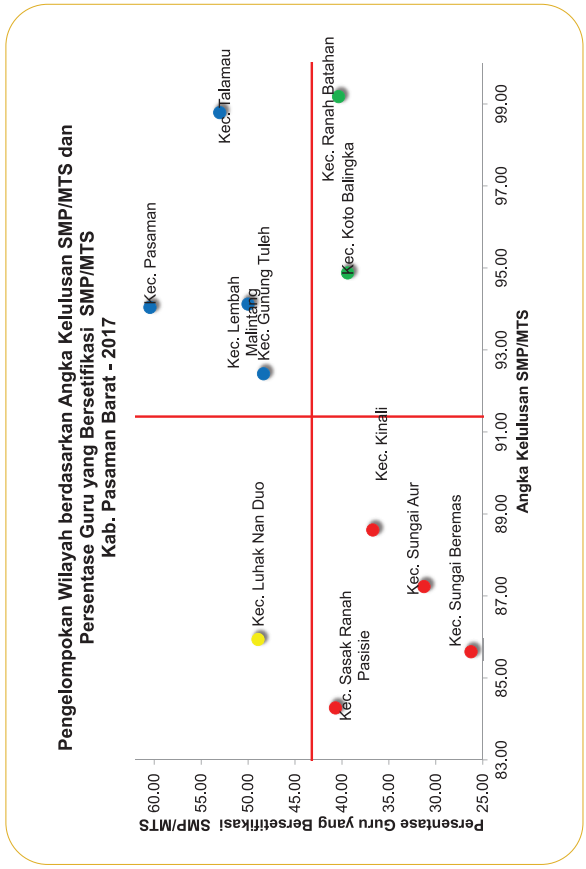
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Kelulusan SMP/MTS dan
Persentase Guru yang Bersertifikasi SMP/MTS
Kab. Pasaman Barat - 2017
Persentase Guru yang Bersertifikasi SMP/MTS
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
83.00
85.00
87.00
89.00
91.00
93.00
95.00
97.00
99.00
Angka Kelulusan SMP/MTS
Kec. Pasaman
Kec. Talamau
Kec. Lembah Malintang
Kec. Gunung Tuleh
Kec. Ranah Batahan
Kec. Koto Balingka
Kec. Luhak Nan Duo
Kec. Kinali
Kec. Sasak Ranah Pasisie
Kec. Sungai Aur
Kec. Sungai Beremas

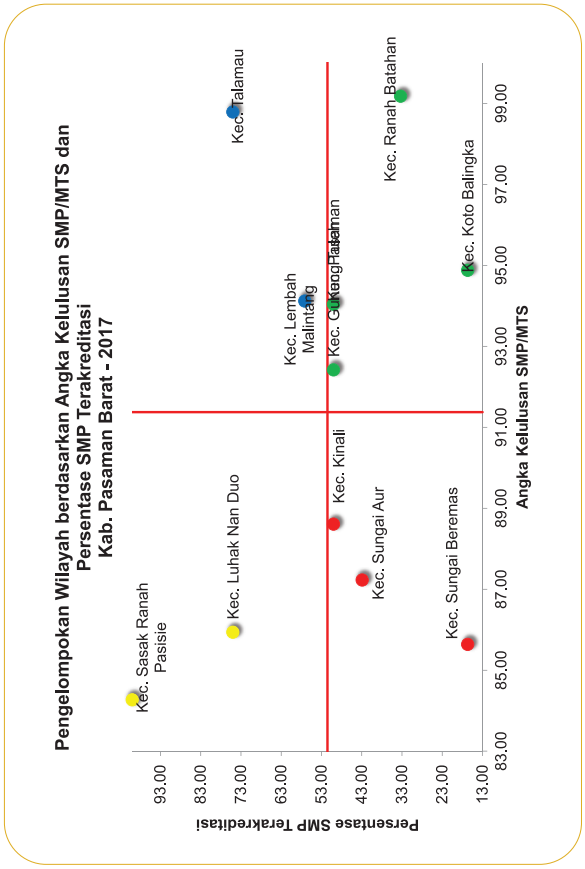
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Kelulusan SMP/MTS dan
Persentase SMP Terakreditasi
Kab. Pasaman Barat - 2017
Persentase SMP Terakreditasi
93.00
83.00
73.00
63.00
53.00
43.00
33.00
23.00
13.00
83.00
85.00
87.00
89.00
91.00
93.00
95.00
97.00
99.00
Angka Kelulusan SMP/MTS
Kec. Sasak Ranah Pasisie
Kec. Luhak Nan Duo
Kec. Lembah Malintang
Kec. Gunung Tuleh
Kec. Pasaman
Kec. Talamau
Kec. Ranah Batahan
Kec. Koto Balingka
Kec. Kinali
Kec. Sungai Aur
Kec. Sungai Beremas

BAB 4

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI PASAMAN BARAT

A. ISU STRATEGIS SEKTOR PERTANIAN

Ketahanan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, terutama beras. Salah satu faktor utama penentu garis kemiskinan di Pasaman Barat adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk makanan. Sedangkan komoditas pangan utama penduduk sebagian besar masih bergantung pada beras. Oleh karena itu, untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh penduduk khususnya kelompok miskin dan rentan maka pemerintah melalui alokasi anggaran (APBD) bertanggung-jawab membuat strategi kebijakan untuk mencapai swasembada pangan, menjaga kestabilan harga, adanya ketersediaan pasokan pangan yang cukup, serta juga berupaya mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan akan beras guna menekan angka kemiskinan di Pasaman Barat.

Ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Pasaman Barat belum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk. Beras masih menjadi pangan utama penduduk di Pasaman Barat. Oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah kebutuhan penduduk terhadap beras juga meningkat. Berdasarkan tren, jumlah ketersediaan beras cenderung meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2016 disebabkan karena menurunnya jumlah produksi padi. Namun, ketersediaan pangan utama beras sejak tahun 2013-2016 selalu mengalami defisit untuk mencukupi kebutuhan penduduk. (Gambar 4.1).

Gambar 4.1. Kondisi Ketersediaan dan Kebutuhan Penduduk terhadap Pangan Utama

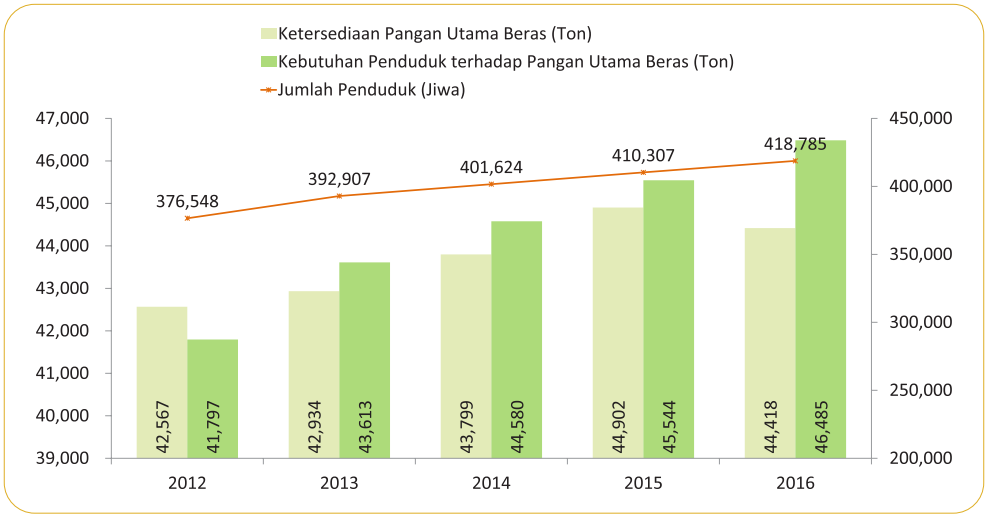

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

Tingkat produktivitas padi di Kabupaten Pasaman Barat masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2017, jumlah produksi padi Pasaman Barat relatif tinggi yaitu 136.380 ton berada di posisi terbesar ke-8 di Provinsi Sumatera Barat. Namun, tingkat produktivitas padinya masih relatif rendah dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat terutama dengan beberapa daerah dengan luas panen padi yang lebih rendah. (Gambar 4.2).

Gambar 4.2. Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Tahun 2017

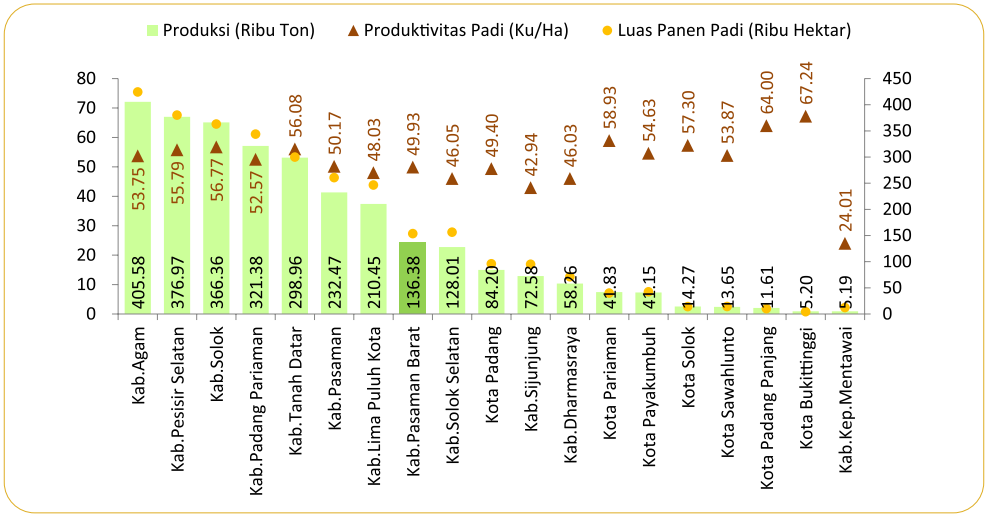

Sumber: BPS Sumatera Barat

Adanya fungsi alih lahan mengakibatkan berkurangnya luas baku lahan sawah untuk produksi padi di Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2006 luas baku lahan sawah di Kabupaten Pasaman Barat seluas 14.480 Ha, namun sejak tahun 2013 luas lahan baku telah berkurang menjadi 13.105 Ha. Hal ini dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan sawah oleh masyarakat untuk pengembangan tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit yang dinilai lebih mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan lahan sawah untuk tanaman padi di Pasaman Barat tersebar di empat wilayah kecamatan utama, yakni Kecamatan Lembah Melintang (2.377 Ha), Kecamatan Talamau (2.358 Ha), Kecamatan Ranah Batahan (2.014 Ha), dan Kecamatan Pasaman (1.557 Ha). (Gambar 4.3).

Gambar 4.3. Sebaran Luas Baku Lahan Sawah (Hektar) Kabupaten Pasaman Barat

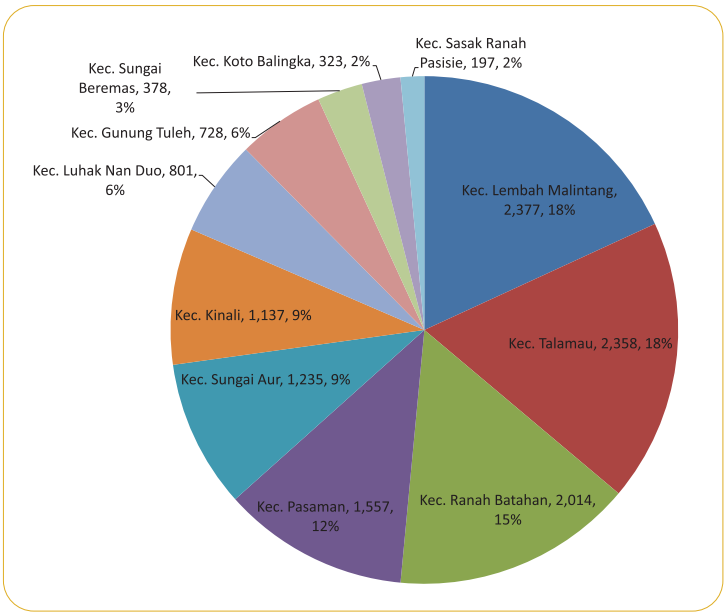

Sumber: Perda LP2B Kabupaten Pasaman Barat, 2015

Peraturan pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Kabupaten Pasaman Barat telah mengeluarkan peraturan daerah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menghambat laju alih fugsi lahan, yaitu melalui Perda LP2B Nomor 8 Tahun 2015. Namun, secara praktik peraturan tersebut belum maksimal dilakukan sehingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir masih terjadi alih fungsi lahan di wilayah Pasaman Barat. Sedangkan data terakhir luas baku lahan sawah yang digunakan masih berdasarkan pada kondisi tahun 2013, yang mungkin saja tidak menggambarkan kondisi terkini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka diperlukannya kegiatan peninjauan ulang mengenai kondisi luas lahan sawah melalui kegiatan audit luas baku lahan sawah.

Tingkat konsumsi energi dan protein Kabupaten Pasaman Barat relatif masih rendah. Kemiskinan juga sangat erat kaitannya dengan tingkat kecukupan gizi masyarakat khususnya kecukupan konsumsi energi dan protein. Hal ini disebabkan karena kemiskinan menyebabkan masyarakat mempunyai keterbatasan dalam menyediakan makanan yang dibutuhkan untuk pemenuhan keluarga terhadap kecukupan energi dan protein. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016, tingkat konsumsi energi kabupaten Pasaman Barat (1.837 kkal/kapita/hari) dan protein (65 gram/kapita/hari) masih jauh dari tingkat konsumsi provinsi untuk konsumsi energi (2.418 kkal/kapita/hari) dan protein (111,53 gram/kapita/hari). (Gambar 4.4 dan Gambar 4.5).

Gambar 4.4. Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)

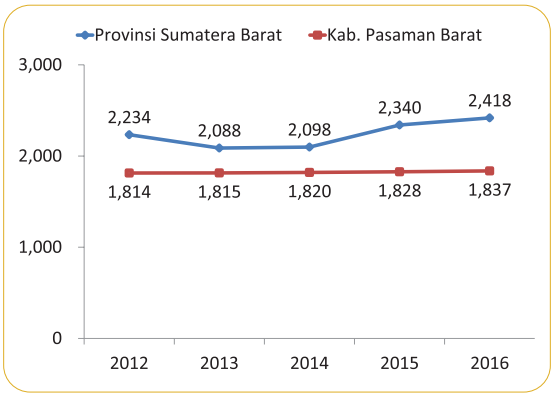

Gambar 4.5. Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)

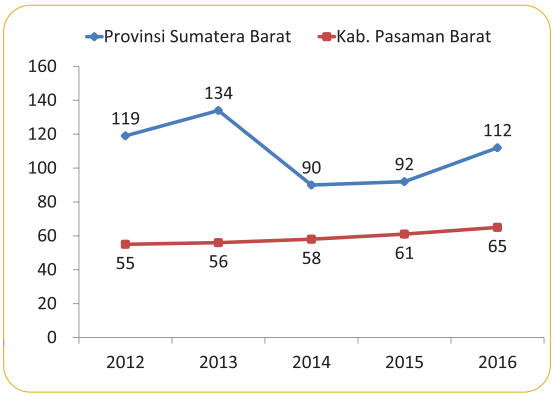

Sumber: BPS Sumatera Barat

Rendahnya kecukupan konsumsi gizi (energi dan protein) menjadikan Kabupaten Pasaman Barat masuk dalam 100 kabupaten prioritas nasional untuk penanggulangan *stunting* tahun 2018. Prevalensi *stunting* merupakan akibat kekurangan energi dan protein serta zat gizi lain dalam jangka waktu lama (kronis). Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu wilayah dengan tingkat prevalensi *stunting* yang cukup tinggi di Indonesia sehingga masuk ke dalam 100 wilayah prioritas nasional penanggulangan *stunting* untuk tahun anggaran 2018. Adapun nagari/desa prioritas yang termasuk dalam penanggulangan *stunting* tersebut, yaitu: Kecamatan Lembah Melintang (Nagari Ujung Gading), Kec. Sungai Beremas (Nagari Air Bangis), Kec. Koto Balingka (Nagari Parik), Kec. Talamau (Nagari Talu, Sinuruik dan Kajai), Kec. Kinali (Nagari Katiagan), Kec. Gunung Tuleh (Nagari Rabi Jonggor), Kec. Ranah Batahan (Nagari Batahan), Kec. Sungai Aur (Nagari Sungai Aur).

B. PRIORITAS INTERVENSI

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman Barat dalam bidang ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan utama (beras). Untuk menguraikan permasalahan tersebut, maka dapat disusun program/ kegiatan yang prioritas untuk dilakukan, berdasarkan *Theory of change* (ToC), seperti gambar dibawah ini: (Gambar 4.6).

Gambar 4.6. *Theory of change* Meningkatnya Ketahanan Pangan Pasaman Barat

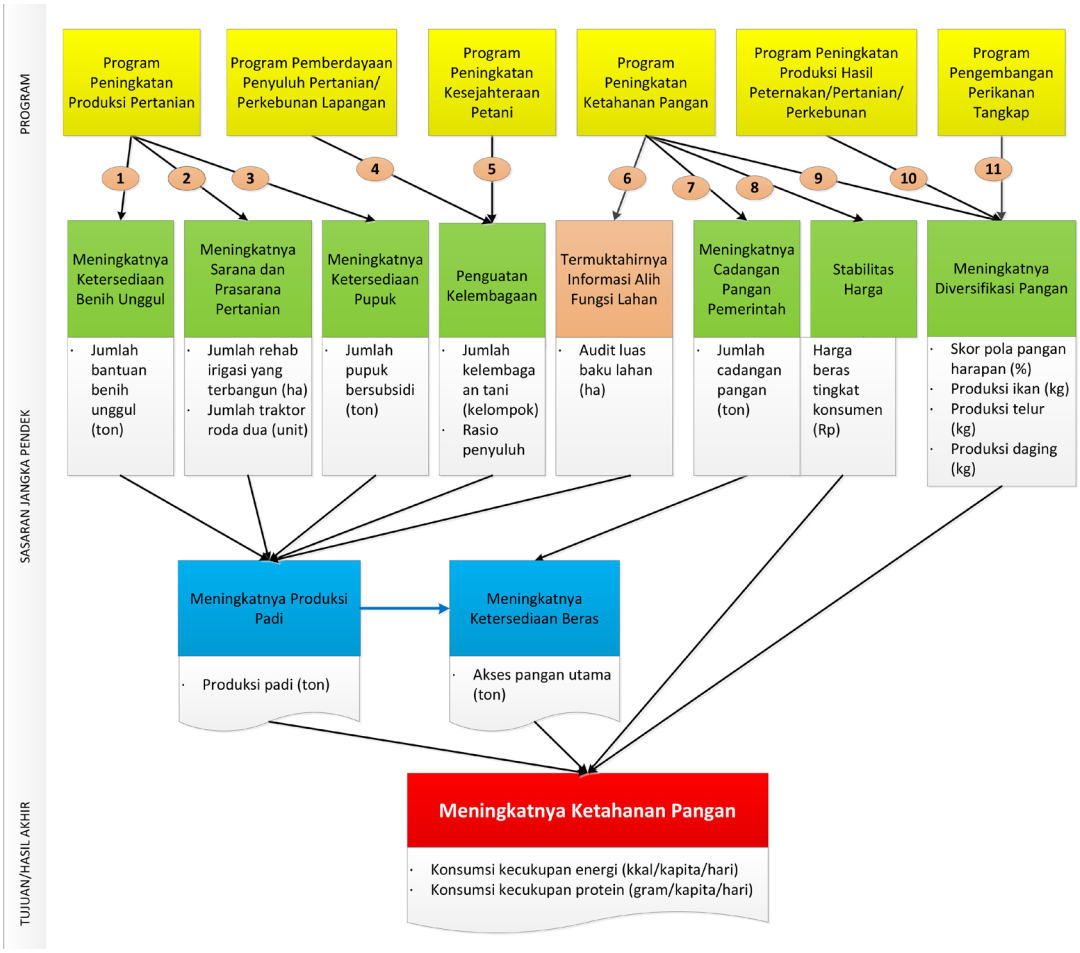

Keterangan :

Program	Kegiatan
Program Peningkatan Produksi Pertanian	1. Operasional Tanaman Pangan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian 3. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Tenaga Penyuluh Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penguatan Kelembagaan Tani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Perencanaan Pembangunan Pertanian 2. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah 3. Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis 4. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan Pertanian Perkebunan	Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Kenelayanan

B.1. Prioritas Intervensi Ketersedian Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Pasaman Barat berkaitan dengan jumlah produksi padi dan kemampuan mengkonversi produk padi ke beras. Hasil analisis keterkaitan (*causal relationship*) antara indikator utama dan indikator-indikator pendukung atau determinannya menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama beras (indikator utama) berkaitan dengan hasil produksi padi dan kemampuan konversi produk padi ke beras. Produksi beras tahun 2016 yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk jika dibandingkan pencapaian produksi tahun 2015 mengalami penurunan akibat menurunnya produksi beras dan konversi padi ke beras. Sedangkan indikator pendukung lainnya, yaitu stok cadangan beras pemerintah tidak menunjukkan keterkaitan yang signifikan karena tren dan jumlahnya yang relatif kecil. (Gambar 4.7).

Gambar 4.7. Analisis Keterkaitan Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

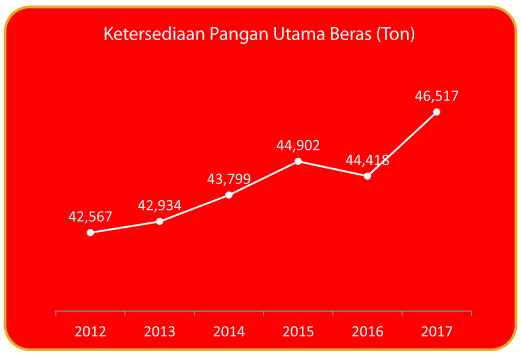

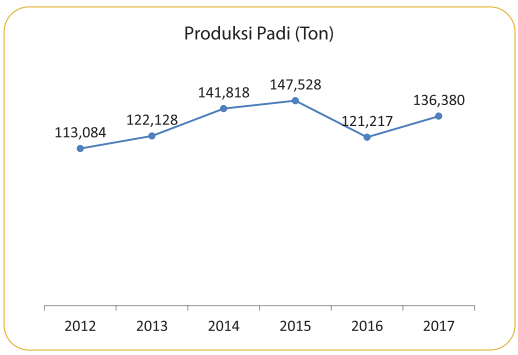

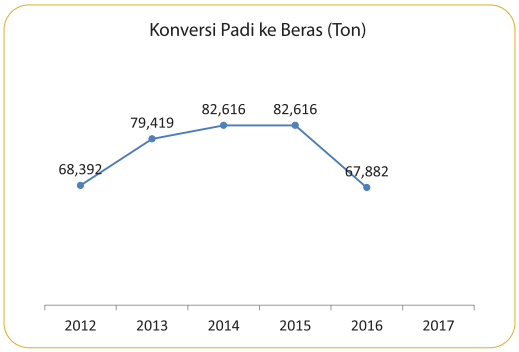

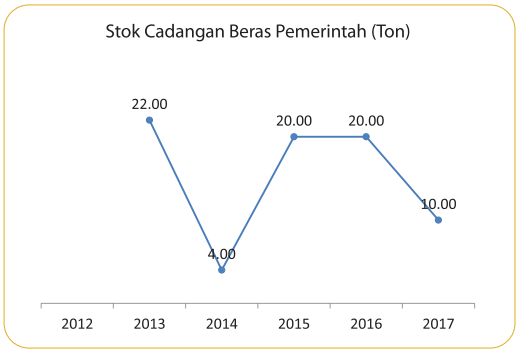

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

Selain itu, ketersediaan beras juga dipengaruhi oleh faktor iklim/cuaca dan arus keluar (ekspor) dan masuk (impor) produk beras di wilayah Pasaman Barat. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk selama lima tahun terakhir di Pasaman Barat dengan pertumbuhan mencapai 2,4 % per tahun, maka kebutuhan pangan pokok terutama beras pun meningkat. Produksi beras sebagai hasil akhir dari konversi produk padi di Pasaman Barat sebenarnya masih surplus dibandingkan jumlah kebutuhan penduduk Pasaman Barat sendiri terhadap beras. Namun, apabila dibandingkan antara data ketersediaan pangan beras dengan kebutuhan penduduk Pasaman Barat sejak 2013 tercatat selalu mengalami defisit. Hal ini dimungkinkan karena sebagian beras yang diproduksi dibawa keluar (ekspor) untuk dijual di luar wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, pertanian lahan basah juga sangat bergantung pada kondisi jatuhnya musim. Sehingga, jika terjadi anomali cuaca dapat menyebabkan perubahan pola tanam, paceklik atau gagal panen yang mengakibatkan berkurangnya jumlah produksi padi. Namun, karena kendala keterbatasan data yang tersedia mengenai arus masuk/keluar produk beras dan kondisi iklim/cuaca maka analisis tersebut tidak dapat dilakukan dalam laporan ini. (Gambar 4.8).

Gambar 4.8. Jumlah Kebutuhan, Ketersediaan dan Kemampuan Konversi Padi ke Beras

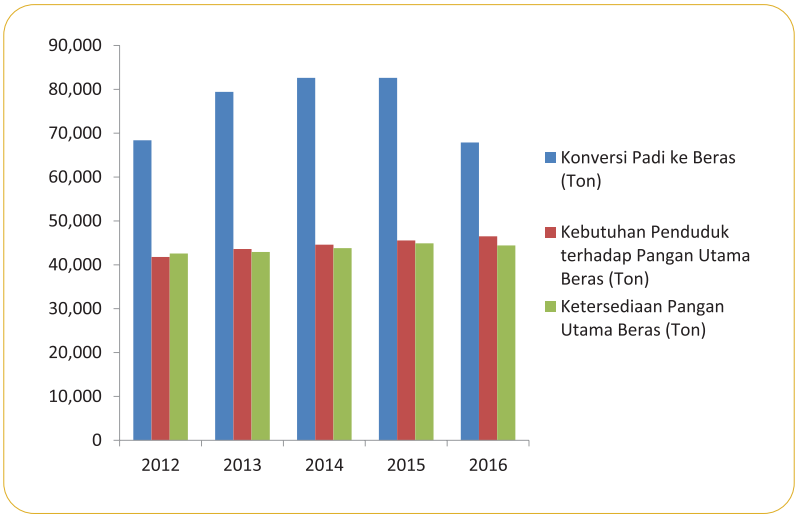

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

Secara umum keterkaitan antara indikator pendukung untuk ketersediaan pangan digambarkan sebagai berikut:

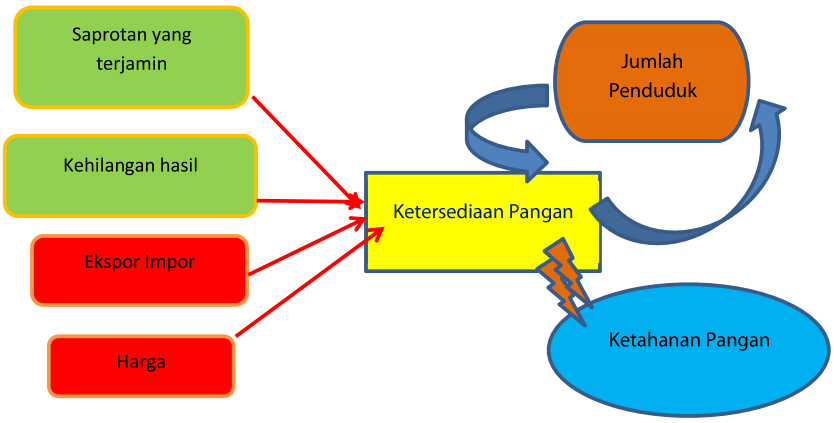

Kunci utama produksi padi di Pasaman Barat adalah ketersediaan lahan dan produktivitas. Berdasarkan hasil analisis keterkaitan produksi padi memang terlihat bahwa tren produksi sangat dipengaruhi oleh luas panen padi dan luas tanam padi. Seiring peningkatan luas tanam dan luas panen akan meningkatkan produksi, dan begitu sebaliknya menurunnya luas tanam dan luas panen akan menurunkan produksi. Namun, peningkatan produksi padi (beras) tidak bisa hanya mengandalkan penambahan luas tanam padi. Hal ini terlihat ketika luas lahan tanam pada tahun 2014 hanya seluas 27.079 hektar mampu menghasilkan luas panen padi sebanyak 29.985 hektar dan produksi padi sebesar 147.528 ton. Namun ketika luas tanam padi meningkat pada tahun 2017 menjadi 31.502 hektar, nyatanya tidak serta merta signifikan mampu meningkatkan luas panen padi dan produksi bahkan capaiannya jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014, yaitu luas panen padi (27.316 hektar) dan produksi padi (136.380 ton). Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi padi selain lahan yang paling diperlukan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas tanaman padi per hektare. Salah satunya, yaitu upaya meningkatkan musim tanam sehingga dapat dilakukan minimal dua kali dalam setahun. Berdasarkan analisis keterkaitan terlihat beberapa indikator pendukung yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas padi di Pasaman Barat, yaitu seperti luas lahan sawah irigasi, jumlah bantuan pupuk bersubsidi, jumlah bantuan benih unggul, jumlah traktor roda dua, dan rasio tenaga penyuluh. (Gambar 4.9).

Gambar 4.9 Analisis Keterkaitan Produksi Padi

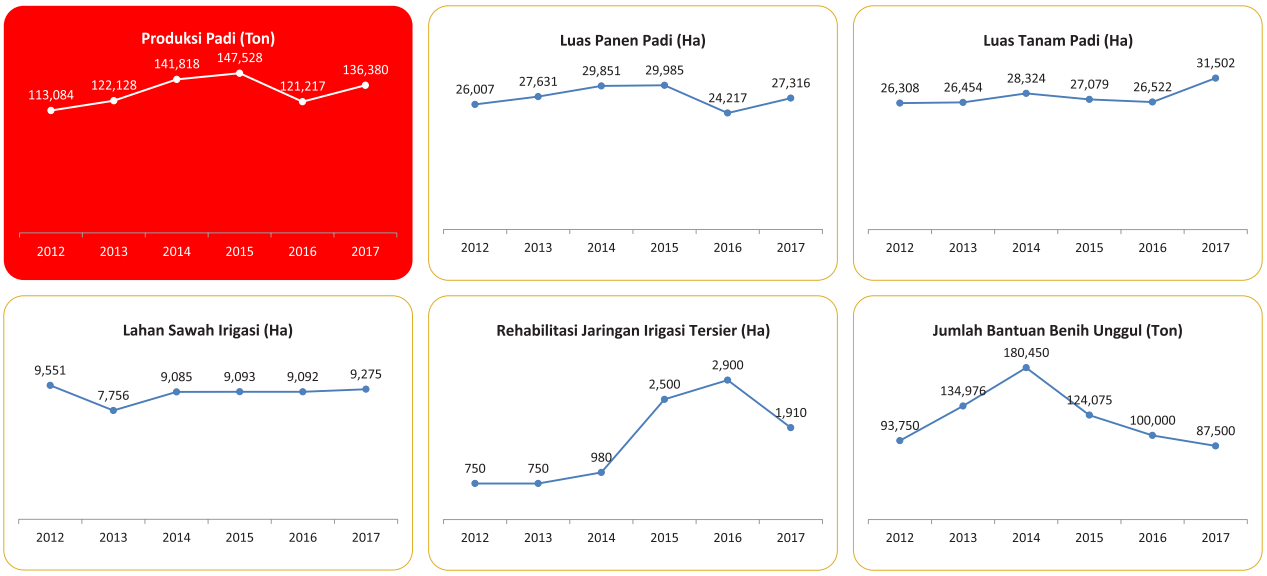

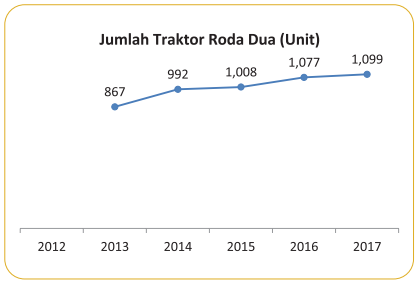

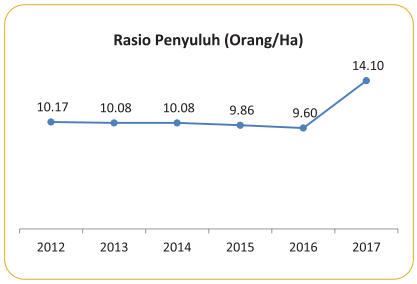

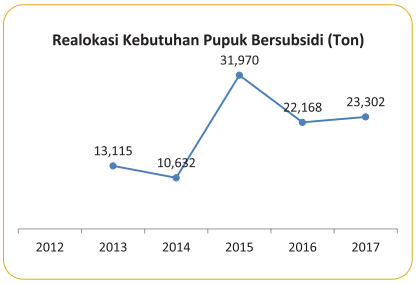

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

Adapun analisis terkait peningkatan produktivitas dari masing-masing indikator pendukung terhadap produksi padi, yaitu sebagai berikut:

- **Luas Panen Padi**

Selama tahun 2012-2017, produksi padi Pasaman Barat mengalami peningkatan seiring peningkatan luas panen dan luas lahan tanam. Sedangkan hasil produksi pada tahun 2016 menurun dikarenakan menurunnya luas panen akibat menurunnya luas tanam padi dimana sebagian lahan tidak dapat digunakan untuk menanam padi. Hal ini dikarenakan adanya beberapa irigasi teknis yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah sehingga dilakukan pergiliran tanaman dari padi ke jagung yang mengakibatkan menurunkan luas tanam padi. Adapun beberapa lokasi wilayah persawahan yang mengalami perbaikan jaringan irigasi primer dan sekunder oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) yaitu, di Kecamatan Talamau, Gunung Tuleh, Ranah Batahan, dan Luhak Nan Duo.

- **Lahan Sawah Irigasi**

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier cenderung meningkat setiap tahunnya sebagai upaya untuk meningkatkan luas sawah irigasi dan produktivitas lahan padi. Bantuan rehab irigasi tersier berasal dari dana pusat kementerian pertanian dengan volume 2.900 ha pada tahun 2016. Namun pelaksanaan rehabilitasi tersebut agak terlambat dilaksanakan akibat adanya perbaikan irigasi oleh Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat di tahun 2016. Hal ini mengakibatkan terjadinya tunda tanam di bulan Oktober sampai Desember 2016 sehingga panen baru akan dilakukan pada tahun 2017. Tertundanya masa panen berdampak pada menurunnya luas panen dan jumlah produksi padi di tahun 2016.

- **Jumlah Traktor Roda Dua**

Ketersediaan alat mesin pertanian seperti traktor roda dua berfungsi untuk mempercepat pengolahan tanah agar siap tanam sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. Idealnya traktor mampu mengolah lahan tiga hektar dalam sehari. Ketersediaan traktor roda dua cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu dengan jumlah tertinggi di tahun 2016 mencapai 1.077 unit. Namun, pembagian bantuan traktor ini belum merata sehingga untuk wilayah sentra produksi pangan masih belum mencukupi. Sedangkan di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo, data ketersediaan traktor roda dua relatif tinggi karena pada umumnya petani sudah memiliki traktor roda dua secara pribadi yang berfungsi untuk mengolah tanah sekaligus alat untuk mengangkut hasil pertanian.

- **Rasio Penyuluh**

Penguatan kelembagaan terdiri dari jumlah tenaga penyuluh, jumlah kelompok tani, dan jumah kelembagaan tani. Idealnya satu tenaga penyuluh meliputi wilayah kerja dengan luas lahan 100 ha dan membina 8 kelompok tani. Namun, jumlah tenaga penyuluh yang ada yaitu sejumlah 70 orang di 96 wilayah kerja penyuluh (WKP) untuk sebanyak 1.196 kelompok tani. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas baku lahan seluas 13.105 ha, dengan 19 nagari dan 212 jorong (desa). Sehingga, kebutuhan tenaga penyuluh untuk Kabupaten Pasaman Barat idealnya sekitar 130 orang, yang artinya saat ini baru terpenuhi sekitar 54%. Sedangkan selama tahun 2014-2016, ketersediaan tenaga penyuluh mengalami penurunan disebabkan adanya penyuluh yang pensiun, mutasi ke bagian struktural sementara proses penerimaan tenaga penyuluh baru tidak ada. Baru kemudian di tahun 2017, terjadi peningkatan tenaga penyuluh yang cukup signifikan dari 9,6 orang/ha menjadi 14,10 orang/ha. Adapun peranan penting dari tenaga penyuluh, yaitu: (1) penyuluh sebagai penasehat/advisor, (2) penyuluh sebagai teknisi, (3) penyuluh sebagai penghubung, (4) penyuluh sebagai organisator, (5) penyuluh sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan diperlukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya petani dan penyuluh sehingga mampu merubah pola pikir awal dari hanya petani biasa menjadi petani berdasi yang menggunakan teknologi modern.

- **Ketersediaan Pupuk Bersubsidi**

Ketersediaan pupuk sangat mempengaruhi produksi padi karena merupakan sumber nutrisi bagi tanaman. Dapat dilihat adanya korelasi antara ketersediaan pupuk subsidi dengan jumlah produksi, dimana tren pada tahun 2015 merupakan angka tertinggi yaitu sebanyak 31,970 ton mampu meningkatkan produksi padi 147,528 ton padi. Lalu subsidi pupuk menurun signifikan di tahun 2016 yang diikuti dengan menurunnya produksi padi. Berlanjut di tahun 2017, jumlah subsidi pupuk kembali sedikit bertambah dan jumlah produksi pun mengalami peningkatan kembali walaupun masih di bawah capaian tahun 2015.

- **Jumlah Bantuan Benih Unggul**

Ketersediaan benih unggul pada tahun 2014 sebanyak 180.450 kg, lalu kemudian sejak tahun 2015-2017 terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2017 bantuan benih unggul yang tersedia sebanyak 87.500 kg. Selain jumlahnya yang menurun, implementasi penerimaan bantuan benih unggul oleh petani juga mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan terjadinya **tunda tanam benih unggul** karena petani sudah terlanjur menanam benih padi lokal atau menanam tanaman jagung.

B.2. Prioritas Intervensi Konsumsi Energi dan Protein

Pola pangan penduduk di Pasaman Barat mengalami peningkatan baik konsumsi energi maupun protein. Angka kecukupan kalori/energi (AKE) penduduk Pasaman Barat terus mengalami peningkatan namun masih di bawah standar Rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yakni 2,150 kkal/kapita/hari. Hal ini dilihat dari konsumsi energi penduduk Pasaman Barat pada tahun 2016 yang baru mencapai 1,837 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk standar Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kapita/hari sudah terpenuhi dan bahkan telah mencapai angka 65 gram/kapita/hari. (Gambar 4.10).

Gambar 4.10 Analisis Keterkaitan Pola Konsumsi

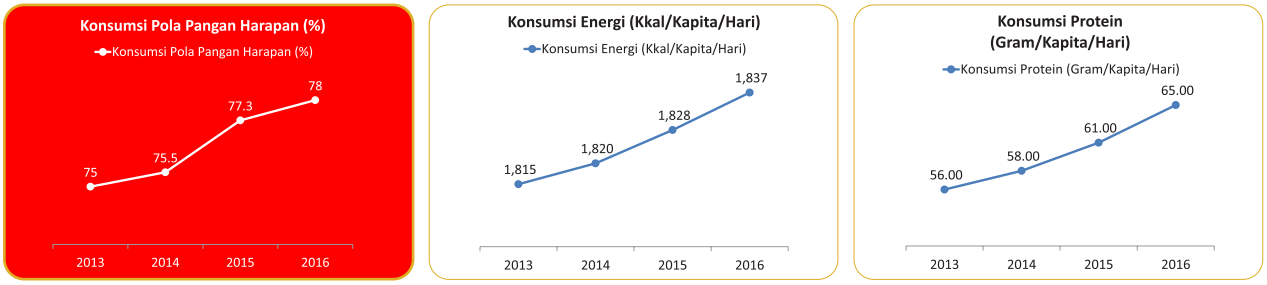

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

Ikan adalah salah satu sumber protein yang dominan dikonsumsi oleh penduduk di Pasaman Barat. Konsumsi protein belum menjadi prioritas masyarakat karena masih menganggap bahwa protein hewani adalah makanan yang yang dinilai mahal. Hasil analisis keterkaitan (*causal relationship*) antara indikator utama (Konsumsi Protein) dan indikator-indikator pendukung atau determinannya menunjukkan konsumsi protein penduduk Pasaman Barat selain dipengaruhi oleh faktor harga juga dipengaruhi oleh: (i) ketersediaan jenis pangan hewani yang diproduksi terutama ikan, (ii) daya beli berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita, dan (iii) pengetahuan gizi dilihat dari lamanya rata-rata lama sekolah. Sedangkan produk daging yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah daging ayam. Namun trennya mengalami penurunan akibat mewabahnya penyakit pada ayam sehingga minat peternak berkurang untuk budidaya ayam. Hal ini pun berpengaruh pada jumlah produksi telur yang dihasilkan. (Gambar 4.11).

Gambar 4.11 Analisis Keterkaitan Konsumsi Protein

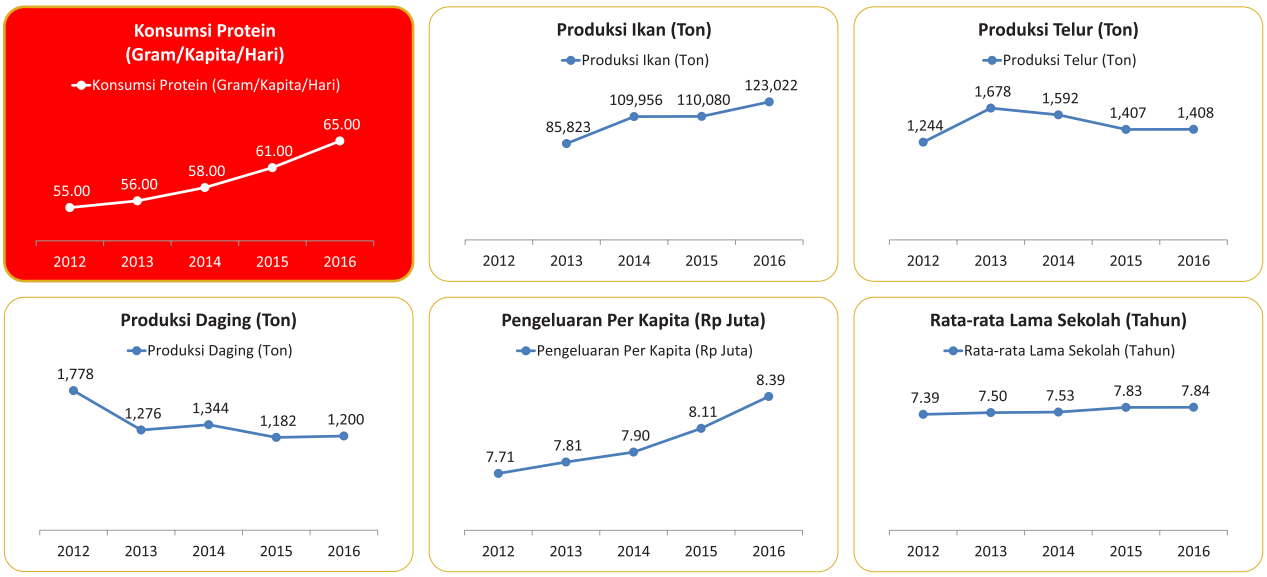

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

C. PRIORITAS WILAYAH

C.1. Peningkatan Produksi Padi Dengan Meningkatkan Lahan Irigasi

Daerah zona merah adalah daerah dengan kondisi luas lahan sawah beririgasi rendah dan tingkat produksi padi juga rendah. Oleh karena itu dengan adanya rehab jaringan irigasi tersier diharapkan luas sawah irigasi meningkat dan proses tanam juga dapat ditingkatkan yang sebelumnya hanya sekali setahun menjadi dua kali. Namun, rehab irigasi dapat dilakukan jika irigasi primer dan sekundernya dalam keadaan baik. (Gambar 4.12).

Gambar 4.12. Pengelompokan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Produksi Padi (Ton) dan Lahan Sawah Beririgasi (Ha) di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017

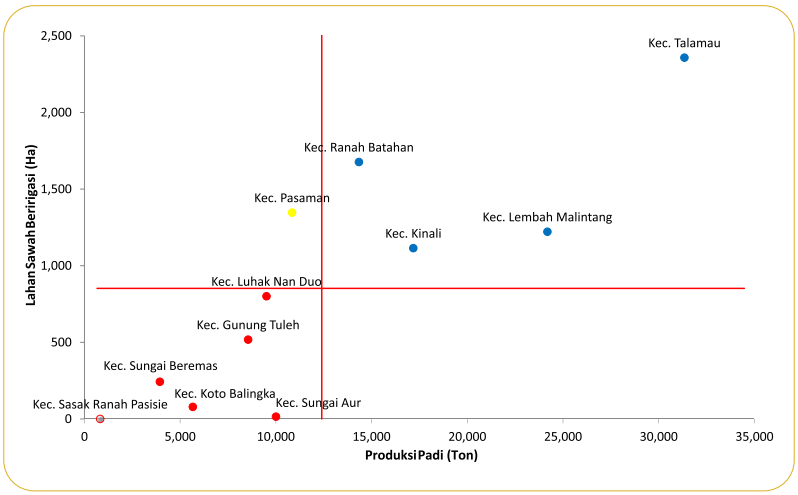

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

C.2. Peningkatan Produksi Padi Dengan Meningkatkan Alat Traktor Roda Dua

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam rangka percepatan tanam dapat mengurangi biaya serta mengefisienkan tenaga kerja yang ada. Pada gambar terlihat bahwa jumlah traktor roda dua yang tertinggi terdapat di Kecamatan Luhak Nan Duo namun produksi padi yang dihasilkan rendah, karena sebagian besar petani disana pada umumnya memiliki traktor roda dua pribadi selain untuk membajak juga digunakan sebagai alat angkut hasil pertanian. (Gambar 4.13)

Gambar 4.13. Pengelompokan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Produksi Padi (Ton) dan Jumlah Traktor Roda Dua (Unit) di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2016

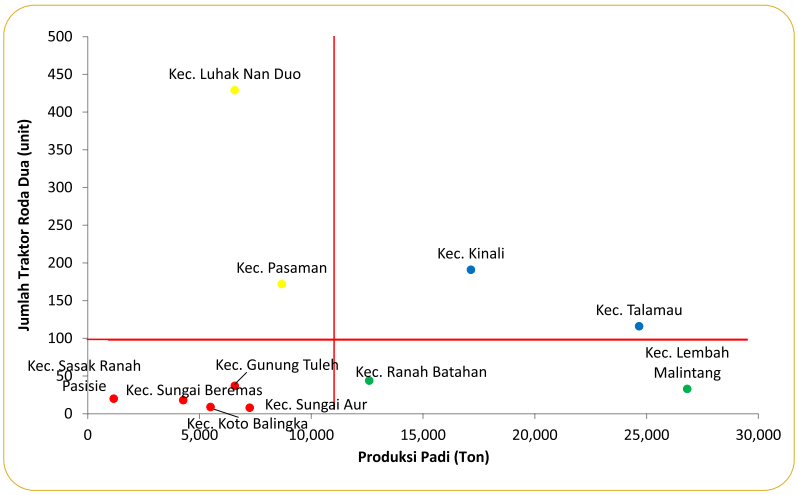

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

(catatan: data jumlah traktor roda dua per kecamatan tersedia tahun 2016)

C.3. Peningkatan Produksi Padi Dengan Meningkatkan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Daerah zona merah lebih sedikit mendapat alokasi pupuk bersubsidi karena sebagian besar memang bukan wilayah sentra padi.. Dalam pertumbuhan tanaman diperlukan pupuk sebagai sumber nutrisi. Tanaman yang diberikan pupuk dengan tanaman yang tidak diberi pupuk jelas memiliki perbedaaan yang signifikan. Selain itu, cara pemberian pupuk juga perlu diperhatikan sesuai dengan dosis dan kondisi wilayah agar hasil produksi maksimal. (Gambar 4.14).

Gambar 4.14. Pengelompokan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Produksi Padi (Ton) dan Realokasi Pupuk Bersubsidi (Ton) di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2016

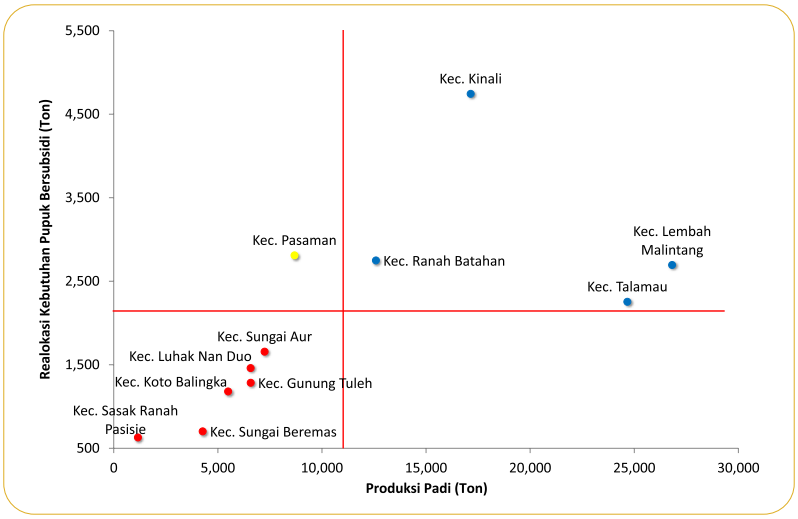

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

C.4. Peningkatan Produksi Padi Dengan Meningkatkan Bantuan Benih Unggul

Benih yang digunakan petani disesuaikan dengan varietas yang diusulkan petani melalui kelompok tani. Namun terkadang pendropingan terlambat karena pengadaan benih dilaksanakan dengan proses lelang selain itu stok benih dari rekanan kurang sehingga petani menanam dengan komoditi lain ataupun dengan benih lokal. Tahun 2016 ini bantuan benih meliputi padi sawah dan padi gogo dimana lebih dominan diberikan untuk wilayah zona biru karena merupakan wilayah sentra. Penangkar yang masih aktif terdapat di kecamatan Pasaman dan Lembah Melintang sehingga masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan benih di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk itu perlu penumbuhan penangkar melalui pembinaan yang intensif terhadap petani agar termotivasi untuk jadi penangkar. (Gambar 4.15).

Gambar 4.15. Pengelompokan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Produksi Padi (Ton) dan Jumlah Bantuan Benih Unggul (Ton) di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2016

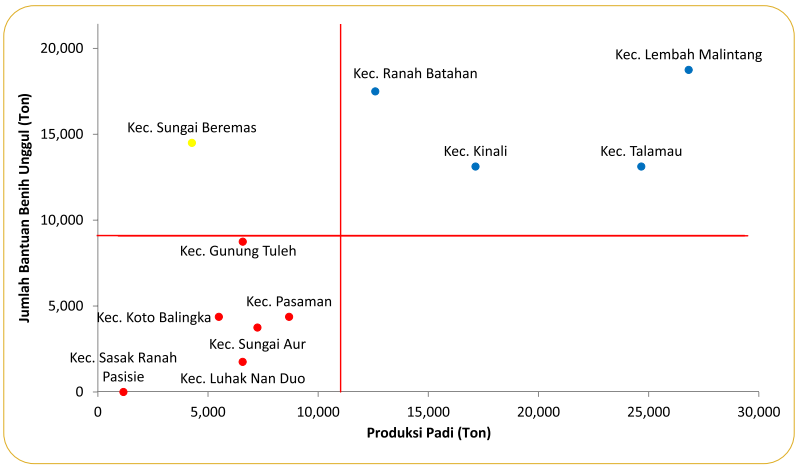

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

C.5. Peningkatan Konsumsi Energi Dengan Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

Hampir seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Ranah Batahan, Lembah Malintang, dan Talamau mengalami defisit antara kebutuhan beras dibandingkan ketersediaan beras. Sedangkan jika dibandingkan antara jumlah produksi beras dan kebutuhan maka Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Koto Balingka, Sungai Beremas, Pasaman dan Luhak Nan Duo merupakan kecamatan dengan kebutuhan beras tidak seimbang antara produksi dengan konsumsi. Salah satu penyebab berkurangnya ketersediaan pangan di suatu wilayah selain produksi padi dan beras yang dihasilkan adalah karena adanya perpindahan hasil produksi ke wilayah lain. Akibat dari pindahnya hasil pertanian pada daerah lain akan mengurangi ketercukupan pada pangan dan pada umumnya di Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, pemerintah berupdaya untuk memperkuat sistem agribisnis masyarakat dengan menghidupkan kembali program kegiatan resi gudang dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)/LUEP. (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Produksi Padi, Produksi Beras, Jumlah Ketersediaan Beras dan Kebutuhan Beras per Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2016

	Produksi Padi (Ton)	Konversi Padi ke Beras (Ton)	Jumlah Ketersediaan Beras (Ton)	Jumlah Kebutuhan Pangan Utama Beras (Ton)	Surplus/Defisit Beras (Ton)
Kec. Sungai Beremas	4,270	2,391	2,391	2,800	-409
Kec. Ranah Batahan	12,592	7,052	3,878	2,935	944
Kec. Koto Balingka	5,492	3,076	2,614	3,316	-702
Kec. Sungai Aur	7,244	4,057	3,448	4,056	-608
Kec. Lembah Malintang	26,817	15,017	9,010	5,316	3,695
Kec. Gunung Tuleh	6,577	3,683	2,210	2,355	-145
Kec. Talamau	24,666	13,813	8,288	2,988	5,300
Kec. Pasaman	8,681	4,861	3,646	8,339	-4,693
Kec. Luhak Nan Duo	6,573	3,681	3,129	4,730	-1,602
Kec. Sasak Ranah Pasisie	1,162	651	651	1,630	-979
Kec. Kinali	17,142	9,599	6,720	8,019	-1,300

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat

D. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN

D.1. Belanja Program

Hampir 40 persen realisasi belanja terkait ketahanan pangan digunakan untuk program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Variabel yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam analisis belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan daerah adalah penempatan belanja pada program-program prioritas utama yang wajib untuk diberikan porsi yang lebih pada pembiayaannya. Adapun belanja pada bidang ekonomi dengan isu peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat di laksanakan melalui 9 (sembilan) program utama yang dijalankan oleh: 1) Dinas Ketahanan Pangan, 2) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 3) Dinas Perkebunan, dan 4) Dinas Perikanan. Adapun komposisi belanja terbesar adalah untuk program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Hal ini disebabkan karena ada kegiatan berupa pembangunan fisik sarana dan prasarana pertanian/perkebunan seperti pembangunan jalan usaha tani, jalan produksi dan lain sebagainya. Sementara komposisi belanja terkecil adalah program untuk peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan berupa promosi hasil ternak. (Gambar 4.16).

Gambar 4.16. Komposisi Realisasi Belanja untuk Ketahanan Pangan Menurut Program

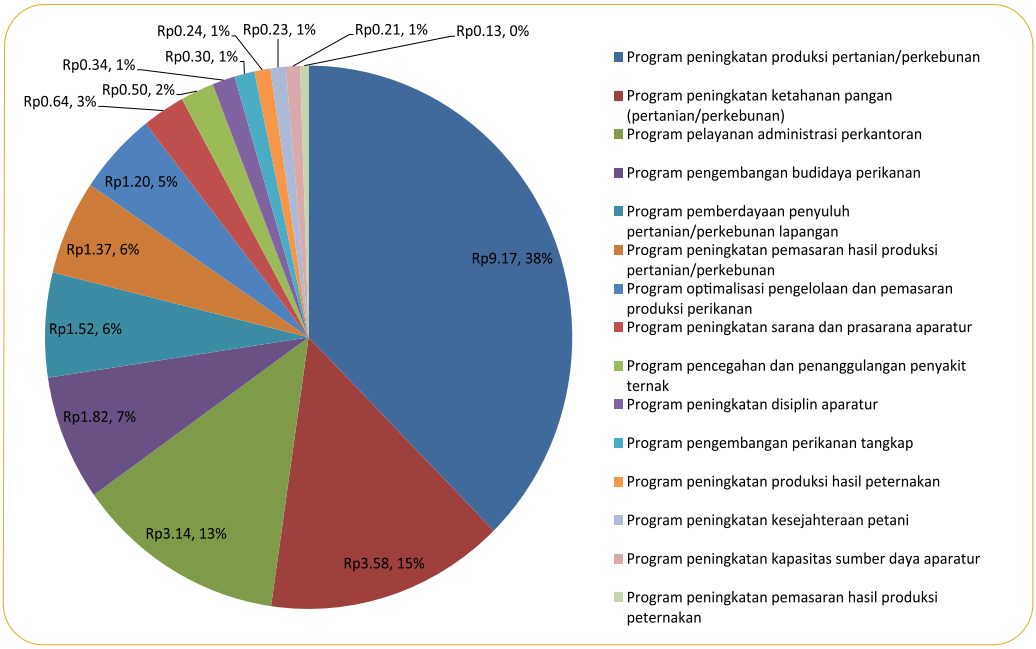

Sumber: APBD Realisasi Tahun 2017

D.2. Belanja Kegiatan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Sebagian besar alokasi belanja digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan. Pada tahun 2017, lebih dari 80% belanja program peningkatan produksi pertanian/perkebunan digunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana pertanian/perkebunan (Rp 6,34 miliar). Sedangkan tahun 2014, terdapat dana DAK tanaman pangan dan holtikultura dengan alokasi Rp 4 miliar namun hanya terealiasikan 34%, yaitu Rp 1,35 miliar. Sedangkan untuk kegiatan operasional sarana prasarana pertanian, operasional tanaman pangan dan hortikultura merupakan pendamping kegiatan dari dana APBN (pendamping Tugas Pembantuan). Kemudian, pada tahun 2014-2015 terdapat alokasi

belanja untuk kegiatan perbanyakan benih sumber sebagai benih unggul yang bertujuan untuk memperbanyak varietas dan kini sudah diakui oleh nasional. (Gambar 4.17).

Gambar 4.17. Komposisi Realiasi Belanja (Rp Miliar dan Persen) Kegiatan untuk Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Kabupaten Pasaman Barat

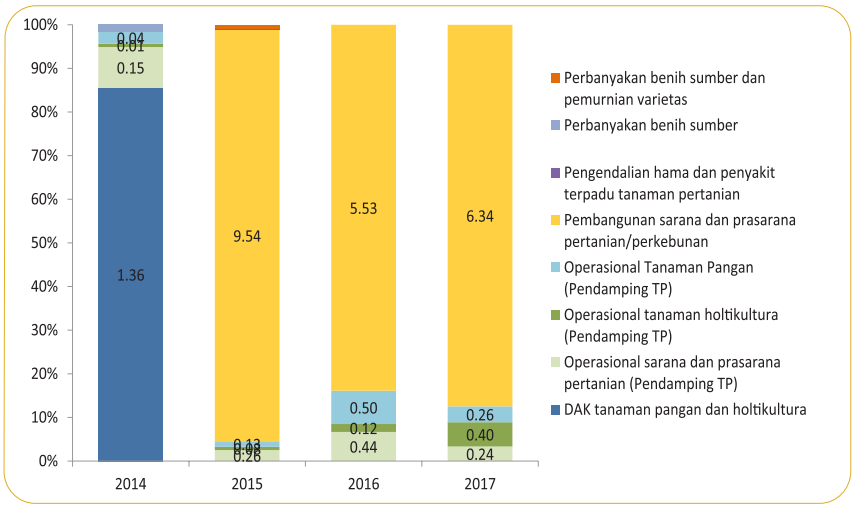

Sumber: APBD Realisasi Tahun 2014-2017

Program Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Sebagian besar 37% belanja program ketahanan pangan digunakan untuk pengkoordinasian dan pengendalian raskin. Pada tahun 2017, realisasi belanja untuk program ketahanan pangan sebanyak Rp 1,3 miliar digunakan untuk pengkoordinasi dan pengendalian raskin yang menyebar di seluruh kecamatan. Namun, pada tahun 2014 dan 2015 terdapat dukungan dana kegiatan penumbuhan lumbung pangan masyarakat *Rice Milling Unit* (RMU) melalui dana DAK fisik dengan alokasi anggaran Rp 875 juta (2014) dan Rp 1,17 miliar (2015). Namun, realisasi penyerapan DAK untuk pembangunan lumbung pada tahun 2014 masih relatif rendah hanya 2.2%, baru di tahun 2015 telah mencapai penyerapan 98%. Dengan adanya lumbung pangan di masyarakat maka hasil panen petani dapat ditampung ditempat ini dengan aman. Upaya yang masih perlu dilakukan adalah pembinaan terhadap lumbung pangan tersebut serta cara pemeliharaan dan perawatannya. (Gambar 4.18).

Gambar 4.18. Komposisi Realiasi Belanja Kegiatan untuk Program Ketahanan Pangan, Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017

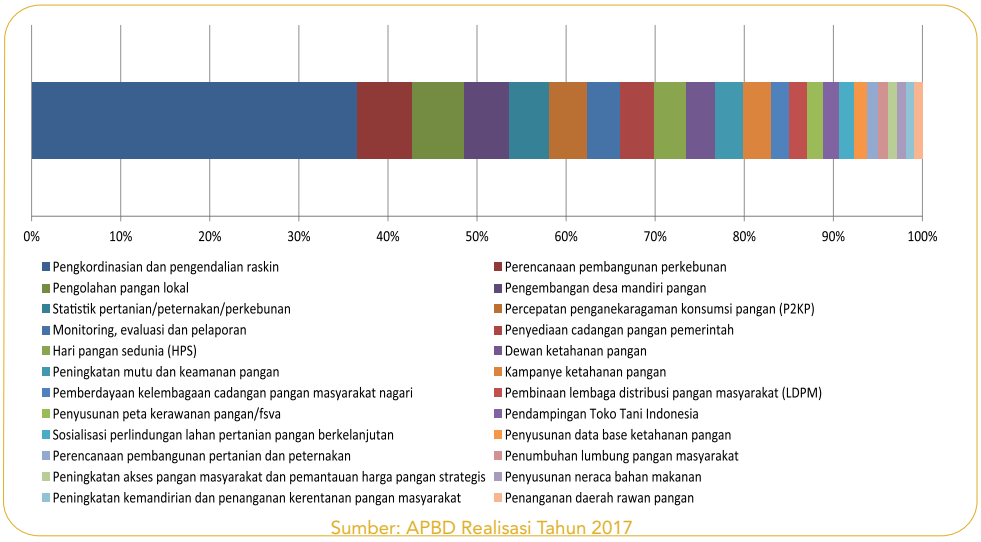

Sumber: APBD Realisasi Tahun 2017

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan bertujuan untuk meningkatkan SDM penyuluh melalui bimtek, pelatihan, sosialisasi. Dalam program ini terdapat 7 kegiatan yaitu: (1) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, (2) Penyusunan Programa penyuluhan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan, (3) Penilaian kredit poin penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan, (4) Melaksanakan supervisi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan, (5) Dana operasional UPT- Balai Penyuluh (UPT-BP), (6) Fasilitasi penilaian penyuluh, petani/gapoktan berprestasi, (7) Pelaksanaan training penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan. Alokasi dana terbesar pada kegiatan Operasional UPT-BP dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, namun ditahun 2017 anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan mengalami penurunan yang sangat drastis karena sewaktu perubahan nomenklatur wewenang penyuluh pindah dari BP2KP menjadi wewenang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Dimana Pemerintah Daerah sedang mengalami defisit sehingga ada pengurangan dana.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Anggaran dana paling dominan terdapat di kegiatan penguatan kelembagaan tani yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM petani dengan melakukan pertemuan, pelatihan, bimtek. Kegiatan pembinaan dan monitoring LKMA serta pengembangan UP3HP bertujuan agar kelembagaan tani selalu aktif dan bisa mandiri. Perlu komitmen dari seluruh anggota untuk memajukan kelembagaannya.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Beberapa kegiatan di bawah program peningkatan produksi hasil peternakan meliputi: (1) Peningkatan produksi pakan, (2) Pengembangan kawasan produksi peternakan, (3) Operasional kegiatan peternakan (pendamping TP), dan (4) Pengadaan sarana dan prasarana inseminasi buatan. Selama dua tahun terakhir 2016-2017, alokasi belanja digunakan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana inseminasi buatan (Rp 157 juta). (Gambar 4.19).

Gambar 4.19. Komposisi Realiasi Belanja Kegiatan untuk Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Pasaman Barat

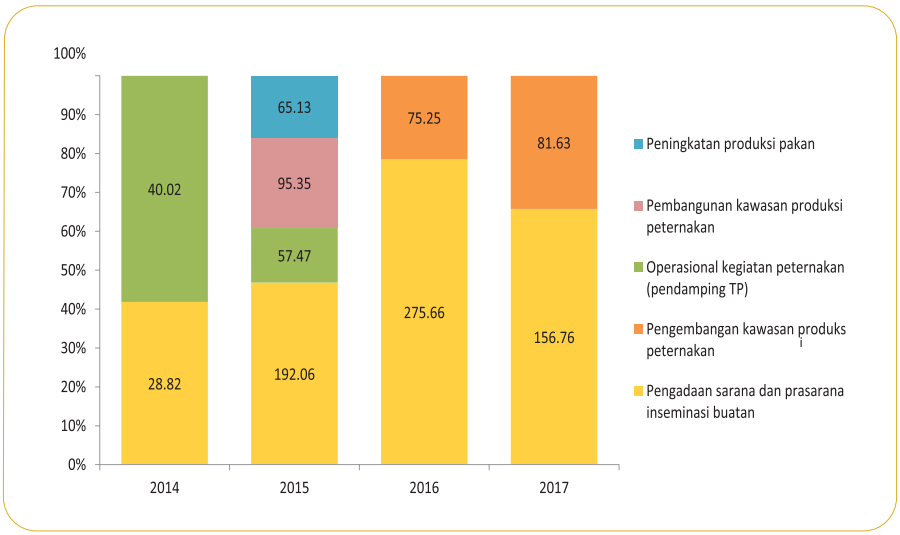

Sumber: APBD Realisasi Tahun 2014-2017

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program pengembangan perikanan tangkap bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui berbagai kegiatan diantaranya peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, peningkatan alat penangkapan ikan, pelatihan dan bimbingan, serta sosialisasi di bidang perikanan tangkap. Pada tahun 2017, belanja realisasi untuk program ini mengalami penurunan karena sebelumnya di tahun 2014-2016 lebih banyak kegiatan untuk penyediaan fisik sarana prasarana dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau tempat pelelangan di Sasak dan Aia Bangih. Pada tahun 2016, pemerintah memberikan jaminan asuransi dengan melakukan kegiatan pendataan dan pembuatan kartu nelayan. Sedangkan upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan kapal perikanan (Rp 117 juta) dengan pendataan dan penandaan kapal sebanyak 100 unit dan penyediaan alat bantu penangkapan 120 unit serta alat tangkap jaring *gillnet 14 piece*. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk belanja kegiatan pengelolaan kapal perikanan (Rp 183 juta). (Gambar 4.20).

Gambar 4.20. Nilai Realiasi Belanja (Rp Juta) Kegiatan untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Pasaman Barat

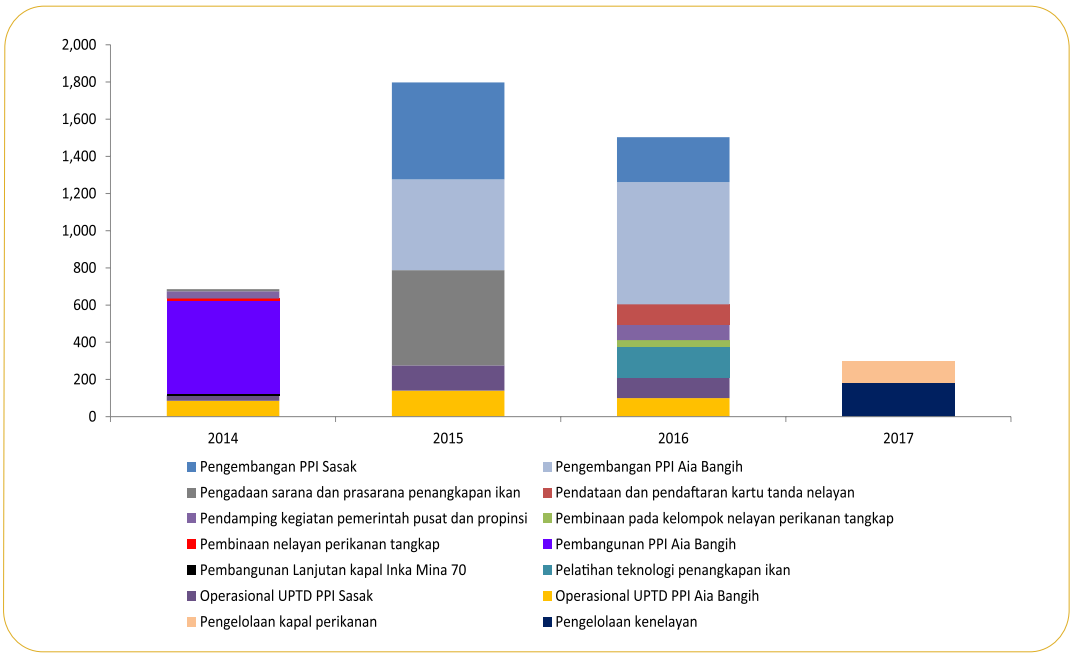

Sumber: APBD Realisasi Tahun 2014-2017

E. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT PRIORITAS INTERVENSI

E.1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program difokuskan pada pemenuhan pangan utama yang dilakukan dengan kegiatan peningkatan produksi padi melalui intensifikasi. Kegiatan intensifikasi dilakukan melalui:

Pemakaian bibit unggul

Dalam peningkatan produksi dibutuhkan bibit unggul dimana manfaatnya dirasakan oleh petani yaitu mempercepat masa panen sehingga memberikan keuntungan kepada petani untuk menghasilkan padi. Namun ketersediaannya kadang tidak terpenuhi untuk itu perlu penumbuhan

penangkar-penangkar benih di kawasan sentra, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pemupukan berimbang

Untuk mendapatkan hasil gabah yang tinggi dengan mempertahankan kesuburan tanah, maka perlu dilakukan kombinasi pupuk anorganik dengan organik. Pemupukan sangat berperan dalam pertumbuhan padi yang maksimal asal tepat waktu dan tepat dosis.

Pengairan yang baik

Pengairan termasuk dalam sarana pertanian jika sarana irigasi baik maka air yang dibutuhkan tanaman tersedia. Selain itu diperlukan tempat persediaan air untuk antisipasi musim kemarau seperti dengan membangun dam parit/embung. Untuk itu perlu adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian.

Pengendalian organisme pengganggu tanaman

Pengendalian organisme pengganggu tanaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi. Untuk itu petani perlu mengetahu bagaimana cara pengendalian OPT secara tepat dan ramah lingkungan.

Penggunaan alat mesin pertanian

Peningkatan produksi padi tidak lepas dari dukungan tekhnologi yang bermanfaat dalam penurunan biaya dan hemat tenaga. Penerapan tekhnologi pertanian mampu menekan biaya produksi hingga 40%.

E.2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan)

Fokus program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dalam pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan:

- Perencanaan pembangunan pertanian terkait alih fungsi lahan dengan melakukan audit luas baku lahan. Hal ini rencananya akan dilakukan pada tahun depan 2019. Kegiatan ini dianggap perlu karena luas baku lahan merupakan dasar untuk menetapkan target produksi, luas tanam dan luas panen.
- Penyediaan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi gagal panen, dan penanganan pasca bencana alam.
- Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan untuk perbaikan konsumsi energi dan protein per kapita.
- Pengolahan pangan lokal untuk peningkatan nilai tambah produk olahan sehingga berdaya jual tinggi.
- Penumbuhan lumbung pangan masyarakat sebagai wadah penyediaan stok pangan ditingkat kecamatan.

E.3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Fokus kegiatan untuk pemberdayaan penyuluh adalah:

- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan merupakan upaya dalam peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan peningkatan peran fungsi kelembagaan petani

- Dana operasional UPT- Balai Penyuluh (UPT-BP) dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tenaga penyuluh dalam melakukan penyuluhan.
- Kegiatan supervisi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan merupakan wadah untuk mengevaluasi hasil kerja penyuluh dilapangan.
- Pelaksanaan training penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan bertujuan untuk saling memberikan informasi dan belajar bersama-sama antara penyuluh dan petani.

E.4. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Fokus kegiatan dalam program peningkatan kesejahteraan petani adalah kegiatan penguatan kelembagaan tani. Perlu dibangun kesadaran berkomunitas/kelompok yang tumbuh atas dasar kebutuhan bukan paksaan dan dorongan proyek-proyek tertentu. Dari komunitas inilah dibentuk suatu kelembagaan yang dibina agar petani dapat menentukan harga dan keuntungan yang layak.

F. REKOMENDASI

Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan pemenuhan pangan masyarakat, adalah sebagai berikut:

- Terkait laju fungsi lahan, maka perlu: (1) dilaksanakan audit luas baku lahan sawah pada tahun 2019 sehingga dengan mengetahui luas baku lahan yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang tepat terkait dengan peningkatan produksi padi.; (2) penerapan Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan); (3) penetetapan regulasi berupa peraturan bupati mengenai LP2B disertai dengan petunjuk teknis (juknis) LP2B guna menghambat laju alih fungsi lahan.
- Sebagai upaya meningkatkan produksi padi, maka diperlukan: (1) penambahan luas tanam melalui cetak sawah; (2) meningkatkan produktivitas pertanian padi dengan penggunaan benih unggul padi, pupuk bersubsisi, infrastruktur irigasi, alat traktor, dan peningkatan pembinaan melalui tenaga penyuluh. Selain itu diperlukan juga peningkatan pembinaan dan penumbuhan penangkar untuk padi sawah maupun padi gogo dari APBD.
- Sebagai upaya meningkatkan gizi konsumsi energi dan protein, maka diperlukan sosialisasi pola hidup sehat dengan meningkatkan diversifikasi/keanekaragaman pangan, dan menjaga keamanan pangan dengan adanya peraturan dalam perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya pada makanan.
- Untuk menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat di Pasaman Barat, maka perlu dilakukan: (1) pemanfaatan resi gudang dan penguatan lumbung pangan masyarakat serta meningkatkan peran bulog dalam serapan gabah; (2) diadakan pos cek point terhadap keluar masuknya komoditi pangan di Kabupaten Pasaman Barat terutama di daerah pintu perbatasan seperti Talamau, Kinali, Ranah Batahan.

BAB 5

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENURUNAN KASUS KEMATIAN IBU, ANAK DAN PREVALENSI *STUNTING*

A. ISU STRATEGIS SEKTOR KESEHATAN

Masalah kesehatan ibu dan anak, serta status gizi adalah salah satu prioritas utama di bidang kesehatan nasional. Terdapat empat isu utama pembangunan nasional di bidang kesehatan berdasarkan RPJMN 2015-2019, yaitu: kesehatan ibu dan anak; status gizi; pengendalian penyakit; dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesehatan ibu dan anak ditunjukkan oleh masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Pada tahun 2015, tercatat untuk AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup; dan AKB sebanyak 15 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan masalah status gizi ditunjukkan dengan angka prevalensi balita *stunting*. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 menunjukkan prevalensi balita *stunting* di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6% di atas batasan yang ditetapkan WHO (20%). *Stunting* adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita *stunting* akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif yang berdampak tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak dan kemiskinan dalam jangka panjang.

Kasus kematian ibu di Kabupaten Pasaman Barat meningkat pada tahun 2017. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasaman Barat terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 241,28 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Angka ini juga termasuk tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu berada di urutan posisi ke-3 teratas setelah Kota Padang Panjang (275,48 per 100.000 kelahiran hidup) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (327,87 per 100.000 kelahiran hidup). (Gambar 5.1).

Gambar 5.1 Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu

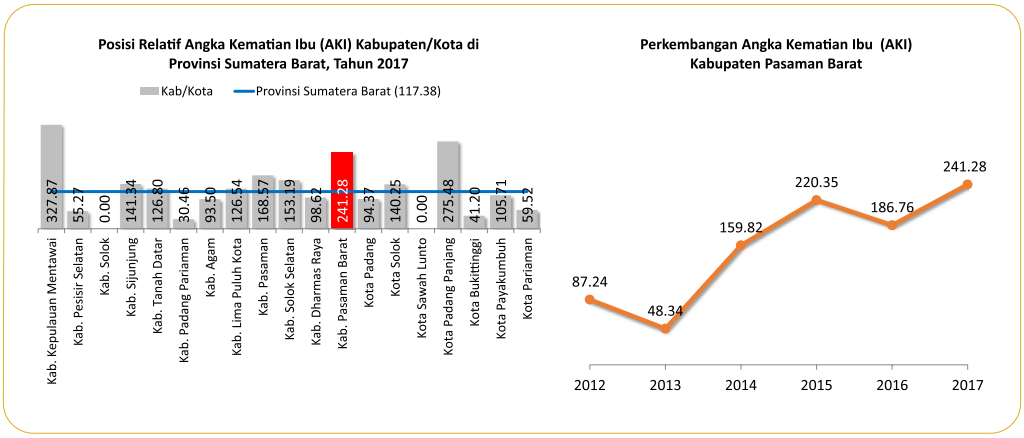

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Pasaman Barat menurun, tetapi masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Kasus kematian bayi di Pasaman Barat sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015, yaitu dengan AKB sebanyak 12,31 per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian, angka ini menurun selama dua tahun, hingga pada tahun 2017 tercatat sebesar 9,53 per 1.000 kelahiran. Namun, angka ini masih relatif tinggi di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2017, AKB di Pasaman Barat (9,53 per 1.000 kelahiran hidup) sedangkan Provinsi Sumatera Barat (6,33 per 1.000 kelahiran hidup). Oleh karena itu,

masalah kematian bayi juga merupakan prioritas utama kesehatan khususnya pada kesehatan ibu dan anak di Pasaman Barat. (Gambar 5.2).

Gambar 5.2 Posisi Relatif dan Relevansi Angka Kematian Bayi

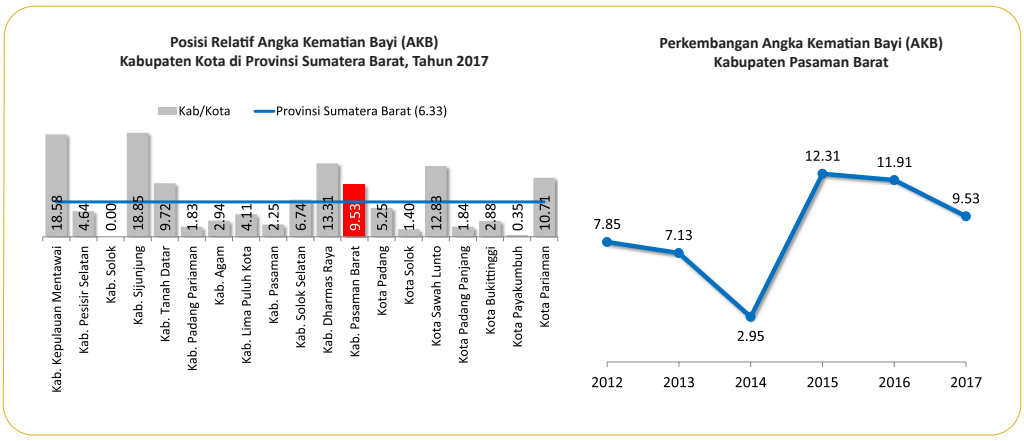

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Prevalensi balita *stunting* di Pasaman Barat juga cukup tinggi walaupun sudah menunjukkan perbaikan dalam waktu tiga tahun terakhir. Angka prevalensi balita *stunting* di kabupaten Pasaman Barat terus mengalami penurunan dari 34,14% di tahun 2015 menjadi 32,23% di tahun 2016, dan kemudian turun kembali ke angka 32,09% di tahun 2017. Namun, angka ini masih relatif tinggi dibandingkan angka capaian nasional (29,60%) maupun rata-rata Provinsi Sumatera Barat (30,60%). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, terdapat 9 (sembilan) daerah dengan angka prevalensi balita *stunting* di atas rata-rata provinsi, dimana Pasaman Barat menduduki posisi urutan ketujuh teratas setelah Kabupaten Pasaman (40,56%); Solok (39,88%); Sijunjung (38,67%); Solok Selatan (36,17%); Padang Pariaman (33,60%); dan Tanah Datar (32,95%). Selain itu, Pasaman Barat juga merupakan salah satu 160 wilayah prioritas nasional untuk percepatan dan pencegahan *stunting* (anak kerdil) di Indonesia pada tahun 2018, berdasarkan pada indikator lainnya selain prevalensi balita *stunting* yang tinggi di tingkat nasional. (Gambar 5.3).

Gambar 5.3. Posisi Relatif dan Relevansi Angka Prevalensi Balita *Stunting*

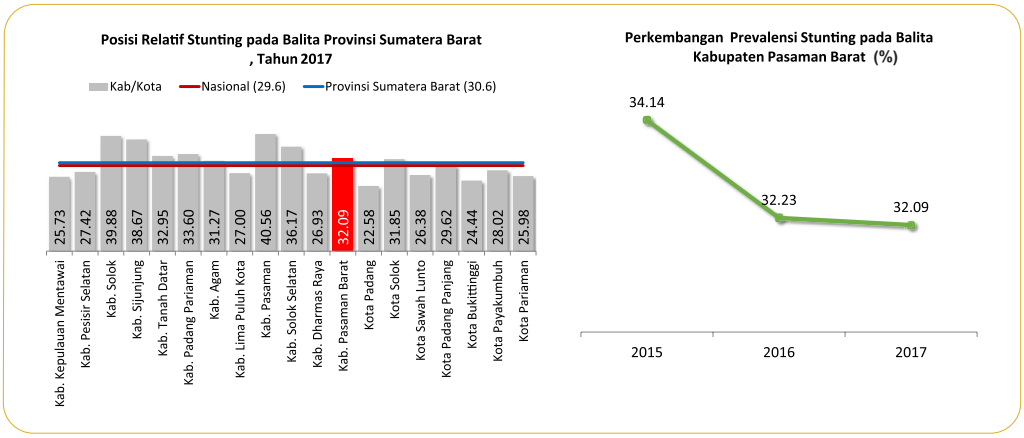

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan analisis di atas, maka isu kesehatan ibu dan bayi berdasarkan AKI dan AKB, serta masalah status gizi dengan prevalensi balita *stunting* menjadi masalah utama di bidang kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat yang akan dianalisis lebih lanjut pada bab ini.

B. PRIORITAS INTERVENSI

B.1. *Theory of change* untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Sebagai upaya penentuan prioritas intervensi untuk penurunan AKI dan AKB, maka tim teknis TKPK Kabupaten Pasaman Barat bersama-sama menyusun logika program (*theory of change*) dengan tujuan akhir, yaitu menurunnya indikator utama AKI dan AKB.

- Kematian ibu dan bayi merupakan peristiwa kompleks yang disebabkan oleh berbagai penyebab yang dapat dibedakan atas determinan dekat, antara, dan jauh. Determinan dekat yang berhubungan langsung dengan kematian ibu merupakan gangguan obstetrik seperti pendarahan, preeklamsia/eklamsia, dan infeksi atau penyakit yang diderita ibu sebelum atau selama kehamilan yang dapat memperburuk kondisi kehamilan seperti jantung, malaria, tuberkulosis, ginjal, dan *acquired immunodeficiency syndrome*. Determinan dekat secara langsung dipengaruhi oleh determinan antara yang berhubungan dengan faktor kesehatan, seperti status kesehatan ibu, status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku penggunaan fasilitas kesehatan. Determinan jauh berhubungan dengan faktor demografi dan sosiokultural. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang kesehatan ibu hamil, pemberdayaan perempuan yang tidak baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, serta kebijakan secara tidak langsung diduga ikut berperan dalam meningkatkan kematian ibu. (Gambar 5.4).

Gambar 5.4. *Theory of change* Bidang Kesehatan untuk Menurunkan AKI dan AKB Kabupaten Pasaman Barat

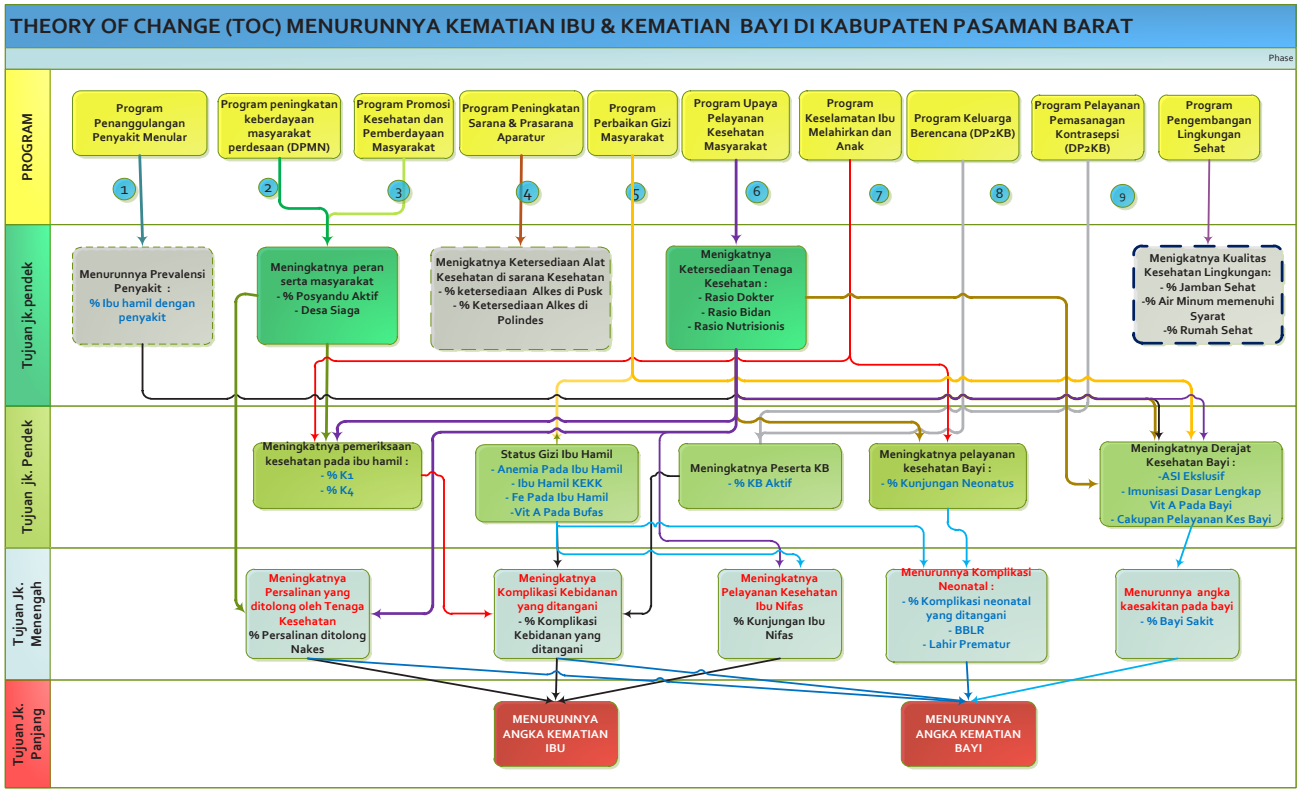

B.1.1. Prioritas Intervensi untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu

Berdasarkan analisis keterkaitan menunjukkan bahwa penurunan AKI memiliki tiga determinan kunci, yaitu: (1) berkurangnya risiko komplikasi reproduksi; (2) meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; dan (3) meningkatnya pelayanan kesehatan ibu pasca melahirkan (nifas). (Gambar 5.5).

Berdasarkan determinan kunci tersebut, maka beberapa prioritas intervensi untuk penurunan AKI, diantaranya:

- **Mengurangi risiko komplikasi kehamilan dengan meningkatkan kunjungan kehamilan, peningkatan asupan gizi ibu hamil dan pendidikan mengenai risiko reproduksi.** Perilaku reproduksi menjadi penyumbang AKI dalam hal ini 4T: hamil terlalu banyak, terlalu rapat, terlalu muda, dan terlalu tua. Keempat hal diatas dapat meningkatkan risiko kehamilan/komplikasi. Jenis komplikasi yang berhubungan langsung dengan kematian ibu merupakan gangguan obstetrik seperti perdarahan, preeklamsi/eklamsi, dan infeksi atau penyakit yang diderita ibu sebelum atau selama kehamilan yang dapat memperburuk kondisi kehamilan seperti jantung, malaria, tuberkulosis, ginjal, dan *acquired immunodeficiency syndrome*. Namun, komplikasi kehamilan terhadap kematian ibu dapat diantisipasi apabila ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Berdasarkan data yang ditunjukkan di Pasaman Barat, terlihat bahwa kunjungan kehamilan (K4) fluktuatif namun secara tren menurun yang mengakibatkan komplikasi kebidanan yang ditangani meningkat. Salah satunya adalah meningkatnya kondisi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) akibat kurang gizi melalui pemberian vitamin A, kalsium, pemberian makanan tambahan. Selain itu mengurangi risiko pendarahan dengan memberikan vitamin zat besi dan asam folat untuk ibu hamil yang mengalami anemia. Kemudian, risiko lainnya yaitu pada ibu yang hamil terlalu sering. Oleh karena itu, peran sosialisasi KB kepada remaja putri dan ibu sangat penting untuk mencegah meningkatnya komplikasi yang mengakibatkan kematian ibu melahirkan.

- **Meningkatkan akses dan kesadaran melakukan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.** Berdasarkan data terlihat bahwa persalinan kesehatan dipengaruhi oleh peningkatan akses terhadap tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Selain itu, kesadaran masyarakat (termasuk ibu hamil/suami/keluarga/masyarakat lingkungan setempat) untuk melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih sangat penting melalui peran desa siaga dan posyandu aktif.

- **Meningkatkan proses pelayanan kesehatan pasca melahirkan (ibu nifas) dengan tersedianya jumlah tenaga kesehatan dan pemberian vitamin A.** Salah satu penyebab kematian ibu terjadi tidak saja ketika proses persalinan namun pasca melahirkan (nifas), terutama apabila mengalami komplikasi infeksi pasca melahirkan. Oleh karena itu, ketersediaan dokter, bidan untuk memberikan pelayanan nifas sangat diperlukan. Selain itu, ibu nifas juga memerlukan kapsul vitamin A dosis tinggi untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit infeksi pasca melahirkan.

Gambar 5.5. Analisis Keterkaitan Angka Kematian Ibu (AKI)

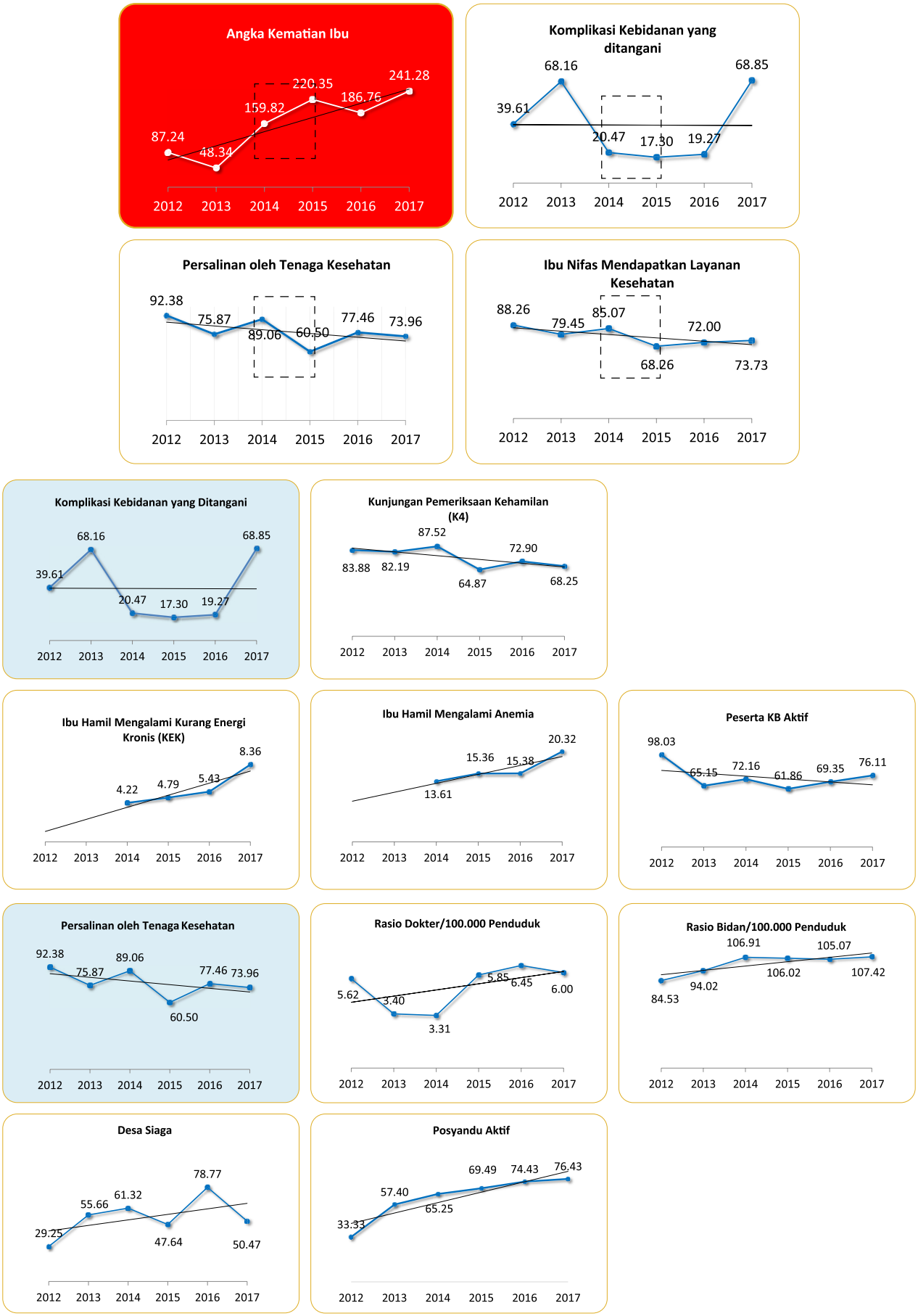

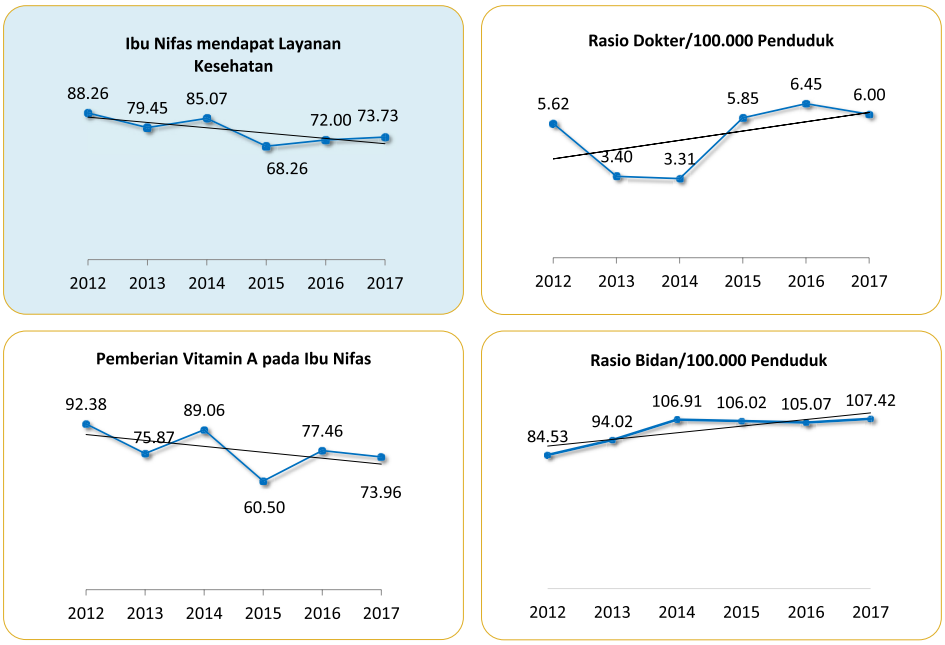

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Catatan: Angka dalam gambar 5.5 adalah dalam satuan persentasi (%) kecuali Angka Kematian Ibu dan Rasio Dokter/100.000 Penduduk dan Rasio Bidan/100.000 Penduduk

B.1.2. Prioritas Intervensi untuk Menurunkan Angka Kematian Bayi

Sedangkan untuk penurunan AKB terdapat lima determinan kunci, yaitu: (1) berkurangnya risiko komplikasi reproduksi; (2) meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (3) berkurangnya risiko komplikasi neonatus pada bayi baru lahir; (4) berkurangnya bayi lahir prematur; dan (5) berkurangnya bayi lahir dengan berat badan rendah. (Gambar 5.6).

Adapun, beberapa prioritas intervensi yang dapat dilakukan untuk penurunan kematian bayi diantaranya:

- **Mengurangi risiko komplikasi kehamilan dengan meningkatkan kunjungan kehamilan, peningkatan asupan gizi ibu hamil dan pendidikan mengenai risiko reproduksi.** Hal ini sama dengan penurunan AKI sebelumnya dimana dengan mengurangi risiko kehamilan akan mengurangi risiko pada ibu dan anak yang dilahirkan.

- **Meningkatkan akses dan kesadaran melakukan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.** Sama halnya dengan penanganan AKI, untuk mencegah kematian bayi maka diperlukan peningkatan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat melalui desa siaga dan posyandu aktif.

- **Meningkatkan asupan gizi melalui pemberian vitamin dan makanan tambahan pada ibu hamil.** Untuk mengurangi risiko neonatus, bayi prematur, dan bayi lahir dengan berat badan rendah maka diperlukan peningkatan asupan gizi kepada ibu hamil melalui pemberian vitamin A, zat besi dan asam folat (Fe-3), kalsium, dan makanan tambahan terutama untuk ibu hamil KEK.

Gambar 5.6. Analisis Keterkaitan Angka Kematian Bayi (AKB)

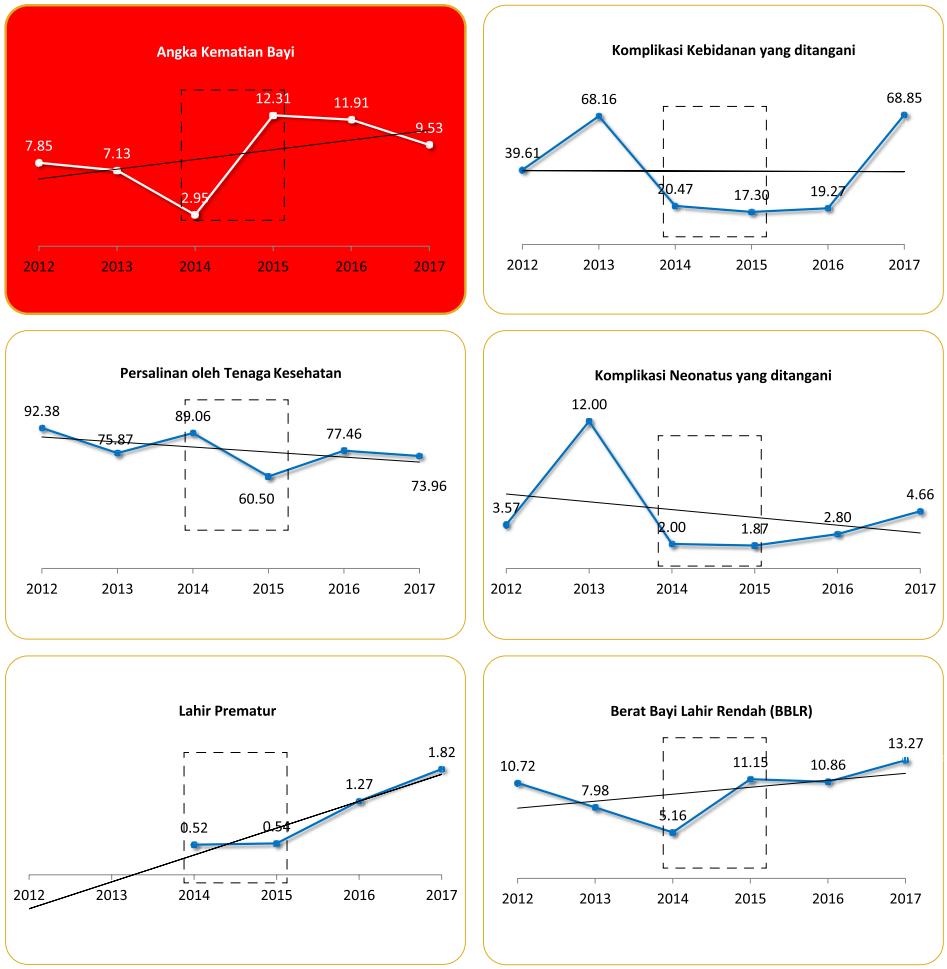

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Catatan: Angka dalam gambar 5.5 adalah dalam satuan persentasi (%) kecuali Angka Kematian Bayi

B.2. Intervensi untuk menurunkan Prevalensi Balita *Stunting*

Upaya penurunan *stunting* dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. (sumber: Pedoman Pelaksanaan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota, Bappenas tahun 2018).

- **Intervensi Gizi Spesifik.** Berdasarkan dokumen strategi nasional untuk percepatan pencegahan *stunting*, intervensi gizi spesifik menyasar penyebab *stunting* yang meliputi: (1) Kecukupan asupan makanan dan gizi; (2) Pemberian makan, perawatan dan pola asuh; dan (3) Pengobatan infeksi/penyakit. Sedangkan kelompok intervensi gizi spesifik terdiri atas tiga kelompok, yaitu:
    1. **Intervensi prioritas,** yaitu intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak pada pencegahan *stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas;

2. **Intervensi penting,** yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *stunting* dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
3. **Intervensi sesuai kondisi tertentu,** yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat)[7].

Tabel 5.1. Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan *Stunting*

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Penting	Intervensi Sesuai Kondisi
Intervensi gizi spesifik – Sasaran prioritas			
Ibu hamil	• Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin • Suplementasi tablet tambah darah	• Suplementasi kalsium • Pemeriksaan kehamilan	• Perlindungan dari malaria • Pencegahan HIV
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	• Promosi dan konseling menyusui • Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) • Tata laksana gizi buruk akut • Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut • Pemantauan pertumbuhan	• Suplementasi kapsul vitamin A • Suplementasi taburia • Imunisasi • Suplementasi zinc untuk pengobatan diare • Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)	• Pencegahan kecacingan
Intervensi gizi spesifik – Sasaran Penting			
Remaja dan wanita usia subur	• Suplementasi tablet tambah darah		
Anak 24-59 bulan	• Tata laksana gizi buruk akut • Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut • Pemantauan pertumbuhan	• Suplementasi kapsul vitamin A • Suplementasi taburia • Suplementasi zinc untuk pengobatan diare • Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)	• Pencegahan kecacingan

Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* Periode 2018-2024

- **Intervensi Gizi Sensitif.** Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Peningkatan akses pangan bergizi; (b) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan (d) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar Kementerian Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. (sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting*, 2018)

[7] Program gizi darurat mencakup kesiapan dan respon bencana, surveilans, dan intervensi sesuai kebutuhan sasaran.

Tabel 5.2. Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan *Stunting*

Jenis Intervensi	Program/Kegiatan Intervensi
Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi	• Akses air minum yang aman • Akses sanitasi yang layak
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	• Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) • Akses Jaminan Kesehatan (JKN) • Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	• Penyebarluasan informasi melalui berbagai media • Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi • Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua • Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemantauan tumbuh - kembang anak • Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan akses pangan bergizi	• Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu • Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng) • Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) • Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan

Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* Periode 2018-2024

C. PRIORITAS WILAYAH

Analisis Prioritas wilayah bertujuan untuk menentukan wilayah intervensi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam penentuan wilayah prioritas ini dikelompokkan menurut Kecamatan, namun data diambil berdasarkan data per puskesmas di kecamatan yang untuk selanjutnya dikelompokkan menurut 11 kecamatan di Pasaman Barat.

C.1. Prioritas Wilayah Intervensi untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu

Adapun prioritas wilayah untuk masing-masing intervensi untuk menurunkan AKI, adalah sebagai berikut berdasarkan pada Gambar 5.7:

- Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie adalah wilayah prioritas untuk menurunkan kematian ibu dengan peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

  Peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan meningkatkan Rasio Bidan per 100.000 Penduduk diprioritaskan di wilayah Kecamatan Gunung Tuleh, Sungai Aur dan Sasak Ranah Pasisie.

- Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Kecamatan Lembah Melintang adalah wilayah prioritas untuk menurunkan kematian ibu melalui peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu nifas.

  Sedangkan wilayah prioritas untuk pemberian vitamin A kepada ibu nifas sebaiknya

diprioritaskan di wilayah Kecamatan Gunung Tuleh, Koto Balingka, dan Sasak Ranah Pasisie. Walaupun AKI di Koto Balingka masih di bawah rata-rata kabupaten, tetapi diprioritaskan untuk mencegah terjadinya peningkatan AKI karena faktor kurangnya pemberian vitamin A pasca persalinan.

- Kecamatan Gunung Tuleh, Sasak Ranah Pasisie, dan Luhak Nan Duo adalah wilayah prioritas untuk penurunan AKI dengan meningkatkan kunjungan ibu hamil ke-4 (K4) ke fasilitas kesehatan.

  Salah satu risiko kematian ibu adalah pendarahan dimana terjadi karena kekurangan zat besi/asam folat. Untuk itu, wilayah prioritas dengan cakupan ibu hamil menerima tablet Fe-3 dan persentase ibu hamil dengan anemia yang tinggi adalah di wilayah Koto Balingka, Sasak Ranah Pasisie, dan Sungai Aur. Walaupun Koto Balingka dan Sungai Aur memiliki AKI yang relatif rendah, tetapi cakupan ibu hamil dengan tablet Fe-3 rendah dikarenakan rendahnya kunjungan ibu hamil (K4) ke fasilitas kesehatan.

Gambar 5.7. Prioritas Wilayah untuk Intervensi Penurunan Angka Kematian Ibu

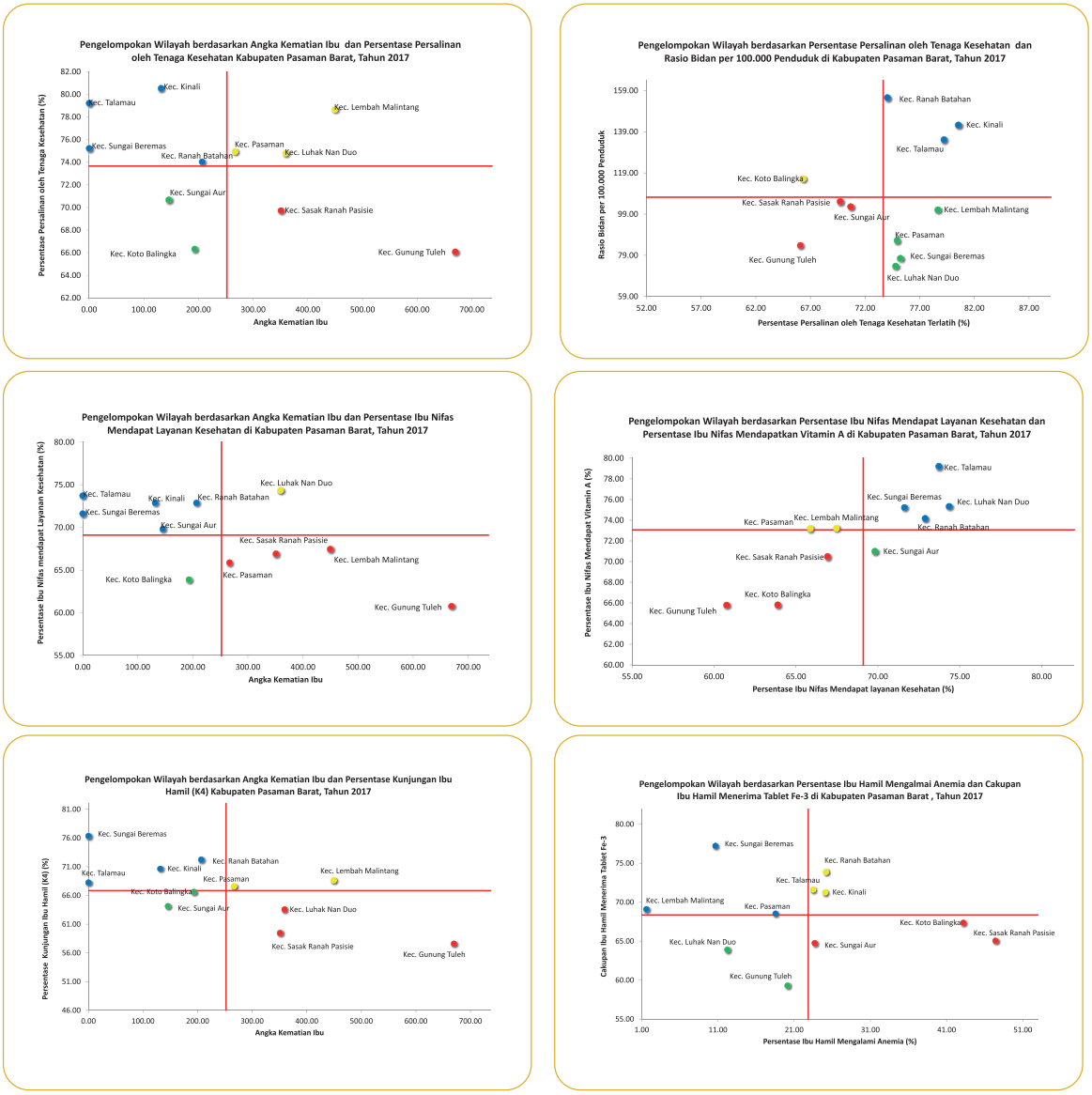

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

C.2. Prioritas Wilayah Intervensi untuk Menurunkan Angka Kematian Bayi

Prioritas wilayah untuk masing-masing intervensi untuk menurunkan AKB, adalah sebagai berikut berdasarkan pada Gambar 5.8:

- Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie adalah wilayah prioritas dengan angka kematian bayi yang tinggi dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah. Rendahnya persalinan dengan tenaga kesehatan karena tidak meratanya tenaga kesehatan bidan, dokter, dan masih rendahnya kesadaran ibu melahirkan di fasilitas kesehatan.
- Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan merupakan Kecamatan dengan angka kematian bayi yang tinggi dan komplikasi kebidanan yang ditangani rendah. Rendahnya komplikasi yang ditangani menyebabkan tingginya angka kematian bayi karena komplikasi kebidanan tidak terdeteksi lebih awal, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil memeriksakan kehamilan secara rutin.
- Angka kematian bayi di Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Ranah Batahan tinggi, sedangkan komplikasi neonatus yang ditangani rendah, ada kemungkinan rendahnya komplikasi neonatus yang ditangani menyebabkan tingginya angka kematian bayi. Untuk menurunkan angka kematian bayi perlu dilakukan deteksi komplikasi neonatus yang lebih baik lagi.

Gambar 5.8. Prioritas Wilayah untuk Intervensi Penurunan Angka Kematian Bayi

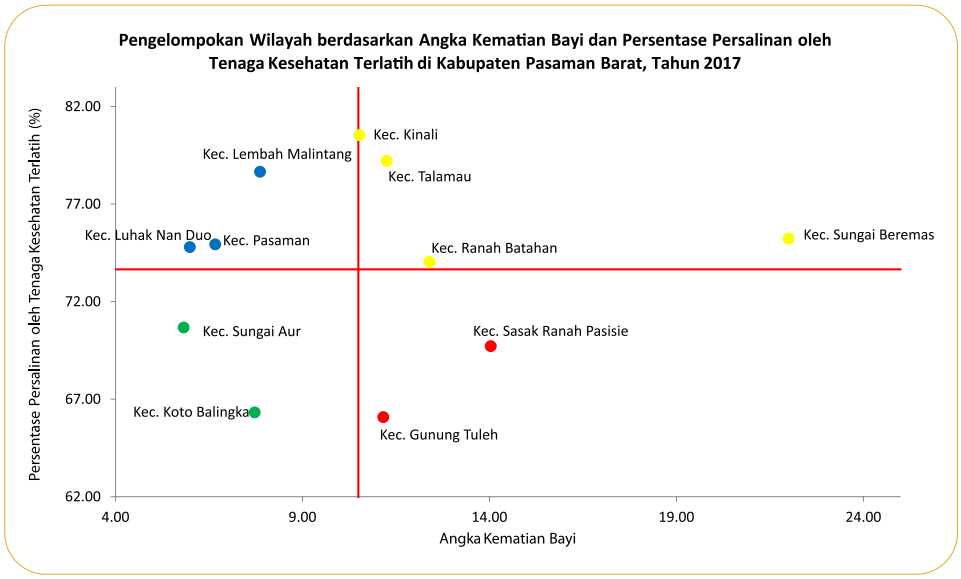

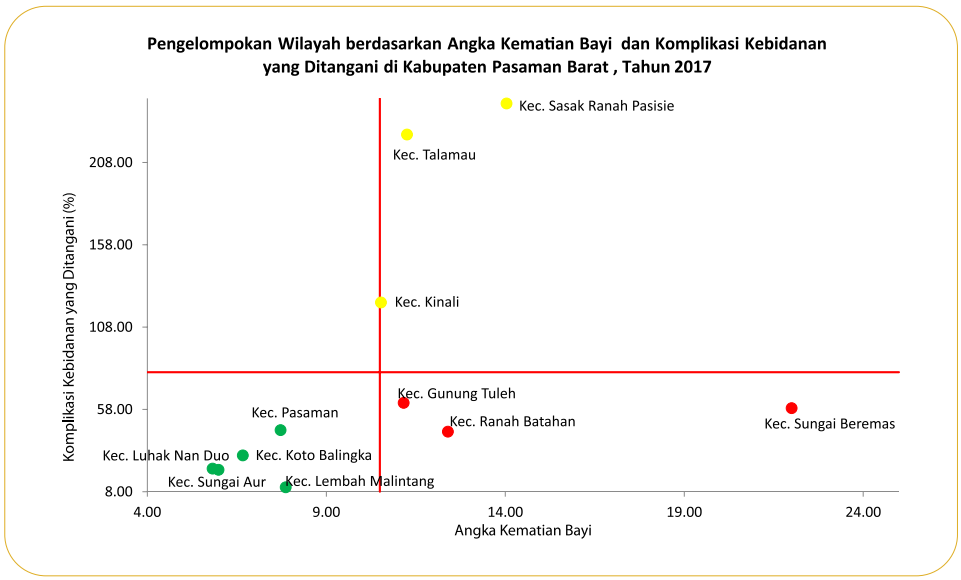

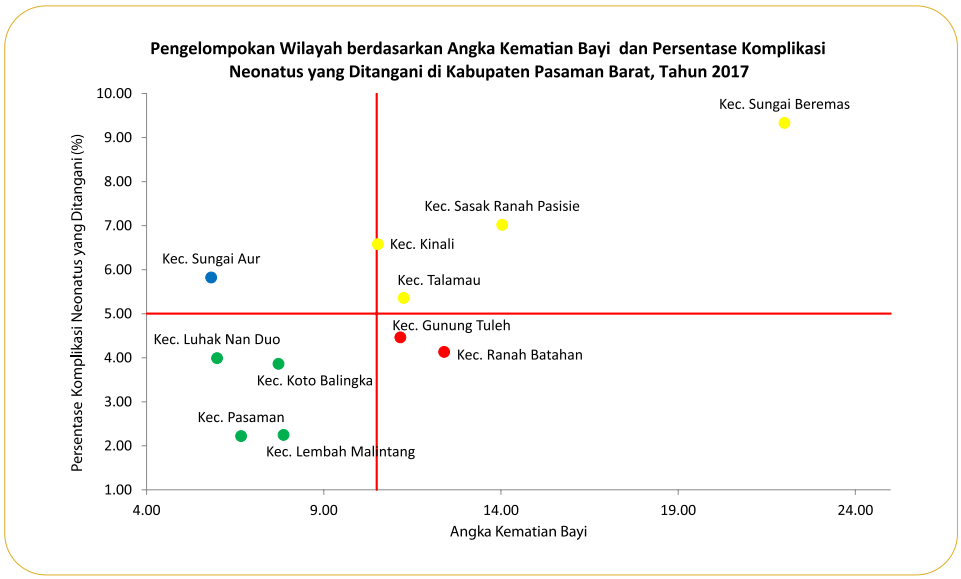

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

C.3. Prioritas Wilayah Prevalensi *Stunting* Pada Balita

- **Prioritas wilayah intervensi gizi spesifik berdasarkan kelompok sasaran ibu hamil.** Wilayah Kecamatan Gunung Tuleh, Sasak Ranah Pasisie, Koto Balingka, dan Sungai Aur adalah wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian indikator sasaran ibu hamil. (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Indikator Capaian Intervensi Gizi Spesifik pada Ibu Hamil

Kecamatan	Persentase Ibu Hamil Mengalami Anemia (%)	Presentase Ibu Hamil KEK (%)	Cakupan Ibu Hamil Melakukan Pemeriksaan Kehamilan (K -4) (%)	Cakupan Ibu Hamil Menerima TTD atau tablet Fe-3 (%)	Cakupan Ibu Nifas mengikuti pelayanan post natal (%)
Sungai Beremas	10.67	6.02	76.36	77.22	71.62
Ranah Batahan	25.17	20.11	72.23	73.87	72.88
Koto Balingka	43.20	10.80	66.63	67.36	63.88
Sungai Aur	23.69	3.59	64.14	64.75	69.82
Lembah Malintang	1.61	3.81	68.65	69.11	67.47
Gunung Tuleh	20.13	6.06	57.61	59.30	60.77
Talamau	23.50	8.38	68.25	71.63	73.73
Pasaman	18.56	5.82	67.63	68.54	65.87
Luhak Nan Duo	12.22	1.96	63.57	63.91	74.35
Sasak Ranah Pasisie	47.41	31.80	59.47	65.05	66.92
Kinali	25.08	11.54	70.65	71.26	72.89

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017
Keterangan: warna merah dan semakin gelap menunjukkan prioritas.

- **Prioritas wilayah intervensi gizi spesifik berdasarkan kelompok sasaran balita.** Wilayah Kecamatan Koto Balingka, Sungai Aur dan Kinali adalah wilayah prioritas untuk menurunkan prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang. (Tabel 5.4). Sedangkan jika dilihat selain prevalensi gizi buruk yang tinggi, Koto Balingka juga memiliki cakupan ASI ekslusif dan cakupan imunisasi dasar lengkap yang relatif rendah.

Tabel 5.4. Indikator Capaian Intervensi Gizi Spesifik pada Balita

Kecamatan	Posyandu Aktif (%)	Cakupan balita memperoleh Vitamin A (%)	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang (%)	Cakupan ASI Eksklusif (%)	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)	Cakupan Balita ditimbang (%)
Sungai Beremas	100.00	95.48	0.26	10.86	52.29	62.88	71.64
Ranah Batahan	57.89	73.11	-	0.97	55.81	54.30	70.85
Koto Balingka	91.67	84.24	2.87	13.95	28.78	57.03	67.78
Sungai Aur	94.59	89.76	2.14	13.86	60.65	86.11	81.95
Lembah Malintang	89.29	76.77	1.54	8.33	42.38	66.06	76.02
Gunung Tuleh	43.75	66.04	1.35	8.51	55.87	65.88	57.60
Talamau	89.13	90.48	1.01	10.43	50.20	74.49	68.04
Pasaman	42.19	81.13	2.31	10.88	58.87	68.09	67.02
Luhak Nan Duo	100.00	80.43	0.62	4.34	66.09	62.84	68.33
Sasak Ranah Pasisie	25.00	61.06	0.30	2.01	34.25	64.93	54.64
Kinali	92.75	84.92	2.65	13.58	56.09	82.45	74.21

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017
Keterangan: warna merah dan semakin gelap menunjukkan prioritas.

D. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN

D.1. Belanja Program untuk Kesehatan Ibu dan Anak

Anggaran belanja yang dimaksudkan disini adalah anggaran belanja yang berhubungan dengan upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan mencegah terjadinya *stunting* pada balita dari berbagai dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB (DP2KB), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN).

Sebagian besar belanja urusan kesehatan digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pada tahun 2017, belanja urusan kesehatan (baik Dinas Kesehatan maupun RSUD) diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang dan jasa kebutuhan peningkatan pelayanan Rumah Sakit BLUD, sarana dan prasarana aparatur, upaya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, dan sarana prasarana RS khusus. Sedangkan program untuk peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak terealisasikan sebanyak Rp 5,38 miliar atau sekitar 7% dari total belanja kesehatan yang sebagian besar berupa pelayanan jaminan persalinan. (Gambar 5.9).

Gambar 5.9. Realisasi Belanja Program Urusan Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017 (dalam Miliar Rupiah dan Persen)

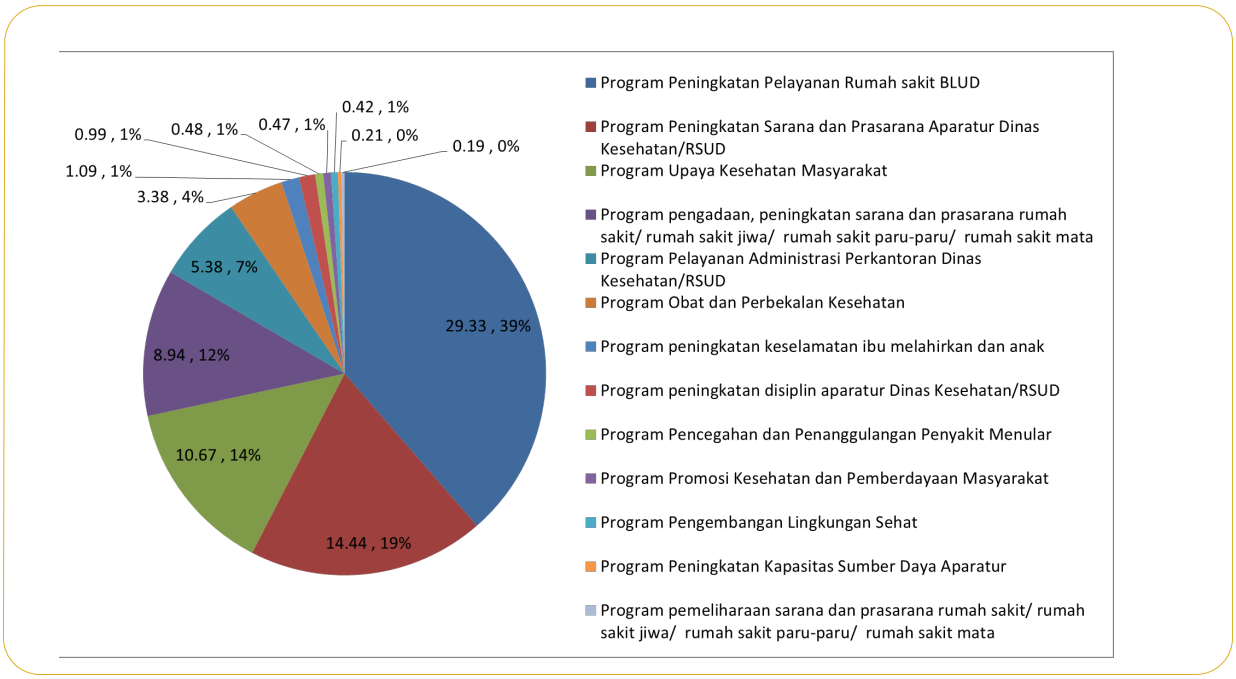

Sumber: Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat, 2017

Pada tahun 2017, terdapat penambaan jumlah kegiatan pada Dinas Kesehatan terutama pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Jumlah total kegiatan belanja program/kegiatan di Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak terdiri atas 13 kegiatan. Sedangkan alokasi anggaran belanja terbesar adalah untuk kegiatan Operasional Pemeliharaan UPT Puskesmas sebesar Rp8,9 milyar dan Pelayanan Jaminan Persalinan sejumlah Rp642 juta. (Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Kegiatan untuk Penurunan AKI dan AKB di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat (Juta Rupiah)

No	Program dan Kegiatan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				
1	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	-	-	-	174.30
2	Peningkatan Desa Siaga	73.58	43.04	55.98	53.96
3	Revitalisasi dan lomba kader posyandu	-	-	-	142.44
4	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	72.90	83.66	111.32	-
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-
5	Operasional dan pemeliharaan UPT Puskesmas	1,148.12	1,530.28	4,789.35	8,968.25
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
6	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	10.34	11.41	70.58	63.41
7	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	15.32	13.45	30.10	45.81
8	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	31.32	32.30	-	-
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	22.63	11.76	-	-
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				
10	Peningkatan kualitas petugas Puskesmas PONED	15.70	15.73	-	97.50
11	Monitoring dan evaluasi program KIA, KB dan kesehatan reproduksi	14.27	25.92	265.53	37.06
12	Pelayanan jaminan persalinan	-	-	159.09	642.14
13	Antenatal Care (ANC) Terpadu	-	-	-	138.60
14	Peningkatan kualitas Bidan dengan asuhan Persalinan Normal (APN)	-	-	-	67.50
15	Pelatihan peningkatan kinerja pelaksanaan MTBM/MTBS	-	-	-	62.61
16	Pelatihan peningkatan kinerja pemantauanSD/DTK	-	-	-	48.41
17	Pemantapan penyelenggaraan AMP	-	19.97	13.00	-
	Total (Juta Rupiah)	1,404	1,788	5,495	10,542

Sumber: Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB mengalokasikan sebagian besar anggaran belanja untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui program KB. Jika dilihat total persentase kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi maka terlihat anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut cukup besar, yaitu 96,80% pada tahun 2014; kemudian 96,53% di tahun 2015; kemudian turun menjadi 89,81% di tahun 2016 dan kembali naik di tahun 2017 sebesar 95,73%. Kegiatan dengan proporsi terbesar di tahun 2017, yaitu kegiatan pengadaan sarana/prasana KB sebesar 38,65% dan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi pada balai penyuluh KB (20,02%) dari total belanja di Dinas DP2KB. Sedangkan terdapat kegiatan pembinaan posyandu yang sebelumnya mendapatkan anggaran cukup besar di tahun 2015 (33,63%), justru tidak muncul kembali di tahun anggaran 2017 dimana sebelumnya sempat menurun signifikan di tahun 2016 menjadi 3,27%. (Tabel 5.6).

Tabel 5.6. Proporsi Belanja Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB (DP2KB) untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Pasaman Barat (%)

No	Program dan Kegiatan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Upaya untuk menurunkan AKI					
Program Keluarga Berencana					
1	Monitoring dan evaluasi Keluarga Berencana	-	1,09	9,67	5,29
2	Pelayanan KIE	2,92	-	-	-
3	Pendataan Keluarga tahun 2014	9,14	5,79	5,91	4,00
4	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Program KB	11,35	6,06	-	-
5	Pengadaan sarana dan prasarana KB/KS	68,51	34,79	29,52	38,65
6	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi pada Balai Penyuluh KB	-	-	14,36	20,02
Program pelayanan kontrasepsi					
7	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	2,72	-	-	-
8	Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin (TMKK)	2,16	-	-	-
9	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	-	2,48	16,40	15,42
10	Pelayanan KB medis operasi	-	1,63	-	-
11	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin (Bhakti TNI KB -Kes)	-	3,22	-	-
Upaya untuk menurunkan AKB					
Program Kesehatan Reproduksi Remaja					
12	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi dan Remaja	-	2,82	5,59	6,62
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga					
13	Pelatihan Kader Pendamping Bina Keluarga	-	5, 02	5, 09	5, 73
Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu					
14	Pembinaan Posyandu	-	33,63	3, 27	-
Proporsi Belanja DP2KB untuk Menurunkan AKI dan AKB (%)		96.80	96.53	89.81	95.73

Sumber: Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

D.2. Belanja Program untuk Penurunan Prevalensi *Stunting*

Sedangkan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan *stunting* berasal dari berbagai dinas terkait, diantaranya: Dinas Kesehatan, DP2KB, DPMN dan Ketahanan Pangan. Namun, dalam analisis ini hanya akan fokus pada Dinas Kesehatan terutama untuk intervensi Gizi Spesifik.

Terdapat 7 program dengan 15 kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan untuk penanggulangan *stunting* pada balita. Berdasarkan 15 kegiatan yang terklasifikasi, hanya 6 kegiatan yang ada di setiap tahunnya, yaitu: (1) Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah; (2) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat; (3) Operasional Pemeliharaan UPT Puskesmas; (4) Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat; (5) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi; dan (6) Evaluasi Program KIA, KB dan Kesehatan Reproduksi. (Tabel 5.7).

Proporsi belanja Dinas Kesehatan untuk mencegah terjadinya *stunting* meningkat cukup signifikan. Proporsi belanja untuk prevalensi *stunting* pada tahun 2017 sebesar 21,53% naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya 6,03% dari total belanja di Dinas Kesehatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa anggaran yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat sudah berpihak pada upaya penanggulangan *stunting*, dan dianggap sudah berhasil karena telah terjadi penurunan prevalensi *stunting* pada balita sejak tahun 2015 hingga 2017. (Tabel 5.7).

Tabel 5.7. Proporsi Belanja Kegiatan Dinas Kesehatan untuk Menurunkan Prevalensi *Stunting* pada Balita di Kabupaten Pasaman Barat

No	Program dan Kegiatan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					
1	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	0,23	0,17	0,42	0.14
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat				0.32
3	Revitalisasi dan lomba Kader Posyandu				0.26
4	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	0,28	0,29	0,24	0.00
Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat					
5	Operasional dan pemeliharaan UPT Puskesmas	4,34	5,21	10,42	16.44
Program Pengembangan Lingkungan Sehat					
6	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	0,19	0,2	0,15	0.13
Program Perbaikan Gizi Masyarakat					
7	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	0,04	0,04	0,15	0.12
8	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi		0,05	0,07	0.08
9	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	0,12	0,11		
10	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian ASI eklusif	0,06			
11	Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Gizi	0,04			
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					
12	Evaluasi program KIA. KB dan kesehatan reproduksi	0,73	0,34	9,24	1.47
13	Pelatihan Peningkatan kinerja pelaksanaan MTBM/MTBS				2.48
14	Pelatihan peningkatan kinerja pemantauan SD/DTK				0.09
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita					
15	Penyuluhan kesehatan anak balita		0,08	0,03	
Proporsi Kegiatan Untuk Menurunkan Prevalensi **Stunting pada Balita (%)**		**6.03**	**6,49**	**20,72**	**21,53**

Sumber: Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, dapat diambil **kesimpulan** sebagai berikut:

- Permasalahan kesehatan utama di Kabupaten Pasaman Barat adalah masih relatif tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi balita *stunting*.
- Permasalahan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Kesehatan sendiri, tetapi perlu dukungan lintas sektor dan koordinasi yang baik dalam menyelesaikannya persoalan. Saat ini seluruh OPD yang terlibat sudah bekerja sesuai dengan porsinya namun masih kurang dalam koordinasi, sehingga target dan capaian indikator kinerja yang diinginkan belum mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan target.
- Setiap kecamatan mempunyai perbedaan permasalahan dan perbedaan penyebab masalah, sehingga intervensi yang dilakukan pun juga berbeda.
- Belum terlihat program dan kegiatan yang spesifik untuk menurunkan AKI, AKB dan prevalensi balita *stunting* karena kegiatan-kegiatan dikelompokkan pada sasaran yang luas, kurang spesifik, sehingga sulit menganalisis program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya untuk menurunkan masalah kesehatan. Misalnya program gizi,

yang hanya terdiri dari dua kegiatan, sementara tujuan dan sasaran yang ada dalam satu kegiatan tersebut relatif banyak.

- Adanya perpindahan kegiatan dari satu program ke program yang lain, adanya progran/ kegiatan yang hilang dan timbul menunjukkan belum mantapnya program dan kegiatan yang ada di Renstra OPD, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas target jangka panjang yang ingin dicapai.
- Beberapa kegiatan sudah dilakukan terus menerus selama empat tahun, namun belum mampu mendongkrak capaian indikator yang diharapkan, sehingga program/kegiatan tersebut dinilai kurang efektif terutama dalam hal implementasi program/kegiatan di lapangan.
- Ada beberapa capaian kinerja yang memerlukan koordinasi dari beberapa OPD terkait. Misalnya upaya untuk meningkatkan persentase balita ditimbang di Posyandu, dimana diperlukan koordinasi antara Dinas Kesehatan, DP2KB, dan DPMN.
- Setiap tahun anggaran operasional dan pemeliharaan puskesmas mengalami peningkatan, namun permasalahan kesehatan tidak kunjung selesai, kemungkinan ini disebabkan karena perencanaan tingkat puskesmas belum tepat fokus dan lokus.

Adapun beberapa **rekomendasi kebijakan** yang dapat diberikan sebagai berikut:

- Adanya suatu bagian di setiap OPD yang bertanggung jawab atas ketersediaan data dan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang sudah teruji tingkat kepercayaannya. Sehingga dapat memudahkan bagi seluruh instansi/siapa saja yang memerlukan data guna keperluan analisis kebijakan.
- Perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Kesehatan, DPMN dan DP2KB dalam menyelesaikan kasus kematian ibu dan bayi, serta menurunkan prevalensi *stunting* pada balita. Kerjasama dan koordinasi tersebut mulai dari perencanaan penentuan program/kegiatan, anggaran, lokasi serta termasuk pelaksanaan evaluasi program/ kegiatan di lapangan.
- Penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan terkait penurunan AKI, AKB dan prevalensi *stunting* disesuaikan dengan prioritas masalah utama kesehatan di masing-masing wilayah kecamatan/puskesmas. Sehingga tidak semua kecamatan mendapatkan proporsi alokasi anggaran kegiatan yang sama.
- Perlu pelatihan untuk analisis masalah dan menyusun perencanaan sesuai permasalahan bagi tenaga puskesmas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan dengan tepat, baik lokasi maupun sasaran penerima manfaat program.
- Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan analisis program dan anggaran belanja untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif terkait dengan percepatan pencegahan prevanlensi *stunting* di Pasaman Barat.
- kurang spesifik, sehingga sulit menganalisis program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya untuk menurunkan masalah kesehatan. Misalnya program gizi, yang hanya terdiri dari dua kegiatan, sementara tujuan dan sasaran yang ada dalam satu kegiatan tersebut relatif banyak.
- Adanya perpindahan kegiatan dari satu program ke program yang lain, adanya progran/ kegiatan yang hilang dan timbul menunjukkan belum mantapnya program dan kegiatan yang ada di Renstra OPD, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas target jangka panjang yang ingin dicapai.

- Beberapa kegiatan sudah dilakukan terus menerus selama empat tahun, namun belum mampu mendongkrak capaian indikator yang diharapkan, sehingga program/kegiatan tersebut dinilai kurang efektif terutama dalam hal implementasi program/kegiatan di lapangan.
- Ada beberapa capaian kinerja yang memerlukan koordinasi dari beberapa OPD terkait. Misalnya upaya untuk meningkatkan persentase balita ditimbang di Posyandu, dimana diperlukan koordinasi antara Dinas Kesehatan, DP2KB, dan DPMN.
- Setiap tahun anggaran operasional dan pemeliharaan puskesmas mengalami peningkatan, namun permasalahan kesehatan tidak kunjung selesai, kemungkinan ini disebabkan karena perencanaan tingkat puskesmas belum tepat fokus dan lokus.
- Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan sebagai berikut:
- Adanya suatu bagian di setiap OPD yang bertanggung jawab atas ketersediaan data dan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang sudah teruji tingkat kepercayaannya. Sehingga dapat memudahkan bagi seluruh instansi/siapa saja yang memerlukan data guna keperluan analisis kebijakan.
- Perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Kesehatan, DPMN dan DP2KB dalam menyelesaikan kasus kematian ibu dan bayi, serta menurunkan prevalensi *stunting* pada balita. Kerjasama dan koordinasi tersebut mulai dari perencanaan penentuan program/kegiatan, anggaran, lokasi serta termasuk pelaksanaan evaluasi program/kegiatan di lapangan.
- Penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan terkait penurunan AKI, AKB dan prevalensi *stunting* disesuaikan dengan prioritas masalah utama kesehatan di masing-masing wilayah kecamatan/puskesmas. Sehingga tidak semua kecamatan mendapatkan proporsi alokasi anggaran kegiatan yang sama.
- Perlu pelatihan untuk analisis masalah dan menyusun perencanaan sesuai permasalahan bagi tenaga puskesmas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan dengan tepat, baik lokasi maupun sasaran penerima manfaat program.
- Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan analisis program dan anggaran belanja untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif terkait dengan percepatan pencegahan prevanlensi *stunting* di Pasaman Barat.

BAB 6

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN KESEMPATAN TENAGA KERJA

A. ISU STRATEGIS SEKTOR TENAGA KERJA

Kemiskinan dan pengangguran adalah dua kondisi yang saling berkaitan. Pengangguran adalah salah satu penyebab timbulnya kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Badan Pusat Statistik mendefinisikan tingkat pengangguran sebagai persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, namun ingin bekerja. Angka ini biasanya diperoleh melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas). Indikator tingkat pengangguran yang paling kerap digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang diartikan sebagai tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya terjadi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya, lapangan kerja yang ada tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran tentunya berakibat buruk bagi perekonomian, produktivitas, maupun pendapatan masyarakat.

A.1. ISU STRATEGIS SEKTOR TENAGA KERJA

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasaman Barat relatif rendah namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2017. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 3.99% relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat (5,58%) dan nasional (5,50%). Kemudian berdasarkan perkembangan antar waktu, tingkat pengangguran terbuka, Pasaman Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2012 - 2017. Pada tahun 2014, terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada angka 5,66% kemudian turun di tahun 2015 menjadi 3,79%. Namun, di tahun 2017 kembali sedikit naik menjadi 3,99%. Meskipun tingkat pengangguran terbuka Pasaman Barat relatif kondusif, pemerintah tentunya harus merumuskan kebijakan yang tepat sasaran di bidang ketenagakerjaan agar dapat memenuhi target penanganan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5% pada akhir periode RPJMD tahun 2016 – 2021. (Gambar 6.1).

Gambar 6.1. Analisis Situasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasaman Barat

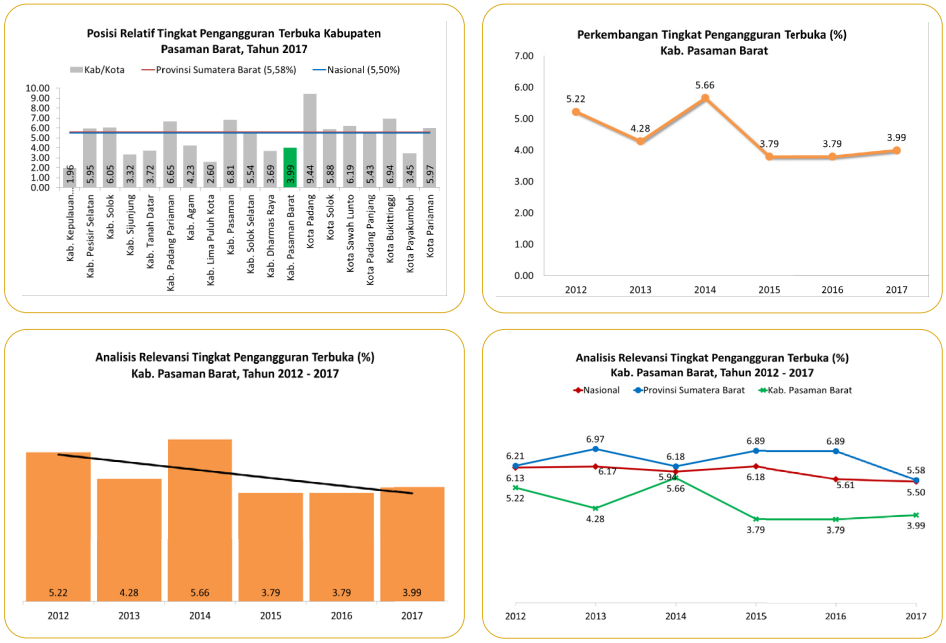

Sumber: BPS

A.2. Tingkat Setengah Pengangguran[8]

Angka setengah pengangguran di Pasaman Barat masih relatif tinggi dan menurun pada tahun 2017. Pada tahun 2017, angka setengah pengangguran Kabupaten Pasaman Barat telah mencapai 42,53%, jauh lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Sumatera Barat (32.28%) dan nasional (26,41%). Jika dilihat dari perkembangan antar waktu, persentase tenaga kerja setengah menganggur menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2013, persentase setengah pengangguran Kabupaten Pasaman Barat adalah 47,50% kemudian turun menjadi 36,98% pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 hingga 2016 cenderung selalu meningkat hingga mencapai angka 48,86% di tahun 2016. Lalu menurun di tahun 2017 pada angka 42,53%. Angka ini relatif masih tinggi yang menunjukkan bahwa sebagian penduduk bekerja paruh waktu dan berimplikasi terhadap rendahnya penghasilan bulanan yang diterima angkatan kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya agar mampu mengatasi permasalahan tingginya angka setengah pengangguran di Pasaman Barat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menurunkan kemiskinan.(Gambar 6.2).

Gambar 6.2. Analisis Situasi Masalah Tingkat Setengah Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasaman Barat

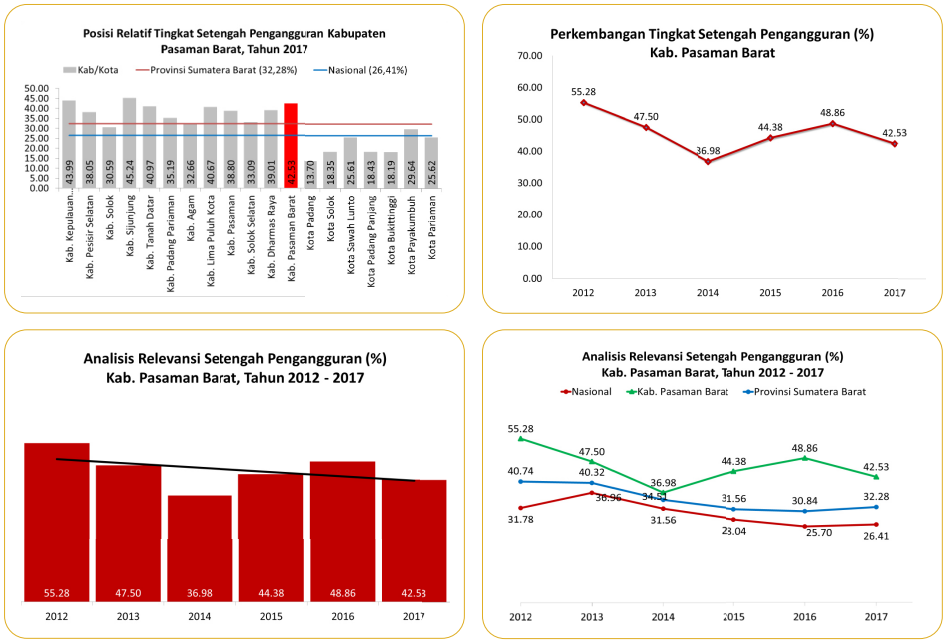

Sumber: BPS

[8] Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan setengah pengangguran sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak bekerja optimal disebabkan oleh alasan tertentu. Sebagai contoh, seorang buruh bangunan telah menyelesaikan suatu proyek dan harus menganggur sementara sambil menunggu pekerjaan berikutnya. Namun, definisi setengah pengangguran harus dibedakan dari pekerja paruh waktu. Setengah pengangguran tidak bekerja penuh, akan tetapi masih bersedia mencari pekerjaan tambahan. Sebaliknya, pekerja paruh waktu juga bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak bersedia menerima dan tidak berusaha mencari pekerjaan lain.

B. PRIORITAS INTERVENSI

Berdasarkan identifikasi masalah, dimana masalah utama ketenagakerjaan di Pasaman Barat adalah tingginya tingkat setengah pengangguran maka disusunlah logika program (*theory of change*). Pendekatan ini disusun untuk menentukan program dan kegiatan prioritas untuk menurunkan angka setengah pengangguran di Pasaman Barat. (Gambar 6.3).

Gambar 6.3. *Theory of change* Ketenagakerjaan Pasaman Barat

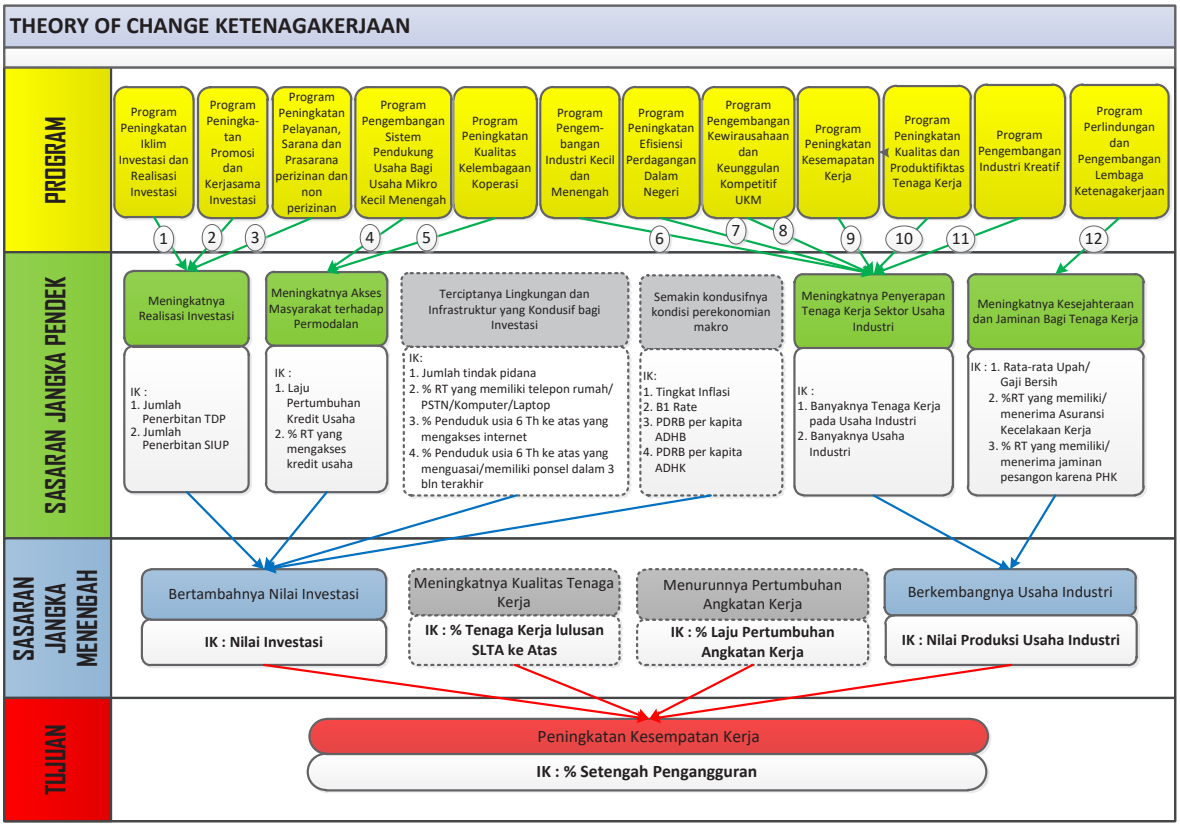

Selanjutnya dilakukan analisis keterkaitan antara indikator utama dan indikator pendukung untuk masing-masing tahapan logika program. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara isu strategis dengan indikator pendukung baik untuk jangka menengah (medium-term outcomes) maupun indikator pendukung jangka pendek (short-term outcomes).

B.1. Prioritas Intervensi Jangka Menengah untuk Menurunkan Setengah Pengangguran

Adapun, sasaran jangka menengah yang perlu dicapai untuk menurunkan angka setengah pengangguran, yaitu melalui (1) peningkatan investasi; (2) peningkatan jumlah usaha wiraswasta (usaha sendiri). Ditambah dengan upaya dari dinas terkait lainnya seperti: (3) peningkatan kualitas tenaga kerja oleh Dinas Pendidikan; dan (4) penurunan laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. (Gambar 6.4).

Gambar 6.4. Analisis Keterkaitan Setengah Pengangguran dengan Indikator Pendukung

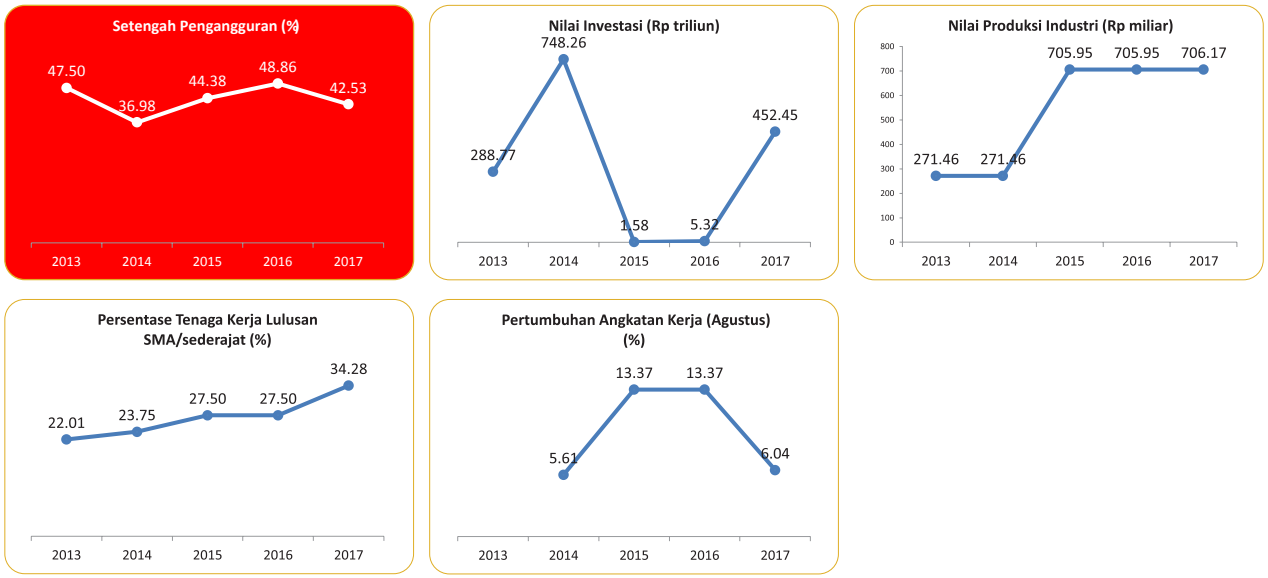

Sumber: BPS

B.1.1. Prioritas Intervensi Peningkatan Nilai Investasi

Nilai investasi sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang ada maupun pencari kerja. Semakin tinggi nilai investasi di suatu daerah, maka lapangan kerja yang tersedia juga akan semakin banyak yang pada akhirnya akan mendorong meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja baru. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berfluktuasi setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2017 terjadi kenaikan cukup signifikan sebesar Rp 452,45 miliar yang sejalan dengan terjadinya penurunan setengah pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan, maka terlihat bahwa perkembangan nilai investasi di Pasaman Barat terkait dengan: (1) peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan; (2) iklim investasi yang kondusif; dan (3) kondisi ekonomi makro. (Gambar 6.5)

Gambar 6.5. Analisis Keterkaitan Nilai Investasi dengan Indikator Pendukung

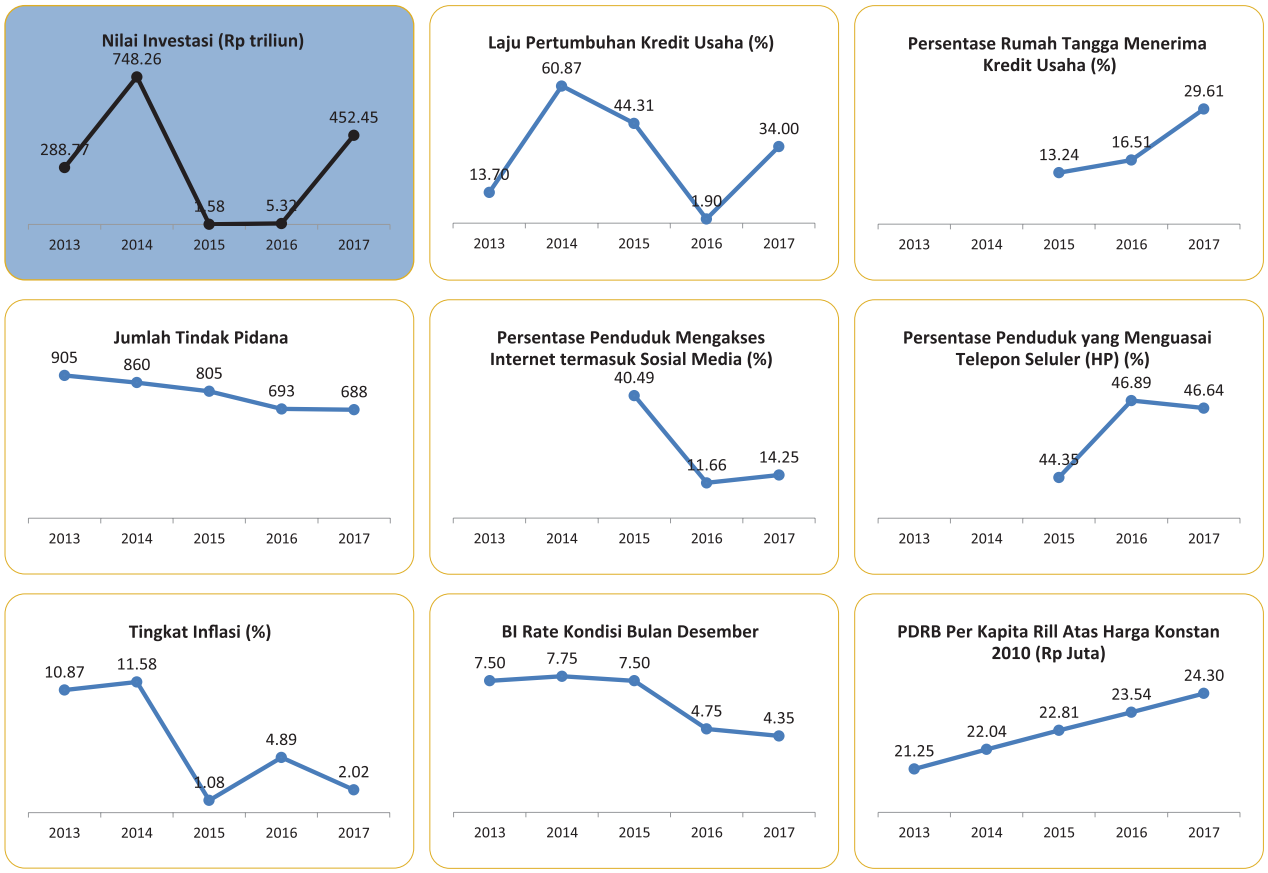

Sumber: BPS

1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Permodalan

Laju Pertumbuhan Kredit Usaha (%) dan Persentase Rumah Tangga Menerima Kredit Usaha

Kredit usaha masih menjadi sumber utama untuk modal usaha bagi masyarakat, bukan hanya usaha besar/sedang, namun juga usaha mikro, kecil, dan menengah. Akses terhadap permodalan sangat mempengaruhi peluang munculnya unit-unit usaha baru maupun peluang untuk pengembangan kapasitas produksi. Semakin tinggi kredit usaha yang tersedia bagi masyarakat, maka semakin besar pula peluang meningkatnya nilai investasi. Laju pertumbuhan kredit usaha menunjukkan kenaikan yang signifikan dari 1,90% pada tahun 2016 menjadi 34% pada tahun 2017. Begitu juga dengan persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha meningkat pada tahun 2017, yaitu menjadi 29,61% dari 16,15% di tahun 2016.

2. Iklim Investasi yang Kondusif

<u>Teknologi Informasi dan Komunikasi</u>

Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran yang sangat penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Banyak usaha yang muncul melalui teknologi internet dan menjadi sumber penghasilan yang cukup potensial bagi masyarakat terutama dalam mengembangkan bisnis dan memasarkan produk.

<u>Keamanan</u>

Faktor keamanan sebuah daerah dapat mempengaruhi investasi. Investor tentunya akan memilih untuk menanamkan modalnya di daerah yang keamanannya stabil. Indikator

keamanan yang biasa digunakan adalah tingkat kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di suatu daerah. Rata-rata selama 2013-2017 jumlah tindak pidana cenderung menurun. Pada tahun 2017, kejadian tindak pidana menurun dari 693 kasus menjadi 688 kasus.

3. Kondisi ekonomi makro

Tingkat Inflasi (%)

Jika inflasi ringan dan di bawah suku bunga kredit maka akan meningkatkan daya dorong bagi masyarakat untuk menabung, investasi atau mengajukan kredit. Pada akhirnya, inflasi ringan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah. Namun, jika tingkat inflasi terlalu tinggi maka masyarakat akan enggan untuk berinvestasi karena kondisi perekonomian dinilai tidak stabil.

BI Rate

Sejak tanggal 19 Agustus 2016, Bank Indonesia menerapkan BI 7-Day Repo Rate yang menjadi acuan suku bunga kebijakan baru yang menggantikan BI Rate. Tujuannya adalah untuk penguatan kerangka operasi moneter. Pada tahun 2017, BI rate turun menjadi 4,35% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,75%. Hal ini tentunya akan mempengaruhi turunnya suku bunga kredit di bank milik pemerintah, bank swasta, maupun lembaga keuangan lainnya. Penurunan BI Rate diharapkan dapat mendorong gairah masyarakat untuk mengajukan kredit usaha, sehingga terbukalah peluang untuk berinvestasi. Lebih dari itu, penurunan BI Rate di tahun 2017 juga sejalan dengan bertambahnya proyeksi nilai investasi di Kabupaten Pasaman Barat di tahun yang sama.

PDRB Perkapita

Kenaikan PDRB per Kapita berpengaruh positif terhadap investasi, karena PDRB per Kapita merupakan cerminan daya beli masyarakat atau pasar. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka semakin tinggi peluang bagi masyarakat maupun pemerintah untuk berinvestasi. Hal ini tergambarkan pada tren nilai rill PDRB per Kapita yang selalu meningkat tiap tahunnya di Pasaman Barat.

B.1.2. Prioritas Intervensi Peningkatan Jumlah Usaha Industri /Usaha Sendiri

Peningkatan nilai produksi usaha industri diduga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Nilai produksi tentunya dipengaruhi banyak aspek, seperti: (1) jumlah tenaga kerja; (2) jumlah unit usaha industri; dan (3) tingkat penghasilan (upah minimum yang berlaku). (Gambar 6.6)

Gambar 6.6. Analisis Keterkaitan Nilai Produksi Industri dengan Indikator Pendukung

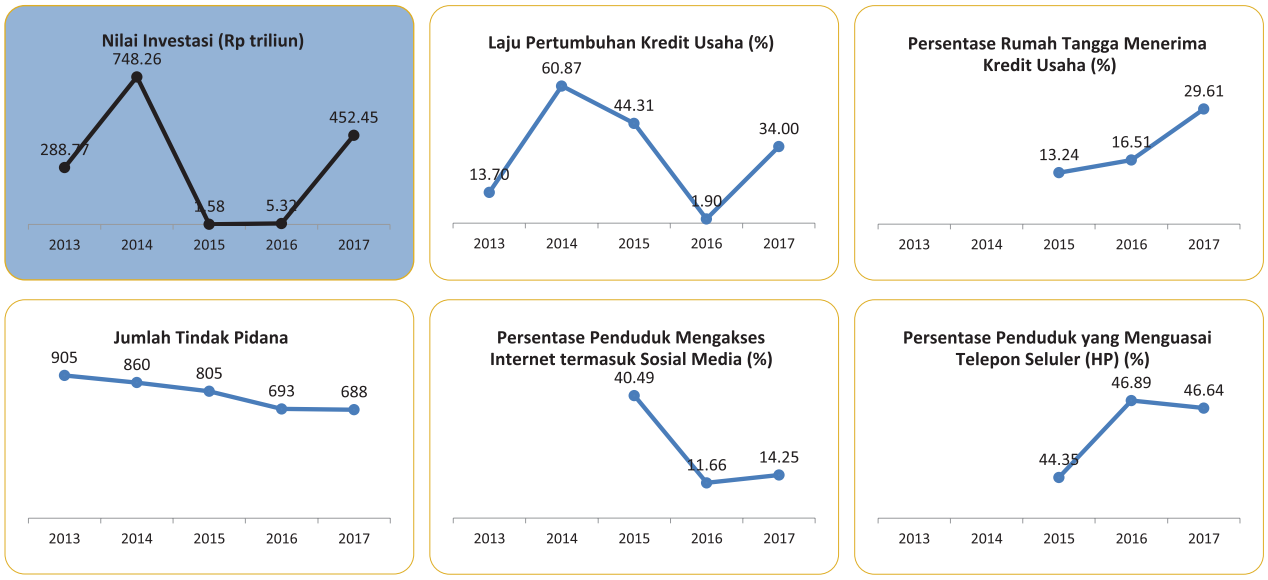

Sumber: BPS

1. Peningkatan kesempatan kerja

Jumlah Tenaga Kerja

Sebuah unit usaha atau bisnis akan membutuhkan tambahan karyawan setidaknya dalam dua kondisi. Pertama, unit usaha tersebut membuka usaha baru atau kantor cabang baru. Kedua, peningkatan skala produksi membuat sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru. Banyaknya jumlah tenaga kerja pada bidang usaha industri menunjukkan kemampuan sektor industri untuk menyerap pengangguran terbuka maupun meningkatkan kualitas dan jam kerja tenaga kerja yang sudah ada (setengah pengangguran). Seperti terlihat pada analisa di atas, nilai produksi usaha industri menujukkan kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 meski tidak signifikan. Pada saat yang sama, jumlah tenaga kerja di sektor usaha industri juga menunjukkan kenaikan. Bisa diasumsikan bahwa kenaikan nilai produksi memiliki keterkaitan dengan kenaikan jumlah tenaga kerja yang ada.

Jumlah Unit Usaha Industri

Seperti dibahas sebelumnya, pertambahan unit usaha baru berarti penyerapan tenaga kerja baru atau tenaga kerja yang sudah ada. Pada akhirnya, unit usaha baru akan berkontribusi terhadap kenaikan nilai produksi secara agregat. Berdasarkan analisis di atas, jumlah unit usaha industri pada tahun 2017 adalah 1.537, naik dari 1.527 pada tahun 2016.

2. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Rata-rata Upah/Gaji Bersih

Kenaikan upah mampu meningkatkan produktivitas pekerja. Pada tahun 2016, karyawan pada unit usaha yang ada di Kabupaten Pasaman Barat rata-rata menerima gaji bersih sebesar Rp. 1,5 juta dan pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 2.38 juta. Kenaikan rata-rata gaji yang diterima oleh karyawan bisa jadi menjadi beban tambahan bagi perusahaan. Meskipun demikian, banyak dampak positifnya bagi perusahaan dimana dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, karyawan akan lebih termotivasi untuk berkinerja lebih baik. Di lain pihak, perusahaan juga

memiliki dasar untuk menuntut kinerja yang lebih baik dari perusahaannya. Jadi, berdasarkan analisa di atas, dapat diduga terdapat keterkaitan antara tingkat kesejahteraan karyawan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja.

B.1.3. Prioritas Intervensi Pendukung Lainnya

Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, dan akhirnya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berproduksi. Indikator ini umumnya diukur dengan dua hal, yakni pendidikan formal yang ditamatkan serta pelatihan keterampilan dan kompetensi yang pernah diikuti. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan tenaga kerja, maka semakin tinggi peluang mendapatkan pekerjaan. Persentase tenaga kerja Kabupaten Pasaman Barat berpendidikan minimal SLTA/sederajat mengalami kenaikan dari 27,50% di tahun 2016 menjadi 34,28% pada tahun 2017.

Pertumbuhan penduduk berdampak terhadap tingkat kesempatan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit karena tingginya tingkat persaingan antar sesama tenaga kerja. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan angkatan kerja menunjukkan penurunan dari 13,37% menjadi 6,04%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya tingkat persaingan sehingga peluang mendapatkan pekerjaan akan semakin meningkat, yang pada akhirnya menurunkan setengah pengangguran.

C. PRIORITAS WILAYAH

Analisis prioritas intervensi wilayah berguna untuk menentukan daerah-daerah prioritas penanganan setengah pengangguran berdasarkan indikator pendukungnya. Analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan maupun pelaksana program/kegiatan dalam rangka upaya penurunan tingkat setengah pengangguran. Karena keterbatasan data yang tersedia, analisis prioritas intervensi wilayah penanganan setengah pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat dibatasi pada data yang bersumber dari BDT 2015, terutama pada kelompok penduduk miskin dan rentan.

C.1. Prioritas Wilayah Intervensi Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja

Analisis prioritas wilayah intervensi bidang ketenagakerjaan dilakukan dengan menggunakan hasil olahan bersumber dari BDT 2015. Berdasarkan karakteristik data yang diperoleh, analisis lebih difokuskan pada 2 jenis intervensi, yaitu penyediaan lapangan kerja tambahan untuk tenaga kerja setengah penganggur dan upaya membuka lapangan kerja baru melalui pengembangan unit-unit usaha baru atau yang sudah berdiri. Sedangkan, bidang ketenagakerjaan didasarkan pada jenis pekerjaan utama yang dominan digeluti oleh masyakarat di Pasaman Barat, seperti

sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri.[9] Berdasarkan analisis terhadap BDT 2015, ditemukan bahwa kepala keluarga yang bekerja sebagai pekerja bebas paling banyak di sub-sektor perkebunan, yakni sebanyak 2.853 kepala keluarga. Oleh karena analisis ini akan lebih fokus pada sektor perkebunan.

a) Sektor Pertanian Perkebunan

Sedangkan wilayah prioritas untuk intervensi penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja bagi kepala keluarga miskin dan rentan usia 15-59 tahun, yaitu di Kecamatan Kinali (680 kepala keluarga), Kecamatan Pasaman (480 kepala keluarga), dan Kecamatan Koto Balingka (456 kepala keluarga). Salah satu upaya yang dapat dilakukan, yaitu peningkatan luas tanam perkebunan, peningkatan kualitas tenaga kerja bidang perkebunan (seperti penanaman, pemeliharaan, dan penanganan pasca panen), pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan. (Gambar 6.7)

Gambar 6.7. Pengelompokkan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga yang Bekerja Pada Sektor Utama Masyarakat Miskin Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Pekerja Bebas di Perkebunan Kab. Pasaman Barat

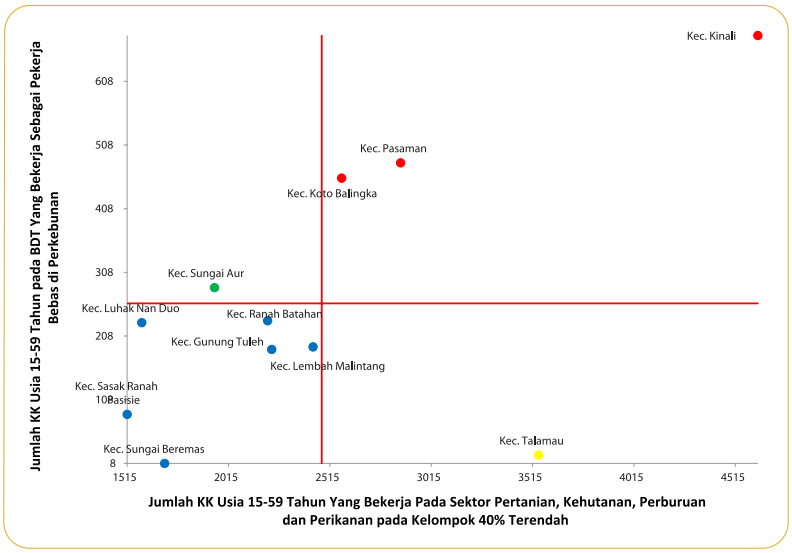

Sumber: BDT (2015)

C.2. Prioritas Wilayah Intervensi Pengembangan Usaha

Menurut BDT 2015, ada 2.204 kepala keluarga miskin dan rentan usia 15-59 tahun yang bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sebagian besar (1.719 kepala keluarga) menjalankan usaha, baik sendiri maupun dibantu buruh tetap atau buruh tidak tetap. Pada bagian ini hanya akan difokuskan pada sektor perdagangan, hotel dan rumah makan serta sektor industri dengan asumsi usaha yang dijalankan adalah usaha skala kecil, seperti Usaha Mikro dan Kecil maupun

[9] BDT 2015 tidak menyajikan data khusus tentang tenaga kerja menurut jam kerja pada pekerjaan utama. Oleh sebab itu, analisis intervensi terhadap setengah pengangguran lebih difokuskan pada Kepala keluarga yang bekerja sebagai pekerja bebas di bidang pertanian dan non-pertanian, serta pekerja rumah tangga, dengan asumsi bahwa kepala keluarga yang memiliki usaha sendiri maupun karyawan swasta/pegawai swasta berpeluang lebih kecil untuk menjadi setengah penganggur. Adapun, pekerja bebas yaitu diasumsikan sama dengan pekerja serabutan yang tidak memiliki tempat kerja khusus maupun jam kerja khusus.

warung/kios makanan skala kecil, pedagang eceran, pedagang musiman, dan sebagainya. Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu memberikan kemudahan untuk akses permodalan, seperti kredit usaha, penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, seperti pasar, promosi produk, pengenalan teknologi informasi dan inovasi. Pemerintah juga bisa melakukan intervensi untuk pengembangan SDM pelaku usaha, seperti pelatihan manajemen usaha maupun pengembangan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat miskin dan rentan. Melalui peningkatan skala usaha, mereka yang tadinya bekerja/membuka usaha beberapa hari saja dalam seminggu diharapkan dapat bekerja penuh.

a) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan

Kuadran pertama (merah) menjadi prioritas intervensi pengembangan usaha bidang perdagangan, hotel, dan rumah makan bagi keluarga miskin dan rentan usia 15-59 tahun. Ada 5 (lima) kecamatan prioritas untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Pasaman Barat, yakni Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Talamau, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, dan Kecamatan Ranah Batahan. (Gambar 6.8).

Gambar 6.8. Pengelompokkan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Bekerja dengan yang Memiliki Usaha Sendiri Bidang di Sektor Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan, Kabupaten Pasaman Barat

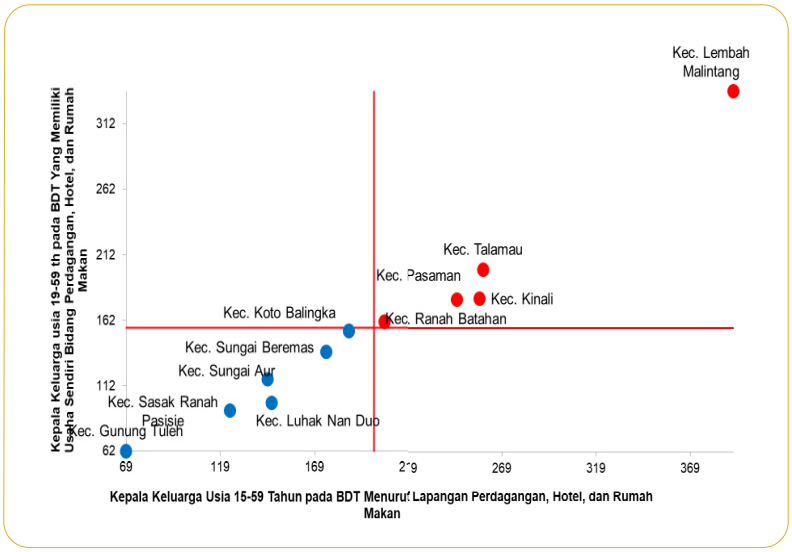

Sumber: BDT (2015)

b) Sektor Industri

Wilayah yang menjadi prioritas untuk intervensi pengembangan usaha bidang industri adalah Kecamatan Talamau dan Kecamatan Pasaman, karena di dua kecamatan ini terdapat lebih banyak unit usaha industri dan unit usaha yang dijalankan oleh keluarga miskin dan rentan usia 15-59 tahun. Dengan berkembangnya sektor industri kecil, diharapkan unit usaha yang ada dapat menyerap tenaga kerja baru. (Gambar 6.9).

Gambar 6.9. Pengelompokkan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memiliki Usaha Sendiri di Industri Pengolahan dan Banyaknnya Usaha Industri di Kabupaten Pasaman Barat

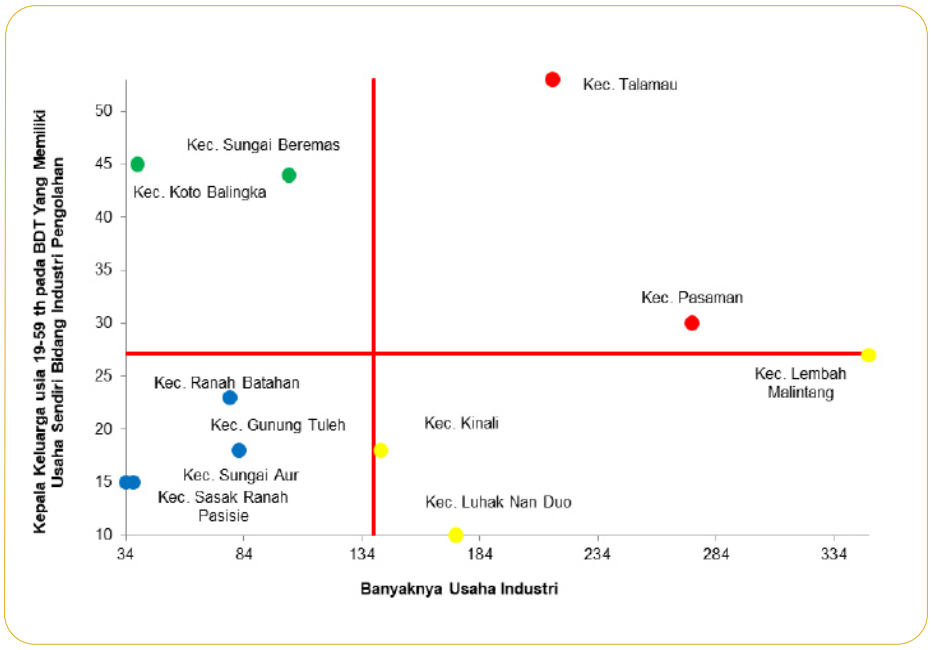

Sumber: BDT (2015)

D. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN

Salah satu perhatian penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah memastikan penempatan belanja pada program – program prioritas utama yang wajib di biayai oleh Anggaran Daerah. Analisis belanja bidang ketenagakerjaan, khususnya penanganan setengah pengangguran, melibatkan banyak bidang. Pasalnya, masalah pengangguran dan setengah pengangguran bersifat multi-dimensi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat makro. Oleh sebab itu, analisis belanja bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman Barat akan dibatasi hanya pada hal-hal yang bisa diintervensi melalui program oleh Pemerintah Daerah. Secara spesifik, analisis akan dibatasi pada dua bidang saja, yakni bidang ketenagakerjaan dan penanaman modal (investasi). (Tabel 6.1).

Tabel 6.1. Program yang Berkaitan dengan Penanganan Setengah Pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program
Menurunnya persentase penduduk setengah menganggur	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Meningkatnya iklim investasi dan dunia usaha	1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3) Program peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan
	Pengembangan Usaha	1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3) Program peningkatan dan pengembangan ekspor 4) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 5) Program pengembangan industri kecil dan menengah 6) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 7) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 8) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 9) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 10) Program pengembangan Industri Kreatif 11) Program pengembangan budidaya perikanan 12) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 13) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 14) Program Nagari

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

D.1. Belanja Program Urusan Ketenagakerjaan

Proporsi belanja dominan digunakan untuk pengembangan industri kecil dan menengah. Pada tahun 2017 berdasarkan anggaran didominasi untuk program pengembangan Industri Kecil dan Menengah, yaitu sebesar 36%. Kemudian disusul oleh Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pada urutan kedua sebesar 20%. Lalu secara berurutan disusul oleh Program Program peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan dan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan masing – masing sebesar 17% dan 11% dari total alokasi belanja. (Gambar 6.10)

Gambar 6.10. Komposisi Belanja Urusan Ketenagakerjaan Menurut Program Pasaman Barat

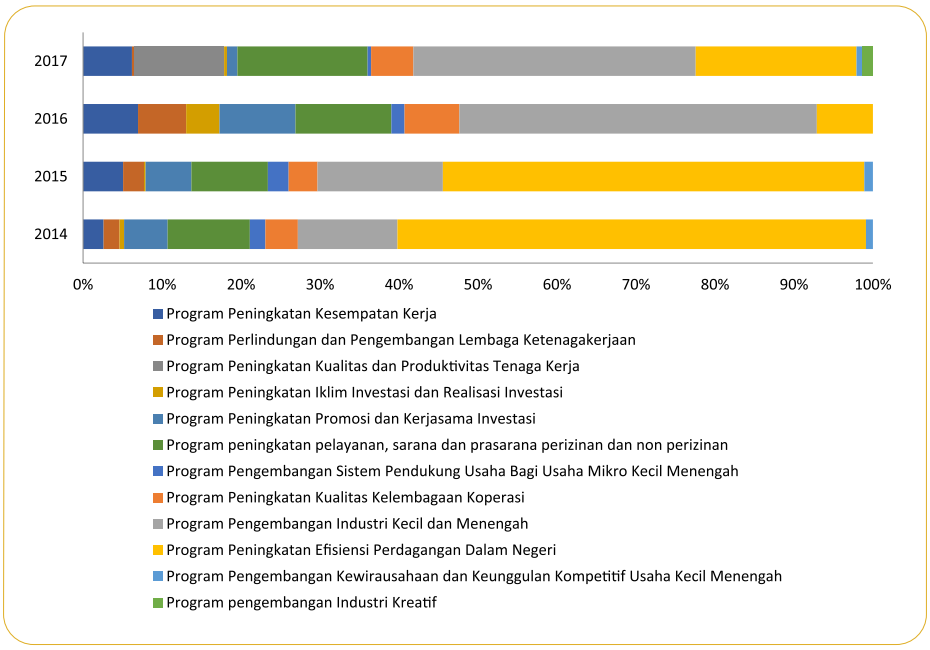

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP dan DKUKM

D.2. Belanja Kegiatan untuk Masing-masing Program Urusan Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja adalah salah satu program prioritas dalam mengurangi angka setengah pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat. Dari grafik 31 dapat dilihat dukungan dana untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja sejak tahun 2014 sampai 2017 mengalami kenaikan. Program ini mencakup kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan, Penyusunan informasi bursa tenaga kerja dan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja untuk pencari kerja di kabupaten Pasaman Barat. (Gambar 6.11)

Gambar 6.11. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Peningkatan Kesempatan Kerja) Urusan Ketenagakerjaan - Kab. Pasaman Barat Tahun 2014-2017

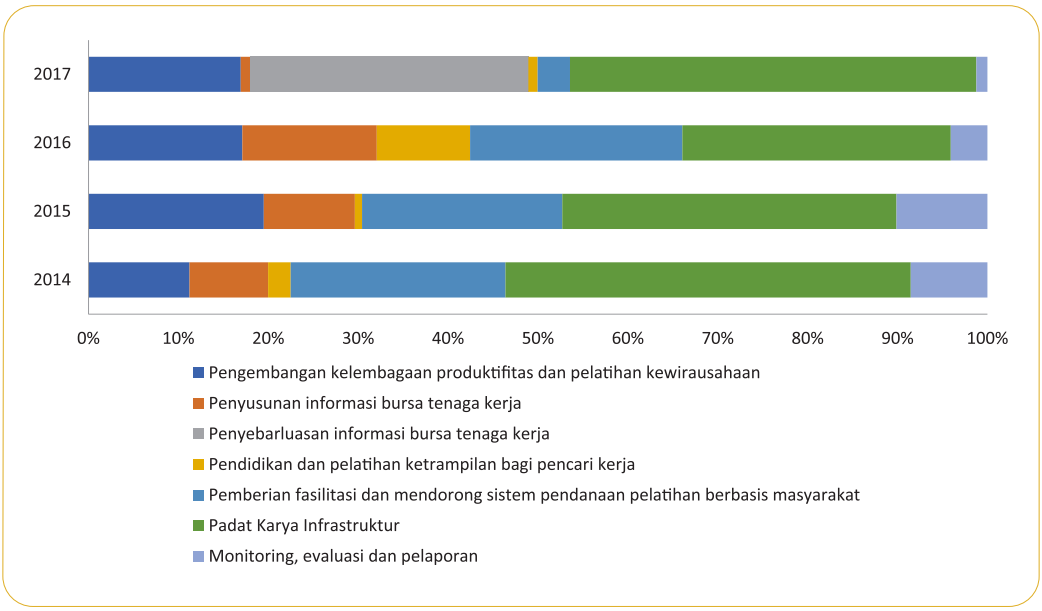

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini terdiri dari kegiatan Pengembangan potensi unggulan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dengan tolak ukur terciptanya data unggulan daerah khas Pasaman Barat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terinventarisasinya potensi unggulan daerah Pasaman Barat. Disamping itu juga terdapat kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan tolak ukur pembinaan dan pengawasan Laporan Kegiatan Penanam Modal (LKPM), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan alokasi dana terbesar digunakan untuk kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pameran investasi. (Gambar 6.12)

Gambar 6.12. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi) Urusan Ketenagakerjaan - Kab. Pasaman Barat Tahun 2014-2017

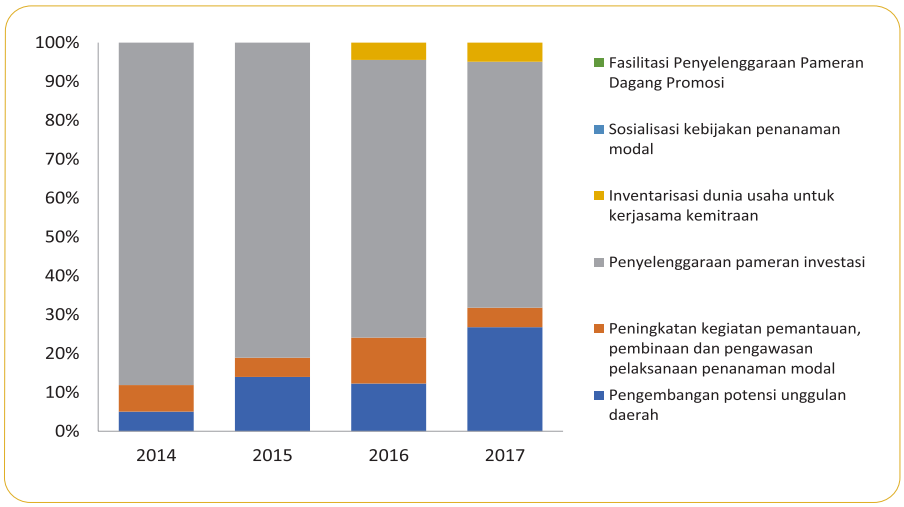

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Komposisi belanja pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi mempunyai satu kegiatan yaitu kegiatan memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi. Alokasi dana untuk kegiatan ini sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan kembali mengalami kenaikan secara bertahap sampai tahun 2017. (Gambar 6.13).

Gambar 6.13. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi) Urusan Ketenagakerjaan - Kab. Pasaman Barat Tahun 2014-2017 (Rupiah)

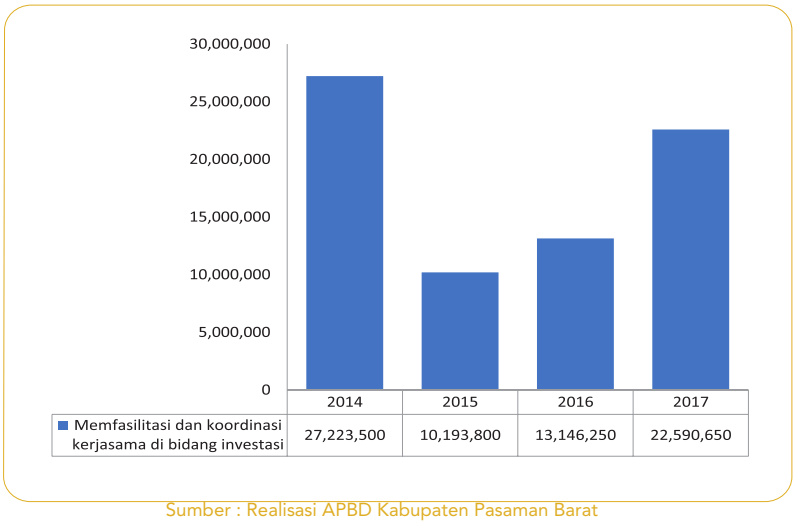

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan

Program ini bertujuan untuk membangun sistem informasi pelayanan perizinan yang berkualitas, terpadu, efektif dan efisien. Sejak tahun 2014, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus melakukan penyempurnaan pelayanan perizinan melalui peningkatan sarana dan prasarana sistem satu pintu dan pelayanan perizinan keliling (mobile service). Pada tahun 2017, program ini diarahkan pada penyediaan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis online dengan anggaran sebesar Rp. 545.779.102 atau sebesar 54,67% dari total anggaran. (Gambar 6.14)

Gambar 6.14. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan) Kabupaten Pasaman Barat 2014-2017

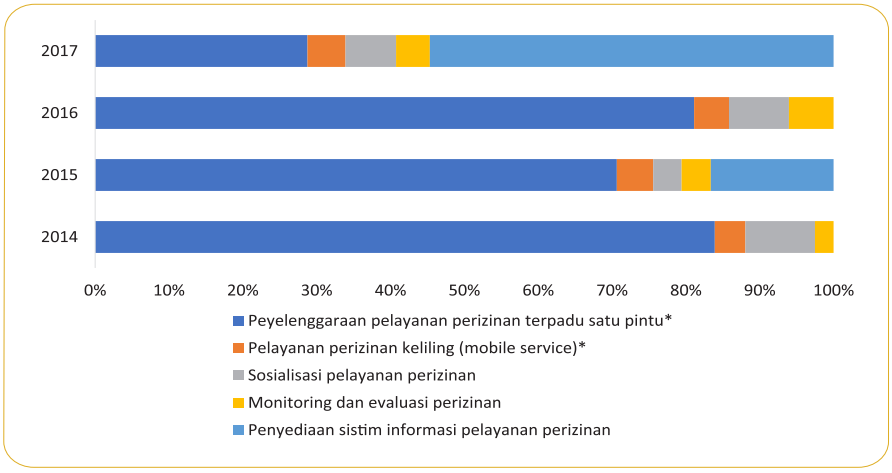

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

E. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat idealnya mengintervensi pembangunan dengan mengarahkan kebijakan pemerintah daerah guna mengurangi persentase setengah pengangguran. Berdasarkan analisis keterkaitan antara persentase setengah pengggangguran dengan indikator – indikator yang mempengaruhinya, berikut rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mengurangi persentase setengah pengangguran:

- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mengintervensi pembangunan wilayah sesuai dengan sektor prioritas yang dominan digeluti oleh masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mengarahkan kebijakan pembangunan untuk mengembangkan usaha tiga sektor dominan, seperti sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus berperan sebagai fasilitator dan mediator masyarakat terhadap akses-akses permodalan untuk pengembangan usaha dari berbagai sektor usaha baik formal maupun informal yang berpihak kepada rakyat.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengintervesi SKPD terkait untuk memberikan fasilitas alat dan teknologi dengan mengedepankan manajemen pengelolaan mandiri berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat melakukan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan, promosi, dan pemasaran sesuai dengan sektor pekerjaan utama masyarakat dengan menekankan pada pembangunan tenaga kerja mandiri.
- Menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan.
- Peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, seperti: (1) mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak memungut biaya sehingga tidak memberatkan pesertanya; (2) mengembangkan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga-lembaga yang berdiri dilingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna; (3) menyusun kurikulum pendidikan yang mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja.

LAMPIRAN. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan Lainnya untuk Program di Bawah Urusan Ketenagakerjaan

Gambar 6.15. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan)

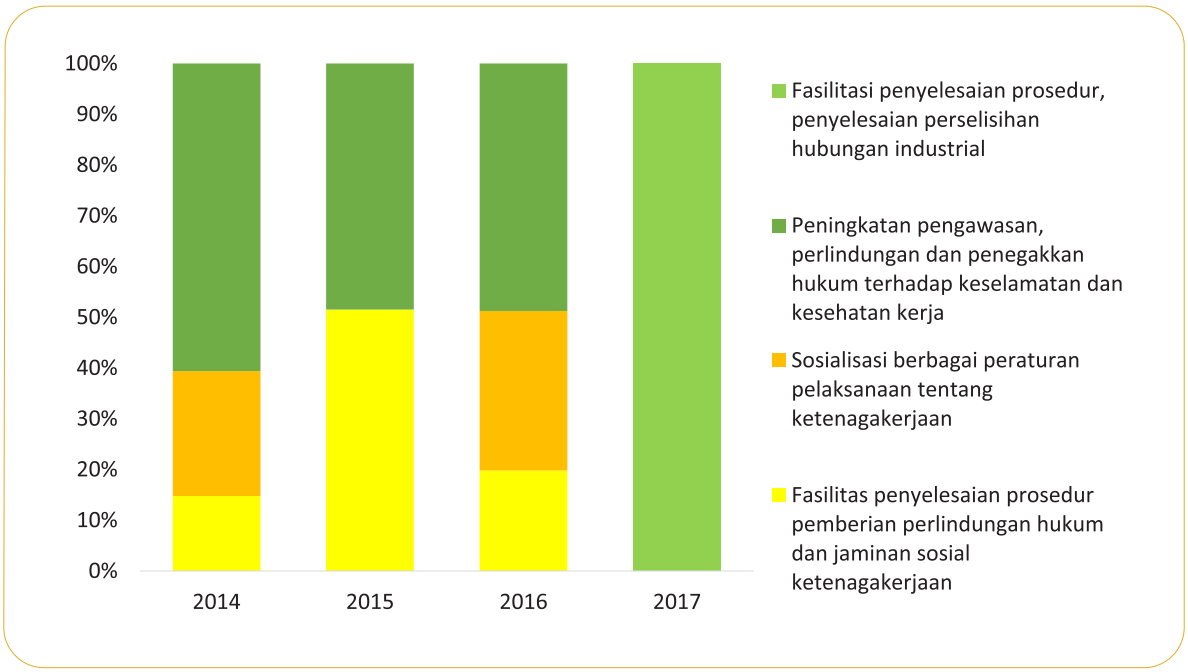

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

Gambar 6.16. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri)

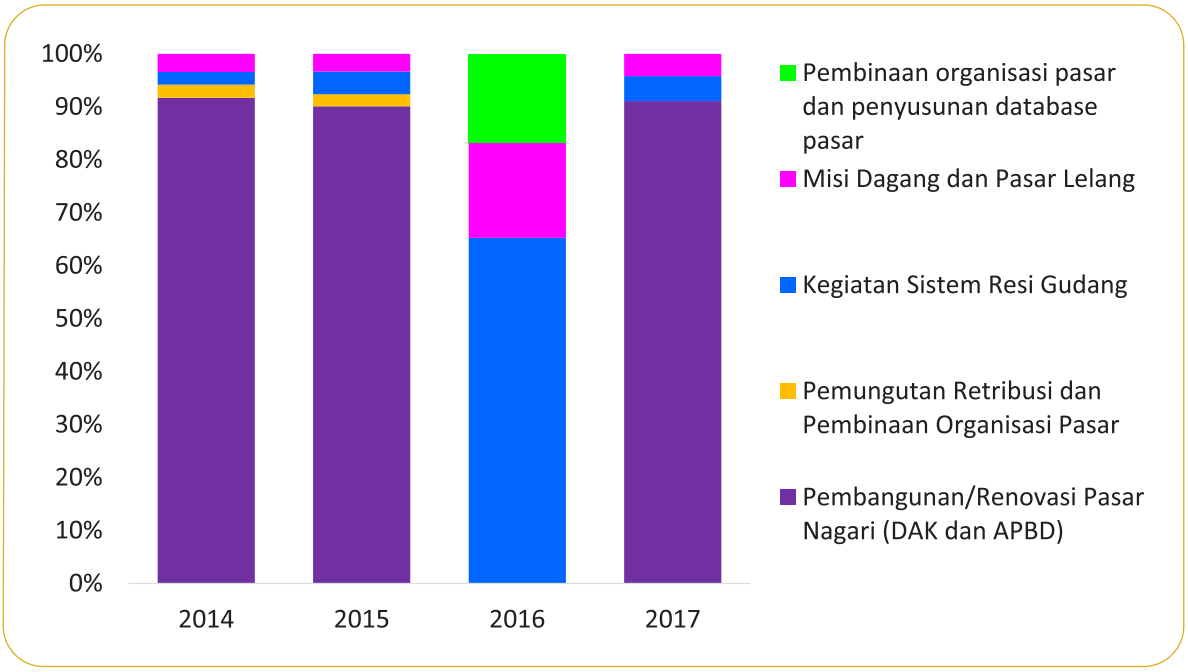

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

Gambar 6.17. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah)

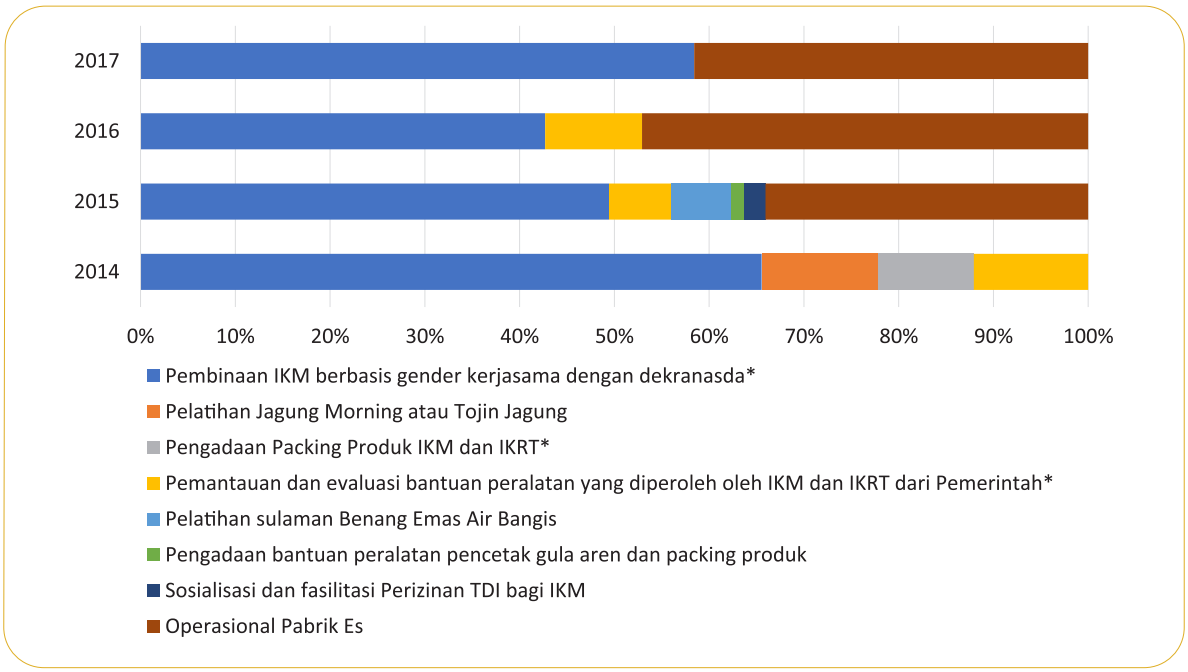

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

Gambar 6.18. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah)

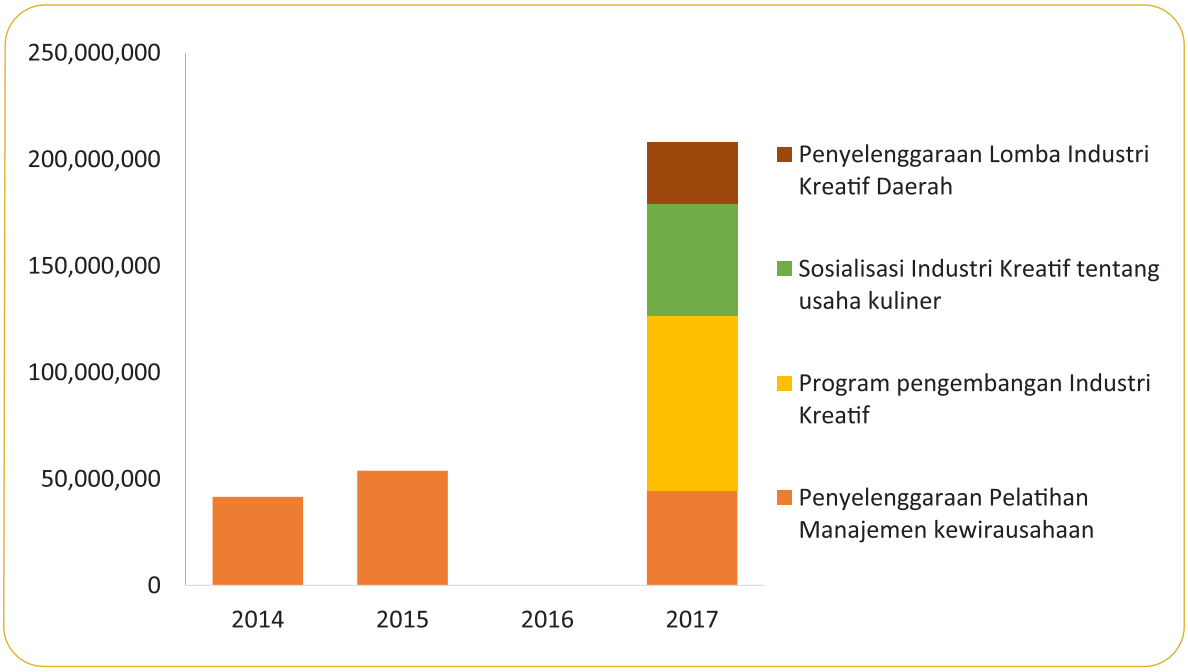

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

Gambar 6.19. Komposisi Belanja Menurut Kegiatan (Program Pengembangan Industri Kreatif) Kab. Pasaman Barat - Tahun 2017

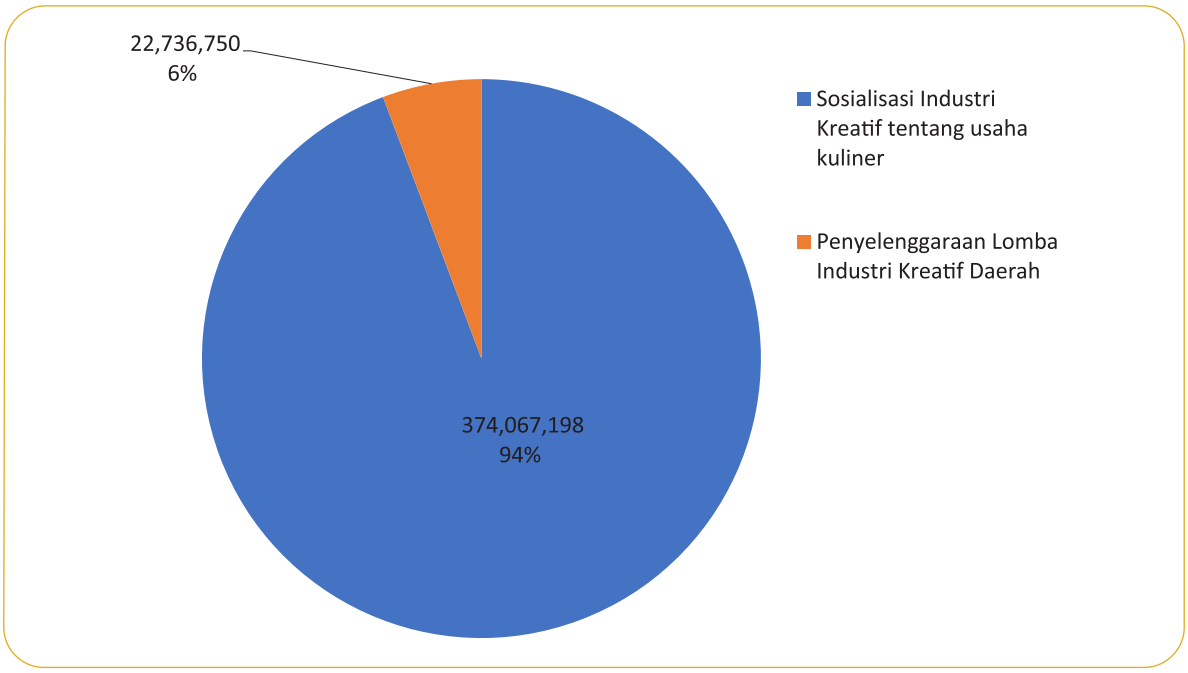

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Pasaman Barat

BAB 7

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN KETEPATAN SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI PASAMAN BARAT

A. ISU STRATEGIS

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mempertajam implementasi program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program melalui penggunaan data terpadu khususnya 40% rumah tangga dan individu dengan pendapatan terendah di Indonesia. Basis data yang digunakan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) atau dikenal sebelumnya dengan nama Pemuktahiran Basis Data Terpadu (BDT) 2015.

Upaya meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat perlu terus dilakukan. Ketepatan sasaran diperlukan agar manfaat program yang diberikan dapat secara efektif menurunkan angka kemiskinan. Namun, selama pelaksanaannya baik program nasional maupun daerah masih ditemukan beberapa keluhan, pengaduan atau laporan dari masyarakat terutama yang "merasa" berhak menerima bantuan. Hal ini dapat saja terjadi karena dalam penentuan penerima manfaat pastinya terdapat inclusion error dan exclusion error, selain itu seiringnya waktu telah terjadi perubahan informasi di lapangan, seperti lokasi tempat tinggal maupun kondisi kesejahteraan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, maka Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat program melalui sistem aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial.

Terdapat sembilan (9) program penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan di Kabupaten Pasaman Barat baik yang bersumber dari APBN maupun program daerah melalui APBD. Kesembilan program tersebut menggunakan basis data terpadu sebagai acuan penerima manfaat program. Oleh karena itu untuk meningkatkan ketepatatan sasaran kegiatan verifikasi dan validasi data perlu dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pemuktahiran data terpadu. Adapun beberapa program nasional yang dibiayai melalui APBN, yaitu: (1) Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Jaminan Kesehatan Negara (JKN); (3) Beras Sejahtera (Rastra); (4) Subsidi Listrik; (5) Jamban; dan (6) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sedangkan program daerah yang bersumber dari APBD, diantaranya: (1) Program Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Tidak Mampu, (2) Program Listrik Gratis, dan (3) Program Jamban Gratis.

A.1. Program Keluarga Harapan

Jumlah penerima manfaat PKH terus meningkat dengan semakin meningkatnya alokasi anggaran pemerintah pusat untuk program tersebut. Mulai tahun 2014 total penerima PKH ada 2,79 juta KPM, pada 2015 menjadi 3,5 juta KPM, pada 2016 menjadi 5,9 juta KPM, dan pada 2017 tercapai 6,2 juta KPM. Kemudian, pada tahun 2018 total KPM untuk program PKH adalah sebanyak 10 juta KPM atau keluarga miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu dengan status kesejahteraan 18% terendah di Indonesia.[10]

[10] Kenaikan 18% pada tahun 2018, yang sebelumnya hanya 8% pada tahun 2015 dikarenakan meningkatnya anggaran untuk pelaksanana program tersebut

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu PPFM dan kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp 1.890.000 per keluarga dengan tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Namun, dalam penentuan KPM diperlukan persyaratan selain merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu PPFM juga harus memiliki persyaratan untuk beberapa indikator dalam komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteran sosial, diantaranya:

- Kesehatan, dalam keluarga terdapat (1) ibu hamil/menyusui; (2) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Pendidikan, yaitu: (1) anak SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA atau sederajat; dan (2) anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- Kesejahteraan sosial, yaitu: (1) lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; (2) penyandang disabilitas diutamakan yang berat.

A.2. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Kecamatan Kinali adalah wilayah dengan kelompok sasaran penerima PBI terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat. Secara aturan KPM penerima bantuan iuran (PBI) adalah individu pada rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu dengan status kesejahteraan 35 (tiga puluh lima) persen terendah. Namun, dalam analisis ini kemudian ditetapkan bahwa sasaran KPM merupakan individu miskin yang berada pada status kesejahteraan 40 (sepuluh) persen / desil 1 - 4. Sasaran penerima Bantuan Iuran (PBI) yang paling banyak yaitu Kecamatan Kinali dengan jumlah 24.831 individu sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan jumlah 8.666 individu. Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Pasaman Barat adalah 161.197 individu, sedangkan sasaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah 104.742 individu. Sehingga terlihat adanya kelebihan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disalurkan di Pasaman Barat sebanyak 17.276 individu. (Gambar 7.1).

Gambar 7.1. Jumlah Individu Desil 1-4 Kab. Pasaman Barat per Kecamatan

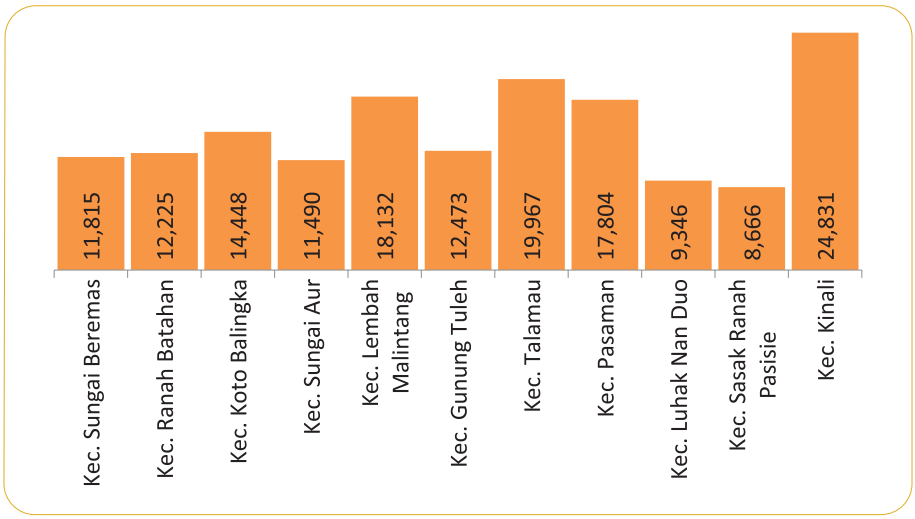

Sumber: Dinas Sosial menggunakan Data BDT 2015

Beberapa wilayah memiliki selisih kurang/lebih dari pendistribusian Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibandingkan dengan jumlah kuota berdasarkan data BDT. Kecamatan Lembah Melintang memiliki kekurangan kouta sebanyak -4.985 individu, Kecamatan Pasaman sebanyak -8.542 individu kekurangan kuota dan Kecamatan Kinali kekurangan kouta sebanyak -13.945 individu dari sasaran BDT desil 1-4. Sedangkan untuk kecamatan yang melebihi kuota PBI-nya adalah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebanyak 20.134 individu dan Kecamatan Luhak Nan Duo sebanyak 16.433 individu.

Gambar 7.2. Posisi Relatif Sisa Lebih/Kurang PBI Kab. Pasaman Barat 2017

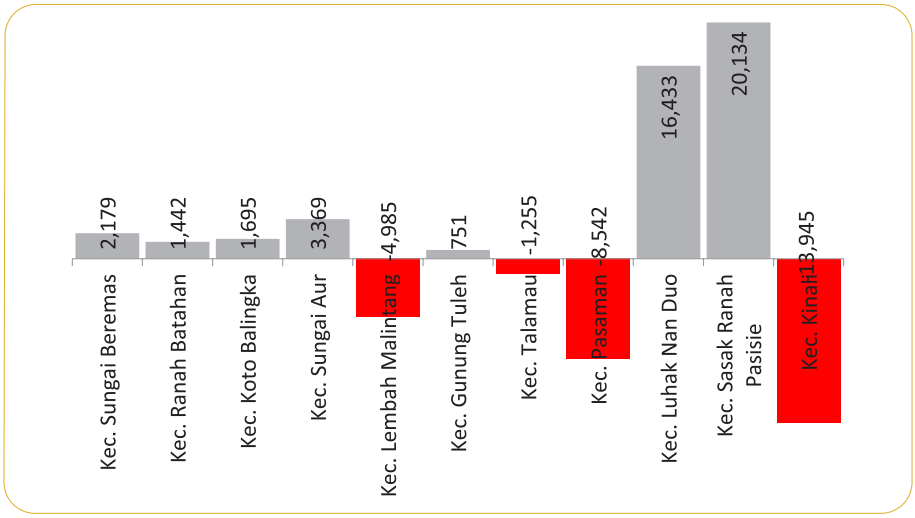

Sumber: Dinas Sosial menggunakan Data BDT 2015

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kini adalah pengintegrasian program-program Jamkesda yang dikelola oleh pemerintah daerah kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan Jamkesda sendiri sangat bervariasi baik dari pola pengelolaan, cara pembayaran, besaran iuran, paket manfaat dan terutama peserta yang ditanggung. Sebagian besar program Jamkesda menanggung peserta yang tidak masuk dalam program Jamkesmas, sementara sebagian kecilnya menanggung seluruh penduduk di daerah tersebut. Data kepesertaan Jamkesda seringkali tidak jelas dan tidak berdasarkan by name by address. Sebagian besar program Jamkesda juga mempunyai kepesertaan yang bersifat terbuka (pesertanya dapat berubah setiap saat) dan masih mengakomodir adanya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) meski sudah memiliki daftar kepesertaan (TNP2K & UI, 2012).

A.3. Beras Sejahtera (Rastra)

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini berupa bantuan beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Manfaat dalam penyaluran rastra adalah:

- Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik distibusi dan titik bagi), maupun ekonomi (disalurkan tanpa biaya tebus) kepada KPM.
- Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- Stabilisasi harga beras di pasaran.
- Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional.
- Membantu pertumbuhan ekonomi didaerah.

Sasaran penerima bantuan Rastra harus lebih tepat sasaran karena masih relatif tingginya jumlah penerima di luar data BDT 2015. Secara aturan KPM penerima rastra adalah rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu dengan status kesejahteraan 25 (dua puluh lima) persen terendah. Namun, dalam analisis ini kemudian ditetapkan bahwa sasaran KPM merupakan RT miskin yang berada pada status kesejahteraan 30 (sepuluh) persen /Desil 1 – 3, yaitu sebanyak 29.475 RT. Untuk kuota Penerima Beras Sejahtera (Rastra) sudah ditentukan dari Kemensos, khususnya Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 23.987 RT. Untuk Kecamatan yang memilki kekurangan kuota yaitu Kecamatan Sungai Beremas memiliki kekurangan sebanyak (-115 RT), Kecamatan Ranah Batahan memilki kekurangan sebanyak (-114 RT), Kecamatan Koto Balingka memilki kekurangan sebanyak -298 RT, Kecamatan Luhak Nan Duo memliki kekurangan sebanyak 136 RT dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie memiliki kekurangan sebanyak -112 RT. Sedangkan kecamatan yang melebihi kuota adalah Kecamatan Kinali 2.378 RT, Kecamatan Sunga Aur sebanyak 303 RT, Kecamatan Lembah Melintang sebanyak 569 RT, Kecamatan Gunung Tuleh sebanyak 335 RT, Kecamatan Talamau sebanyak 880 RT, Kecamatan Pasaman sebanyak 1.553 RT dan Kecamatan Luhak Nan Duo sebanyak 136 RT. (Gambar 7.3).

Gambar 7.3. Posisi Relatif Sisa Lebih/Kurang Penerima Rastra 2016

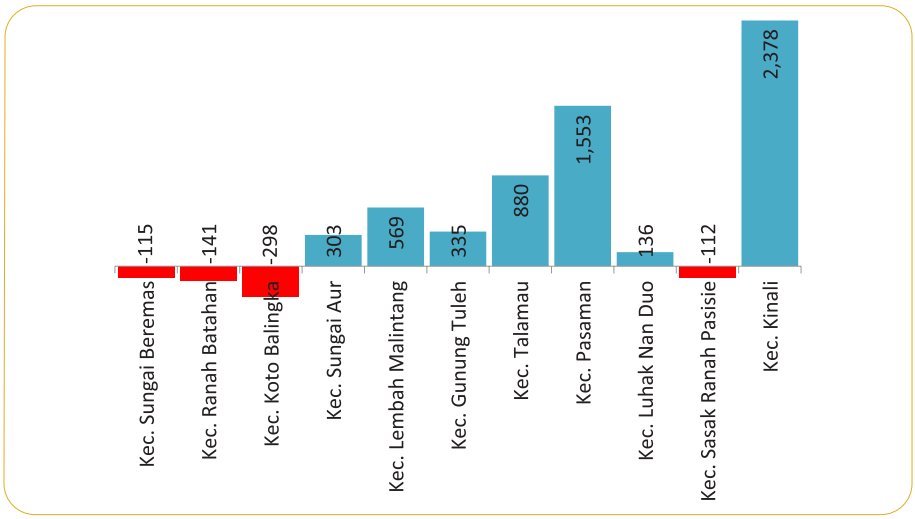

Sumber: Dinas Sosial menggunakan Data BDT 2015

A.4. Subsidi Listrik

Kecamatan Kinali adalah kecamatan dengan target sasaran penerima subsidi listrik PLN terbanyak, yaitu 672 rumah tangga. Kecamatan Kinali sebagai wilayah dengan jumlah rumah tangga termiskin terbanyak di Pasaman Barat, dimana terdapat 368 rumah tangga tidak dapat mengakses listrik PLN dan 304 rumah tangga tidak memiliki listrik baik PLN maupun Non-PLN. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit sasaran penerima subidi listrik adalah Kecamatan Luhak Nan Duo sebanyak 174 rumah tangga. Berdasarkan dari sasaran subsidi listrik per kecamatan di Kabupaten Pasamana Barat kecamatan yang memliki kekurangan kuota yaitu Gunung Tuleh (82 RT), Ranah Batahan (64 RT), Gunung Tuleh (82 RT), Pasaman (44 RT), Luhak Nan Duo (89 RT), dan Sasak Ranah Pasisie (52 RT). Untuk kecamatan yang melebihi kuota yaitu Sungai Beremas (360 RT), Koto Balingka (91 RT), Sungai Aur (14 RT), Lembah Melintang (153 RT), Talamau (143 RT) dan Kinali (357 RT). (Tabel 7.1 dan Gambar 7.4).

Tabel 7.1 Sebaran Rumah Tangga Desil 1-4 Terhadap Akses Listrik

No.	Kecamatan	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total
1	Sungai Beremas	1.956	418	192	2.566
2	Ranah Batahan	2.907	121	249	3.277
3	Koto Balingka	3.116	110	277	3.503
4	Lembah Melintang	3.606	127	396	4.129
5	Sungai Aur	2.620	22	203	2.845
6	Gunung Tuleh	3.038	68	213	3.319
7	Talamau	4.644	345	249	5.238
8	Pasaman	4.194	52	143	4.389
9	Luhak Nan Duo	2.103	110	64	2.277
10	Sasak Ranah Pasisie	1.994	16	182	2.192
11	Kinali	5.631	368	304	6.303
	Jumlah	35.809	1.757	2.472	40.038

Sumber: Dinas Sosial menggunakan Data BDT 2015

Gambar 7.4. Posisi Relatif Sisa Lebih / Kurang Subsidi Listrik

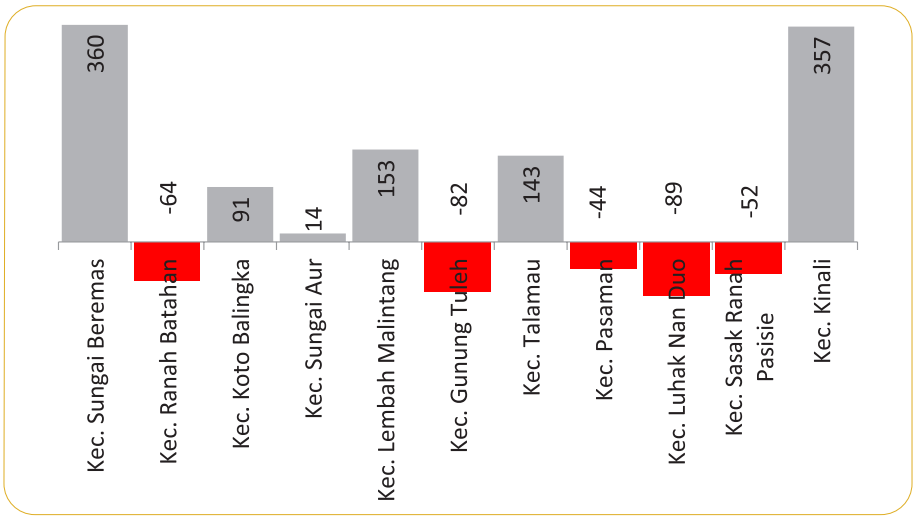

Sumber: Dinas Sosial menggunakan Data BDT 2015

A.5. Bantuan Jamban

Akses pada sanitasi khususnya pada penggunaan jamban sehat, saat ini memang masih menjadi masalah serius di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan data BPS, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak (jamban sehat) itu hanya sebesar 38,09% dan akses terhadap fasilitas buang air besar (BAB) sebanyak 60,01%. Berdasarkan olahan Data BDT 2015, jumlah rumah tangga Desil 1 – 4 yang tidak memiliki jamban adalah sebanyak 24.792 rumah tangga. Kecamatan Talamau adalah daerah dengan jumah rumah tangga miskin dan rentan terbanyak yang tidak memiliki akses buang air besar baik sendiri/bersama/umum. (Tabel 7.2).

Tabel 7.2. Distribusi Sasaran Bantuan Jamban

No.	Kecamatan	Sendiri	Bersama / Umum	Tidak Ada	Total
1	Sungai Beremas	737	312	1.517	2.566
2	Ranah Batahan	907	201	2.169	3.277
3	Koto Balingka	1.083	256	2.164	3.503
4	Lembah Melintang	1.262	412	2.455	4.129
5	Sungai Aur	980	97	1.768	2.845
6	Gunung Tuleh	510	335	2.474	3.319
7	Talamau	656	1.028	3.554	5.238
8	Pasaman	1.006	433	2.950	4.389
9	Luhak Nan Duo	709	420	1.148	2.277
10	Sasak Ranah Pasisie	510	101	1.581	2.192
11	Kinali	2.412	879	3.012	6.303
	Jumlah	10.772	4.474	24.792	40.038

Sumber: Dinas Sosial menggunakan Data BDT 2015

A.6. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Bantuan sosial rehabilitasi sosial RTLH adalah berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan yang dalam pelaksanaan pembangunan/perbaikannya dilakukan secara gotong royong dan tidak bisa dipihakketigakan. Kegiatan rehabilitasi sosial RTLH bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Dalam Permensos Nomor 20/2017, pasal 3 menyebutkan kriteria RTLH yang dapat diperbaiki adalah:

1. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Sedangkan calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial RTLH harus memenuhi syarat:

1. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin;
2. Belum pernah mendapat bantuan sosial rehabilitasi sosial RTLH;
3. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
4. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah.

Kecamatan Kinali, Talamau, dan Lembah Malintang adalah wilayah dengan target sasaran tertinggi untuk program RTLH. Berdasarkan data BDT, target penerima bantuan RTLH terbanyak di Kecamatan Kinali (2.795 rumah tangga), Lembah Malintang (2.580 rumah tangga), dan Talamau (2.728 rumah tangga). Sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebanyak 1.099 rumah tangga. (Gambar 7.5).

Gambar 7.5. Posisi Relatif Rumah Tangga Sasaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pasaman Barat

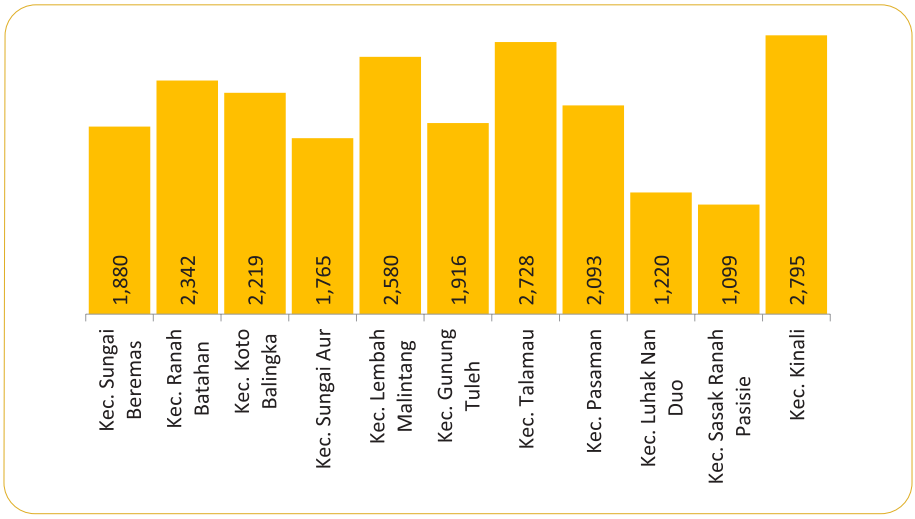

Sumber: Dinas Sosial menggunakan Data BDT 2015

B. PRIORITAS INTERVENSI

Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi dari setiap pelaksanaan program bantuan baik yang berasal dari dana pusat maupun daerah. Begitu banyaknya program dari pusat belum mampu mengakomodir target sasaran penerima program karena terbatasnya anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengupayakan program/ kegiatan yang sinergis dengan pusat untuk diberikan kepada kelompok sasaran yang belum mendapatkan bantuan melalui dana pusat. Namun, sinkronisasi data penerima manfaat dari bantuan pusat dan daerah juga diperlukan agar lebih tepat sasaran dan signifikan mengatasi permasalahan kemiskinan.

Gambar 7.6. *Theory of change* Bidang Sosial Kabupaten Pasaman Barat

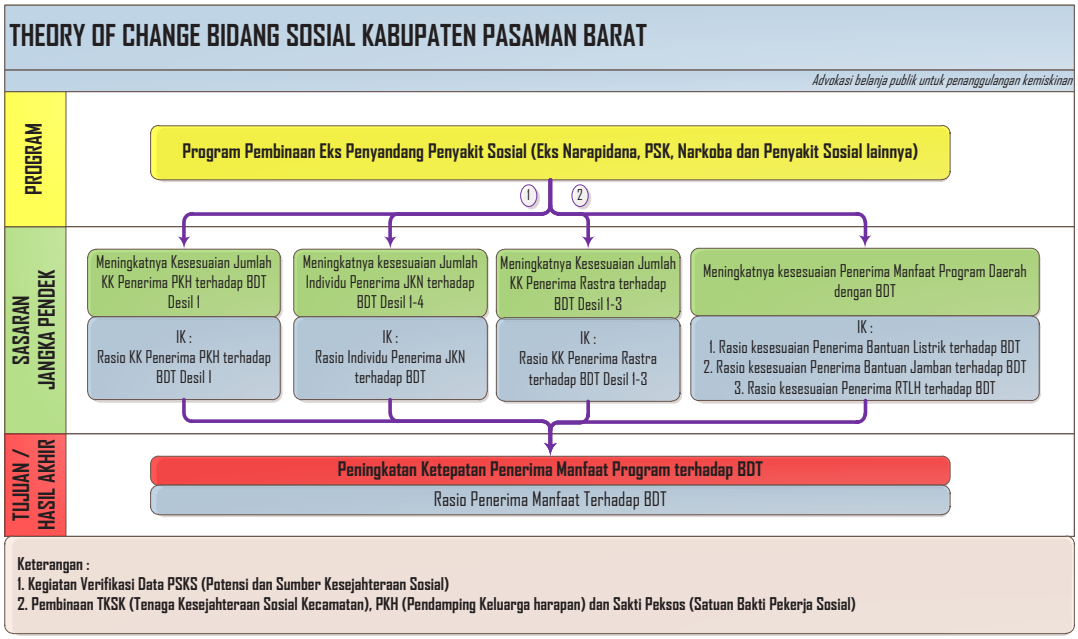

C. EVALUASI FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN

Belanja bidang sosial terdistribusi pada 7 (tujuh) program utama. Analisis belanja merupakan komponen penting dalam advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan bagaimana penempatan belanja pada program-program prioritas utama yang wajib untuk dibiayai oleh APBD. Adapun program yang dibiayai oleh Dinas Sosial, yaitu: (1) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, (2) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), (3) Program pembinaan panti asuhan / panti jompo, (4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, (5) Program pembinaan anak terlantar, (6) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dan (7) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Berdasarkan Gambar 7.7, dapat dijelaskan bahwa program yang paling besar didanai pada tahun 2014 - 2017 adalah program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Pada tahun 2017, nilai nominal untuk program tersebut adalah Rp. 1,09 miliar atau sekitar 59% dari total belanja urusan sosial. (Gambar 7.7)

Gambar 7.7. Komposisi Belanja Menurut Program - Urusan Perlindungan Sosial Kab. Pasaman Barat, Tahun 2014 - 2017

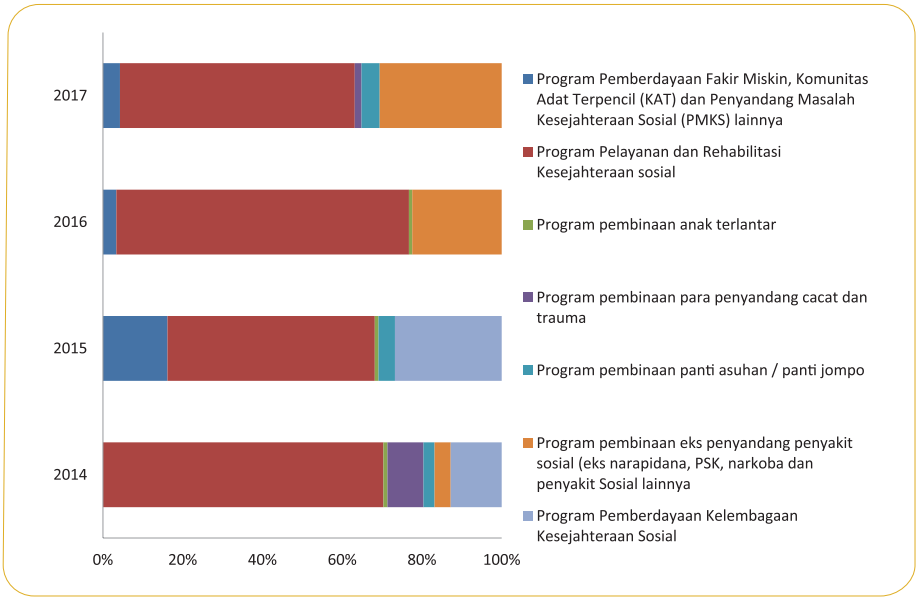

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

Alokasi anggaran perlu ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan verifikasi dan validasi data sasaran penerima manfaat program. Sebagian besar alokasi belanja pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial diarahkan ke peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi dan kesejahteraan sosial bagi PMKS, cetak blangko kemiskinan dan honor fasilitator dan supervisor. Namun, jika dikaitkan dengan tujuan utama mengatasi masalah ketepatan sasaran seharusnya belanja program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapida, narkoba, PSK dan penyakit sosial lainnya) perlu ditingkatkan. Hal ini, karena kegiatan tersebut berkaitan dengan verifikasi dan validasi di lapangan terutama untuk membiayai penambahan jumlah personil di lapangan dan biaya perjalanan dinas. Pada tahun 2017, alokasi untuk program ini dianggarkan sebesar Rp 585 juta atau sekitar 31% dari total belanja urusan sosial.

Kegiatan verifikasi dan valisasi data dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November. Data hasil verivali kemudian dikirim ke pusat berdasarkan target yang telah ditentukan oleh kementerian sosial untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Adapun saat ini, Kabupaten Pasaman Barat memiliki sebanyak 50 orang tenaga fasilitator, 3 supervisor dan 1 manager dalam pelaksanaan kegiatan pilot Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) bekerjsama dengan Kemensos sejak tahun 2017, yang juga dilakukan oleh 70 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Adapun tugas dari fasilitator adalah sebagi berikut:

1. Fasilitator

- Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2018
- Melaksanakan operasional pelayanan sesuai dengan ketentuan bidang pelayanan, tugas dan fungsi;

- Mencatatat berbagai masukan, saran dan memberikan pertimbangan kepada tim pengarah program untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas.
- Melakukan komunikasi dengan SOPD terkait dan pihak – pihak pemberi layanan dan kunjungan lapangan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan;
- Melaksanakan penerima dan proses assesment bagi masyarakat pemohon;
- Apabila diperlukan dapat melakukan survei lapangan untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan assement lanjut;
- Menyusun rencana intervensi dan menyiapkan kelengkapan administrasi pelayanan.

2. Manajer

- Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosilisasi SLRT di kabupaten.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk:
  1. Pengelolaan supervisor dan fasilitator
  2. Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah; dan
  3. Analisis hasil pengumpulan data SLRT.
- Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait temasuk pemerintah provinsi dan pengelolan program di daerah.
- Menelaah dan merekomendasikan:
  1. Pembaharuan Data Penerima Manfaat
  2. Survey Penambahan Data Penduduk
  3. Penambahan Data Kebutuhan Program
  4. Mengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat.
  5. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer Sekretariat Teknis Daerah.

3. Supervisor

Adapun tugas dan fungsi supervisor adalah:

- Menelaah/review pembaharuan data penerima manfaat
- Reveiw penambahan data penerima manfaat
- Reveiw penambahan data kebutuhan kebutuhan program; dan
- Review pendataan keluhan

Seorang fasilitator dalam melakukan verivali lapangan hanya sanggup mengerjakan 10 kuesioner per hari. Dengan jumlah fasilitator yang ada, berarti per hari mampu hanya mampu melakukan verval sebanyak 500 kuesioner. Oleh karena itu diperlukan tambahan sumber daya manusia untuk pelaksanaan verivali agar dapat dilakukan secara efektif.

D. REKOMENDASI

Masih belum valid-nya beberapa data BDT yang dipakai dan kurangnya tingkat koordinasi di lapangan mengakibatkan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum berjalan secara efektif sehingga target capaian penurunan kemiskinan tidak maksimal. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk peningkatan ketepatsasaran penerima manfaat program, adalah sebagai berikut:

- Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat program melalui sistem aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelum penyaluran bantuan kepada KPM melalui:
    - Program pendataan dari Dinas Sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) , fasilitator, puskesos, *front office* dan *back office.*
    - Kerjasama dengan kejorongan, wali nagari dan kecamatan.
    - Musyawarah validasi data di tingkat kecamatan dimana yang diundang adalah jorong dan wali nagari.
- Menambah petugas fasilitator atau petugas lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi.
- Melakukan kerjasama yang intensif dengan Pusat Data dan Informasi Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam meningkatkan kualitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).
- Meningkatkan kapasitas perangkat jaringan internet dan spesifik elektronik (laptop dan komputer) dalam pengolahan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).
- Meningkatkan anggaran unutk perbaikan data Sistem Informasi Kesejahteran Sosial– Next Generation (SIKS-NG).
- Meningkatkan kerjasama secara vertikal dari bidang yang terkait dengan data Organisai Perangkat Daerah lain yang terkait dengan angka kemiskinan seperti BPS , Bappeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) , Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Perumahan dan Permukiman (Perkim), dan lainnya
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara regular minimal dua kali setahun secara berkelanjutan.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812
Faksimili : (021) 3912511
Email : info@tnp2k.go.id
Website : www.tnp2k.go.id